



BAPPENAS

Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



RPJMD

KABUPATEN BUOL 2025–2029

**Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2025**



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan Daerah.
3. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan.
5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dasar hukum perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kabupaten Buol.
18. Bupati adalah Bupati Buol.

Pasal 2

- (1) RPJMD ini disusun berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. berkeadilan;
 - c. keterpaduan;
 - d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
 - e. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - f. berkelanjutan;
 - g. berwawasan lingkungan;
 - h. efektif dan efisien; dan
 - i. kemandirian.
- (2) RPJMD disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJMD merupakan:
 - a. penjabaran Visi, Misi, dan program Pemerintah Daerah ke dalam tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Umum, program Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD; dan
 - b. dokumen rencana Pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan bagi penyelenggara Pembangunan Daerah jangka menengah;
- b. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang *sinergis* dan terpadu dengan Perencanaan pembangunan Nasional dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan; dan
- c. sebagai pedoman dalam:
 1. penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 2. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan

3. penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

SISTIMATIKA RENCANA PEMABNGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum daerah;
 - c. visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;
 - d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN Dan EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Masa berlaku RPJMD meliputi:

1. RPJMD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sesuai dengan masa jabatan Bupati terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah.
2. RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah selama masa jabatan Bupati.
3. Dalam hal terjadi pergantian Bupati sebelum berakhirnya masa jabatan, maka penyesuaian terhadap RPJMD dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal 26 September 2025

BUPATI BUOL,

RISHARYUDI TRIWIBOWO

Diundangkan di Buol pada
tanggal 26 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

DADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2025
NOMOR 63



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
 BAB I. PENDAHULUAN	 I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.4. Maksud dan Tujuan	I-10
1.5. Sistematika Penulisan	I-11
 BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-25
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-49
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-74
2.2. Gambaran Keuangan Daerah	II-114
2.2.1 Kinerja Keuangan Periode Sebelumnya.....	II-115
2.2.2 Neraca Daerah	II-123
2.2.3 Proyeksi Kerangka Pendanaan.....	II-126
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis	II-128
2.3.1 Permasalahan.....	II-128
2.3.2 Isu Strategis.....	II-132
2.3.3 Isu Global	II-133
2.3.4 Isu Strategis Nasional	II-141
2.3.5 Isu Strategis Regional.....	II-153
2.3.6 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tengah	II-180
 BAB III. VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	 III-1
3.1. Visi dan Misi	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran	III-30
3.3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-57
3.4. Program Pembangunan Daerah	III-115



BAB IV.	PROGRAM PERANGKAT DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1.	Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-58
4.2.1	Indikator Kinerja Utama	IV-58
4.2.2	Indikator Kinerja Daerah	IV-60
BAB V.	PENUTUP	V-1
5.1	Pedoman Transisi	V-1
5.2	Kaidah Pelaksanaan	V-2



DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>		<i>Halaman</i>
Tabel 2.1	Luasan Penutupan Lahan Kabupaten Buol Tahun 2020	II-11
Tabel 2.2	Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2024	II-24
Tabel 2.3	Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buol Tahun 2024	II-41
Tabel 2.4	Peta Universal Coverage Jamsostek Kabupaten Buol sampai Tahun 2025	II-43
Tabel 2.5	Pengelolaan Portal Layanan Perangkat Daerah Kabupaten Buol Tahun 2025	II-59
Tabel 2.6	Area Blankspot di Kabupaten Buol Tahun 2025	II-62
Tabel 2.7	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA	II-63
Tabel 2.8	Data Kondisi Mantap dan Tidak Mantap Ruas Jalan Kabupaten Buol Tahun 2020-2024	II-66
Tabel 2.9	Kondisi Saluran Jaringan Irigasi	II-68
Tabel 2.10	Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Buol Tahun 2020-2024	II-72
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah	II-81
Tabel 2.12	Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Buol Tahun 2024	II-106
Tabel 2.13	Realisasi APBD Tahun 2020-2024	II-116
Tabel 2.14	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2020-2024	II-119
Tabel 2.15	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2020-2024	II-121
Tabel 2.16	Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2020-2024	II-122
Tabel 2.17	Neraca Daerah	II-124
Tabel 2.18	Proyeksi Keuangan	II-127
Tabel 2.19	Isu strategis	II-203
Tabel 3.1	Sasaran Strategis dan Indikator Visi.....	III-6
Tabel 3.2	Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029, Misi RPJMN (Asta	



	Cita/ Prioritas Nasional) Tahun 2025-2029 dan Misi /Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045.....	III-12
Tabel 3.3	Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	III-19
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 1 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Tahun 2025 – 2029	III-33
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 2 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Tahun 2025 – 2029	III-36
Tabel 3.6	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 3 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Tahun 2025 – 2029	III-40
Tabel 3.7	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 4 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Tahun 2025 – 2029.....	III-44
Tabel 3.8	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 5 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Tahun 2025 – 2029.....	III-48
Tabel 3.9	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 6 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Tahun 2025 – 2029.....	III-52
Tabel 3.10	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 7 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Tahun 2025 – 2029.....	III-56
Tabel 3.11	Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol.....	III-58
Tabel 3.12	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029.....	III-64
Tabel 3.13	Highlight Indikasi Intervensi Lokasi Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.....	III-93
Tabel 3.14	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 untuk Indonesia Emas.....	III-98
Tabel 3.15	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045.....	III-100
Tabel 3.16	Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029.....	III-105
Tabel 3.17	Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Kabupaten Buol.....	III-109
Tabel 3.18	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah dan Program Prioritas Kabupaten Buol.....	III-110
Tabel 3.19	Program Pembangunan Daerah.....	III-115



Tabel 3.20	Misi, Tujuan, Sasaran, Outcome, Indikator dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2025-2029.....	III-121
Tabel 3.21	Integrasi Janji Politik dengan Program Nomenklatur.....	III-147
Tabel 3.22	Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Buol	III-153
Tabel 3.23	SPM Bidang Pendidikan	III-174
Tabel 3.24	SPM Bidang Kesehatan	III-176
Tabel 3.25	SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	III-177
Tabel 3.26	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.....	III-179
Tabel 3.27	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	III-180
Tabel 3.28	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	III-182
Tabel 4.1	Rencana Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 Kabupaten Buol.....	IV-3
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030 Kabupaten Buol.....	IV-58
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030 Kabupaten Buol	IV-60



DAFTAR GAMBAR

<i>Nomor</i>		<i>Halaman</i>
Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	I-8
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Buol	II-1
Gambar 2.2	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Buol Tahun 2024	II-2
Gambar 2.3	Peta Kondisi Geomorfologi Kabupaten Buol.	II-4
Gambar 2.4	Jumlah Produksi Padi (Ton) Kabupaten Buol.....	II-6
Gambar 2.5	Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton) Kabupaten Buol	II-7
Gambar 2.6	Jumlah Produksi Kelapa (Ton) Kabupaten Buol.....	II-7
Gambar 2.7	Jumlah Produksi Kakao (Ton) Kabupaten Buol.....	II-8
Gambar 2.8	Jumlah Produksi Sapi Potong (Ekor) Kabupaten Buol	II-9
Gambar 2.9	Jumlah Produksi dan Nilai Perikanan Tangkap Kabupaten Buol	II-10
Gambar 2.10	Jumlah Produksi dan Nilai Perikanan Budidaya Kabupaten Buol	II-11
Gambar 2.11	Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Kabupaten Buol	II-14
Gambar 2.12	Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Kabupaten Buol	II-16
Gambar 2.13	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Buol	II-16
Gambar 2.14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2018-2023	II-17
Gambar 2.15	Indeks Risiko Bencana Kab. Buol Tahun 2020-2024	II-18
Gambar 2.16	Indeks Ketahanan Daerah Kab. Buol Tahun 2020-2024	II-19
Gambar 2.17	Jumlah Penduduk Kabupaten Buol Tahun 2020-2024	II-20
Gambar 2.18	Jumlah Penduduk Kabupaten Buol Tahun 2024	II-21
Gambar 2.19	Proyeksi Jumlah Penduduk Kab. Buol Tahun 2025-2030	II-22
Gambar 2.20	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Buol Tahun 2020-2024	II-23
Gambar 2.21	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Buol Tahun 2020-2024	II-24
Gambar 2.22	PDRB Per Kapita Kabupaten Buol Tahun 2020-2024	II-24
Gambar 2.23	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buol Tahun 2020-2024	II-25



Gambar	2.24	Indeks Gini Kabupaten Buol Tahun 2020-2024.....	II -25
Gambar	2.25	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buol Tahun 2020-2024.....	II-28
Gambar	2.26	Usia Harapan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2020-2024	II-28
Gambar	2.27	Usia Harapan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2019-2023	II-29
Gambar	2.28	Prevalensi Stunting Di Kabupaten Buol Tahun 2020-2024.....	II-30
Gambar	2.29	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Buol Tahun 2020-2024	II-31
Gambar	2.30	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buol Tahun 2020-2024.....	II-31
Gambar	2.31	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022-2024.....	II-32
Gambar	2.32	Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tahun 2022-2024.....	II-33
Gambar	2.33	Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021-2024.....	II-34
Gambar	2.34	Indeks Pembangunan Kebudayaan Prov. Sulteng dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-34
Gambar	2.35	Indeks Pembangunan Kebudayaan Prov. Sulteng... ..	II-35
Gambar	2.36	Indeks Ketimpangan Gender Kab. Buol Tahun 2020-2024.....	II-36
Gambar	2.37	Indeks Pembangunan Gender Kab. Buol Tahun 2020-2024.....	II-37
Gambar	2.38	Indeks Pembangunan Pemuda Prov. Sulteng Tahun 2020-2024.....	II-37
Gambar	2.39	Angka Ketergantungan Kabupaten Buol Tahun 2020-2024 (%).....	II-38
Gambar	2.40	Distribusi PDRB Industri Pengolahan ADHB Kabupaten Buol Tahun 2020-2024 (%).....	II-39
Gambar	2.41	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Buol Tahun 2020-2024 (%)	II-40
Gambar	2.42	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Buol Tahun 2020-2024 (%).....	II-41
Gambar	2.43	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buol Tahun 2020-2024 (%).....	II-41
Gambar	2.44	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021-2024.....	II-42
Gambar	2.45	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023 (%).....	II-43
Gambar	2.46	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi	



		Mantap Kab. Buol Tahun 2020-2024.....	II-45
Gambar	2.47	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Buol Tahun 2020-2024.....	II-46
Gambar	2.48	Persentase Desa Mandiri DiKabupaten Buol tahun 2020-2024 (%).....	II-47
Gambar	2.49	Indeks Reformasi Hukum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024.....	II-48
Gambar	2.50	Indeks SPBE Kabupaten Buol Tahun 2020-2024.....	II-49
Gambar	2.51	Persentase Penegakan Perda Kab. Buol Tahun 2020-2024.....	II-50
Gambar	2.52	Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Sulteng Tahun 2019-2023.....	II-50
Gambar	2.53	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman Ketertiban dan Keindahan Kab. Buol Tahun 2020- 2024.....	II-51
Gambar	2.54	Indeks Daya Saing Daerah Kab. Buol Tahun 2022-2024	II-52
Gambar	2.55	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Buol Tahun 2020-2024.....	II-70
Gambar	2.56	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Buol Tahun 2020-2024.....	II-73
Gambar	2.57	Isu Strategis Global, Nasional, Regional, Sulawesi Tengah dan Buol.....	II-85
Gambar	2.58	Visi RPJMN 2025-2029.....	II-163
Gambar	2.59	Capaian Indikator TPB Tahun 2022 Kabupaten Buol.....	II-179
Gambar	2.60	Pendekatan CDF Dalam Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Strategis.....	II-182
Gambar	3.1	Keselarasan dan Harmonisasi Visi, Misi Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Buol.....	III-4
Gambar	3.2	Keterkaitan Visi RPJPN dan RPJMN , RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Buol 2025-2029	III-5
Gambar	3.3	Keselarasan Visi dan Misi Kabupaten Buol.....	III-8
Gambar	3.4	Diagram Keselarasan Misi 1	III-9
Gambar	3.5	Diagram Keselarasan Misi 2	III-10
Gambar	3.6	Diagram Keselarasan Misi 3	III-10
Gambar	3.7	Diagram Keselarasan Misi 4	III-11
Gambar	3.8	Diagram Keselarasan Misi 5	III-11
Gambar	3.9	Diagram Keselarasan Misi 6	III-11
Gambar	3.10	Diagram Keselarasan Misi 7	III-12
Gambar	3.11	Diagram Keselarasan Misi 1	III-16
Gambar	3.12	Diagram Keselarasan Misi 2	III-17



Gambar	3.13	Diagram Keselarasan Misi 3	III-17
Gambar	3.14	Diagram Keselarasan Misi 4	III-17
Gambar	3.15	Diagram Keselarasan Misi 5	III-18
Gambar	3.16	Diagram Keselarasan Misi 6	III-18
Gambar	3.17	Diagram Keselarasan Misi 7	III-18
Gambar	3.18	Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 1	III-31
Gambar	3.19	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 1	III-32
Gambar	3.20	Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 2	III-34
Gambar	3.21	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 2	III-36
Gambar	3.22	Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 3	III-38
Gambar	3.23	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 3	III-39
Gambar	3.24	Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 4	III-42
Gambar	3.25	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 4	III-43
Gambar	3.26	Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 5	III-46
Gambar	3.27	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 5	III-47
Gambar	3.28	Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 6	III-50
Gambar	3.29	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 6	III-51
Gambar	3.30	Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 7	III-54
Gambar	3.31	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 7	III-55
Gambar	3.32	Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	III-93
Gambar	3.33	Klaster Perwilayahan Provinsi Sulawesi Tengah	III-96
Gambar	3.34	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 Berdasarkan 4 Klaster Perwilayahan Provinsi Sulawesi Tengah	III-98
Gambar	3.35	Kese Usulan Paket Multi Years Contract Provinsi Sulawesi Tengah Rekonstruksi Ruas Jalan Mulisari- Kokobuka- Air Terang Tahun 2026-2030 Iarasan Visi dan Misi Kabupaten Buol	III-102
Gambar	3.36	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Quick Wins Nasional dan Kabupaten Buol	III-113
Gambar	3.37	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Quick Wins Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Buol	III-114



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tujuan utama pembangunan negara tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur meliputi jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah, undang-undang tersebut juga memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah Bapak H. Risharyudi Triwibowo, M.M sebagai Bupati dan Bapak Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto sebagai Wakil Bupati yang telah dilantik oleh Presiden RI Bapak Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto pada tanggal 20



Februari 2025 berdasarkan hasil Pemilukada Serentak pada tanggal 27 Nopember 2024. Nantinya RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 tahun. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan daerah yang disusun berdasarkan kondisi dan potensi daerah. RPJMD sendiri bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan pembangunan antar daerah. Hal ini untuk menciptakan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Penyusunan RPJMD melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan pelibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. RPJMD ini akan menjadi wadah untuk mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang terukur dan membuat kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih memiliki acuan dalam menjalankan program kerja.

Sebagai bagian dari suatu Sistem Perencanaan Pembangunan, RPJMD Kabupaten Buol juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen RPJMD ini adalah produk bersama yang merupakan hasil integrasi dari berbagai rujukan. Adapun rujukan dasarnya adalah Visi dan Misi daerah untuk kurun waktu 5 tahun, yang selanjutnya diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti: RPJPN 2025-2045, RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029, RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029, RPJPD Kabupaten Buol 2025- 2045 serta RTRW Kabupaten Buol. Dalam rangka penajaman relevansi kebutuhan pembangunan di Kabupaten Buol 5 tahun ke depan, muatan RPJMD ini sangat terkait dengan kondisi umum dan potensi Kabupaten Buol serta kebutuhan nyata masyarakatnya.

RPJMD Kabupaten Buol 2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap perangkat daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan. Renstra Perangkat Daerah juga memiliki jangka waktu lima tahun. Pada tingkat daerah, RPJMD dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah



Daerah (RKPD), sedangkan pada tingkat Perangkat daerah, Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buol harus berlandaskan pada prinsip keseimbangan dan integrasi antar dimensi. Hal ini berarti bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi secara simultan. Pendekatan sektoral dan kewilayahan serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah rencana pembangunan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan. Rencana pembangunan tersebut dalam kerangka jangka panjang dikenal sebagai RPJPD. RPJMD merupakan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan operasional untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengarahkan pembangunan.

Sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 9 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif, spasial, maka penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 disusun melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratik, pendekatan ini berdasarkan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan ini dimulai dengan penyusunan rencana pengumpulan data dan informasi, peraturan perundangundangan. Berdasarkan analisis dan kajian terhadap data dan informasi yang dihimpun kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
2. Pendekatan partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan sebagai upaya untuk memperoleh berbagai aspirasi dengan mempertimbangkan kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam



pengambilan keputusan; keterwakilan seluruh elemen masyarakat; terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; serta terwujudnya konsensus pada semua tahapan pengambilan keputusan;

3. Pendekatan Politis, sebagai upaya dalam menjabarkan agendaagenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih atau dengan kata lain menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, hasil pendekatan bawah-atas melalui hasil penjangkaran aspirasi masyarakat berupa konsultasi publik dan musrenbang RPJM Daerah, dan pendekatan atas-bawah, berupa penyelarasan dokumen perencanaan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional sebagai upaya dalam menciptakan sinergitas;
5. Pendekatan holistik-tematik, dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
6. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
7. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Adapun untuk implementasi misi disusun melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah pendukung misi maupun program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah, termasuk membangun keselarasan antara program dan kegiatan perangkat daerah di tiga belas kabupaten/kota. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut dan untuk mewujudkan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pendekatan teknokratis melalui penerapan manajemen strategik, logic model, berfikir sistem, dan sistem dinamik.



1.2. DASAR HUKUM

Dokumen RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah,



pembangunan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
18. Instruksi Presiden 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan;
19. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah;
20. Instruksi Presiden 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah;
21. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi;
22. Inpres Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana

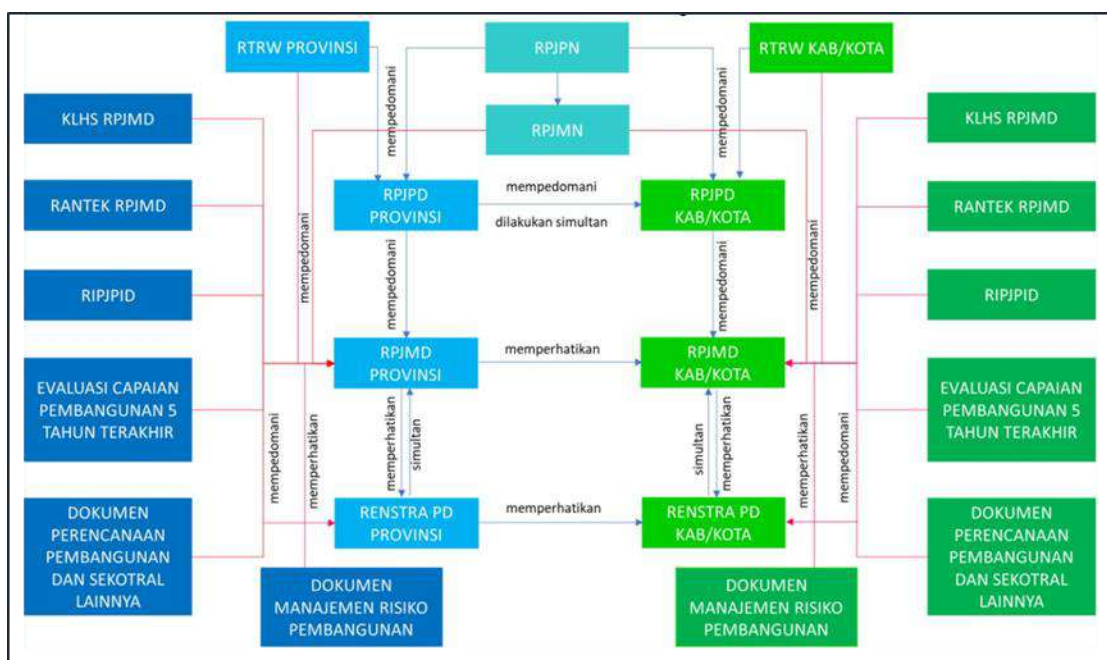


- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem perencanaan pembangunan daerah harus sinergi, mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota atau sebaliknya. Masing-masing tingkatan perencanaan bukan hanya memiliki sasaran yang spesifik, tetapi juga agregatif dari sistem perencanaan yang ada di bawahnya. Sebagaimana terlihat dalam gambar secara hierarki, RPJMD Kabupaten Buol disusun berdasarkan RPJMD Provinsi dan RPJMN Nasional.



Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Dari gambar di atas, secara teknis, dapat disimpulkan bahwa sasaran RPJMD Kabupaten Buol harus selaras dengan target yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Begitu juga dengan arah kebijakan kewilayahan yang diamanatkan untuk Kabupaten Buol untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Hal yang sama juga disinergikan antara kebijakan RPJMD Kabupaten Buol dengan RPJPN.



Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah akan menjadi pedoman penyusunan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Buol. RPJMD merupakan penjelmaan dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJM Nasional. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, RPJMD Kabupaten Buol. diterjemahkan oleh Renstra Perangkat Daerah sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buol.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Buol. didasarkan pada kajian aspek tata ruang yang ada sehingga rencana tata ruang dan RPJMD menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, visi dan misi pembangunan jangka menengah turut menentukan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Buol dan sebaliknya. Sasaran dan arah pembangunan jangka menengah juga harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial.

Peran RPJMD Kabupaten Buol 2025-2029 sangat penting dalam kaitannya dengan RTRW dan kedudukannya bagi perencanaan pembangunan jangka panjang. RTRW harus dipedomani dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Buol, begitu juga sebaliknya. Kedua dokumen tersebut menjadi salah satu rujukan utama penyusunan RPJMD Kabupaten Buol. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan daerah akan menciptakan keterpaduan dan keselarasan pencapaian tujuan pembangunan bersama-sama, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Buol adalah menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, sebagai arahan atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan maksud tersebut, maka tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029, sebagai



berikut:

1. Menjadi pijakan strategis dan operasional bagi segenap lapisan masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Buol, untuk menetapkan prioritas program pembangunan;
2. Menjadi landasan tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah (PD) dan tolok ukur kinerja lima tahun masa akhir jabatan kepala daerah;
3. Sebagai pedoman untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat dicapai secara bertahap (gradual) melalui program-program pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program yang jelas dan terukur;
4. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Buol;
5. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD;
6. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Buol dalam mengendalikan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan.

1.5. SISTIMATIKA PENULISAN

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Bab ini berisi Latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD;

BAB II : Gambaran Umum Daerah Bab ini berisi gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Buol, yang memuat bahasan tentang aspek geografi dan demografi, Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek daya saing daerah dan Aspek pelayanan



umum, Standar pelayanan Minimal, Kerjasama Daerah, Rencana Pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota, BUMD yang Mendukung kinerja pelayanan Pemda, Subbab Gambaran Keuangan Daerah, Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah;

BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, yang memuat bahasan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dan memuat tentang uraian strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang terukur melalui target capaian indikator kinerja;

BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang memuat bahasan tentang daftar program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah tahun 2025-2029, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD);

BAB V : Penutup yang memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Buol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam peta Pulau Sulawesi, Kabupaten Buol nampak memanjang dari timur ke barat, serta mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara : Laut Sulawesi sekaligus berbatasan langsung dengan Negara Philipina
- ❖ Sebelah Selatan : Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Parigi Moutong
- ❖ Sebelah Timur : Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
- ❖ Sebelah Barat : Kabupaten Tolitoli

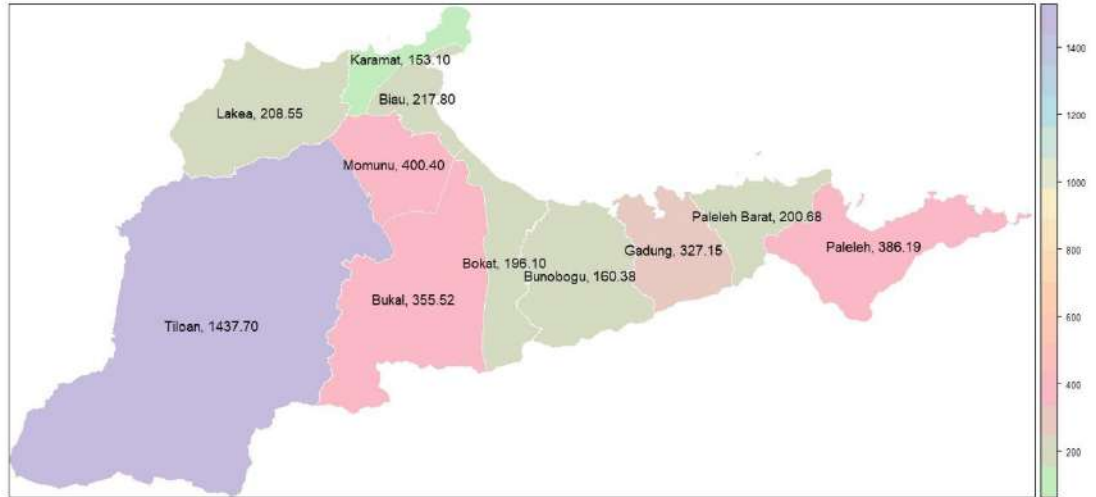


Sumber: RTRW Kabupaten Buol, Tahun 2012-2032

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Buol

Kabupaten Buol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015, luas wilayah Kabupaten Buol sebesar 4.043,57 Km². Wilayah Kabupaten Buol terbagi kedalam 11 (sebelas) kecamatan, yaitu: Lakea,

Karamat, Biau, Momunu, Tiloan, Bokat, Bukal, Bunobogu, Gadung, Paleleh Barat, dan Paleleh. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tiloan, yaitu sebesar 1.437,70 Km² atau sekitar 35,55% dari total luas Kabupaten Buol, sedangkan Kecamatan Karamat memiliki luas terkecil yaitu 153,10 Km² (3,79%). Secara rinci luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2025

Gambar 2.2
Peta Wilayah Administrasi Berdasarkan Luas Wilayah Kabupaten Buol

b. Letak dan Kondisi Geografis

➤ **Posisi Astronomis**

Kabupaten Buol terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Secara geografis wilayah Kabupaten Buol terletak diujung utara Provinsi Sulawesi Tengah dengan letak astronomisnya dalam koordinat 0,35°-1,20° lintang utara dan 120°-122,09° bujur timur.

➤ **Kondisi/Kawasan**

Jika ditelaah dari sisi geomorfologi, beberapa pulau yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Buol berupa pulau kecil dengan morfologi yang tidak rumit, di antaranya Pulau Busak, Pulau Raja, Pulau Boki, Pulau Panjang dan Pulau Lesman di perairan Laut Sulawesi. Berdasarkan pada proses geologi, pengelompokan umum morfologi laut dan daratan wilayah Kabupaten Buol, dapat dibagi dalam:



- 1) Lereng/tebing depresi, menghubungkan daerah depresi yang dalam dengan daerah paparan yang relatif dangkal. Pada beberapa bagian laut, lereng yang terbentuk berupa tebing curam karena proses subduksi. Lereng depresi kedalamannya berkisar antara 10-200 meter.
- 2) Daerah paparan; dengan kedalaman kurang dari 200 m dengan lebar dari pantai yang relatif bervariasi ditemui pada sepanjang dasar laut kabupaten ini.

3) Dataran; terdiri dari:

- a. Dataran kipas alluvial yang melereng landai, umumnya merupakan lahan datar pesisir yang tersebar pada sebagian besar wilayah terutama di wilayah Kecamatan Tiloan yang berakhir di wilayah Kecamatan Biau.
- b. Dataran Lumpur antara pasang surut, tersebar pada luasan yang sempit pada semua kecamatan yang ada.

Secara umum, sebagian dari satuan morfologi ini merupakan permukiman yang sudah lama dibuka.

4) Perbukitan, terdiri dari:

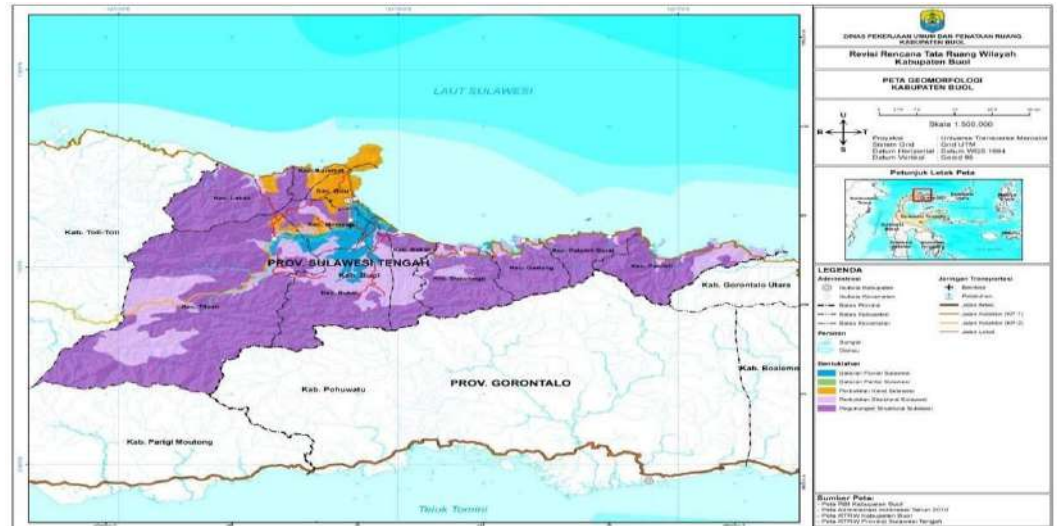
- c. Punggung bukit sedimen asimetrik tak terorientasi. Bentuk seperti ini dijumpai dalam luasan yang sempit pada daerah perbukitan pesisir bagian selatan sepanjang wilayah Kabupaten Buol.
- d. Perbukitan karst (kapur) di atas batu gamping coral. Bentuk bukit karst seperti ini dapat ditemui di wilayah Kecamatan Biau.
- e. Deretan bukit sangat curam di atas batuan beku, dijumpai di bagian barat dan timur Kabupaten Buol seperti pada Kecamatan Biau, Kecamatan Tiloan, dan Kecamatan Paleleh.

5) Pegunungan, terdiri dari:

- a. Punggung bukit sedimen asimetrik tertoreh melebar, sebarannya dijumpai di sebagian wilayah kecamatan yang ada.
- b. Punggung gunung metamorfik terorientasi terjal, dijumpai pada hampir semua wilayah kecamatan di bagian selatan Kabupaten Buol.

Satuan ini merupakan bagian terbesar morfologi yang terdapat di

wilayah Kabupaten Buol. Ketinggiannya berkisar 800-2.500 mdpl (G. Malino). Wilayah-wilayah pegunungan yang termasuk dalam satuan ini meliputi deretan Pegunungan Malino, G. Bangkalang dan G. Tetembu, serta G. Tentolomatinan di Pegunungan Paleleh. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: RTRW Kabupaten Buol, Tahun 2012-2032

Gambar 2.3
Peta Kondisi Geomorfologi Kabupaten Buol

c. Fungsi dan Kontribusi Daerah Terhadap Wilayah Sekitar

Kabupaten Buol berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, memiliki peran yang cukup strategis secara kewilayahan dalam skala nasional maupun provinsi. Peran strategis Kabupaten Buol dalam konstelasi regional dapat dilihat dalam beberapa aspek yaitu keterkaitan sistem perkotaan dan pusat pelayanan wilayah, serta keterkaitan sumber daya alam. Dilihat dalam sistem perkotaan baik sistem perkotaan nasional maupun provinsi Kabupaten Buol memiliki peran sebagai kota pendukung percepatan kota-kota pusat pertumbuhan nasional dalam hal ini adalah pendukung Kawasan Andalan (KA) Tolitoli dan sekitarnya.

Keberadaan Buol yang terletak di sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang mendukung pelayaran pada sabuk tengah Kepulauan Indonesia berpotensi untuk semakin memperkuat peran Buol dalam konstelasi regional, tentu saja peran ini harus saling sinergi dengan Tolitoli yang secara hierarki memiliki pelabuhan laut dengan hierarki lebih tinggi



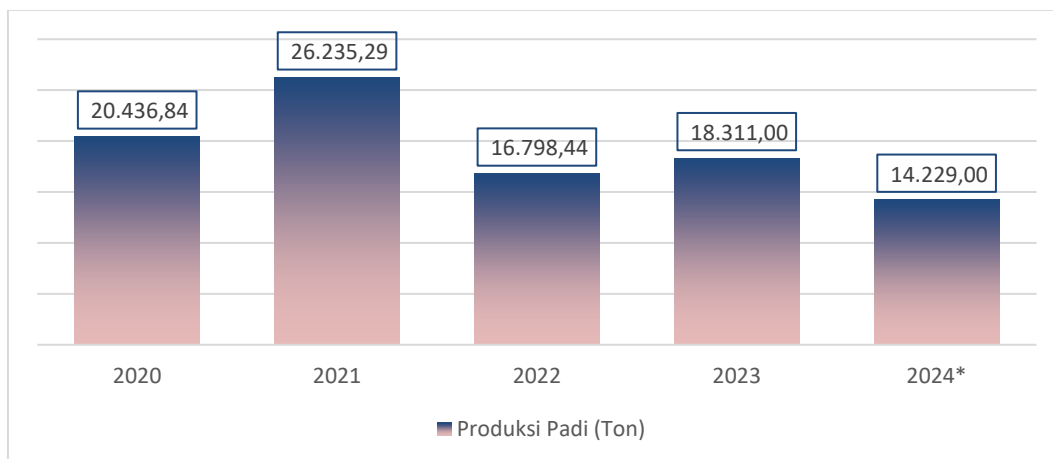
yaitu sebagai pelabuhan nasional. Keberadaan Buol dengan kedekatan dengan ALKI harus dimanfaatkan oleh Kabupaten Buol sebagai pendorong pertumbuhan wilayah, khususnya untuk memperlancar transportasi barang dan orang dari Buol menuju ke wilayah lainnya di sekitar Kabupaten Buol.

2. Potensi Sumber Daya Alam

a. Potensi Sektor Pertanian

Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat vital bagi Indonesia, mengingat statusnya sebagai negara agraris. Mengingat pula salah satu visi RPJPD Kabupaten Buol Tahun 2025-2045 Buol Daerah Agropolitan yang maju dan berkelanjutan. Potensi besar sektor ini tidak hanya terbatas pada penyediaan bahan pangan, tetapi juga sebagai tulang punggung perekonomian, penyedia lapangan kerja, dan penopang ketahanan nasional.

Sebagai kawasan dengan potensi pertanian yang sangat signifikan maka, perlu ada upaya strategis dari pemerintah Kabupaten Buol untuk mengembangkan pertanian secara terpadu, salah satunya melalui pengembangan Kawasan Agropolitan yang sudah dirintis oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui pengembangan KTM Air Terang di Kecamatan Tiloan. Kecamatan-kecamatan yang berpotensi sebagai kawasan pengembangan agropolitan antara lain adalah wilayah yang mempunyai nilai daya saing komoditas unggulan sektor pertanian, antara lain Kecamatan Tiloan, Bukal, Bokat. Jumlah Produksi Padi Kabupaten Buol paling tinggi dalam 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 sebesar 26.235,26 Ton. Sementara ditahun 2024 menurun menjadi 14.229 Ton. Secara rinci perkembangan jumlah produksi Padi (Ton) dari Tahun 2019-2023 sebagai berikut:



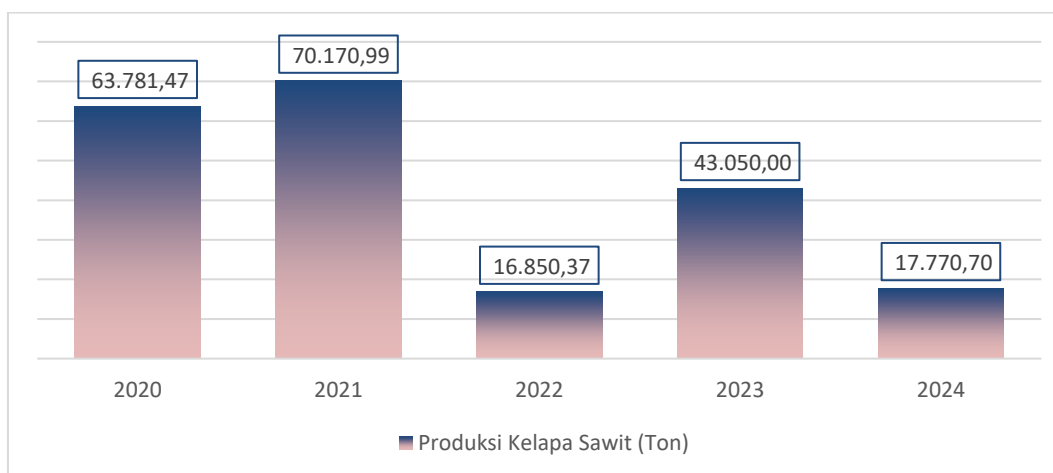
Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2025

Gambar 2.4
Jumlah Produksi Padi (Ton) Kabupaten Buol

b. Potensi Sektor Perkebunan

Sektor perkebunan memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia, menjadikannya salah satu pilar utama perekonomian nasional. Dengan kondisi geografis dan iklim yang sangat mendukung, Indonesia mampu menjadi produsen komoditas perkebunan global. Di Provinsi Sulawesi Tengah Khususnya Kabupaten Buol Komoditas Perkebunan paling tinggi yaitu Kelapa Sawit, Kelapa dan Kakao.

Produksi Kelapa Sawit Tahun 2020-2024 cenderung berfluktuatif. Produksi kelapa sawit paling tinggi terjadi tahun 2021 sebesar 70.170,99 Ton dan pada tahun 2024 jumlah produksi kelapa sawit menurun menjadi 17.770,70 Ton. Rincian produksi kelapa sawit sebagai berikut:

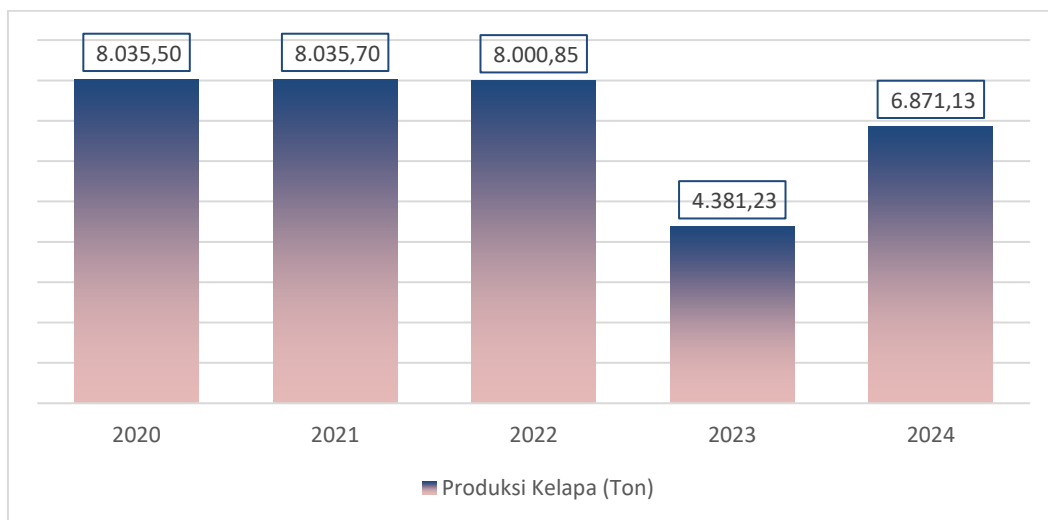


Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2025

Gambar 2.5
Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton) Kabupaten Buol



Produksi Kelapa Di Kabupaten Buol Tahun 2020-2024 cenderung stabil namun menurun ditahun 2024. Produksi kelapa paling tinggi terjadi tahun 2019 sebesar 8.062,11 Ton dan pada tahun 2024 jumlah produksi kelapa menurun menjadi 6.871,13 Ton. rincian produksi kelapa sebagai berikut:

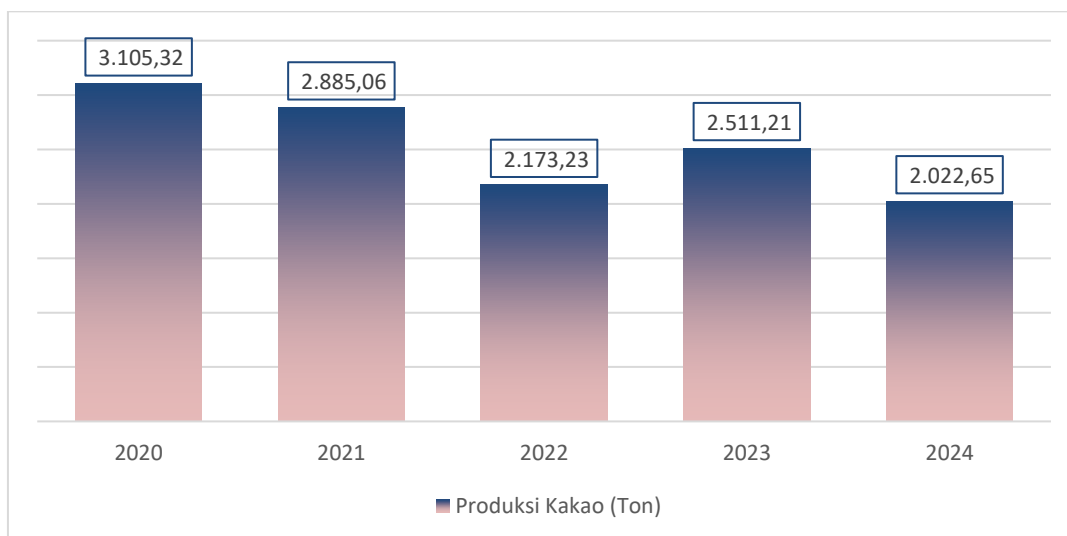


Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2025

Gambar 2.6

Jumlah Produksi Kelapa (Ton) Kabupaten Buol

Produksi Kakao Di Kabupaten Buol Tahun 2020-2024 cenderung berfluktuatif. Produksi kakao paling tinggi terjadi tahun 2020 sebesar 3.105,32 Ton dan pada tahun 2024 jumlah produksi kakao menurun menjadi 2.022,65 Ton. Rincian produksi kakao sebagai berikut:



Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2025

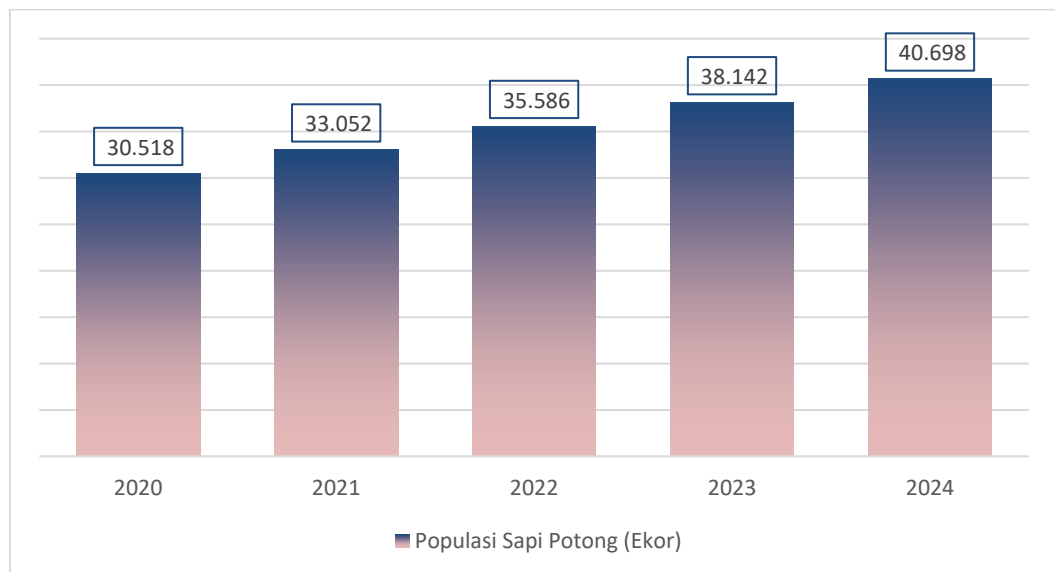
Gambar 2.7

Jumlah Produksi Kakao (Ton) Kabupaten Buol



c. Potensi Sektor Peternakan

Sektor peternakan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, terutama karena permintaan protein hewani yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan kesadaran gizi masyarakat. Sektor ini tidak hanya berperan penting dalam ketahanan pangan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi jutaan orang. Sektor peternakan, khususnya sapi potong, memiliki potensi yang sangat besar dan strategis bagi Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan, sektor peternakan sapi potong di Indonesia memiliki prospek cerah. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang tepat, investasi, dan adopsi teknologi, sektor ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan daging nasional tetapi juga berkontribusi lebih besar pada perekonomian dan ketahanan pangan. Produksi Sapi Potong Di Kabupaten Buol Tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2020 Jumlah Sapi Potong sebanyak 30.518 Ekor dan ditahun 2024 telah menjadi 40.698 Ekor. Perkembangan Jumlah Sapi Potong Di Kabupaten Buol Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2025

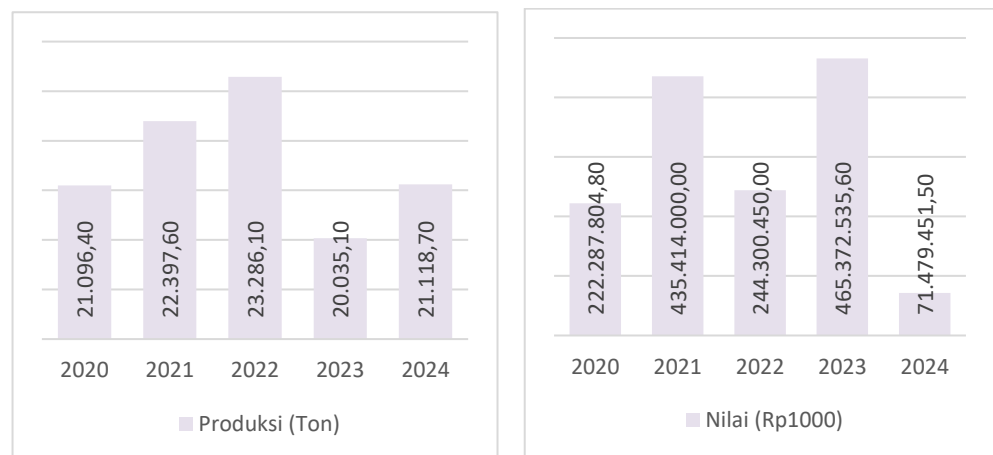
Gambar 2.8
Jumlah Produksi Sapi Potong (Ekor) Kabupaten Buol

d. Potensi Sektor Perikanan

a). Perikanan Tangkap

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi perikanan tangkap yang luar biasa. Wilayah lautnya yang sangat luas,

dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, menyimpan kekayaan hayati yang melimpah dan beragam. Potensi ini tidak hanya menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan, tetapi juga sebagai mesin penggerak ekonomi yang signifikan. Dengan pengelolaan yang baik, perikanan tangkap di Indonesia dapat menjadi sektor yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Di Kabupaten Buol Jumlah Produksi Pada Perikanan Tangkap 2020-2024 Memiliki nilai yang berfluktuatif. Jumlah produksi terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar 23.286,10 Ton dengan nilai produksi sebesar Rp.244.300.450,-. Sementara itu pada tahun 2024 telah menurun menjadi 21.118,70 Ton dengan nilai produksi meningkat menjadi Rp.71.479.451,50,-. Perkembangan Produksi dan Nilai Perikanan Tangkap Kabupaten Buol Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2025

Gambar 2.9

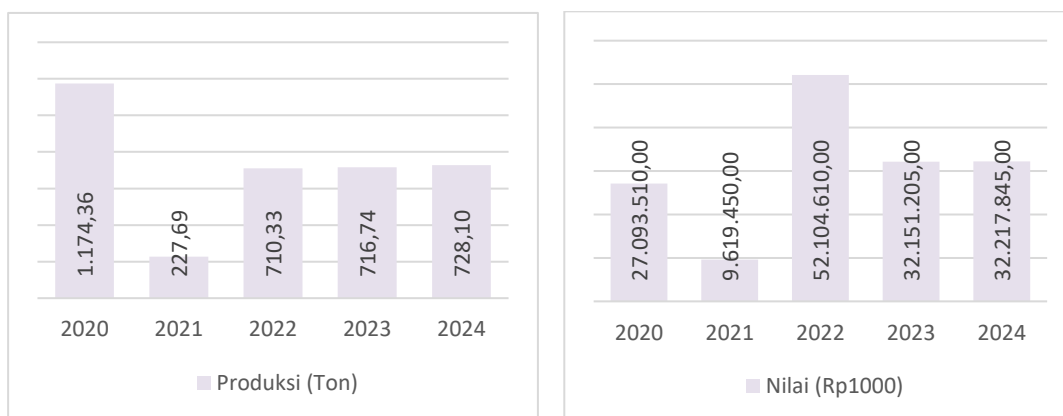
Jumlah Produksi dan Nilai Perikanan Tangkap Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

b). Perikanan Budidaya

Sektor perikanan budidaya memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia, menjadikannya kunci untuk memenuhi kebutuhan pangan, mengurangi tekanan pada perikanan tangkap, dan menggerakkan ekonomi nasional. Dibandingkan dengan perikanan tangkap, budidaya menawarkan kontrol lebih besar atas produksi, sehingga lebih stabil dan



berkelanjutan. Dikabupaten Buol Jumlah Produksi Pada Perikanan Budidaya 2020-2024 Memiliki nilai yang berfluktuatif. Jumlah produksi terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar 1.174,36 Ton dengan nilai produksi sebesar Rp.27.093.510,-. Sementara itu pada tahun 2024 telah menurun menjadi 728,10 Ton dengan nilai produksi meningkat menjadi Rp.32.217.845,00. Perkembangan Produksi dan Nilai Perikanan Budidaya Kabupaten Buol Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2025

Gambar 2.10

Jumlah Produksi dan Nilai Perikanan Budidaya Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

e. Kawasan Pertambangan

Kabupaten Buol memiliki Kawasan pertambangan mineral yang cukup potensial untuk dikembangkan dan lokasinya berada di luar kawasan lindung, yaitu di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat. Luas potensi kawasan pertambangan di Kabupaten Buol sekitar 746.400 Ha. Tetapi kawasan ini berpotensi menimbulkan konflik lingkungan dengan kawasan sekitarnya, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya perlu mendapat prioritas penanganan dari pemerintah Kabupaten Buol.

f. Penggunaan Lahan

Penggunaan dan fungsi lahan ialah pengkajian keadaan penggunaan lahan dan fungsi lahan saat sekarang berdasarkan atas: (1) Penutup lahan yang ada di atas permukaan bumi, dan (2) Kegunaan penutup lahan tersebut sesuai dengan maksud si pengguna. Kajian penggunaan dan fungsi lahan



pada umumnya dilaksanakan untuk melengkapi (dalam batas keruangan) informasi bagi rencana pengembangan daerah perkotaan dan daerah pedesaan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 tahun 2016 tersedia peta penutupan lahan. Peta penutupan lahan tersebut diperbarui dengan menggunakan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan tahun 2019. Peta penggunaan lahan yang merupakan terbitan dari Kanwil/Kanta ATR/BPN masih tersedia untuk jangka waktu tahun yang sudah melebihi 2 tahun. Untuk memperbarui peta penggunaan lahan, diperlukan proses survei setiap jenis penutupan lahan. Oleh karena itu, peta penutupan lahan yang berasal dari RBI dan sudah diperbarui akan menjadi salah satu bahan untuk melakukan analisis dan penyusunan rencana pola ruang.

Penutupan lahan terluas di Kabupaten Buol adalah hutan dengan luas kurang lebih 259.529,06 Ha atau 70,06% dari total luas kabupaten. Selanjutnya lahan perkebunan sekitar 9,02%, dan semak belukar sekitar 9,01 %. Ladang/tegalan hortikultura memiliki luas 17.172,25 Ha sedangkan sawah kurang lebih 4.493 Ha. Sementara luasan mangrove kurang lebih 1.686,76 atau 0,46 % yang dapat direkomendasikan untuk menjadi ekosistem mangrove yang perlu di lindungi atau konservasi. Adapun detail penutupan lahan di Kabupaten Buol dapat dilihat pada tabel uraian penggunaan lahan.

Tabel 2.1

Luas Penutupan Lahan di Kabupaten Buol Tahun 2020

No	Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Hamparan Pasir Pantai	75,94	0,02
2	Hutan	259.529,06	70,06
3	Industri	74,61	0,02
4	Karang	1,48	0,00
5	Kebun Campuran	10.163,23	2,74
6	Ladang/Tegalan Hortikultura	17.727,25	4,79
7	Laut	133,43	0,04
8	Mangrove	1.686,76	0,46
9	Padang Rumput	63,99	0,02
10	Perkebunan	33.418,86	9,02
11	permukiman	3.753,92	1,01



No	Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
12	Rawa	4.295,21	1,16
13	Sawah	4.493,27	1,21
14	Sedimentasi	0,21	0,00
15	Semak Belukar	33.381,66	9,01
16	Sungai	1.340,20	0,36
17	Tambak	314,60	0,08
18	Tanggul	1,51	0,00
Jumlah		370.455,19	100,00

Sumber: RBI Skala 1:50.000, Citra Spot 6/7, Analisis menggunakan Arcgis, 2020

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kemampuan atau kemampuan ekosistem dalam mendukung kehidupan organisme dengan baik dan mempertahankan produktivitas, kemampuan beradaptasi dan memperbaharui diri dan disebut sebagai daya dukung lingkungan. Uraian tersebut memberi makna bahwa daya dukung lingkungan adalah daya dukung kehidupan manusia. Setiap daerah memiliki karakteristik geografis yang berbeda-beda seiring dengan aktivitas manusia untuk berbagai kepentingan, sehingga daya dukung lingkungan sangat bervariasi. Selain itu daya dukung lingkungan juga memberikan makna kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan keduanya. Disisi lain proses Pembangunan setiap daerah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Manusia adalah makhluk hidup yang kebutuhannya lebih kompleks dari pada makhluk hidup lain di muka bumi ini.

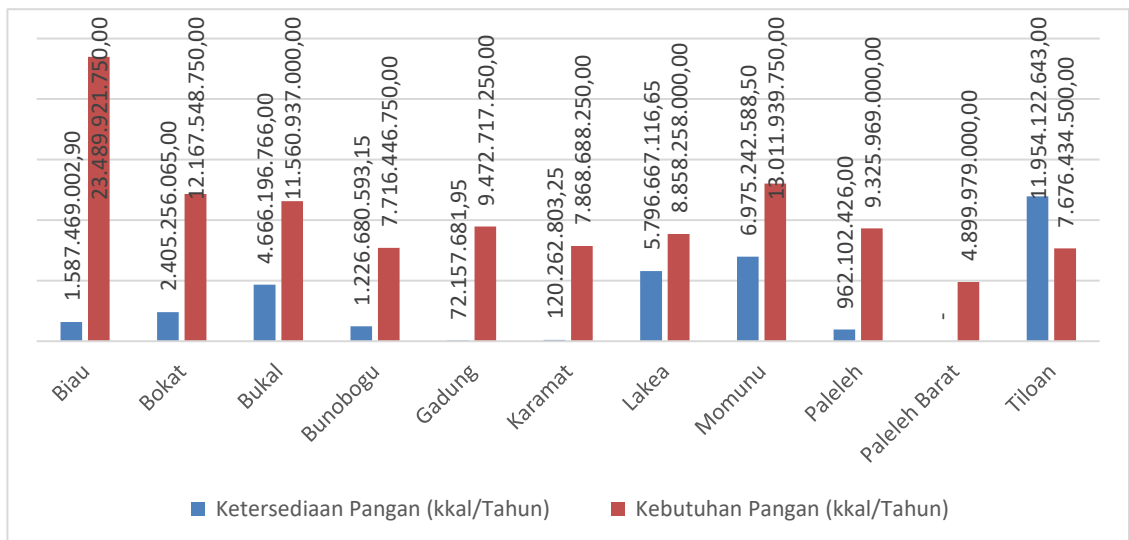
a. Daya Dukung Pangan

Status daya dukung dan daya tampung pangan sangat ditentukan antara ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand) sehingga menghasilkan status terlampaui atau tidak terlampaui daya dukung daya tampung penyediaan pangan diukur oleh angka ambang batas penduduk. Jika ketersediaan yang ada melampaui ambang batas kebutuhan penduduknya maka akan terlampaui daya dukung daya tampung suatu wilayah tersebut.

Ketersediaan pangan dalam system grid sebesar 35.766.157.687 Kkal/tahun dan dengan jumlah populasi penduduk dalam system grid sebesar 147.880 jiwa



maka ambang batas penduduk dalam penyediaan pangan Kabupaten Buol sebesar 45.576 jiwa, terdapat selisih (minus) jumlah penduduk sebesar – 102.304 jiwa. Asumsinya adalah semakin tinggi nilai indeks jasa lingkungan penyediaan di wilayah tersebut, maka semakin besar sebaran potensi ketersediaan di wilayah tersebut.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029

Gambar 2.11
Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Kabupaten Buol

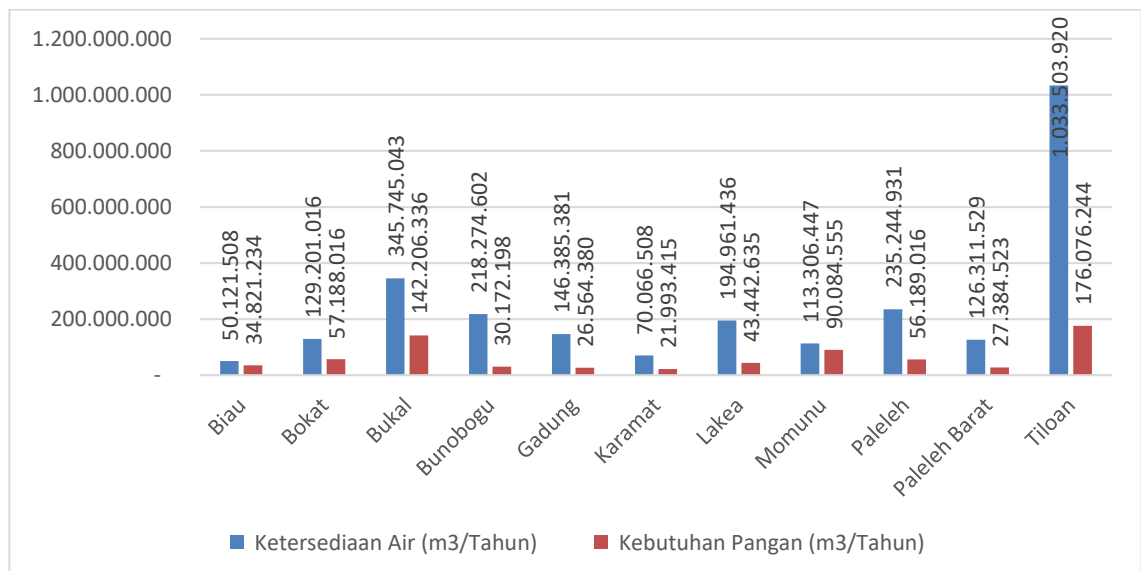
Terlihat bahwa secara administrasi, hanya Kecamatan Tilloan yang memiliki tingkat ketersediaan pangan lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan pangannya, menunjukkan potensi wilayah tersebut sebagai salah satu lumbung pangan Kabupaten Buol. Sementara itu, kecamatan-kecamatan lainnya belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri, di mana tingkat ketersediaan pangan masih lebih rendah dibandingkan kebutuhan konsumsi masyarakat.

Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi dan produksi pangan antarwilayah, serta menunjukkan perlunya penguatan sistem produksi, pengelolaan, dan distribusi pangan lokal di seluruh kecamatan agar ketahanan pangan daerah dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan.

b. Daya Dukung Air

Ketersediaan air di Kabupaten Buol dihitung menggunakan data air dari beberapa sungai. Asumsinya air sungai yang melintas di Kabupaten Buol dapat

digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal. Ketersediaan air di Kabupaten Buol dihitung menggunakan data debit air baku permukaan material aliran sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Buol. Dengan asumsi material air sungai yang melintas di Kabupaten Buol dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan maksimal. Debit air sungai yang bersumber dari Cipta Karya Sumberdaya Air (CIKASDA) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 yaitu debit andalan (Q80) sungai 3.062.350.000 m³/tahun yang selanjutnya didistribusikan ke dalam sistem grid berdasarkan indeks jasa lingkungan penyedia air Kabupaten Buol, dengan asumsi bahwa semakin tinggi nilai indeks di wilayah tersebut, maka semakin besar sebaran potensi ketersediaan di wilayah tersebut. Dihasilkan ketersediaan air total untuk Kabupaten Buol sebesar 2.663.122.321 m³/tahun.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029

Gambar 2.12

Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air Kabupaten Buol

4. Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan

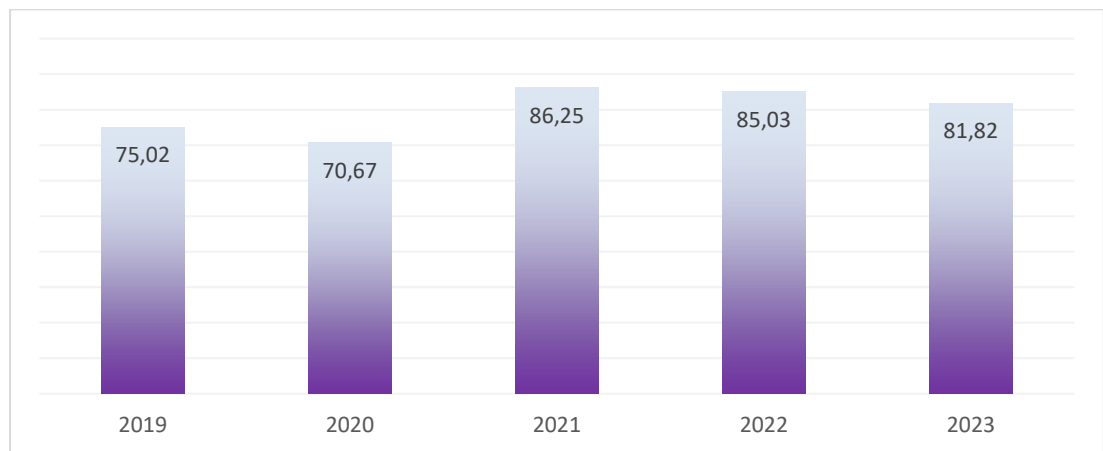
a. Ketahanan Air

Ketahanan air mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan sumber daya air yang memadai, dapat diakses, berkualitas, dan berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan rumah tangga, kegiatan ekonomi, serta kelestarian lingkungan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk



menilai kondisi ketahanan air adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak.

Semakin tinggi persentase rumah tangga dengan akses air minum layak, semakin baik ketahanan air di suatu wilayah, karena kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih dapat terpenuhi dengan aman dan merata. Sebaliknya, persentase yang masih rendah menunjukkan adanya tantangan dalam penyediaan infrastruktur air bersih, pengelolaan sumber daya air, maupun pemerataan layanan.



Sumber: BPS, Tahun 2025

Gambar 2.13

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Kabupaten Buol Tahun 2019-2023

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Buol dalam kurun waktu 2019–2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, capaian akses air minum layak tercatat sebesar 75,02 persen, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 70,67 persen. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai 86,25 persen, meskipun kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 85,03 persen, dan turun lagi pada tahun 2023 menjadi 81,82 persen.

Perkembangan data ini memperlihatkan bahwa meskipun secara umum Kabupaten Buol telah mampu meningkatkan cakupan akses air minum layak dibandingkan tahun awal periode, masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi pencapaian dari tahun ke tahun. Fluktuasi capaian ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan infrastruktur

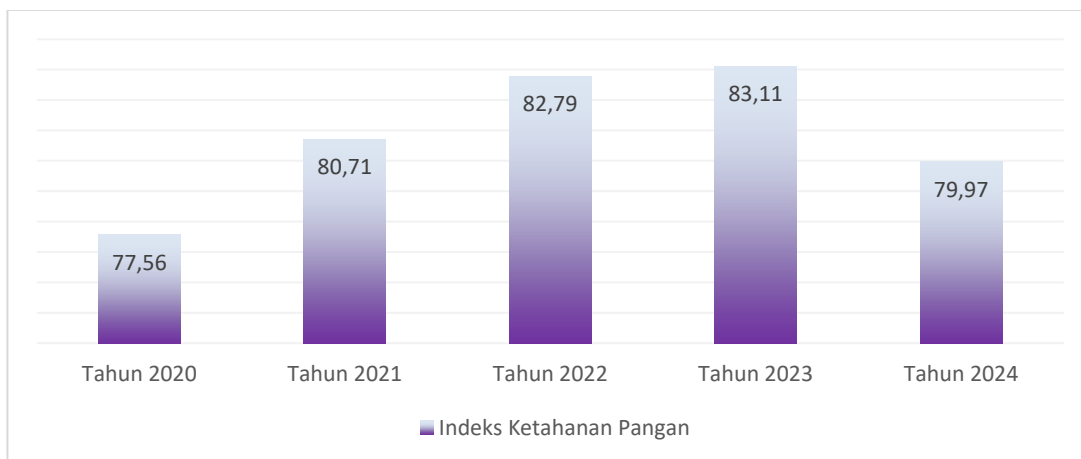


penyediaan air bersih, kualitas layanan, kondisi sumber daya air, serta aspek keberlanjutan pengelolaannya.

Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terarah dalam memperkuat infrastruktur penyediaan air bersih, memperluas cakupan layanan, serta menjaga kualitas sumber air, sehingga ketahanan air di Kabupaten Buol dapat terjamin dan capaian akses air minum layak dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

b. Kemandirian Pangan

Kemandirian pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya dari produksi dalam negeri. Konsep ini erat kaitannya dengan indeks ketahanan pangan yang merupakan alat ukur untuk menilai seberapa baik suatu daerah dalam memastikan ketersediaan pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh penduduk. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Buol dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun dengan sedikit fluktuasi di akhir periode. Pada tahun 2020, indeks ketahanan pangan tercatat sebesar 77,56, kemudian meningkat konsisten pada tahun 2021 menjadi 80,71, tahun 2022 sebesar 82,79, dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2023 dengan nilai 83,11. Namun demikian, pada tahun 2024 indeks ini mengalami sedikit penurunan menjadi 79,97. Kenaikan indeks hingga tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, serta pemanfaatan pangan oleh masyarakat. Peningkatan tersebut dapat mencerminkan membaiknya distribusi pangan, dukungan infrastruktur, serta akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok. Adapun penurunan pada tahun 2024 menjadi sinyal bahwa terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi ketahanan pangan, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dinamika harga pangan, perubahan iklim, maupun gangguan distribusi. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam memperkuat sistem pangan lokal, sehingga capaian ketahanan pangan dapat terjaga stabil dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buol.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

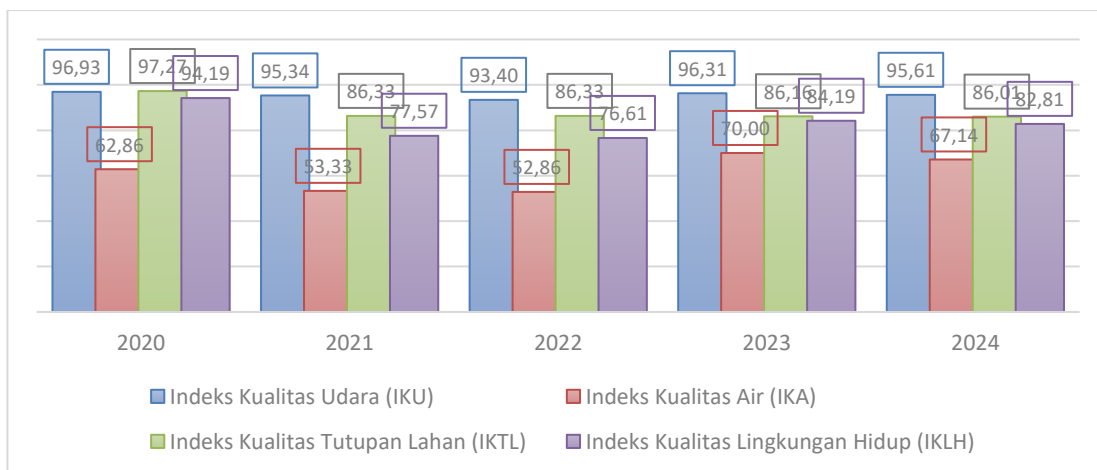
Gambar 2.14

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Buol

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya Environmental Performance Index (EPI) yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Yale University. Konsep Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), hanya mengambil tiga indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol sebagai berikut:



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buol Tahun 2025-2045

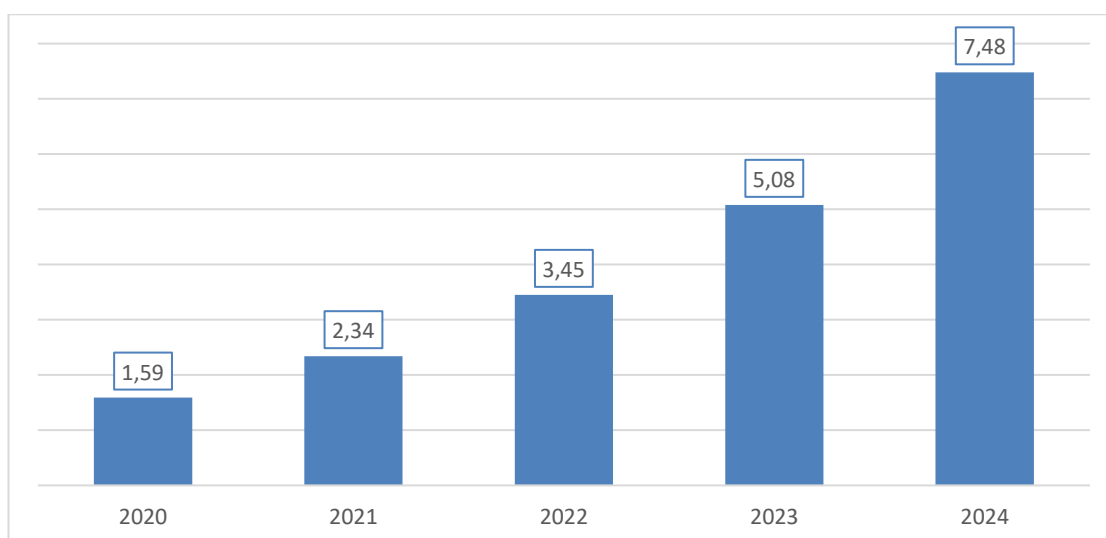
Gambar 2.15

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar diatas pada perhitungan IKLH Kabupaten Buol Tahun 2024 bernilai 82,81 dengan kategori baik. Kategori "Baik" mengindikasikan bahwa secara umum, kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Buol relatif terjaga dan upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan yang dilakukan sudah menunjukkan hasil yang positif.

b. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengendalian pencemaran lingkungan yang bersumber dari sampah merupakan upaya krusial untuk menjamin kualitas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Strategi utama dalam pengendalian ini adalah melalui Pengelolaan Sampah Terpadu yang berorientasi pada pengurangan volume dan pemanfaatan kembali material. Fasilitas-fasilitas persampahan seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Bank Sampah, dan sarana pengolahan lainnya berfungsi sebagai pusat untuk memastikan sampah tidak hanya dibuang, tetapi juga diolah—baik didaur ulang, dikomposkan, maupun diubah menjadi energi. Capaian ini menjadi indikator penting keberhasilan pengelolaan, di mana jumlah sampah yang berhasil diolah mencerminkan efektivitas sistem dalam menekan volume sampah yang berakhir di TPA dan pada akhirnya, mengurangi potensi pencemaran tanah, air, dan udara. Berikut adalah capaian pengelolaan Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah:



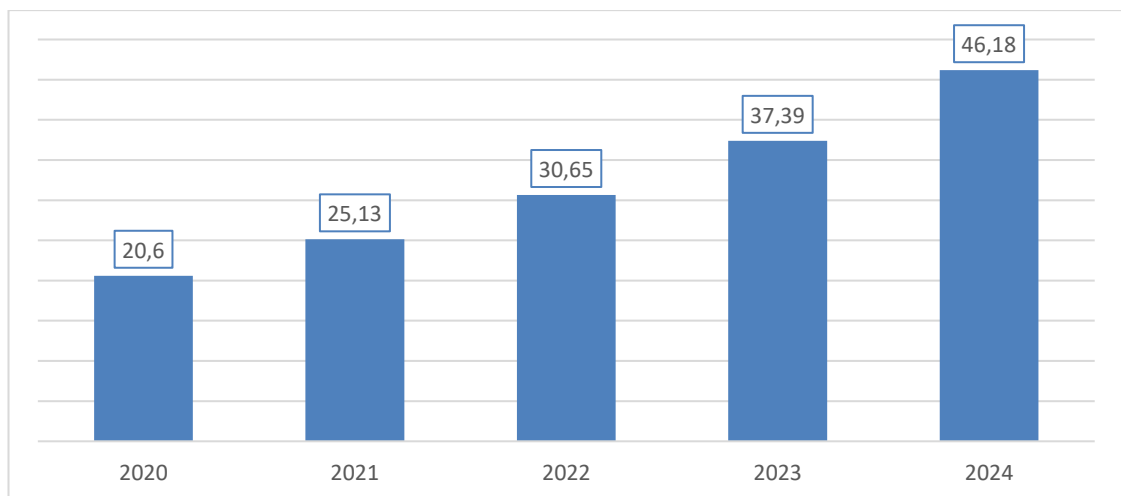
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Gambar 2.16

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2020-2024

Dari Data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020-2024 terjadi peningkatan Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah setiap tahunnya. Dimana tahun 2020 hanya sebesar 1,59 dan tahun 2024 sebesar 7,48. Tren ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas dan efektivitas fasilitas pengolahan sampah (seperti TPST, Bank Sampah, atau fasilitas daur ulang) serta kemungkinan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah.

Pengendalian pencemaran lingkungan yang bersumber dari sampah merupakan upaya krusial untuk menjamin kualitas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Strategi utama dalam pengendalian ini berfokus pada Pengelolaan Sampah Terpadu melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta penanganan yang efisien. Namun, keberhasilan pengendalian pencemaran sangat bergantung pada Proporsi Rumah Tangga dengan layanan Penuh Pengumpulan Sampah yang datanya disajikan sebagai berikut:



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Gambar 2.17

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2020-2024

Data menunjukkan adanya tren positif dan saling berkaitan di kedua indikator tersebut. Selama periode 2020 hingga 2024, Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah mengalami peningkatan yang sangat signifikan, melonjak dari 20,60% menjadi 46,18%. Peningkatan lebih dari dua kali lipat ini merupakan bukti keberhasilan perluasan jangkauan layanan

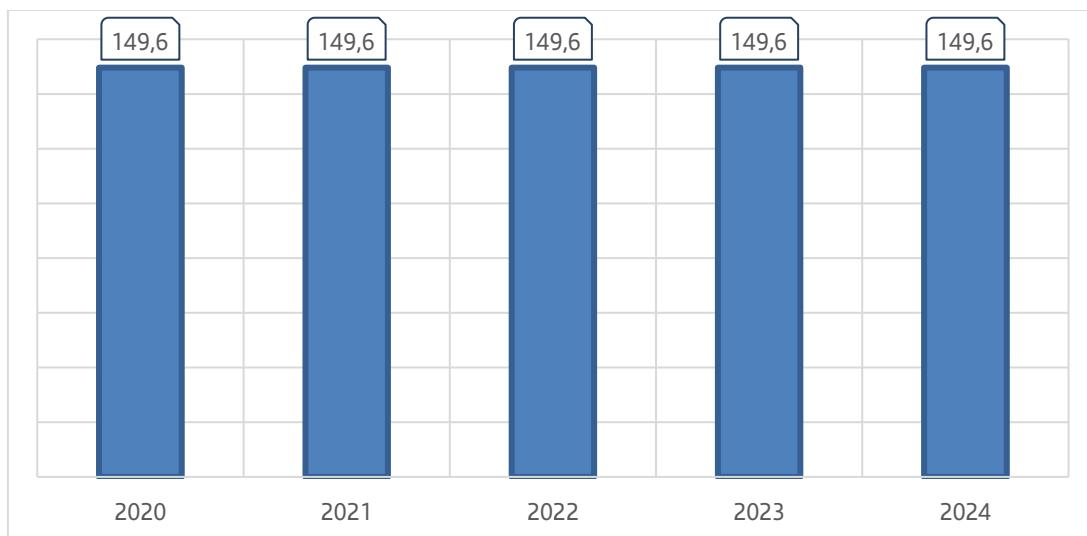


persampahan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi proporsi rumah tangga yang terlayani, semakin besar volume sampah yang berhasil ditarik dari lingkungan terbuka dan masuk ke dalam sistem pengelolaan resmi, sehingga secara langsung mengurangi potensi pencemaran tanah, air, dan udara akibat praktik pembuangan liar atau pembakaran sampah rumah tangga.

6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Indeks Risiko Bencana

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Buol dalam periode tahun 2020–2024 tercatat sebesar 149,60, yang termasuk dalam kategori risiko tinggi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Buol memiliki tingkat ancaman dan potensi dampak bencana yang signifikan, sehingga diperlukan upaya pengurangan risiko bencana yang lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Adapun perkembangan nilai indeks risiko bencana Kabupaten Buol secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:



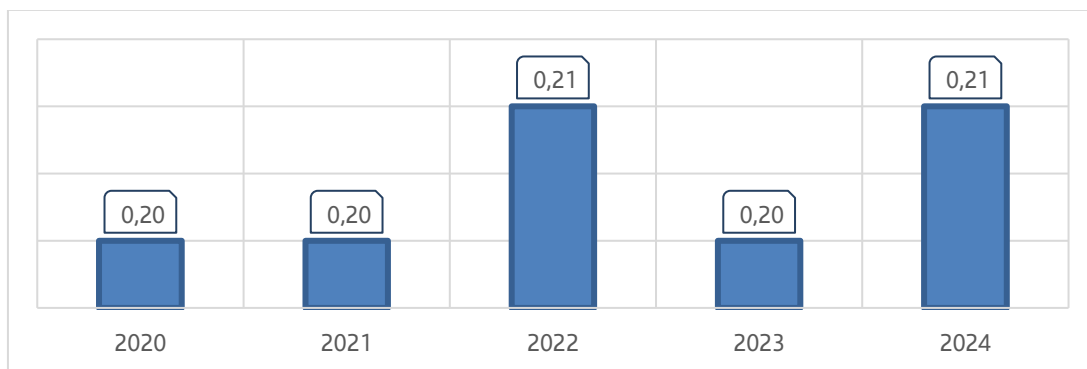
Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024

Gambar 2.18

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

b. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah ini nantinya akan mempengaruhi Indeks Risiko Bencana Indonesia di tingkat nasional pada setiap provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadikan urusan bencana di Indonesia menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Pelaksanaan penanggulangan bencana juga tidak hanya ketika terjadinya bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut, disebutkan bahwa terdapat 3 tahapan dalam penanggulangan bencana yakni prabencana, darurat bencana, dan pasca bencana. Ketiga tahapan tersebut menjadi kewajiban yang mesti dijalankan di setiap daerah. Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Buol ada 5 tahun terakhir masih berfluktuatif. Angka Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Buol tahun 2020 sebesar 0,20 dengan kategori rendah dan tahun 2024 naik menjadi 0,21 namun masih dalam kategori rendah. Perkembangan Nilai IKD 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BNPB dan BPBD Prov. Sulteng, 2025

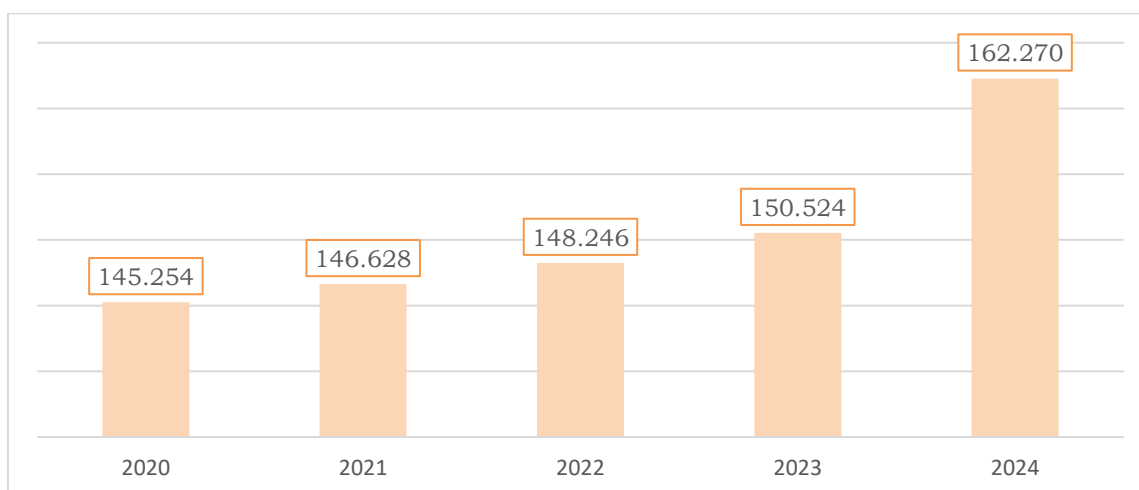
Gambar 2.19

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

7. Demografi

Penduduk merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan.

Jumlah Penduduk Kabupaten Buol dalam 5 Tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Terakhir pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Buol sebesar 162.270 Jiwa. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Buol dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut

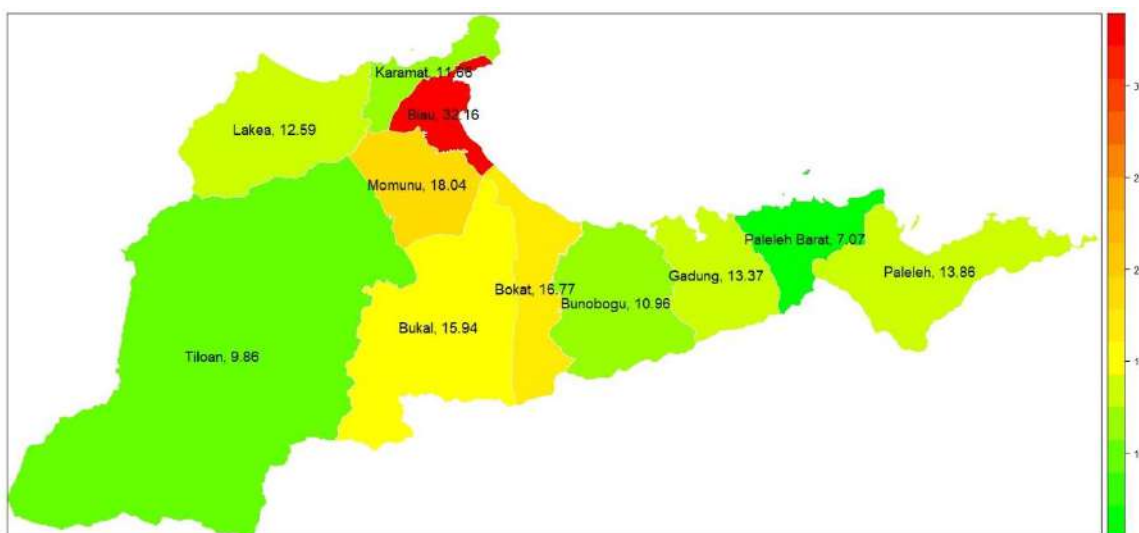


Sumber: BPS, Buol Dalam Angka 2025

Gambar 2.20

Jumlah Penduduk Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

Persebaran penduduk di Kabupaten Buol dikategorikan tidak merata. Sebagian besar penduduknya, yaitu sekitar 19,82%, menempati ibukota kabupaten yaitu di Kecamatan Biau. Kecamatan Biau juga merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat se-Kabupaten Buol, dengan kepadatan penduduk 147,66 jiwa per Km². Jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Paleleh Barat, yaitu hanya 4,36% penduduk Kabupaten Buol pada Tahun 2024. Penduduk di luar Kecamatan Biau dan Kecamatan Paleleh Barat relatif tersebar secara merata dengan sebaran antara 6,75 hingga 11,12%. Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Tiloan. Setiap 1 Km² wilayah geografis di kecamatan Tiloan hanya dihuni oleh 6 jiwa penduduk. Hal ini karena luas wilayah di Kecamatan Tiloan jauh lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Buol, yaitu seluas 1.437,70 Km² atau sekitar 35,56% wilayah Kabupaten Buol. Sebaran persentase jumlah penduduk di Kabupaten Buol Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2025

Gambar 2.21

Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Buol Tahun 2024

Distribusi Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Buol Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



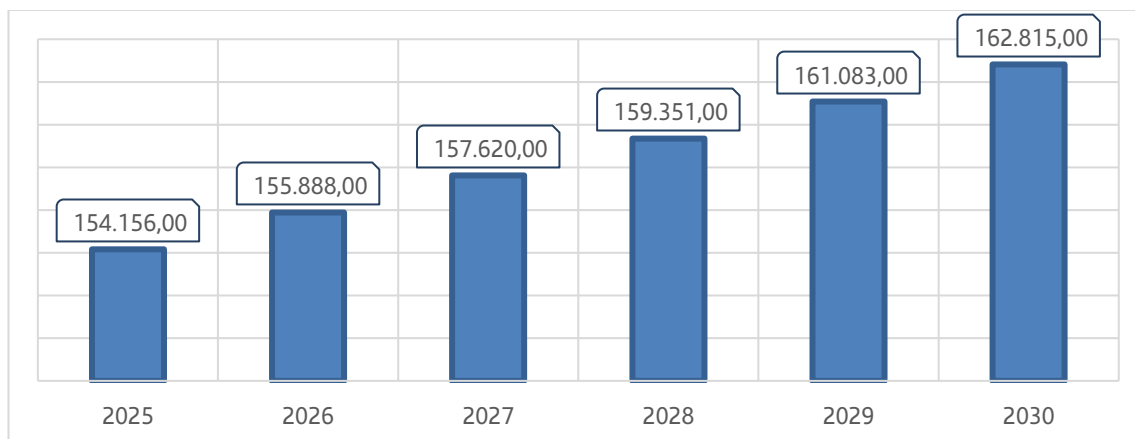
Tabel 2.2
Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Buol Tahun 2024

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Ribuan)	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki (Ribuan)	Perempuan (Ribuan)		
Lakea	6,52	6,07	12,59	107,34
Karamat	6,05	5,62	11,66	107,68
Biau	16,38	15,79	32,16	103,74
Momunu	9,32	8,71	18,04	107,01
Tiloan	5,16	4,71	9,86	109,59
Bokat	8,46	8,31	16,77	101,83
Bukal	8,21	7,73	15,94	106,18
Bunobogu	5,58	5,38	10,96	103,62
Gadung	6,77	6,60	13,37	102,61
Paleleh Barat	3,72	3,35	7,07	111,05
Paleleh	7,10	6,75	13,86	105,09
Kabupaten Buol	83,26	79,02	162,27	105,37

Sumber: BPS, Buol Dalam Angka 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk di tahun 2024 paling banyak di Kecamatan Biau sebanyak 32,16 Ribuan Jiwa dengan persentase 19,82 persen dari total seluruh jumlah penduduk Kabupaten Buol sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Paleleh Barat dengan 7,07 ribu jiwa atau 4,36 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Buol. Rasio jenis kelamin (Sex Ratio) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap 100 penduduk perempuan. Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Buol sebesar 105,37 artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Terdapat 105-106 laki-laki diantara 100 perempuan.

Analisis Proyeksi Penduduk sesuai proyeksi RPJPD Kabupaten Buol Tahun 2025-2045 bahwa pada tahun 2030 jumlah penduduk di Kabupaten Buol mencapai 162.815 Jiwa. Perkembangan Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Buol 2025-2030 sebagai berikut:



Sumber: RPJPD Kabupaten Buol 2025-2045

Gambar 2.22

Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Buol Tahun 2025-2030

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator makro ekonomi fundamental yang merefleksikan laju peningkatan agregat nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buol selama Tahun 2020-2024 terus mengalami tren yang berfluktuatif. Ditahun 2024 sebesar 3,31%, nilai tersebut turun dari tahun 2023 yang sebesar 3,61%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perekonomian daerah telah pulih dari tekanan pandemi, struktur ekonomi Buol masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing antar sektor. Diperlukan upaya penguatan sektor unggulan berbasis sumber daya lokal, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk, serta pemerataan infrastruktur ekonomi antarwilayah untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Perkembangan pertumbuhan PDRB Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.23

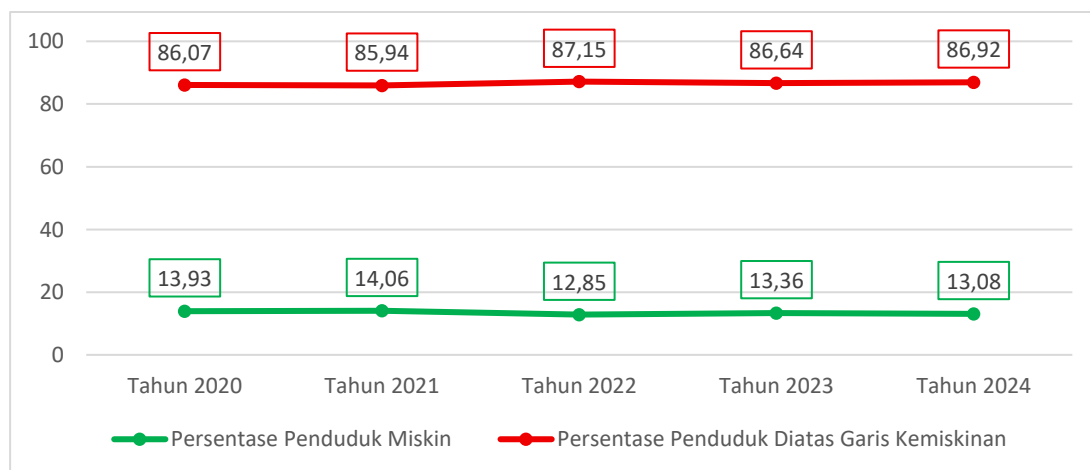
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

b. Tingkat Kemiskinan

Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan adalah individu yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan (atau pendapatan) yang nilainya lebih besar dari Garis Kemiskinan yang ditetapkan. Singkatnya, mereka adalah kelompok penduduk yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum, baik makanan maupun non-makanan, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara Penduduk Miskin adalah kebalikan dari penduduk diatas Garis Kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluarannya dibawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Ditahun 2024 Jumlah Penduduk Miskin sebesar 13,08% menurun dari tahun 2023 yang sebesar 13,36%. Hal ini membuat penduduk diatas garis kemiskinan meningkat dari yang sebelumnya 86,64 ditahun 2023 menjadi 86,92 di tahun 2024. Secara umum, kondisi ini menggambarkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Buol belum berjalan optimal. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian primer dengan produktivitas rendah, keterbatasan lapangan kerja non-pertanian, serta rendahnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan menjadi faktor utama yang memengaruhi lambatnya penurunan angka kemiskinan. Diperlukan strategi yang lebih terarah, antara lain melalui penguatan ekonomi lokal berbasis sumber daya unggulan daerah, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan



perluasan akses terhadap layanan dasar, agar pengurangan kemiskinan dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Buol. Perkembangan selama lima tahun terakhir Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dengan tingkat kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.24
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

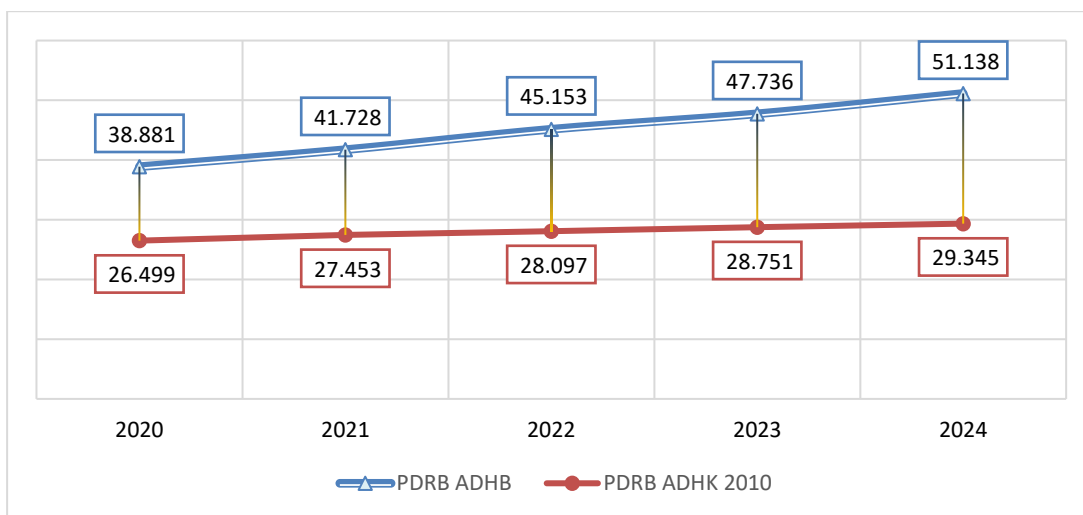
c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita mencerminkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat kemakmuran atau kesejahteraan rata-rata penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi PDRB per kapita, semakin tinggi pula potensi kemakmuran penduduknya.

PDRB per kapita ADHB adalah nilai PDRB yang dihitung menggunakan harga-harga yang berlaku pada tahun berjalan (tahun yang bersangkutan) dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB per kapita ADHK adalah nilai PDRB yang dihitung menggunakan harga-harga pada suatu tahun dasar tertentu (tahun 2010) dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Penggunaan tahun dasar ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga (inflasi). PDRB Per Kapita Kabupaten Buol baik perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga



Konstan (ADHK) memiliki nilai yang meningkat. Ditahun 2024 PDRB Per Kapita ADHB sebesar 51.138 meningkat dari tahun 2023 yang hanya sebesar 47.736. Sedangkan PDRB Per Kapita ADHK sebesar 29.345 meningkat dari tahun 2023 yang hanya sebesar 28.751. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

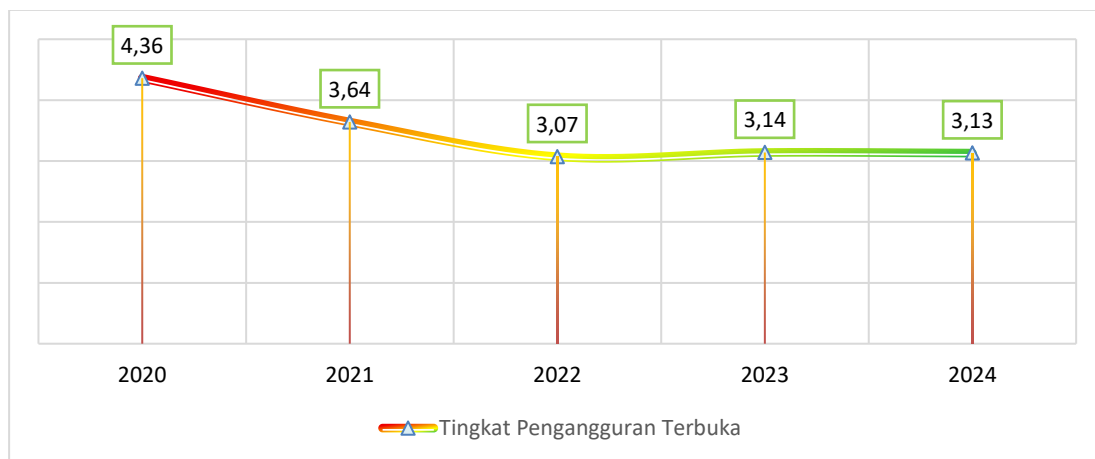


Sumber: BPS Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.25
PDRB Per Kapita Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator ekonomi kunci yang mengukur seberapa besar proporsi angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2023 dan 2024 TPT sedikit mengalami penurunan masing-masing menjadi 3,14 persen dan 3,13 persen, secara keseluruhan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Buol masih menunjukkan stabilitas dan perbaikan dibandingkan tahun awal pengamatan. Penurunan tingkat pengangguran ini mengindikasikan bahwa lapangan kerja di Kabupaten Buol semakin terbuka, baik di sektor formal maupun informal. Sektor pertanian, perdagangan, dan jasa berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja lokal, sementara peningkatan kegiatan ekonomi pasca-pandemi turut memperkuat daya serap pasar kerja di daerah. Perkembangan Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Buol dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2025

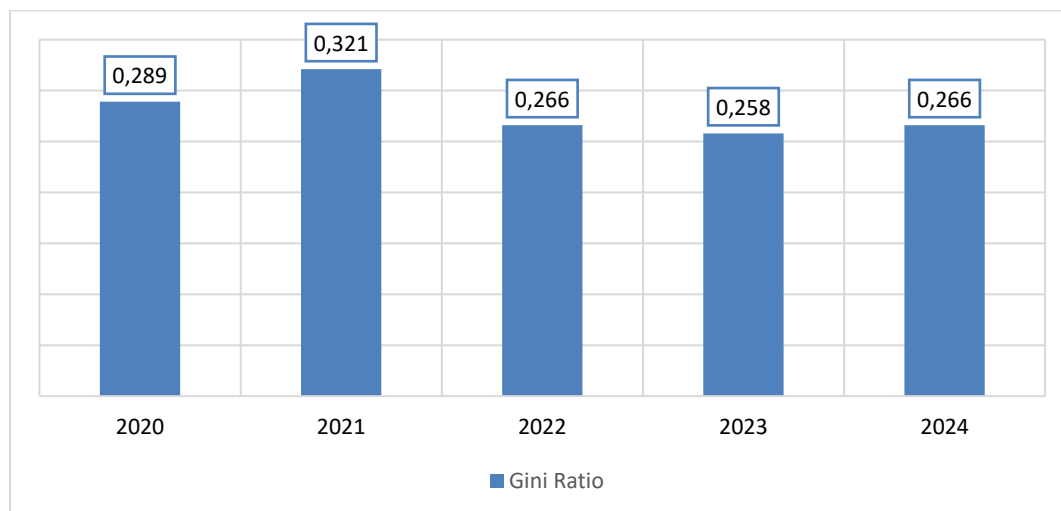
Gambar 2.26
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

e. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang nilainya berkisar antara nol hingga satu. Jika nilai gini ratio mendekati nilai satu maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin tidak merata, sedangkan jika nilainya mendekati nol maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat 3 kelompok ketimpangan yaitu ketimpangan tinggi jika nilai koefisien $\geq 0,5$, sedang jika nilainya antara $0,30 - 0,49$ dan rendah jika $< 0,30$. Nilai gini ratio Kabupaten Buol pada lima tahun terakhir berfluktuatif cenderung menurun. Pada tahun terakhir yaitu tahun 2024 sebesar 0,266 meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 0,258. Pada tahun 2024, Gini Ratio sedikit meningkat menjadi 0,266, namun masih berada pada kategori ketimpangan rendah (di bawah 0,4). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Buol cukup merata, dan ketimpangan ekonomi berhasil ditekan dalam beberapa tahun terakhir.

Tren penurunan ketimpangan ini sejalan dengan meningkatnya berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif di Kabupaten Buol. Perkembangan gini

ratio Kabupaten Buol dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

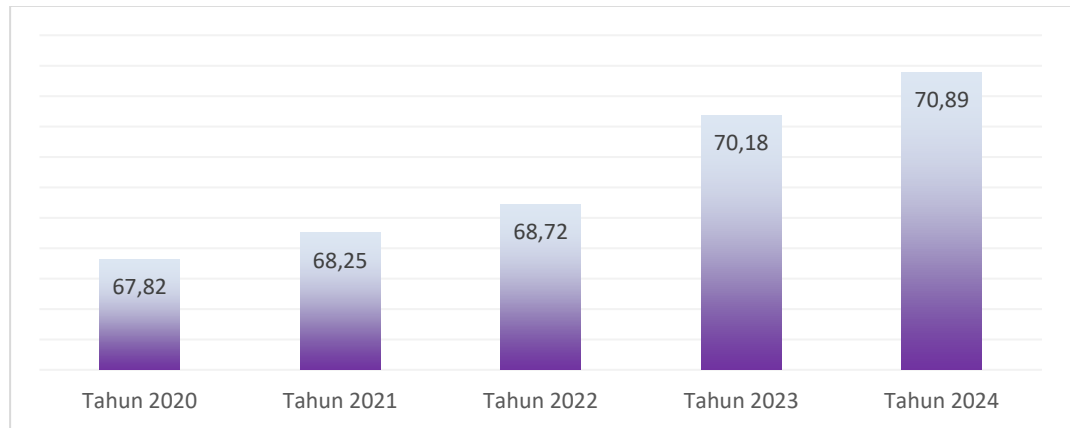


Sumber: BPS Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.27
Indeks Gini Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah. Unsur pembentuk indeks pembangunan manusia terdiri dari 3 bidang yaitu bidang kesehatan yang menggunakan variabel usia harapan hidup, kemudian bidang pendidikan menggunakan variabel harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah serta bidang perekonomian dengan variabel rata-rata pengeluaran per kapita. Jika melihat gambar di atas, secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Buol selama Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun terakhir yaitu pada tahun 2024 nilai indeks pembangunan manusia sebesar 70,89 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 yang hanya sebesar 70,18. Perkembangan Indeks pembangunan Manusia Kabupaten Buol selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

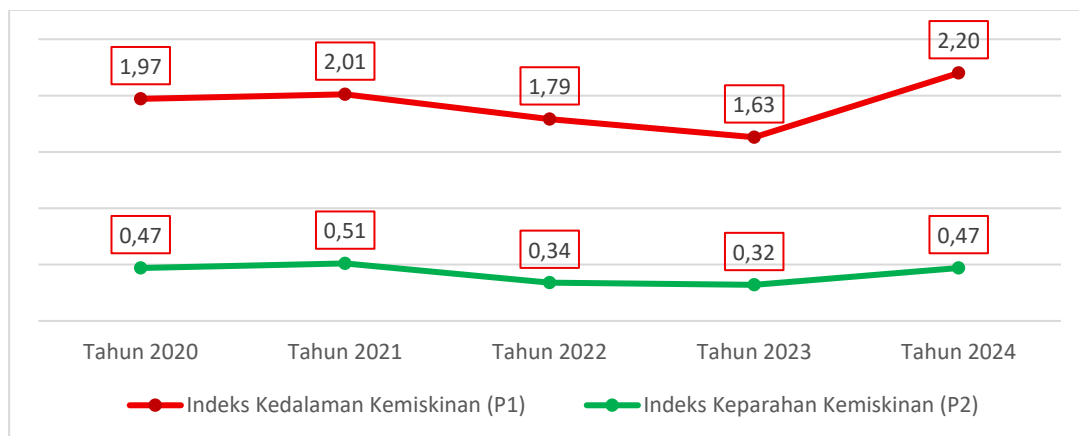


Sumber: BPS Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.28
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

g. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan maka Kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin besar. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Mengukur ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin. Semakin tinggi P2, semakin tidak merata pengeluaran di antara orang miskin; artinya, ada yang sangat jauh di bawah garis kemiskinan, sementara yang lain lebih dekat. Pada tahun 2024 angka Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan sama-sama memiliki nilai yang meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 2,20 meningkat dari tahun 2023 yang hanya sebesar 1,63. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 0,47 meningkat dari tahun 2023 yang hanya sebesar 0,32. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2025

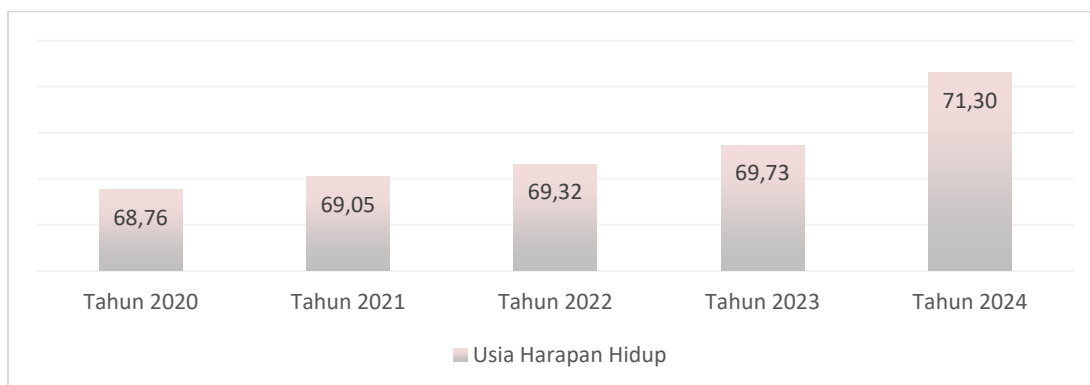
Gambar 2.29

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

2. Kesehatan untuk Semua

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah indikator statistik yang menunjukkan rata-rata perkiraan lama hidup seseorang atau sekelompok orang, jika pola kematian pada periode waktu tertentu tidak berubah. Usia harapan hidup di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2020 hingga Tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 Usia Harapan Hidup Kabupaten Buol sebesar 71,30 tahun meningkat dari tahun 2023 yang hanya sebesar 69,73 tahun. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Buol dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2025

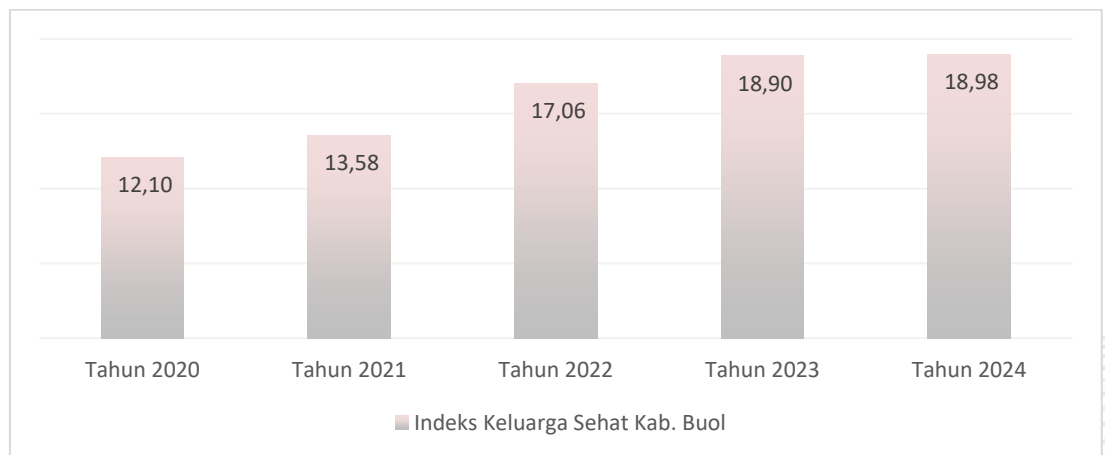
Gambar 2.30

Usia Harapan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2020-2024



b. Indeks Keluarga Sehat

Keluarga Sehat adalah konsep yang menjadi inti dari program Pendekatan Keluarga Sehat yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan 12 indikator keluarga sehat sebagai indeks komposit pembentuk yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai, serta diharapkan banyak dari keluarga yang ada di Indonesia memiliki standar kesehatan yang optimal. Adapun 12 indikator tersebut yaitu: (1) Keluarga mengikuti program KB; (2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; (3) Bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap; (4) Bayi mendapat ASI eksklusif; (5) Balita mendapat pemantauan pertumbuhan; (6) Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar; (7) Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan; (8) Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan; (9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok; (10) Keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (11) Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih; dan (12) Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Buol dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2024 Indeks Keluarga Sehat Kab. Buol sebesar 18,98. Secara detail perkembangan Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:



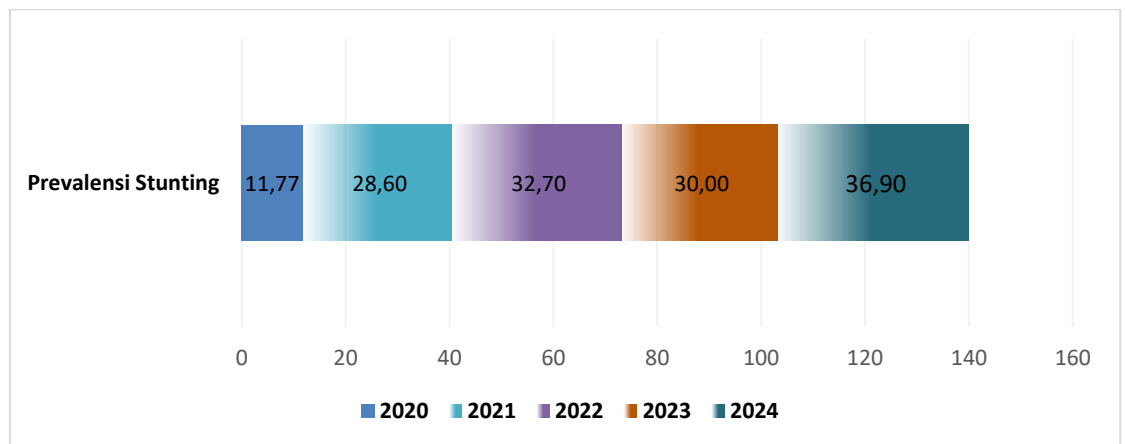
Sumber: BPS Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.31
Indeks Keluarga Sehat Kab. Buol Tahun 2020-2024



c. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan persentase balita yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, terutama selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Berdasarkan data, prevalensi stunting di Kabupaten Buol menunjukkan peningkatan dari 30,00% pada tahun 2023 menjadi 36,90% pada tahun 2024, menjadikannya kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024. Secara rinci prevalensi Stunting di Kabupaten Buol disajikan pada gambar berikut:



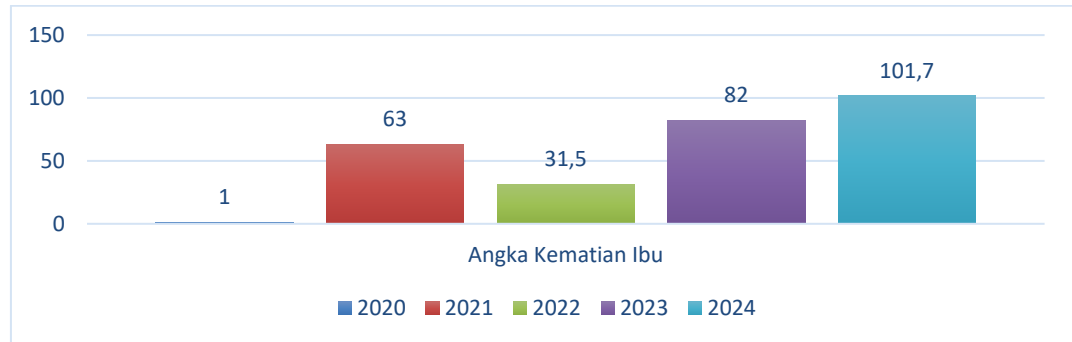
Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol, Tahun 2024

Gambar 2.32
Prevalensi Stunting Di Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

d. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian Ibu adalah jumlah Ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun, dibagi dengan jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dalam kurun waktu yang sama di kali dengan 100.000. Gambar dibawah menunjukkan, angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup sepanjang Tahun 2020-2024 berfluktuatif. Pada Tahun 2020 angka kematian ibu 63 per 100.000 kelahiran hidup, ditahun 2020 menurun drastis menjadi 63 per 100.000 kelahiran hidup, namun pada tahun 2021 kembali turun menjadi 31,5 dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan menjadi 82 per 100.000 kelahiran hidup di Tahun 2023. Pada tahun 2024 angka kematian ibu naik kembali menjadi 101,7 per 100.000 kelahiran hidup. Faktor penyebab meningkatnya AKI di Kabupaten Buol antara lain, kesehatan Ibu, Ketersediaan dokter

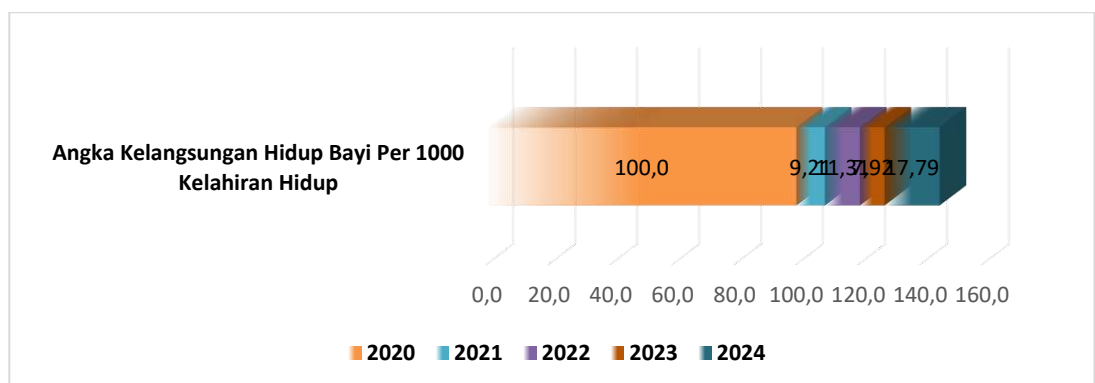
speasialis serta kehadiran fasilitas layanan kesehatan dalam kasus-kasus emergensi. Selain masih ada Ibu yang melahirkan di rumah sehingga cenderung beresiko dibandingkan difasilitas layanan kesehatan. Data angka kematian Ibu disajikan pada gambar berikut:



Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol, Tahun 2025

Gambar 2.33
Angka Kematian Neonatal per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Buol Tahun 2020 – 2024

- e. Angka Kelahiran Hidup Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup
- Angka Kelangsungan Hidup Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kelangsungan Hidup itu dihitung. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang cenderung Meningkat hingga akhir Tahun 2024 yaitu sebesar 17,79 persen. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup dapat dilihat pada gambar berikut:di Kabupaten Buol disajikan pada gambar berikut:



Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol, Tahun 2025

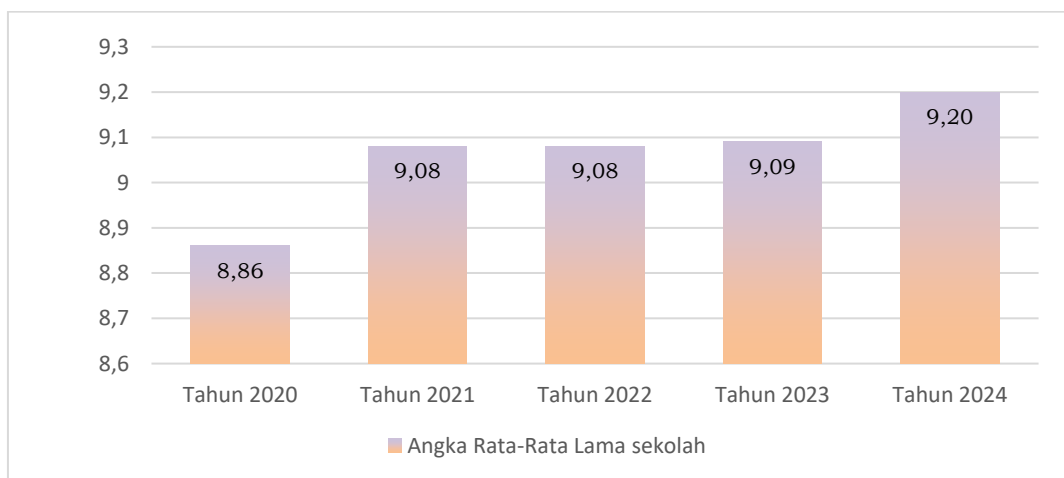
Gambar 2.34
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Buol Tahun 2020-2024



3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) adalah jumlah tahun pendidikan formal rata-rata yang telah ditempuh oleh penduduk pada kelompok usia tertentu di suatu wilayah. Pada Tahun 2024 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buol sebesar 9,20 Tahun meningkat dari tahun 2023 yang hanya sebesar 9,09 Tahun. Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



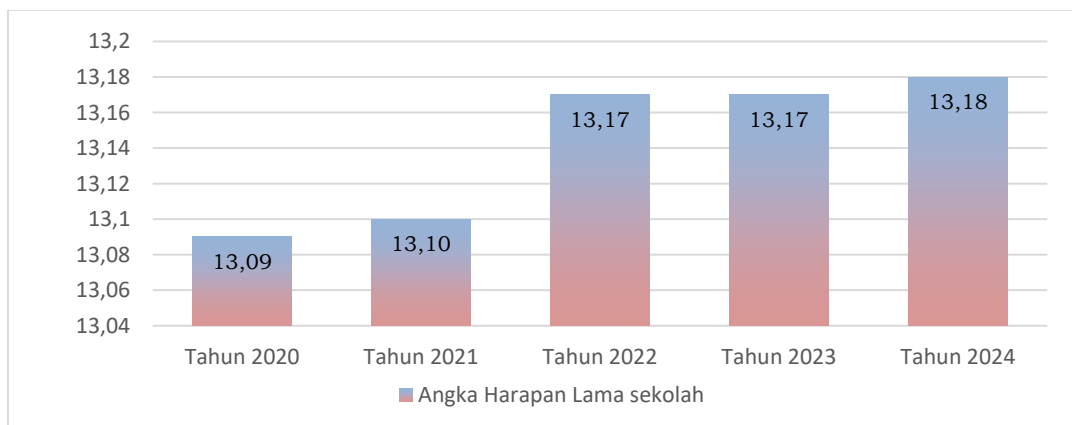
Sumber: BPS Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.35

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

b. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Sekolah Mengukur lamanya sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh seorang anak pada usia tertentu (biasanya 7 tahun) di masa depan, jika pola pendidikan saat ini tidak berubah. Ini adalah cerminan dari potensi atau proyeksi pendidikan di masa depan. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 sebesar 13,18 meningkat dari tahun 2023 yang hanya sebesar 13,17 tahun. Perkembangan Angka Harapan Sekolah dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



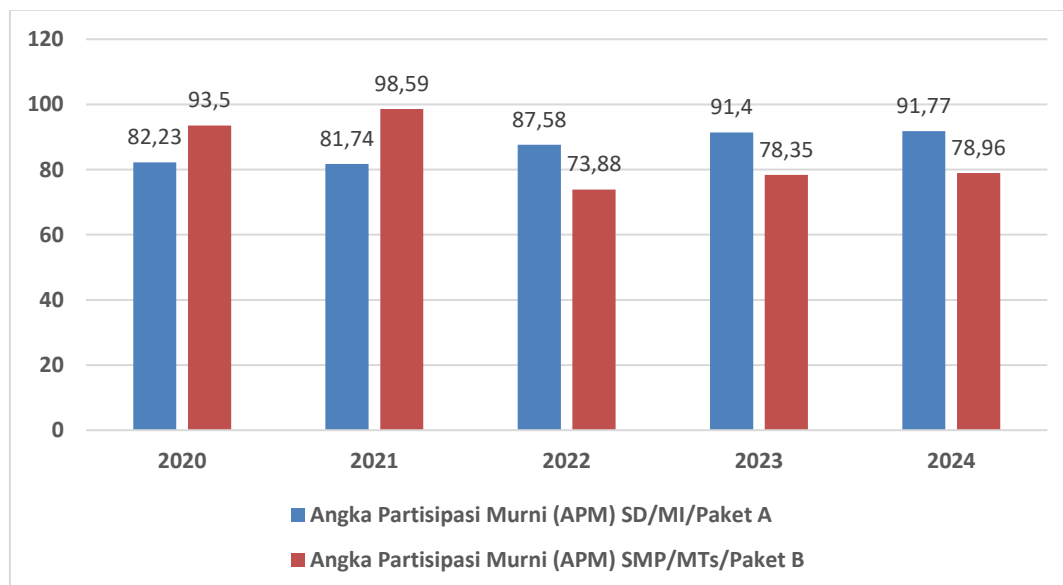
Sumber: BPS Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.36
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

c. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah penduduk pada kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu terhadap total penduduk pada kelompok umur tersebut. Secara umum, APM jenjang SD/MI/Paket A mengalami peningkatan dari 82,23% pada tahun 2020 menjadi 91,77% pada tahun 2024, yang mencerminkan semakin banyaknya anak usia sekolah dasar yang bersekolah sesuai usianya. Sementara itu, APM jenjang SMP/MTs/Paket B menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Nilainya meningkat dari 93,50% pada tahun 2020 menjadi 98,59% pada tahun 2021, namun kemudian menurun hingga 73,88% pada tahun 2022. Setelah itu, angka partisipasi kembali meningkat secara bertahap menjadi 78,96% pada tahun 2024.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi pada jenjang pendidikan dasar telah mencapai tingkat yang relatif tinggi dan stabil, namun pada jenjang pendidikan menengah pertama masih terdapat tantangan dalam mempertahankan angka partisipasi, yang memerlukan perhatian lebih dalam hal pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan. APM (Angka Partisipasi Murni) penduduk di Kabupaten Buol untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs sepanjang Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut:



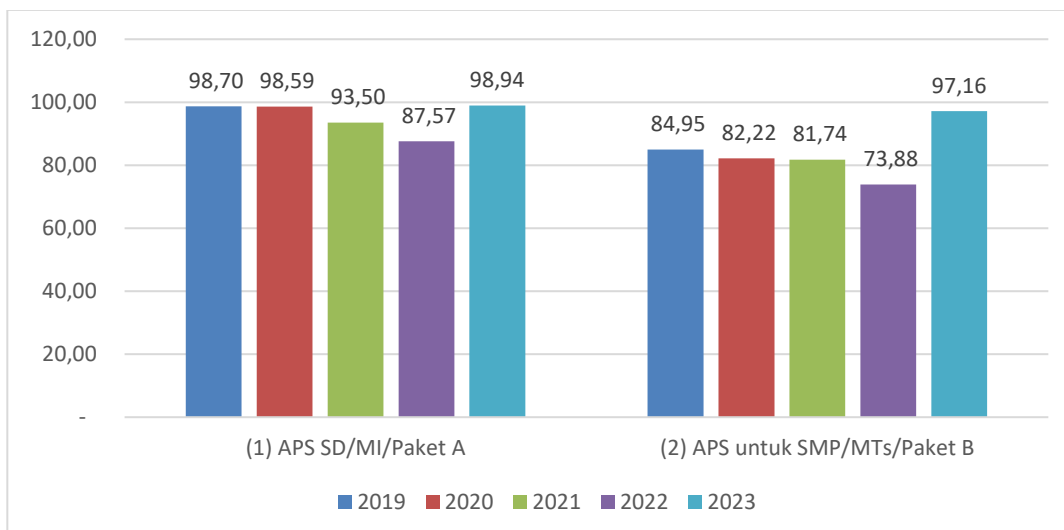
Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Buol Tahun 2025

Gambar 2.37

APM (Perkembangan Angka Partisipasi Murni) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

d. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, yang memperhitungkan perubahan jumlah penduduk usia muda. Sepanjang 2019–2023, APS di Kabupaten Buol menunjukkan tren fluktuatif. Pada jenjang SD/MI/Paket A, APS tercatat sebesar 98,70% (2019), menurun hingga 87,57% (2022), kemudian meningkat kembali menjadi 98,94% (2023). Sementara pada jenjang SMP/MTs/Paket B, APS menurun dari 84,95% (2019) menjadi 73,88% (2022), lalu naik signifikan menjadi 97,16% (2023). Perkembangan ini mencerminkan perbaikan akses dan ketersediaan sarana pendidikan, serta dukungan anggaran dan tenaga pendidik yang semakin baik di Kabupaten Buol. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Buol Tahun 2019-2023 ditampilkan dalam gambar berikut:



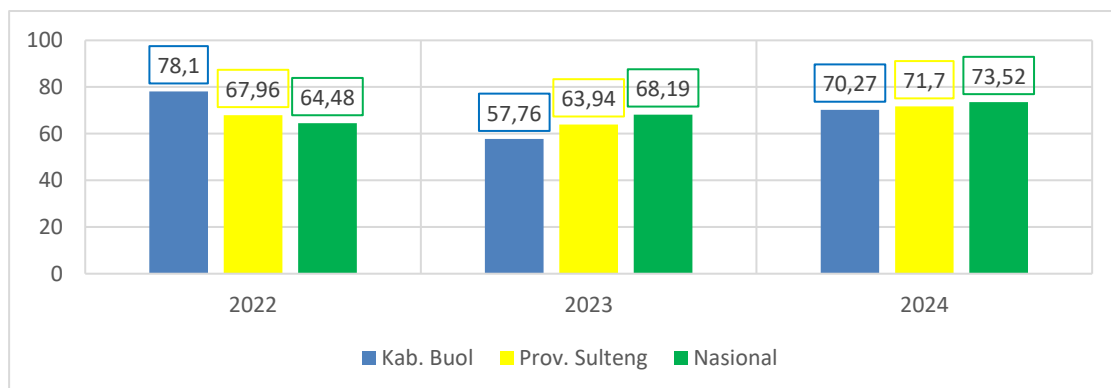
Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buol Tahun 2024

Gambar 2.38
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Buol
Tahun 2019-2023

e. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2022, IPLM Kabupaten Buol mencapai 78,10, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah (67,96) dan nasional (64,48), menunjukkan capaian literasi masyarakat yang relatif baik. Namun, pada tahun 2023, indeks Buol mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 57,76, berada di bawah rata-rata provinsi (63,94) dan nasional (68,19). Selanjutnya, pada 2024, IPLM Kabupaten Buol meningkat kembali menjadi 70,27, meskipun masih sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Tengah (71,70) dan nasional (73,52). Perkembangan ini mengindikasikan bahwa tingkat literasi masyarakat di Kabupaten Buol sempat mengalami penurunan pada 2023, namun mulai pulih kembali pada 2024. Hal tersebut menunjukkan adanya efektivitas program peningkatan literasi, seperti penguatan peran perpustakaan, kegiatan membaca masyarakat, serta dukungan kebijakan literasi daerah yang mulai menunjukkan hasil positif.

Berikut adalah perbandingan nilai IPLM Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional pada tahun 2022 hingga 2024:



Sumber: BPS Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.39

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022-2024

f. Angka Anak Tidak Bersekolah dan Penyandang Disabilitas

Angka anak tidak bersekolah dan penyandang disabilitas masih menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagian anak usia sekolah belum dapat menikmati pendidikan formal karena keterbatasan ekonomi, jarak sekolah yang jauh, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Sementara itu, penyandang disabilitas menghadapi hambatan akses terhadap pendidikan yang inklusif akibat minimnya fasilitas pendukung dan tenaga pendidik yang terlatih. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memastikan setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan yang layak dan bermutu. Berdasarkan data Pusdatin Kemendikbud Tahun 2025 bahwa jumlah Anak Tidak Sekolah Dikabupaten Buol sebanyak 1.179 Anak. Jumlah ini menjadi jumlah 2 terbawah di Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah 1.179 ini dijabarkan sebagai berikut:

- Usia <7 sebanyak 0 anak
- Usia 7-12 sebanyak 290 anak
- Usia 13-15 sebanyak 216 anak
- Usia >15 sebanyak 673 anak



Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemerataan akses pendidikan, terutama bagi kelompok usia remaja. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya terpadu melalui peningkatan program kejar paket A, B, dan C, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta perluasan akses sekolah di daerah terpencil. Selain itu, penguatan peran sekolah inklusif dan penyuluhan kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan berkelanjutan perlu digalakkan agar setiap anak di Kabupaten Buol, tanpa terkecuali, dapat memperoleh hak pendidikan yang layak dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Selanjutnya, anak penyandang disabilitas yang berusia antara 5 hingga 18 tahun merupakan anak yang mengalami keterbatasan fisik mental, intelektual, atau sensorik yang menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas atau berinteraksi dengan lingkungan serta dalam hal mengakses pendidikan. Berdasarkan data jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Buol, tercatat sebanyak 1.217 jiwa dengan berbagai ragam disabilitas. Jenis disabilitas yang paling banyak adalah tuna daksa atau cacat tubuh sebanyak 259 orang, diikuti oleh tuna netra sebanyak 204 orang, serta penyandang cacat fisik dan mental sebanyak 224 orang. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat dengan kebutuhan khusus yang memerlukan perhatian dalam hal aksesibilitas, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kesempatan kerja yang inklusif. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas, penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas, serta penguatan program pemberdayaan sosial dan ekonomi agar mereka dapat hidup mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Berikut adalah jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Buol tahun 2024:

Tabel 2.3

Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buol Tahun 2024

No	Ragam Disabilitas	Jumlah
1	Tuna daksa/cacat tubuh	259
2	Tuna netra/buta	204
3	Tuna rungu	144
4	Tuna wicara	76



No	Ragam Disabilitas	Jumlah
5	Tuna rungu & wicara	40
6	Tuna netra & cacat tubuh	45
7	Tuna netra, rungu & wicara	17
8	Tuna rungu, wicara & cacat tubuh	23
9	Tuna rungu, wicara, netra & cacat tubuh	18
10	Cacat mental retardasi	114
11	Mantan penderita gangguan jiwa	53
12	Cacat fisik & mental	224
Jumlah		1217

Sumber: Dinas Sosial (Data DTKS 2024)

4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial Adaptif adalah sebuah pendekatan dalam sistem perlindungan sosial yang dirancang untuk merespons berbagai krisis dan guncangan, baik yang berskala individu, keluarga, maupun masif seperti pandemi atau bencana alam. Tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan masyarakat rentan dan mencegah mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perlindungan terhadap pekerja bukan penerima upah yang ada pada sektor informal membutuhkan perlindungan yang dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi guna mewujudkan kesejahteraan pekerja bukan penerima upah dan keluarganya. Pekerja bukan penerima upah dan keluarganya sebagai kelompok masyarakat di Sulawesi Tengah yang rentan terhadap hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan membutuhkan dan perhatian Pemerintah meninggal dunia Daerah melalui pengembangan Sistem Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Peta Universal Coverage Jamsostek Kabupaten Buol sampai tahun 2025 seperti pada tabel berikut:



Tabel 2.4
Peta Universal Coverage Jamsostek Kabupaten Buol sampai Tahun 2025

No	Jenis Jamsostek	Kab. Buol	Prov. Sulawesi Tengah
1	Formal		
a	Semesta	15.974	392.002
b	Realisasi	11.308	269.300
c	%	71%	69%
d	Selisih	-4.666	-122.702
2	Informal		
a	Semesta	44.711	853.045
b	Realisasi	6.884	110.293
c	%	15%	13%
d	Selisih	-37.827	-742.752
3	Total		
a	Semesta	60.685	1.245.047
b	Realisasi	18.192	379.593
c	%	30%	30%
d	Selisih	-42.493	-865.454

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Prov. Sulteng Tahun 2025

Cakupan Kepesertaan jaminan Sosial ketenagakerjaan Formal Kabupaten Buol sampai tahun 2025 ditargetkan 15.972 peserta (71%) masih ada yang belum menjadi peserta sebesar 4.666 jiwa. Sedangkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan informal sampai dengan tahun 2025 ditargetkan 44.711 peserta (15%) masih ada yang belum menjadi peserta sebesar 37.827 jiwa. Total target cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Buol sebesar 60.685 peserta (30%) masih ada yang belum menjadi peserta sebesar 42.493 jiwa.

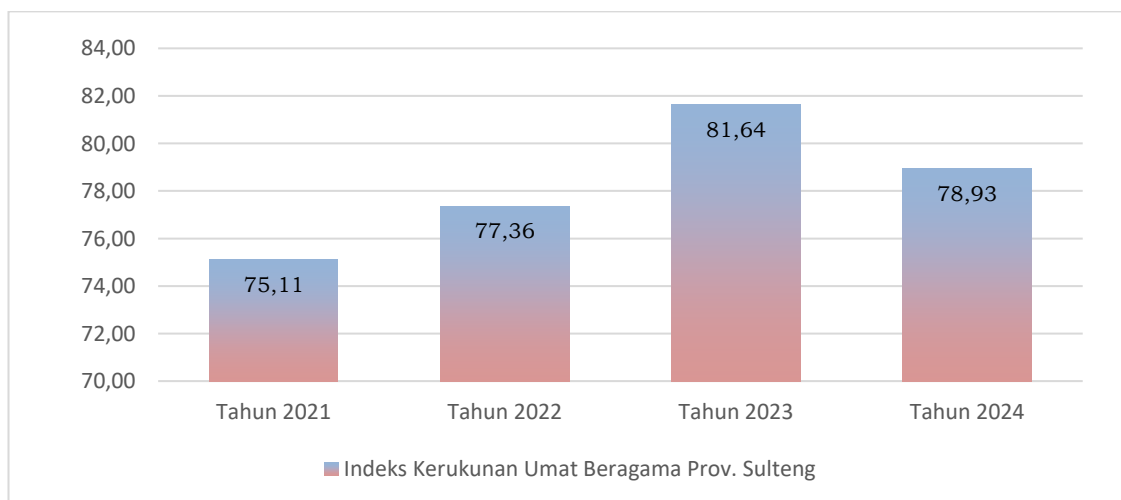
Salah satu yang menjadi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan adalah pegawai Non ASN dimana di Kabupaten Buol sebanyak 1.178 peserta (100%). Kemudian untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perangkat Daerah, BPD, RT/RW Kabupaten Buol Tahun 2025 sebanyak 1.495 peserta dan 859 yang belum menjadi peserta.



5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah sebuah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai kondisi kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Survei ini dilakukan secara berkala oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui Badan Litbang dan Diklat. Tujuan Perhitungan IKUB adalah memantau kondisi kerukunan antarumat beragama secara nasional dan regional. Tiga Dimensi Utama IKUB adalah Toleransi, Kesetaraan dan Kerja Sama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren positif dengan fluktuasi ringan. Pada 2021 nilainya sebesar 75,11, meningkat menjadi 77,36 pada 2022, dan mencapai puncak 81,64 pada 2023. Namun, pada 2024 sedikit menurun menjadi 78,93. Secara keseluruhan, tingkat kerukunan antarumat beragama di Sulawesi Tengah tetap berada pada kategori tinggi dan relatif stabil, mencerminkan hubungan sosial yang harmonis di masyarakat. Berikut adalah Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024



Sumber: Kementerian Agama Tahun 2024

Gambar 2.40

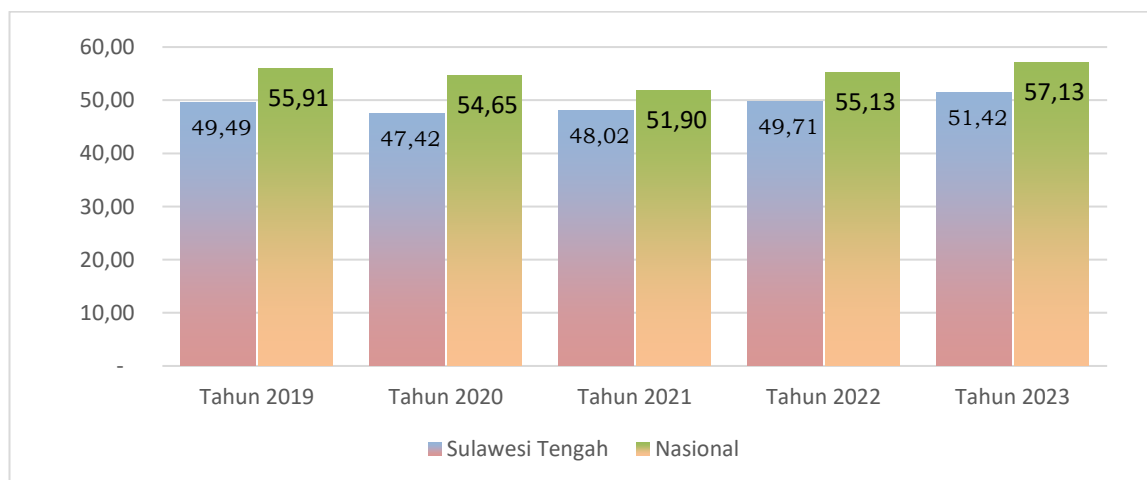
Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021-2024

b. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah sebuah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai capaian pembangunan kebudayaan



di tingkat nasional dan provinsi di Indonesia. Pada tahun 2022, nilai indeks di Sulawesi Tengah mencapai 49,71, sedangkan tingkat nasional sebesar 55,13. Tahun berikutnya, 2023, indeks Sulawesi Tengah meningkat menjadi 51,42, sementara nasional juga naik menjadi 57,13. Secara keseluruhan, kinerja Sulawesi Tengah menunjukkan tren perbaikan, meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional, menandakan perlunya penguatan kebijakan dan program untuk mengejar kesetaraan capaian nasional. Berikut Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional dari 2019-2023:



Sumber: Kementerian Kebudayaan RI

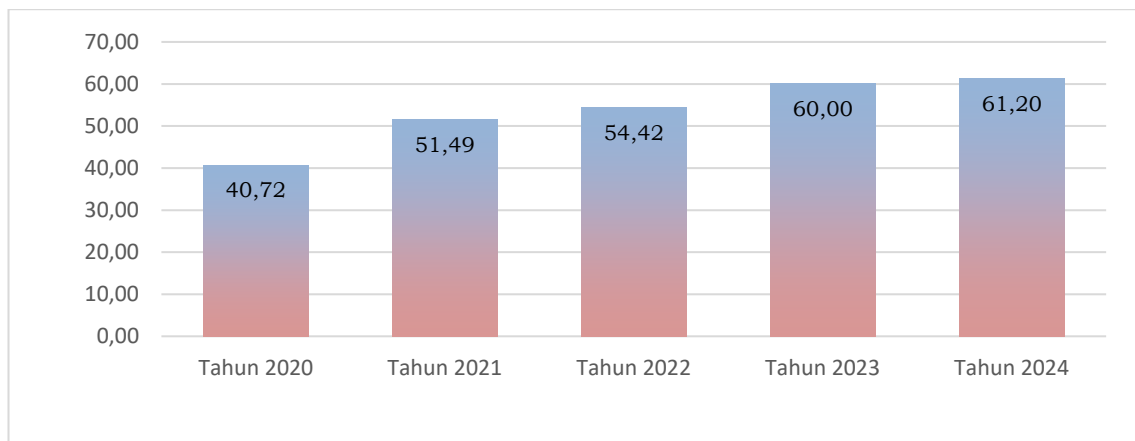
Gambar 2.41
Indeks Pembangunan Kebudayaan Prov. Sulteng dan Nasional
Tahun 2019-2023

6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) adalah alat ukur yang sedang dikembangkan oleh pemerintah untuk menilai sejauh mana kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga telah tercapai. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebesar 60,00, menunjukkan kondisi kualitas keluarga yang tergolong cukup baik dan terus membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2024, indeks ini mengalami peningkatan menjadi 61,20, yang mengindikasikan adanya kemajuan dalam ketahanan, kemandirian, serta kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, kenaikan IPKK antara 2023 dan 2024 menggambarkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan keluarga, seperti peningkatan pendidikan dan kesehatan keluarga, penguatan

ekonomi rumah tangga, serta peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam membina keluarga berkualitas dan berketahanan sosial. Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga Prov, Sulteng 2020-2024 sebagai berikut:



Sumber: BKKBN, 2025

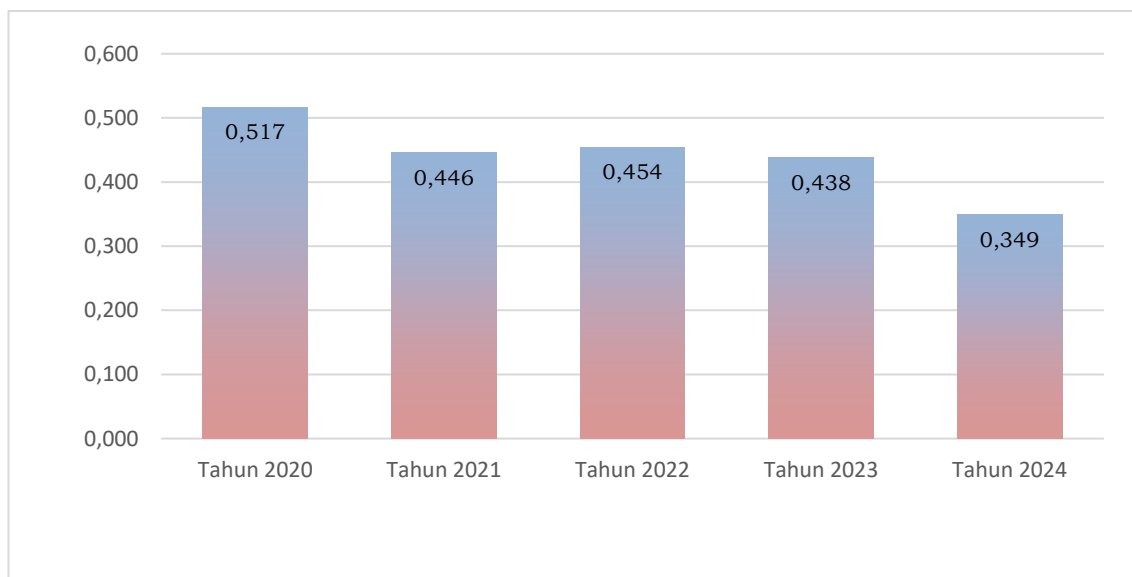
Gambar 2.42
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Prov. Sulteng

b. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah sebuah indeks yang mengukur kerugian dalam pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan (ketimpangan) antara laki-laki dan perempuan. IKG bukanlah ukuran untuk mengukur sejauh mana perempuan lebih baik atau lebih buruk dari laki-laki. Sebaliknya, IKG mengukur sejauh mana potensi pembangunan manusia "hilang" karena adanya kesenjangan gender. Semakin tinggi nilai IKG, semakin besar ketimpangan gender yang terjadi, yang berarti semakin banyak potensi pembangunan yang tidak optimal. Sebaliknya, semakin rendah nilai IKG, semakin kecil ketimpangan yang ada, dan semakin setara pencapaian antara laki-laki dan perempuan.

Dalam 5 Tahun terakhir IKG Kabupaten Buol Cenderung menurun. Pada tahun 2023, Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Buol berada pada angka 0,438, menunjukkan masih adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi. Namun pada tahun 2024, nilai indeks ini menurun menjadi 0,349, yang menandakan adanya perbaikan kondisi kesetaraan gender di daerah tersebut. Secara keseluruhan, penurunan nilai indeks dari tahun 2023 ke 2024 menggambarkan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Buol semakin berkurang, dan upaya peningkatan peran

serta perempuan dalam pembangunan mulai menunjukkan hasil positif. Perkembangan IKG Kabupaten Buol 2020-2024 sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2025

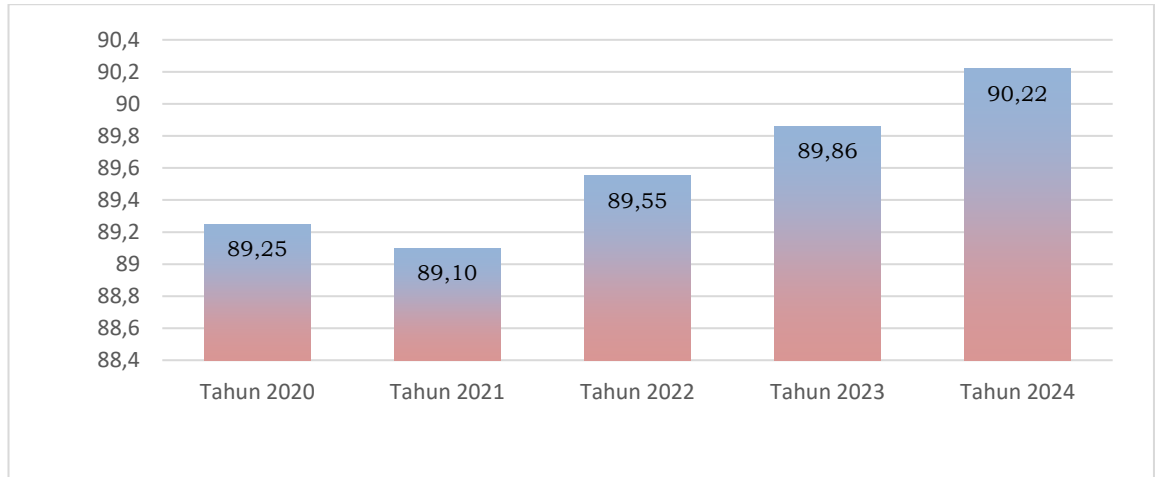
Gambar 2.43
Indeks Ketimpangan Gender Kab. Buol Tahun 2020-2024

c. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator komposit yang mengukur pencapaian pembangunan manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan cerminan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi disesuaikan untuk menunjukkan capaian pembangunan pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Nilai IPG berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati angka 100, berarti semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan adanya kesetaraan. Sebaliknya, semakin jauh dari 100, semakin besar ketimpangan yang terjadi. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Buol mencapai 89,86, dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 90,22. Kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Secara keseluruhan, peningkatan IPG tersebut menggambarkan bahwa pembangunan di Kabupaten Buol semakin inklusif dan responsif terhadap

gender, di mana perempuan memperoleh akses dan kesempatan yang semakin setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah perkembangan IPG Kabupaten Buol dari Tahun 2020-2024:

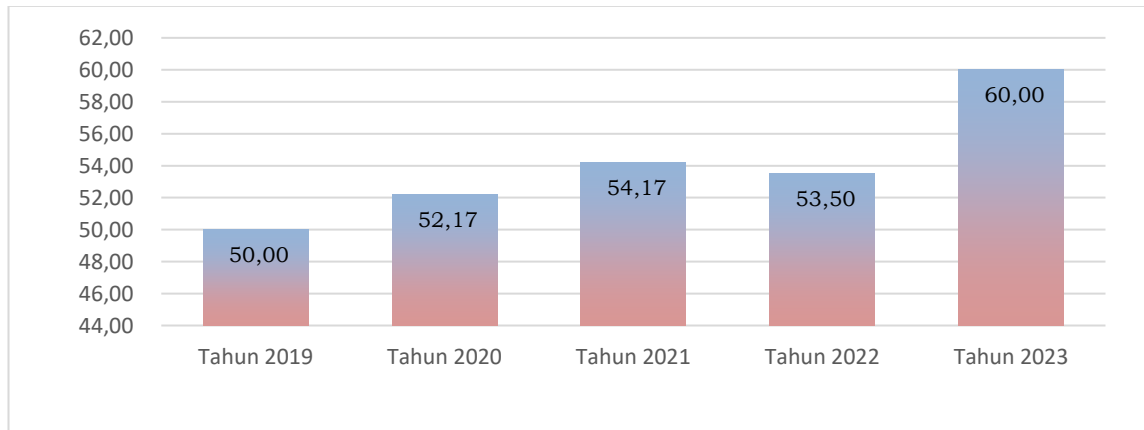


Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2025

Gambar 2.44
Indeks Pembangunan Gender Kab. Buol Tahun 2020-2024

d. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kepemudaan di suatu wilayah, baik di tingkat nasional maupun provinsi hingga kabupaten. Instrumen ini memberikan gambaran tentang kemajuan yang telah dicapai dalam memberdayakan pemuda dan mempersiapkan mereka sebagai aset bangsa di masa depan. IPP berfungsi sebagai indikator kunci untuk memantau progres pembangunan pemuda di Indonesia, memastikan bahwa bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nilai IPP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 60,00 meningkat dari tahun 2023 yang hanya sebesar 53,50. Berikut perkembangan IPP Provinsi Sulawesi Tengah dari 2019-2023:



Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Gambar 2.45
Indeks Pembangunan Pemuda Prov. Sulteng Tahun 2020-2024

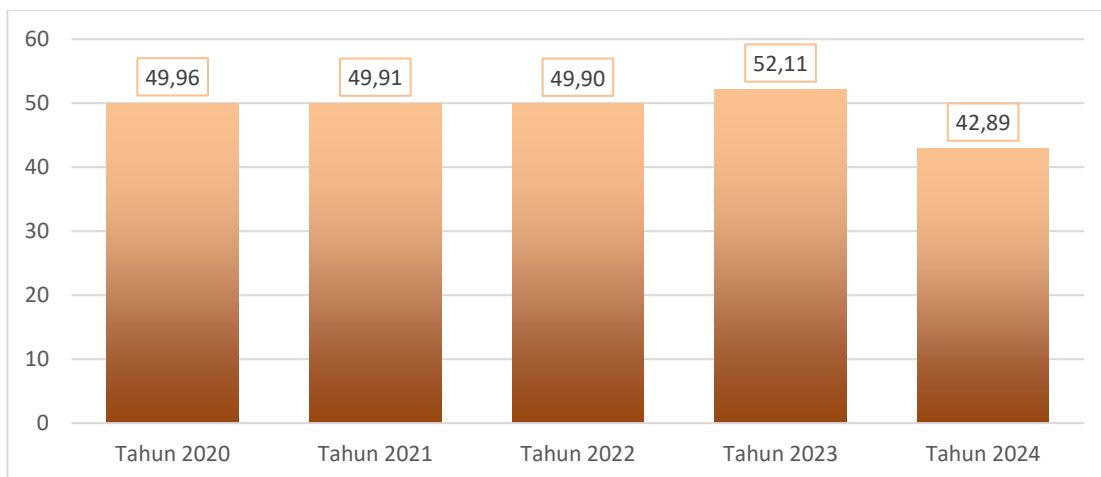
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi persentase angka ketergantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Jika dilihat dari komposisi penduduknya, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Buol merupakan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun), baik bagi laki-laki, maupun perempuan.

Kondisi ini berpengaruh pada angka ketergantungan yang merupakan indikator kependudukan yang digunakan untuk mengukur beban yang ditanggung penduduk usia produktif terhadap usia non produktif (usia dibawah 5 tahun dan usia diatas 64 tahun). Pada tahun 2024, angka ketergantungan Kabupaten Buol sebesar 42,89 Artinya, dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 42 penduduk usia tidak produktif. Angka ini relatif menurun dibanding tahun 2023 yang sebesar 52,11. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai angka ketergantungan penduduk Kabupaten Buol selama kurun waktu tahun 2020-2024:



Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2025, Data Diolah Kembali

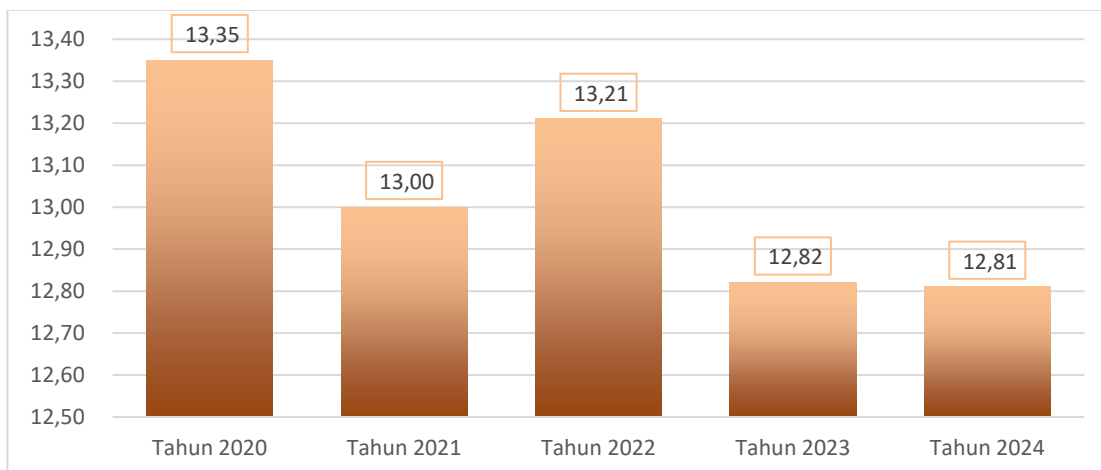
Gambar 2.46
Angka Ketergantungan Kabupaten Buol Tahun 2020-2024 (%)

2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan memainkan peran penting dalam perekonomian daerah dengan memberikan kontribusi utama terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi. Sektor ini juga mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya, seperti sektor jasa dan pertanian. Pada tahun 2023, rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Buol tercatat sebesar 12,82 persen, dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 12,81 persen.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB Kabupaten Buol relatif stabil, meskipun cenderung mengalami perlambatan kecil dalam dua tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan sektor hilir dan peningkatan nilai tambah produksi lokal agar industri pengolahan dapat kembali menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Perkembangan Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Buol selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:



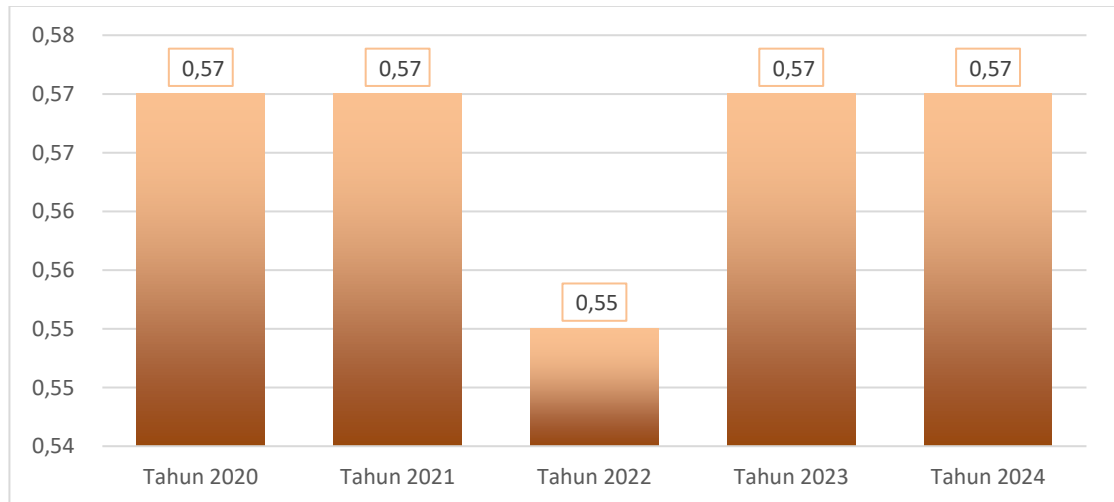
Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2025, Data Diolah Kembali

Gambar 2.47
Distribusi PDRB Industri Pengolahan ADHB Kabupaten Buol Tahun 2020-2024 (%)

b. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Sektor akomodasi dan makan minum memainkan peran penting dalam perekonomian daerah, terutama dalam sektor pariwisata. Sektor ini diharapkan mampu menyediakan kebutuhan dasar wisatawan, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pendapatan daerah. Selain itu, akomodasi dan makan minum juga mendukung sektor-sektor lain seperti transportasi dan perdagangan. Pada tahun 2023 dan 2024, rasio PDRB sektor akomodasi, makan, dan minum di Kabupaten Buol tercatat stabil di angka 0,57 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor tersebut terhadap total PDRB daerah masih relatif kecil dan belum mengalami pertumbuhan berarti dalam dua tahun terakhir. Meski demikian, stabilitas angka ini menandakan adanya konsistensi aktivitas ekonomi di bidang jasa kuliner dan perhotelan, yang berpotensi ditingkatkan melalui pengembangan pariwisata dan peningkatan kualitas layanan usaha lokal. Perkembangan Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Buol Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

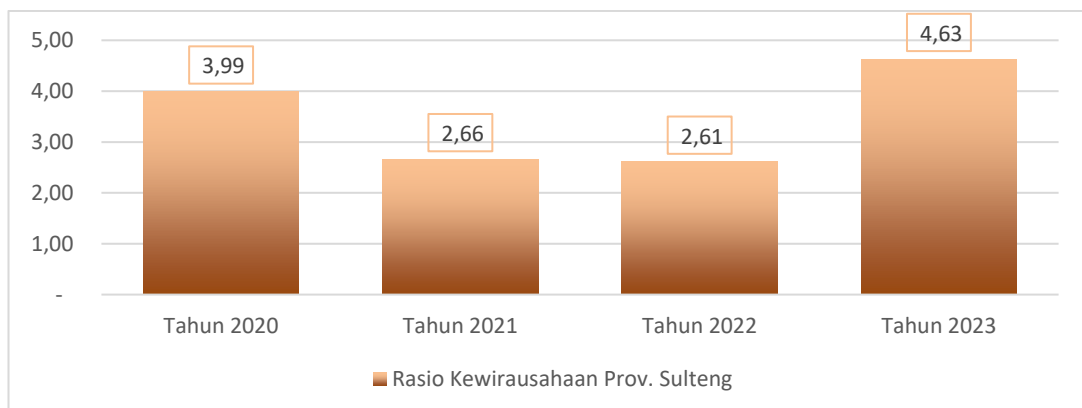


Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2025, Data Diolah Kembali

Gambar 2.48
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Buol
Tahun 2020-2024 (%)

c. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak penduduk suatu negara yang memiliki atau menjalankan usaha. Rasio ini sering digunakan sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur kemajuan ekonomi dan daya saing suatu negara. Semakin tinggi rasio kewirausahaan, semakin dinamis dan inovatif perekonomian suatu negara. Angka kewirausahaan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sebesar 4,63%. Perkembangan Rasio Kewirausahaan Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



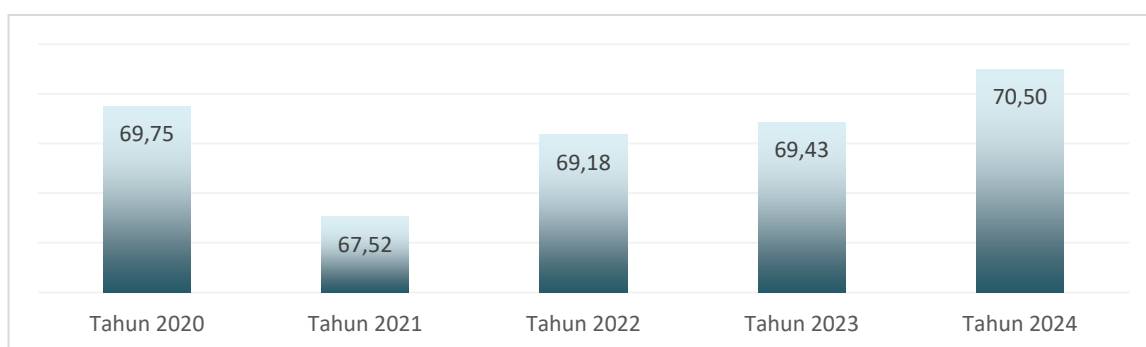
Sumber: Kemenkop UKM, 2024

Gambar 2.49
Rasio Kewirausahaan Provinsi Sulteng Tahun 2020-2024 (%)



d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk pada usia kerja (penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun keatas yang berpotensi memproduksi barang dan jasa). Di Tahun 2023, TPAK sudah berada dalam tren positif, tercatat sebesar 69,43%, melanjutkan proses pemulihan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, pencapaian yang paling menonjol terlihat di Tahun 2024. Pada tahun ini, TPAK mengalami lonjakan signifikan, melampaui semua angka sebelumnya hingga mencapai 70,50%. Kenaikan ini tidak hanya melanjutkan tren positif, tetapi juga berhasil membawa tingkat partisipasi angkatan kerja ke titik tertinggi dalam periode yang diamati, mengindikasikan semakin besarnya kontribusi penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja lima tahun terakhir Kabupaten Buol dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2025, Data Diolah Kembali

Gambar 2.50
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buol
Tahun 2020-2024 (%)

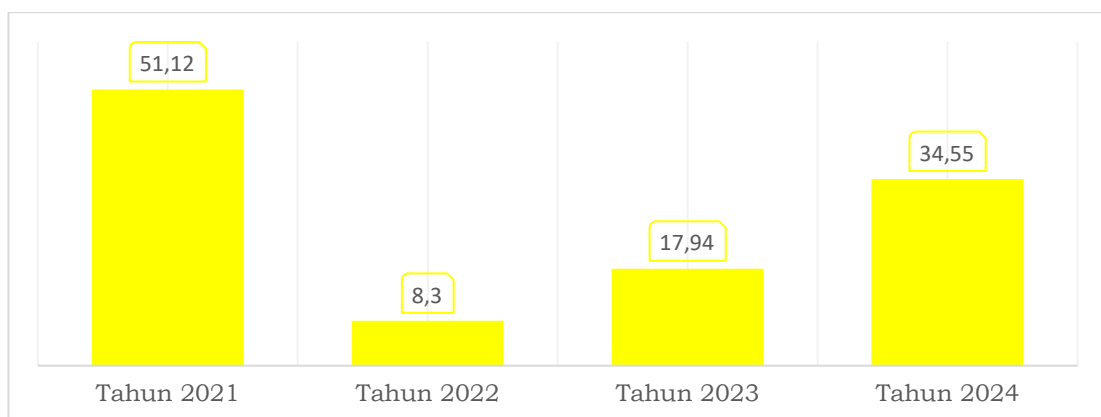
e. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kinerja Indeks Inovasi Daerah pada periode 2021 hingga 2024 menunjukkan volatilitas yang tinggi. Pada Tahun 2021, Indeks Inovasi Daerah berada pada level optimal dengan capaian 51,12, menandai puncak kinerja inovasi daerah pada periode tersebut.

Namun, terjadi kontraksi kinerja yang signifikan pada tahun berikutnya. Tahun 2022 mencatatkan penurunan drastis, menyebabkan indeks terperosok

hingga titik terendah di angka 8,3. Koreksi tajam ini memerlukan perhatian khusus dan evaluasi mendalam terkait faktor-faktor penyebab kemerosotan inovasi daerah.

Meskipun demikian, dua tahun terakhir menunjukkan pemulihan yang progresif. Di Tahun 2023, terjadi peningkatan kinerja yang mulai mengangkat indeks kembali ke angka 17,94. Akselerasi pemulihan ini mencapai momentum terbaiknya pada Tahun 2024, di mana Indeks Inovasi Daerah melonjak secara substansial hingga mencapai 34,55. Capaian di tahun 2024 merefleksikan upaya keras dalam revitalisasi program inovasi daerah, meskipun target strategis untuk kembali pada level kinerja 2021 masih menjadi pekerjaan rumah di masa mendatang. Adapun nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Buol dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kemendagri, 2025

Gambar 2.51
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021-2024

3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

a. Analisis Data Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Buol

Indeks Ekonomi Hijau (IEH) merupakan suatu alat ukur yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. IEH mengintegrasikan berbagai indikator yang mencerminkan upaya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, efisiensi sumber daya, dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Buol, IEH menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana aktivitas ekonomi telah bertransformasi menuju model yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Meskipun data spesifik



untuk Kabupaten Buol tidak tersedia, kita dapat melakukan analisis diagnostik secara umum berdasarkan tren IEH Indonesia dan mengaitkannya dengan konteks Kabupaten Buol:

- 1) Ketergantungan pada Sumber Daya Alam: Kabupaten Buol memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam ini dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi hijau dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
- 2) Peningkatan Efisiensi Energi: Efisiensi energi merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai ekonomi hijau. Upaya untuk meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor, seperti transportasi, industri, dan rumah tangga, perlu terus ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi energi terbarukan dan penerapan praktik-praktik hemat energi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan.
- 3) Pengelolaan Sampah dan Limbah: Pengelolaan sampah dan limbah yang efektif dan berkelanjutan merupakan tantangan besar bagi Kabupaten Buol. Peningkatan sistem pengelolaan sampah, termasuk pengurangan sampah di sumber, daur ulang, dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah yang tepat, perlu menjadi prioritas. Hal ini akan membantu mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- 4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola: Penguatan kelembagaan dan tata kelola lingkungan merupakan faktor kunci dalam mencapai ekonomi hijau. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang efektif, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buol.

b. Analisis Data Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Buol



Ekonomi Biru (Blue Economy) adalah kerangka kerja pembangunan ekonomi yang didasarkan pada aktivitas kelautan dan pesisir yang inovatif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Buol, yang memiliki garis pantai dan potensi perikanan yang besar, IEB menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana sektor kelautan dan perikanan telah dikelola secara optimal, efisien, dan ramah lingkungan. Poin penting diagnostik utama terkait potensi dan tantangan IEB di Kabupaten Buol

Angka Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Buol Tahun 2024 sebesar 43,02 dengan kategori Kurang. Nilai 43,02 mengindikasikan bahwa pelaksanaan konsep Ekonomi Biru di Kabupaten Buol masih menghadapi tantangan besar dan belum optimal. Singkatnya, IEB 43,02 menunjukkan bahwa Kabupaten Buol memiliki potensi biru yang besar, tetapi strategi pengelolaan saat ini belum cukup kuat untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Dibutuhkan pergeseran fokus dari kuantitas eksploitasi ke kualitas, efisiensi, dan konsep

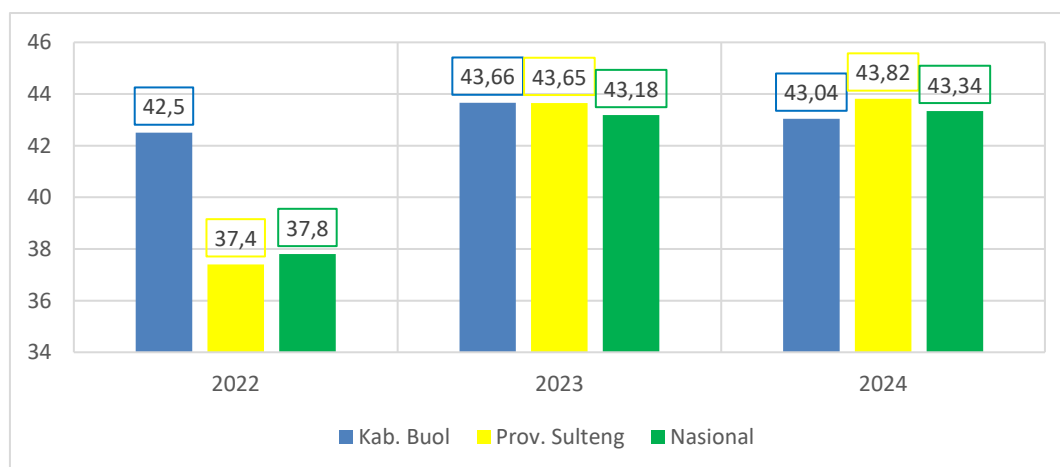
4. Transformasi Digital

a. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Masyarakat digital merupakan masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan teknologi digital, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas menjadi hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua lini kehidupannya mulai dari produksi, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya.

Pengukuran IMDI merupakan salah satu konsep penting untuk melihat kondisi masyarakat digital di Indonesia secara menyeluruh dari skala nasional hingga tingkat kabupaten/kota, sehingga perlu disusun suatu metode pengukuran yang mampu mencakup berbagai aspek terkait keterampilan digital dan pemanfaatannya. Pada tahun 2024, nilai IMDI Kabupaten Buol sedikit menurun menjadi 43,04, namun masih berada pada tingkat yang kompetitif dengan Provinsi Sulawesi Tengah (43,82) dan

nasional (43,34). Berikut adalah nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2022-2024:



Sumber: Buku Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2024

Gambar 2.52

Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tahun 2022-2024

b. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

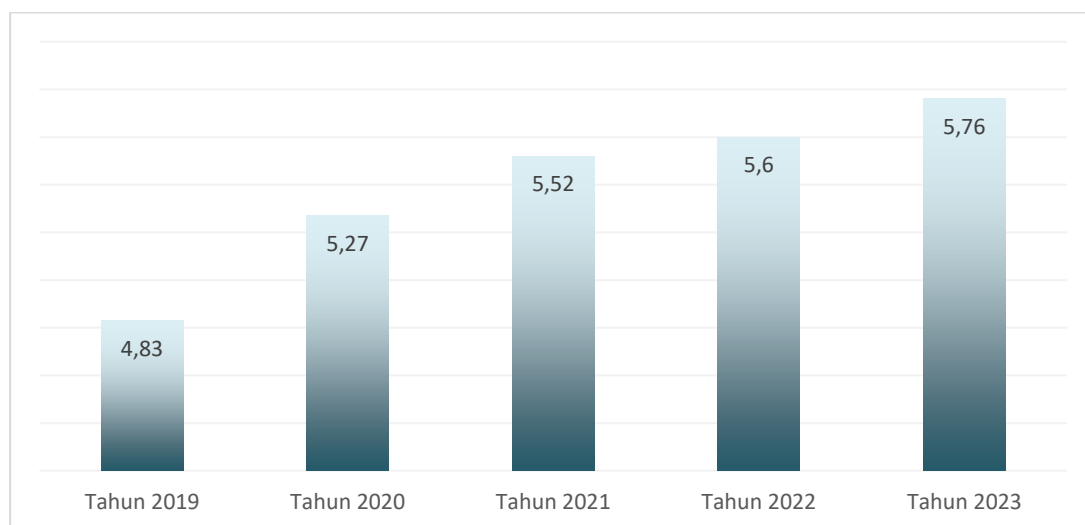
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah sebuah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan TIK di suatu wilayah atau negara. Indeks ini merupakan alat ukur standar yang dapat digunakan untuk membandingkan capaian pembangunan TIK antarwaktu dan antarwilayah. IP-TIK disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yang masing-masing memiliki beberapa indikator. Nilai indeks berada pada skala 0 hingga 10. Semakin tinggi nilainya, semakin baik pembangunan TIK di wilayah tersebut. Kinerja Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Provinsi Sulteng selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan positif secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2019, IP-TIK memulai periode pengamatan di angka 4,83. Kinerja ini kemudian menunjukkan peningkatan konsisten dari tahun ke tahun. Di Tahun 2020, indeks naik menjadi 5,27, dan terus menguat di Tahun 2021 mencapai 5,52.

Meskipun terjadi perlambatan kenaikan pada Tahun 2022 dengan capaian 5,60, momentum peningkatan kembali terakselerasi di tahun

terakhir. Tahun 2023 mencatatkan capaian tertinggi dalam periode ini, di mana IP-TIK berhasil mencapai angka 5,76.

Secara keseluruhan, tren yang berkelanjutan dan tanpa penurunan ini mengindikasikan keberhasilan program-program yang berfokus pada pengembangan infrastruktur, akses, dan pemanfaatan TIK di Provinsi Sulteng, dengan capaian tertinggi di tahun 2023. Perkembangan IP-TIK Provinsi Sulawesi Tengah dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut:



Sumber: BPS Tahun 2025, Data Diolah Kembali

Gambar 2.53
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023 (%)

c. Pengelolaan Portal Layanan Perangkat Daerah Kabupaten Buol

Pengelolaan Portal Layanan Perangkat Daerah Kabupaten Buol merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui penyediaan dan pengelolaan website resmi di setiap perangkat daerah. Portal ini berfungsi sebagai sarana informasi dan layanan publik yang transparan, mudah diakses, serta mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Buol. Pengelolaan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah dengan koordinasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian sebagai instansi pembina, meliputi pengembangan konten, pemeliharaan sistem, keamanan data, serta pembaruan informasi secara berkala. Melalui pengelolaan portal layanan yang baik, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memberikan layanan publik yang cepat,



transparan, dan terintegrasi, sehingga mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Berikut adalah daftar rekapan Pengelolaan Portal Layanan Perangkat Daerah Kabupaten Buol Tahun 2025:

Tabel 2.5

Pengelolaan Portal Layanan Perangkat Daerah Kabupaten Buol Tahun 2025

	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja	Aktif	Belum Aktif	Proses Pembuatan	Alamat Website
1	Sekretariat Daerah				
2	Sekretariat DPRD	√			dprd.buolkab.go.id
3	Inspektorat Daerah	√			inspektorat.buolkab.go.id
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√			dikbud-buolkab.id
5	Dinas Kesehatan				
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			√	pupr.buolkab.go.id
7	Dinas Perhubungan	√			dishub.buolkab.go.id
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			√	disperkimta.buolkab.go.id
9	Satuan Polisi Pamong Praja			√	satpolpp.buolkab.go.id
10	Dinas Sosial	√			dinsos.buolkab.go.id
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		√		distan-kp.buolkab.go.id
13	Dinas Lingkungan Hidup				
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		√		disdukcapil.buolkab.go.id
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa				



Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja		Aktif	Belum Aktif	Proses Pembuatan	Alamat Website
16	Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan			√	diskumperindag.buolkab.go.id
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
18	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata			√	disporapar.buolkab.go.id
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
20	Dinas Perikanan			√	diskan.buolkab.go.id
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	√			diskominfo.buolkab.go.id
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan LITBANG	√			bappeda.buolkab.go.id
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	√			bpkad.buolkab.go.id
25	Badan Pendapatan Daerah	√			bapenda.buolkab.go.id
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	√			bkpsdm.buolkab.go.id
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			√	bpbd.buolkab.go.id
29	RSUD Mokoyurli				



Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja		Aktif	Belum Aktif	Proses Pembuatan	Alamat Website
30	RSUD Pratama			√	rspratama.buolkab.go.id

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Buol

d. Area Blankspot di Kabupaten Buol

Area *blankspot* di Kabupaten Buol merupakan wilayah yang belum terjangkau layanan jaringan telekomunikasi, baik sinyal seluler maupun internet, umumnya terdapat di daerah pedesaan, perbukitan, dan kawasan terpencil dengan kondisi geografis yang sulit. Keberadaan area ini menghambat akses masyarakat terhadap informasi, layanan publik digital, pendidikan, serta kegiatan ekonomi berbasis daring. Pemerintah Kabupaten Buol bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator seluler terus berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS), pemetaan wilayah blankspot, dan perluasan jaringan 4G hingga ke desa-desa, sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat menikmati akses komunikasi dan internet secara merata sebagai bagian dari percepatan transformasi digital daerah. Berikut adalah wilayah blankspot yang ada di Kabupaten Buol Tahun 2025:



Tabel 2.6
Area Blankspot di Kabupaten Buol Tahun 2025

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	NAMA LOKASI	DESKRIPSI LOKASI	LATITUDE	LONGITUDE	KODE LOKASI
1	Gadung	Pandangan	Desa Pandangan	Kompleks Rumah Sakit Pratama	1.04006	121.696771	7205092011
2	Gadung	Bulagidun	Desa Bulagidun	Dekat lapangan hijau bulagidun	1.0686111	121.7238889	7205092006
3	Gadung	Bulogidon Tanjung	Desa Bulagidun Tanjung	Belakang rumah atap biru Arah Laut	1.0769444	121.7127778	7205092010
4	Karamat	Mendaan	Dusun Tanjung Dako	Dekat Masjid	1.2883333	121.4616667	7205102002
5	Karamat	Lamakan	Desa Lamakan	Dekat Poskesdes	1.2522222	121.3202778	7205102007
6	Bukal	Bungkudu	Desa bungkudu	Dekat kantor desa	1.0938889	121.4577778	7205082002
7	Bukal	Mulat	Desa Mulat	Dekat kantor desa	1.0233333	121.4475000	7205082013
8	Momunu	Momunu	Desa Momunu	Dekat SD Negeri 18 Momunu	1.0936111	121.3752778	7205012001
9	Momunu	Soraya	Desa Soraya	Dekat kantor desa	1.0925000	121.3358333	7205012021
10	Paleleh Barat	Oyak	Desa Oyak	Dekat SD Negeri 11 Paleleh Barat	1.089041	121.894733	7205112006
11	Paleleh Barat	Timbulon	Desa Timbulon	Dekat Kantor Camat Paleleh Barat	1.04961	121.952485	7205112005
12	Bokat	Doulan	Desa Doulan	Dekat Kantor Desa Doulan	1.079619	121.526822	7205032004

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buol



5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dapat diukur melalui kinerja investasi, baik dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing). Peningkatan PMDN mencerminkan kepercayaan investor lokal terhadap stabilitas ekonomi serta dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sementara itu, arus masuk PMA menunjukkan keterhubungan ekonomi nasional dengan sistem ekonomi global, serta menjadi indikator daya tarik Indonesia di mata investor asing. Berikut akan ditampilkan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Tahun 2019-2023:

Tabel 2.7
Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Insvestasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.589.136.4 56.440	1.556.974. 256.440	17.534.0 00.000	203.660.0 00	203.660. 000

Tabel di atas menunjukkan Bahwa Jumlah nilai investasi berskala nasional pada pada tahun 2019 sebesar 1.556.974.256.440 pada tahun 2020 sebesar 1.556.974.256.440,- namun pada tahun 2021 Jumlah nilai Investasi berskala nasional mengalami peningkatan menjadi 17.534.000.000 dan pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan menjadi 203.660.000 hal ini menunjukkan nilai investasi berskala nasional pada kabupaten buol mengalami penurunan pada dua tahun terakhir.

6. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Indeks Infrastruktur

Infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan timbal balik yang erat. Infrastruktur yang memadai adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang kuat memungkinkan investasi lebih lanjut dalam pembangunan infrastruktur. Keduanya saling memengaruhi dalam sebuah siklus positif. Pembangunan Infrastruktur jalan



khususnya yang menjadi kabupaten terus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Berdasarkan data capaian realisasi indikator persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Kecepatan lebih dari 40 km/Jam) di Kabupaten Buol selama 5 tahun kualitas jalan dari tahun ke tahun dengan persentase 51,59% di Tahun 2020, meningkat menjadi 54,97% di Tahun 2021. Tahun 2022 mencapai 56,15%, Tahun 2023 mencapai 19,73% dan pada tahun 2024 dapat dilihat terjadi penurunan menjadi 23,22%, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk kondisi dan panjang jalan yang mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dikarenakan metode survey, dimana pada tahun sebelumnya survey dilakukan secara manual, hanya dengan melakukan penilaian terhadap kondisi dan perkerasan jalan, untuk jalan Aspal (AC-WC) ini di katagorikan dalam kondisi baik sedangkan untuk Lapen dan Rabat Beton di katagorikan dalam kondisi sedang, untuk kerikil masih ada pertimbangan dari tim survey, apabila masih terdapat kerikil maka di kategorikan Rusak Ringan namun apabila sudah lebih banyak tanah maka di kategorikan Rusak Berat termasuk jalan Tahan dan jalan yang masih dalam perencanaan tetapi sudah masuk dalam SK Ruas Jalan.
2. setelah Tahun 2022, kami diwajibkan melakukan survey kondisi jalan dengan menggunakan Aplikasi PKRMS (merupakan alat bantu untuk mendukung perencanaan, pemrograman, dan penganggaran (PPP) jalan daerah (jalan provinsi dan jalan kabupaten) dengan Aplikasi ini banyak jalan yang mengalami penurunan kondisi, dan Aplikasi ini sudah sesiaa dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2023 Tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PKRMS (Provincial Kabupaten Road Management System) Dalam Kegiatan Preservasi Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten, inilah yang menyebabkan kondisi jalan kabupaten Buol menurun signifikan dan setiap tahunnya kami selalu melakukan kegiatan Verifikasi data Teknis dimana hasil survey yang dilakukan oleh konsultan akan kita verifikasi dengan Kemeterian PUPR, dan semua ruas akan ditampilkan apakah

sudah sesuai dengan kondisi lapangan data yang disampaikan. Perkembangan Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Kabupaten Buol Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Buol, 2025

Gambar 2.54

**Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap
Kab. Buol Tahun 2020-2024**

Berdasarkan Gambar diatas menunjukkan bahwa data capaian indikator persentase jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Buol selama lima tahun, terlihat adanya kecenderungan peningkatan dari tahun 2020 Persentase jalan dalam kondisi mantap mencapai 51,59% atau sepanjang 566,10 KM, tahun 2021 54,97 % atau sepanjang 603,27 KM, sampai dengan tahun 2022 menjadi 56,15% atau sepanjang 616,16 KM. Pada tahun 2023, persentase jalan dalam kondisi mantap menurun menjadi 19,73% atau sepanjang 215,42 KM, dan pada tahun 2024 meningkat lagi sebesar 23,22% atau sepanjang 263,11 KM, Penurunan panjang ruas jalan yang terjadi pada tahun 2022 dengan panjang 1.097,37 KM dan tahun 2023 dengan panjang 1.091,96 karena telah dilakukan perubahan SK sebagaimana keputusan dari kementerian bahwa setiap 5 tahun akan dilakukan pergantian SK dan untuk perubahan Panjang Jalan dikarenakan ada beberapa ruas jalan yang tidak memenuhi syarat, ada ruas jalan yang belum ada pembebasan/Hibah dari pemilik lahan, ada pula jalan yang hanya memiliki panjang tidak lebih dari 50 Meter dan lebar tidak mencapai 1 Meter, setelah dilakukan survey ada beberapa ruas jalan yg sudah berubah fungsi karena hanya merupakan jalan setapak yang melewati



lahan milik masyarakat, dan pada tahun 2024 panjang ruas jalan meningkat menjadi 1.133 KM, hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya peningkatan panjang yang signifikan ini karena adanya penambahan panjang ruas jalan terutama jalan usaha tani oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol, adanya pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, termasuk ada beberapa ruas jalan yang dibangun oleh desa melalui dana desa, sehingga pada saat perubahan SK Jalan dan dilakukan survey kembali terhadap jalan-jalan tersebut terjadi perubahan panjang jalan yang selanjutnya agar mempermudah pengimputan data di aset maka dimasukkan jalan tersebut di SK Jalan.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buol terus berupaya untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan jalan di Kabupaten Buol dengan melihat kondisi jalan dengan menggunakan metode survey, kondisi panjang jaringan jalan di Kabupaten Buol ini dapat dilihat pada 2 sebagai berikut:

Tabel 2.8

Data Kondisi Mantap Dan Tidak Mantap Ruas Jalan Kabupaten Buol Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Panjang	Mantap		Tidak Mantap	
		(km)	(km)	(%)	(km)	(%)
1	2020	1.097,37	566,10	51,59	531,27	48,41
2	2021	1.097,37	603,27	54,97	494,10	45,03
3	2022	1.097,37	616,16	56,15	481,21	43,85
4	2023	1.091,96	215,42	19,73	876,54	80,27
5	2024	1.133,00	263,11	23,22	869,89	76,78

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Buol, 2025

b. Kondisi Jaringan Irigasi

Kondisi jaringan irigasi adalah status fisik dan fungsional sistem saluran primer, sekunder dan tersier dan bangunan pelengkap yang menunjukkan kemampuan jaringan dalam menyediakan, membagi, dan



mengalirkan air ke lahan pertanian , yang ditandai oleh tingkat kerusakan, fungsi dan luas areal yang terlayani. Kondisi baik berarti jaringan berfungsi optimal dan mampu melayani luas areal pertanian yang dituju, sementara kondisi tidak baik/rusak disebabkan oleh kerusakan prasarana atau masalah pemeliharaan yang mempengaruhi keberlanjutan pasokan air.

Faktor penentu kondisi jaringan irigasi adalah :

1. Integritas fisik yaitu kondisi saluran dan bangunan (bendungan, gorong-gorong, pintu air) yang baik atau mengalami kerusakan.
2. Fungsi Operasional yaitu kemampuan jaringan untuk mendistribusikan air secara lancar dan efisien sesuai dengan kebutuhan tanaman.
3. Kapasitas Pelayanan yaitu luas areal pertanian yang dapat dilayani oleh jaringan irigasi.

Faktor penyebab kondisi buruk/rusak jaringan irigasi adalah :

1. Kerusakan prasarana yaitu adanya kerusakan pada bangunan dan saluran irigasi akibat usia atau perubahan lingkungan.
2. Pemeliharaan yang tidak berkelanjutan yaitu kurangnya anggaran, sumber daya atau petugas untuk melakukan perawatan dan perbaikan secara rutin.
3. Desain yang tidak tepat yaitu sistem pembangunan prasarana yang tidak sesuai prosedur atau tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan.
4. Perubahan penggunaan lahan yaitu konversi lahan sawah ke penggunaan lain yang dapat mempengaruhi fungsi jaringan irigasi.

Infrastruktur irigasi termasuk saluran pembawa air, bendungan, pintu air, dan struktur pendukung lainnya yang digunakan untuk mendistribusikan air untuk keperluan pertanian, industri, dan domestik. Dengan melihat kondisi jaringan irigasi ini penting bagi perencanaan dan pengembangan kebijakan di tingkat kabupaten untuk memastikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, mendukung kegiatan ekonomi, dan mengadaptasi praktik pengelolaan air dalam menghadapi perubahan iklim dan peningkatan kebutuhan akan air. Kondisi panjang saluran irigasi Kabupaten Buol dalam kondisi baik dan rusak beserta luas layanan irigasi disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.9
Kondisi Saluran Jaringan Irigasi

N o.	Jaringan Saluran irigasi		Luas Area		Kondisi Saluran									
	Jaringan	Panjang (m)	Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2015 (Ha)	Fungsional (Pemetaan IGT) Ha	2020		2021		2022		2023		2024	
					Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak
1	Jaringan Primer	23.032	3.687	2.380	17.606	5.426	17.695	5.337	17.679	5.353	17.745	5.287	17.965	5.067
2	Jaringan Sekunder	70.689			57.559	13.130	55.359	15.330	54.105	16.584	53.784	16.905	53.724	16.965
Jumlah		93.721			75.165	18.556	73.054	20.667	71.784	21.937	71.529	22.192	71.689	22.032
Jumlah					93.721		93.721		93.721		93.721		93.721	

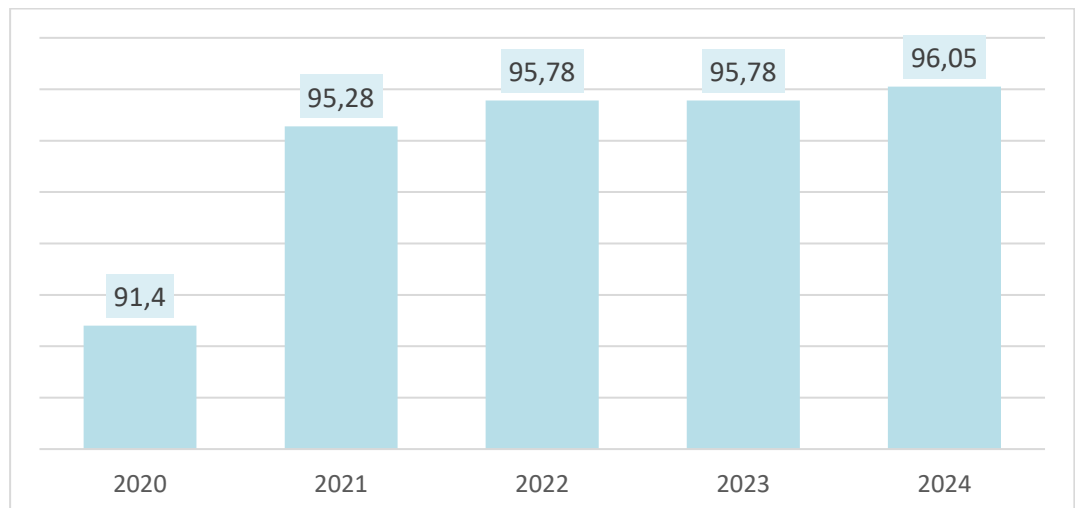
Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Buol, 2025



Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan kondisi jaringan irigasi Kabupaten Buol yang diharapkan upaya untuk menekankan pentingnya manajemen dan pemeliharaan infrastruktur irigasi yang efektif sebagai kunci untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Buol

c. Kondisi Drainase

Indikator Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi dan efektivitas sistem drainase di suatu area. Indikator ini mengukur persentase dari total sistem drainase yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi secara efisien, yaitu tanpa adanya sumbatan yang dapat menghambat aliran air. Kondisi drainase yang baik sangat penting untuk mengelola air hujan dan limbah, serta mencegah genangan air dan banjir. Indikator ini merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengelolaan perkotaan, serta menjadi dasar untuk intervensi dan investasi dalam infrastruktur drainase. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat disajikan pada Gambar berikut:



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, 2025

Gambar 2.55

Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat Kabupaten Buol Tahun 2020-2024



Berdasarkan gambar diatas terjadi peningkatan dalam persentase drainase yang berada dalam kondisi baik dari tahun 2020 dengan capaian 91,48% ke tahun 2021 dan seterusnya dengan capaian di atas 96,05%. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan signifikan dan berkelanjutan dalam pemeliharaan dan efektivitas sistem drainase di Kabupaten Buol. Stabilisasi persentase pada sekitar 95,78% pada tahun 2022 dan 2023 serta tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 96,05%, ini menunjukkan bahwa sistem drainase di Kabupaten Buol secara umum dipelihara dengan baik, memastikan fungsi yang efisien dan efektif dalam mengelola aliran air, yang sangat penting untuk pencegahan banjir dan kesehatan Masyarakat. Angka yang tinggi dan konsisten selama periode ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Buol memiliki strategi pengelolaan infrastruktur yang efektif, termasuk pemeliharaan rutin dan respon cepat terhadap masalah yang muncul, yang membantu dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas sistem drainase. Konsistensi tinggi dalam kondisi baik sistem drainase menunjukkan bahwa kebijakan dan praktik yang diadopsi oleh pemerintah lokal dalam manajemen drainase telah berhasil. Namun, penting untuk terus berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi dan metode baru untuk memelihara atau bahkan meningkatkan standar ini, terutama mengingat tantangan yang dapat disebabkan oleh perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat. Meskipun capaian sangat baik, tetap penting untuk menjalankan inspeksi berkala dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tidak membuang sampah ke dalam sistem drainase untuk menjaga keefektifan jangka panjang sistem tersebut.

d. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan rumah layak huni adalah kebutuhan minimal masa (penampilan) dan ruang (luar-dalam) (kebutuhan luas); Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; dan kebutuhan minimal keamanan

dan keselamatan. Secara sederhana dapat dimaknai sebuah rumah dan pemukiman yang layak adalah tempat tinggal keluarga dan warga dengan dukungan fasilitas lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari air bersih, penerangan, sanitasi saluran pembuangan limbah, serta aman bagi aktivitas penghuninya. Dari data rasio rumah layak huni selama lima tahun di Kabupaten Buol, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi kecil dalam rasio tersebut dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 angka Rasio Rumah Layak Huni meskipun terdapat peningkatan yang mencapai puncaknya di tahun 2021, secara keseluruhan tren rasio rumah layak huni di Kabupaten Buol menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun setelah mencapai puncak tersebut. Ini bisa menandakan adanya beberapa tantangan dalam pemeliharaan atau peningkatan kualitas hunian yang layak di wilayah tersebut serta kondisi masyarakat miskin pasca tahun 2021. Rasio rumah layak huni dihitung dengan membandingkan luas rumah layak huni dengan jumlah penduduk, rasio rumah layak huni dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buol, 2025

Gambar 2.56

Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

Rumah tidak layak huni (RTLH) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi rumah yang tidak memenuhi standar minimum kelayakan sebagai tempat tinggal. Beberapa faktor yang menyebabkan sebuah rumah dikategorikan tidak layak huni antara lain:



1. Struktur Bangunan: Dinding, atap, atau lantai yang rusak atau tidak memadai sehingga tidak memberikan perlindungan yang cukup.
2. Sanitasi: Tidak adanya fasilitas sanitasi yang memadai seperti kamar mandi, WC, atau sistem drainase yang buruk.
3. Ventilasi: Kurangnya ventilasi yang baik, sehingga mengganggu sirkulasi udara di dalam rumah.
4. Penerangan: Kurangnya pencahayaan, baik alami maupun buatan, yang memadai.
5. Keamanan: Kondisi bangunan yang berisiko terhadap penghuni, seperti atap yang mudah runtuh atau tembok yang retak.
6. Akses air bersih: Tidak adanya akses terhadap air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah Kabupaten Buol Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat memiliki program renovasi atau bantuan untuk masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Untuk lebih jelas Kondisi RTLH di Kabupaten Buol dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Buol
Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Buol	
	Rumah Layak Huni (RLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Tahun 2020	24.317	8.551
Tahun 2021	24.697	8.468
Tahun 2022	24.933	8.638
Tahun 2023	25.208	8.523
Tahun 2024	25.830	8.402

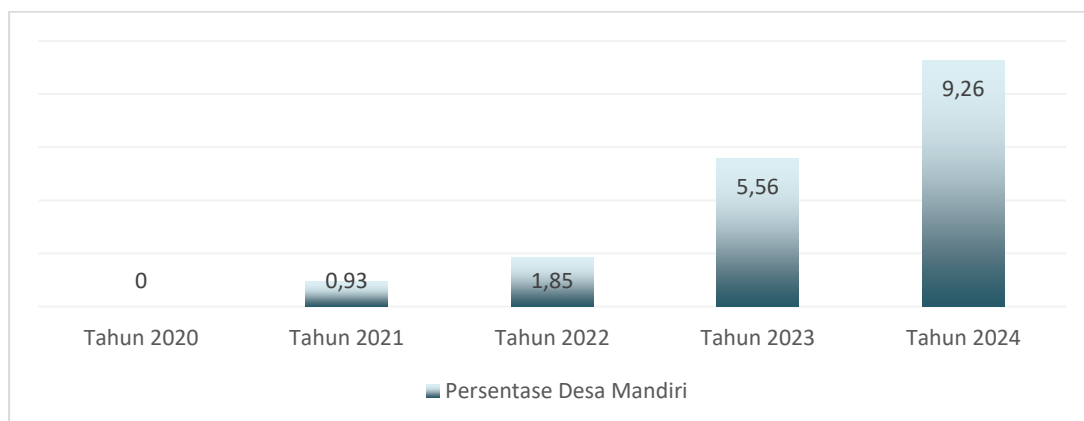
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buol, 2025

e. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah klasifikasi tertinggi dalam Indeks Desa Membangun (IDM), yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah



Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Sebuah desa dikategorikan sebagai Desa Mandiri jika memiliki nilai IDM lebih dari 0,8151. IDM sendiri diukur berdasarkan tiga indeks utama yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi. Persentase Desa Mandiri Di Kabupaten Buol terus meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 belum ada desa mandiri di Kabupaten Buol hingga di 2024 jumlah desa mandiri sebanyak 10 desa atau 9,25.



Sumber: Kemendes, 2025

Gambar 2.57
Persentase Desa Mandiri Di Kabupaten Buol tahun 2020-2024 (%)

7. Stabilitas Ekonomi Makro

a. Tingkat Inflasi

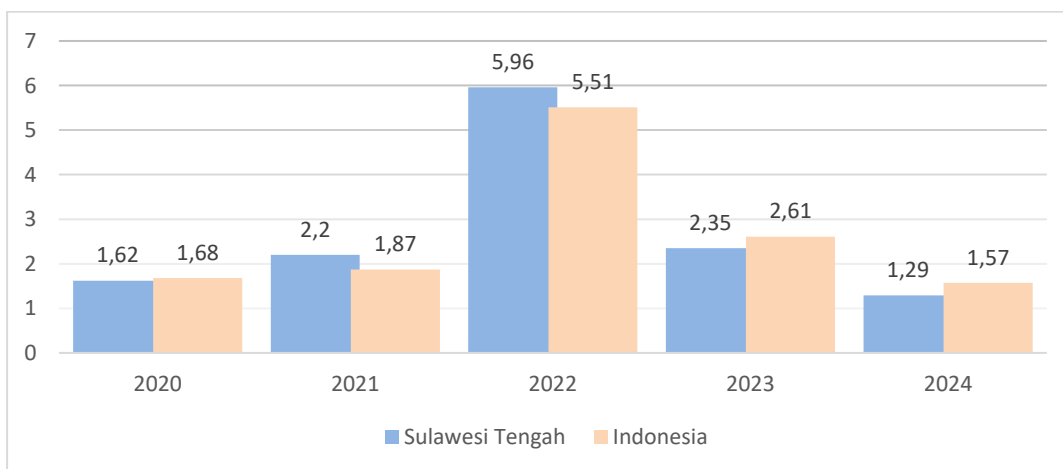
Tingkat inflasi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai stabilitas ekonomi makro. Inflasi yang terkendali mencerminkan kestabilan harga barang dan jasa, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah maupun nasional, inflasi menjadi perhatian penting karena dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat, iklim investasi, serta daya saing perekonomian.

Apabila inflasi terlalu tinggi, harga kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan yang signifikan sehingga menekan konsumsi rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah atau bahkan deflasi dapat mengindikasikan lemahnya permintaan dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, menjaga inflasi agar tetap stabil



sesuai target yang ditetapkan pemerintah dan bank sentral menjadi salah satu sasaran utama kebijakan fiskal maupun moneter.

Hingga saat ini, Kabupaten Buol belum memiliki perhitungan inflasi secara mandiri karena keterbatasan ketersediaan data statistik harga yang terukur secara berkala. Oleh karena itu, sebagai acuan dalam analisis stabilitas ekonomi makro daerah, digunakan data inflasi Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun perkembangan Tingkat Inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2024 sebagai berikut:



Sumber: BPS Tahun 2025

Gambar 2.58
Tingkat Inflasi Sulawesi Tengah dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)

Perkembangan laju inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 mengalami kecenderungan yang fluktuatif, yakni pada Tahun 2020 laju inflasi sebesar 1,62 persen naik menjadi 2,20 persen pada Tahun 2021, pada Tahun 2022 inflasi melonjak hingga 5,96 persen dan dapat ditekan kembali hingga menjadi 2,35 persen pada Tahun 2023 dan pada Tahun 2024 menurun menjadi 1,29 persen serta berada di bawah capaian nasional. Kenaikan inflasi 2022 ini masih merupakan dampak dari adanya kenaikan BBM pada September 2022.

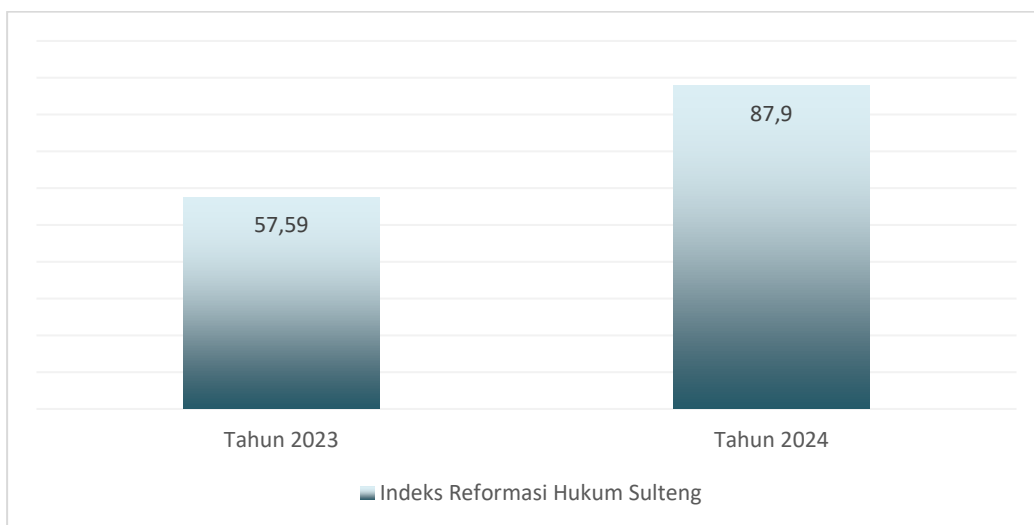
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum adalah proses perubahan sistem hukum secara komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan, efisiensi, dan efektivitasnya. Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen yang

digunakan untuk mengukur sejauh mana reformasi hukum telah dilakukan oleh pemerintah. IRH mengidentifikasi dan memetakan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan, serta memperkuat sistem regulasi nasional. Penilaian IRH dilakukan pada empat variabel, yaitu koordinasi harmonisasi regulasi, regulasi/deregulasi, penyederhanaan regulasi, dan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2023 IRH Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 57,59 kemudian meningkat ditahun 2024 menjadi 87,90. Berikut adalah grafik IRH Provinsi Sulawesi Tengah:



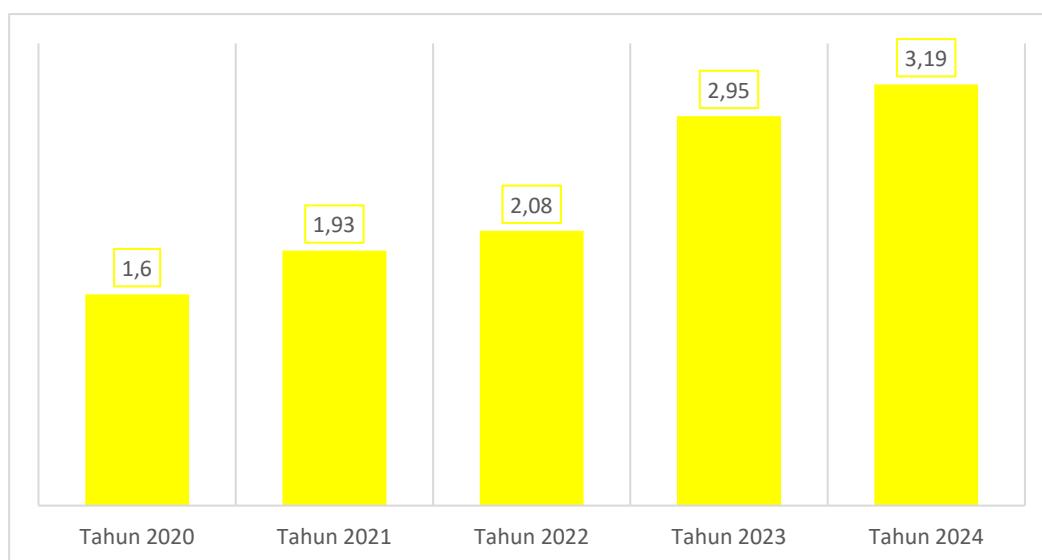
Sumber: Kementerian Hukum dan HAM, 2025

Gambar 2.59
Indeks Reformasi Hukum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024

b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem pemerintahan berbasis elektronik, juga dikenal sebagai e-government atau pemerintahan elektronik, merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan publik, memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan warga, serta mengelola berbagai proses administratif dengan lebih efisien. Teknologi ini mencakup berbagai aplikasi seperti situs laman pemerintah, platform e-procurement, sistem manajemen data penduduk, layanan secara daring, dan masih banyak lagi. Dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sendiri, ada beberapa implementasi layanan berbasis elektronik, di antaranya Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE), SPASIKITA, Aplikasi Sumber Daya Manusia,

hingga beberapa platform dari Kementerian lain yang turut kita gunakan seperti Molk untuk laporan keuangan, SAKTI untuk urusan keuangan dan pencatatan pembelanjaan anggaran negara, dan masih banyak lainnya. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Buol Tahun 2020 sebesar 1,60 dengan Kategori Kurang, Tahun 2021 sebesar 1,93 dengan Kategori Cukup. Kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 2,08 dengan Kategori Cukup, pada tahun 2023 meningkat menjadi 2,95 dengan kategori Baik dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 3,19 dengan kategori Baik. Berikut adalah Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Buol Tahun 2020-2024:

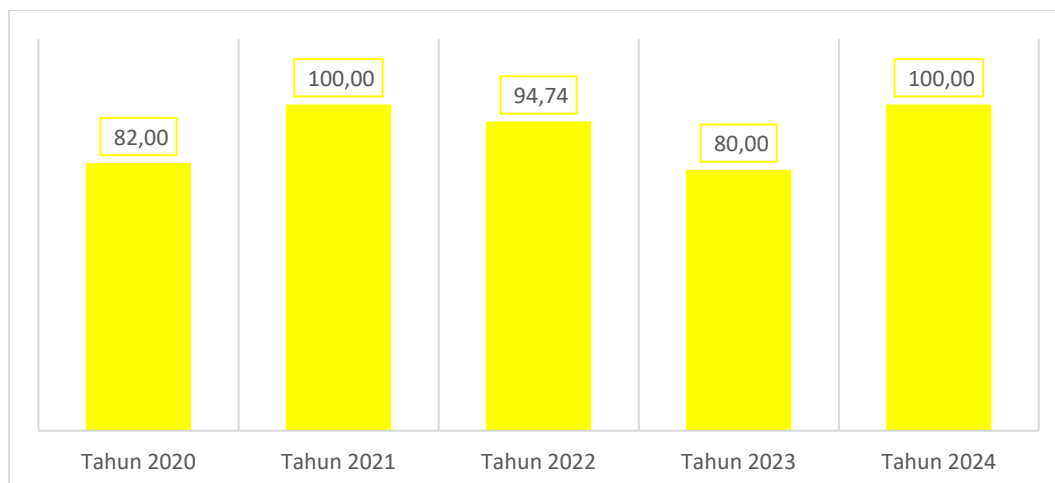


Gambar 2.60
Indeks SPBE Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

a. Persentase Penegakan Perda

Persentase penegakan Perda tidak memiliki satu formula baku nasional. Namun, secara umum, perhitungannya didasarkan pada perbandingan antara jumlah kasus pelanggaran yang berhasil ditindaklanjuti dengan jumlah total kasus pelanggaran yang ditemukan atau dilaporkan dalam periode waktu tertentu. Pada tahun 2024 jumlah penegakan Perda yang dilakukan sebesar 100%. Berikut adalah Persentase Penegakan Perda Kabupaten Buol dari tahun 2020-2024 sebagai berikut:

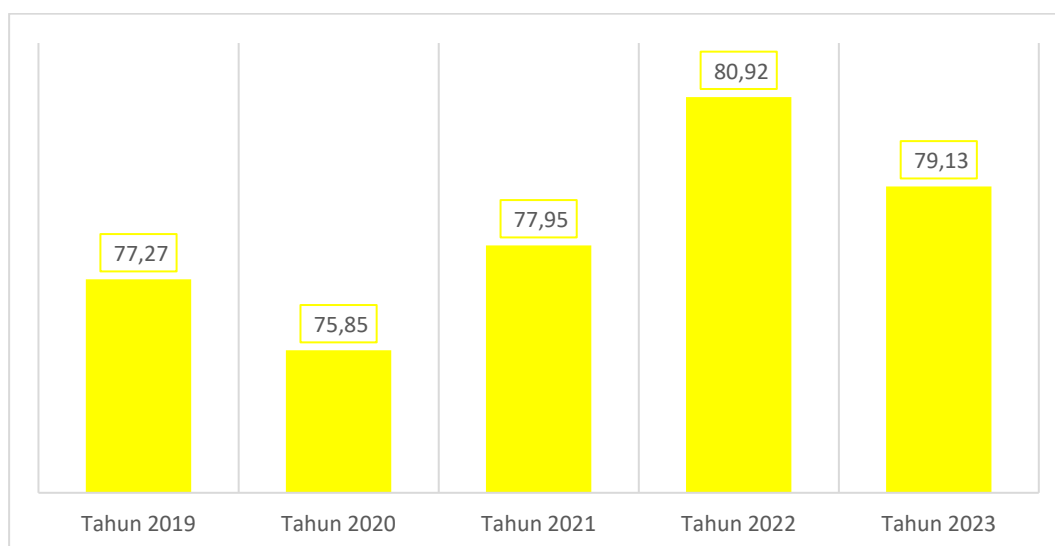


Sumber: Satpol PP Kab. Buol Tahun 2025

Gambar 2.61
Persentase Penegakan Perda Kab. Buol Tahun 2020-2024

b. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah sebuah indikator komposit yang mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indeks ini disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemendagri) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Sulteng Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

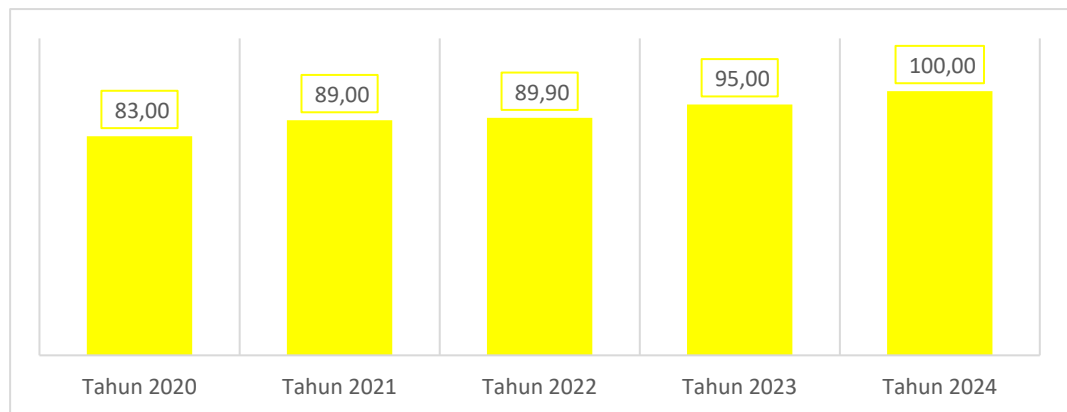


Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.62
Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Sulteng Tahun 2019-2023

- c. Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan) adalah indikator yang mengukur seberapa efektif pemerintah daerah menindaklanjuti pelanggaran terhadap peraturan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan kebersihan. Sama seperti persentase penegakan perda, tidak ada data nasional tunggal untuk tingkat penyelesaian pelanggaran K3. Berikut adalah Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) Kabupaten Buol Tahun 2020-2024:

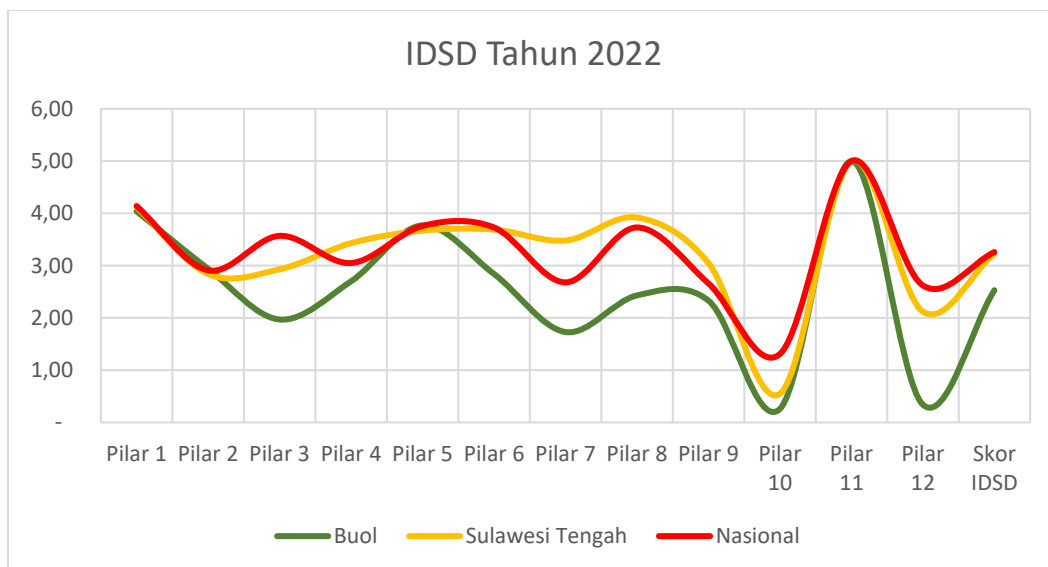


Sumber: Satpol PP Kab. Buol Tahun 2025

Gambar 2.63
Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan Kab. Buol Tahun 2020-2024

3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

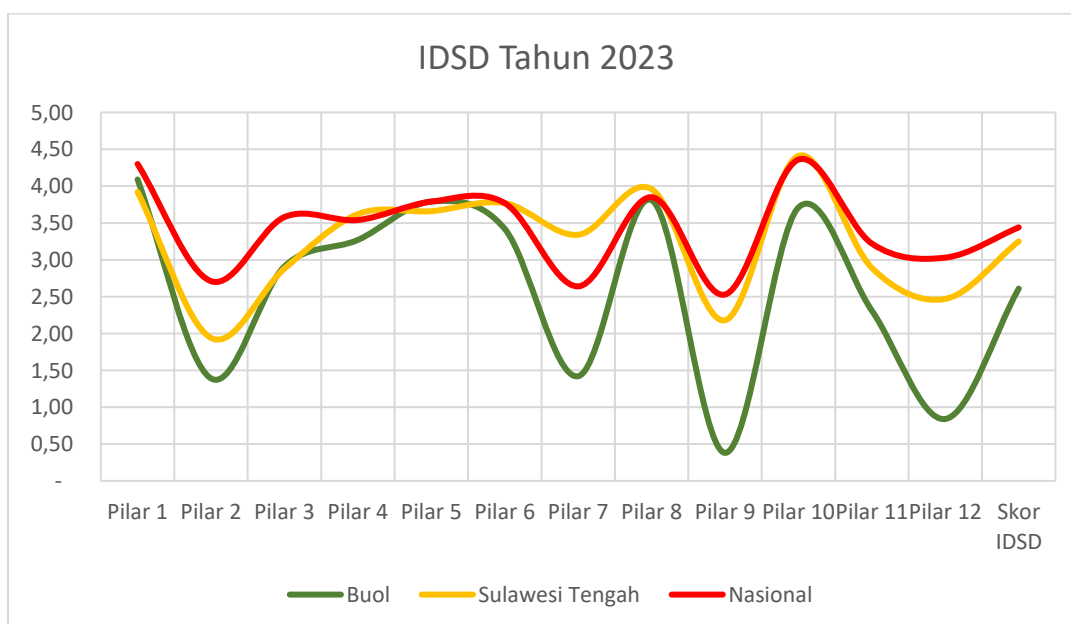
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai dan membandingkan kemampuan ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu daerah dalam menciptakan kesejahteraan bagi penduduknya. Indeks ini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan kelemahan yang perlu diperbaiki untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perkembangan Tahun 2022-2024 IDSD Kabupaten Buol sebagai berikut:



Sumber: BRIN, Indeks Daya Saing Daerah, 2025

Gambar 2.64
Indeks Daya Saing Daerah Kab. Buol Tahun 2022

Pada Gambar diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Buol sebesar 2,53 masih dibawah Capaian Nasional sebesar 3,26. Pilar IDSD yang nilainya diatas Nasional hanya pada Pilar 2 (Infrastruktur) dan Pilar 5 (Kesehatan). Kemudian pada pilar 11 yaitu mendapat nilai 5 (Dinamika Bisnis) setara dengan capaiannya nasional

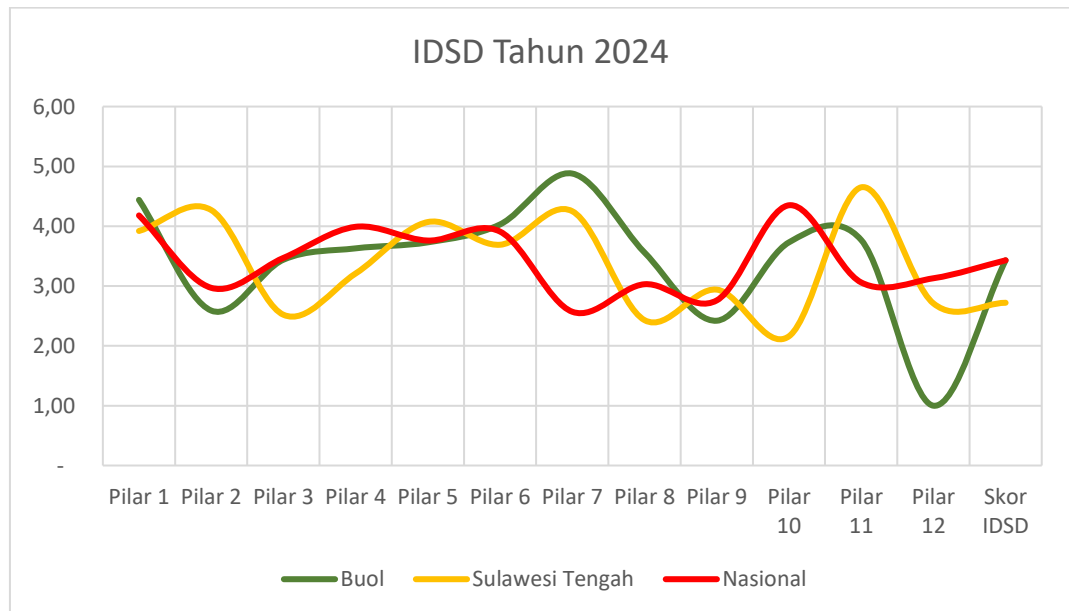


Sumber: BRIN, Indeks Daya Saing Daerah, 2025

Gambar 2.65

Indeks Daya Saing Daerah Kab. Buol Tahun 2023

Pada Gambar diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Buol sebesar 2,61 masih dibawah Capaian Nasional sebesar 3,26. Tidak ada satupun pilar IDSD yang capaiannya melampaui nasional, hanya pada Pilar 5 (Kesehatan) dengan angka yang setara dengan Nasional dengan angka 3,79.



Sumber: BRIN, Indeks Daya Saing Daerah, 2025

Gambar 2.66 Indeks Daya Saing Daerah Kab. Buol Tahun 2024

Pada Gambar diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Buol sebesar 3,43 sudah setara dengan capaian Nasional. Pilar yang nilainya diatas capaian Nasional diantaranya Pilar 1 (Institusi), Pilar 6 (Keterampilan), Pilar 7 (Pasar Produk), Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja dan Pilar 11 (Dinamika Bisnis).

4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

a. Indikator Kinerja Kunci

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.11

Capaian Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Urusan Pendidikan														
1	Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	Persen	63	74,04	66	44,52	67,34	51,32	67,14	48,42	74,04	46,52	79,23	Tinggi
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Mi/Paket A	Persen	102,89	112,85	102,89	101,64	97,16	97,9	108,22	97,77	112,85	98,39	97,35	Sangat Tinggi
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	95	100,83	95	97,16	112,27	86,46	98,16	86,6	100,83	87,26	92,04	Sangat Tinggi
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi/Paket A	Persen	99	82,23	99	81,74	88,78	87,58	98,71	91,4	98,59	91,77	89,99	Tinggi
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	75	93,5	76	98,59	74,97	73,88	84,95	78,35	82,23	78,96	108,24	Sangat Tinggi
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/Mi/Paket A	Persen	99,57	98,7	99,99	98,59	88,78	93,5	98,71	87,57	98,59	98,94	98,42	Sangat Tinggi
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	96,35	84,95	99,76	82,22	74,97	81,74	84,95	73,88	82,23	97,16	96,95	Sangat Tinggi
8	Angka Putus Sekolah (APS) SD/Mi	Persen	0,49	0,03	0,49	0,9	0,66	0,51	0,41	0,53	1,02	0,59	90,84	Tinggi
9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,5	0,01	0,45	3,17	0,66	0,55	1,09	0,6	3,25	0,62	172,78	Sangat Tinggi
10	Angka Kelulusan SD/Mi - SMP/MTs	Persen	98,5	99,4	99	99,44	98,37	99,47	98,37	99,42	99,4	99,44	100,72	Sangat Tinggi

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/Mi ke SMP/MTs	Persen	96	95,73	97	102,47	73,78	93,71	72,56	94,19	95,73	95,28	112,34	Sangat Tinggi
12	Fasilitas Pendidikan (SD/Mi) Kondisi Bangunan Baik	Persen	96,5	14,61	97	44,1	16,32	35,61	14,61	34,93	44,1	37,21	120,45	Sangat Tinggi
13	Fasilitas Pendidikan (SMP/MTs) Kondisi Bangunan Baik	Persen	63,5	24,11	64	38,79	25,26	36,24	24,11	34,42	38,79	37,67	96,38	Sangat Tinggi
14	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Rasio	330	824	330	922	699	1022,48	730	920,39	777	937,7	184,43	Sangat Tinggi
15	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun	Persen	99,75	99,33	99,75	98,84	100	99,1	100	99,21	100	98,94	99,18	Sangat Tinggi
16	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf	Persen	98,32	99,89	98,32	99,9	99,7	99,9	99,71	99,21	99,89	99,94	100,59	Sangat Tinggi
17	Guru yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV	Persen	69	72,15	69,25	78,11	61,27	77,26	66,9	76,76	72,15	94,5	117,83	Sangat Tinggi
Urusan Kesehatan														
1	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	Persen	na	11	0	9,2	18,6	11,3	17,6	7,9	16	17,8	72,30	Sedang
2	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Persen	0	1	0	9,48	1,5	11,59	1,2	21,86	0,9	18,12	1.535,89	Sangat Tinggi
3	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	Persen	11	9	11	7,5	11,6	9,7	11	12,8	10	15,4	100,80	Sangat Tinggi

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
4	Angka Kematian Ibu Per 1000 Kelahiran Hidup	Persen	15	1	10	63	205	31,5	194	82	183	101,7	149,97	Sangat Tinggi
5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Rasio	12	11	12	19	10	15	11	22	12	11	138,33	Sangat Tinggi
6	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	Rasio	0,61	17,39	0,63	17,3	0,10	17,3	0,11	18,3	0,12	18,3	10.956,64	Sangat Tinggi
7	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Rasio	0,007	0,01	0,0073	0,012	0,10	0,012	0,10	0,013	0,1	0,012	68,85	Sedang
8	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Rasio	0,21	0,14	0,23	0,274	0,039	0,293	0,042	0,316	0,045	0,31	475,67	Sangat Tinggi
9	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	Rasio	30	3	40	6	0,001	7	0,001	7	0,001	7	420.005,00	Sangat Tinggi
10	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	Persen	94	49	95	57	100	74	100	117	100	88	78,23	Tinggi
11	Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	Persen	82	102	84	36	85	65	86	54	87	65	76,24	Tinggi
12	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persen	100	100	100	100	96	112	97	97	98	100	103,74	Sangat Tinggi
13	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	Persen	93	28	95	44	50	66	60	84	70	99	97,97	Sangat Tinggi

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
14	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	0	100	0	60,00	Rendah
15	Penderita Diare Yang Ditangani	Persen	99	63	100	37,14	60	29,37	70	25,9	80	31,72	45,28	Sangat Rendah
16	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Persen	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	-	Sangat Rendah
17	Cakupan Kunjungan Bayi	Persen	93	92	94	85	90	88	92	83	95	103	97,15	Sangat Tinggi
18	Cakupan Puskesmas	Persen	100	109	100	118	100	118	100	127	100	127	119,80	Sangat Tinggi
19	Cakupan Pembantu Puskesmas	Persen	56	56	58	51	100	51	100	48	100	48	66,99	Sedang
20	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	90	70	91	70	90	69	92	69	95	90	80,22	Tinggi
21	Cakupan Pelayanan Nifas	Persen	88	75	89	80	80	83	82	80	85	101	99,05	Sangat Tinggi
22	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
23	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
24	Cakupan Balita Gizi Buruk	Persen	100	0,002	100	0,172	7,5	0,168	7,3	0,29	7,2	0,104	1,57	Sangat Rendah

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
25	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Persen	0,02	100	0,01	7,6	7,5	10,3	7,3	16,1	7,2	3,4	115.281,0 2	Sangat Tinggi
26	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	Persen	99	100	100	9,21	18,6	11,31	17,6	7,92	16	17,79	65,44	Rendah
27	Prevalensi Stunting	Persen	Na	Na	Na	28,6	24	32,7	22	30	20	36,9	152,37	Sangat Tinggi
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	0,78	0,52	0,79	0,55	0,56	0,56	0,58	0,57	0,6	0,23	74,58	Sedang
2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00	Sangat Tinggi
3	Persentase Kawasan Permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	Sangat Tinggi
4	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	69	51,59	71	54,97	56	56,15	58	56,72	60	23,38	77,84	Tinggi
5	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	Persen	14,85	0,2	19,15	0,2	0,2	0,2	0,21	0,2	0,22	0,2	57,71	Rendah
6	Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau	Persen	0,5	0,13	0,5	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	70,40	Sedang

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Bangunan Rumah Liar													
7	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	75	78	85	75,43	76,21	76,21	77,04	74,82	77,68	73,48	96,89	Sangat Tinggi
8	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	Persen	2,5	1,7	2,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	87,20	Tinggi
9	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat	Persen	87,5	91,4	90	95,28	95,28	95,78	96,35	95,78	96,75	96,05	101,91	Sangat Tinggi
10	Persentase Daerah/Wilayah yang Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun	Persen	0	64,13	0	64,13	64,13	64,13	64,13	64,13	64,13	64,13	100,00	Sangat Tinggi
11	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	Persen	58	6,7	60	8,6	8,6	20	9,03	20	9,48	20	138,18	Sangat Tinggi
12	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	83	79,32	85	65,05	66,68	66,68	68,76	66,68	72,67	66,68	92,17	Sangat Tinggi
13	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	70	68,6	73	71,86	71,86	71,9	71,86	71,95	71,86	71,99	99,36	Sangat Tinggi
14	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	54	83,05	65	93,68	94,54	96,62	96,79	91,9	98,48	90,36	117,36	Sangat Tinggi

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
15	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Persen	82,5	73,04	85	81,68	80,4	82,27	84,42	77,39	88,64	76,78	93,05	Sangat Tinggi
16	Persentase Areal kawasan Kumuh	Persen	35	2,05	20	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	63,22	Rendah
17	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	Persen	35	0	40	0	0	0	0	0	0	0	-	Sangat Rendah
18	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per satuan Penduduk	Persen	100	67,83	100	75,73	74,55	75,02	74,55	69,44	74,55	67,79	85,65	Tinggi
19	Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk	Persen	2,5	2,17	2,75	2,43	2,41	2,51	2,41	2,32	2,41	2,27	93,95	Sangat Tinggi
20	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	0,15	0,5108	0,2	0,6129	1,84	0,6088	1,93	0,6088	2,02	0,6088	148,35	Sangat Tinggi
21	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan	Persen	44,29	1,91	46,35	1,95	0,02	2,2	0,021	2,25	0,022	2,3	6.435,47	Sangat Tinggi
22	Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan	Persen	0,65	0,022	0,7	0,023	0,023	0,026	0,024	0,026	0,025	0,026	66,41	Sedang



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
23	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Sangat Rendah
24	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit & survei foto udara terhadap luas daratan	Persen	75	0,79	75	1	1,00	0,91	1,05	0,91	1,10	0,91	52,56	Rendah
25	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	96	70	98	70	70	70	25	70	50	70	132,87	Sangat Tinggi
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														
1	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	0,190	0,188	0,196	0,189	0,192	0,187	0,194	0,178	0,195	0,175	94,85	Sangat Tinggi
2	Rasio Pemukiman Layak Huni	Persen	0,98	0,22	0,99	0,31	0,00035	0,31	0,00041	0,36	0,00046	0,36	50.938,19	Sangat Tinggi
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	71,24	67,56	73,22	67,75	68,01	67,46	68,31	67,84	68,34	67,89	97,04	Sangat Tinggi
4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	Persen	75	0,49	80	0,3	0,42	0,32	0,48	0,59	0,06	0,07	63,36	Rendah
5	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	Persen	0	0,069	0	0,069	0,00035	0,069	0,00041	0,069	0,00046	0,069	17.181,18	Sangat Tinggi
6	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	Persen	0,02	0,02	0,02	0,02	2,34	0,02	2,34	0,02	2,34	0,02	40,51	Sangat Rendah

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
7	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	Persen	15	0,324	10	0,381	31,99	0,378	31,69	0,377	31,66	0,377	1,91	Sangat Rendah
8	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU	Persen	57,5	27,94	60	42,87	43		43,05		43,05		24,01	Sangat Rendah
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat														
1	Cakupan petugas Linmas (Perlindungan Masyarakat)	Persen	30	88	35	87	20	84	25	12	30	84	257,98	Sangat Tinggi
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	83	100	89	28,57	89,9	26,47	95	29,05	100	237,96	Sangat Tinggi
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	40	5	50	5	14,61	50	24,61	37	34,58	50	131,93	Sangat Tinggi
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	Persen	40	85	50	100	20	71,43	30	74	40	93	249,76	Sangat Tinggi
5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	80	82	90	100	50	94,74	60	80	70	100	135,86	Sangat Tinggi
Urusan Tenaga Kerja														



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun	Angka	0	11	0	24	11	0	11	0	17	1	5,88	Sangat Rendah
2	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	40	0	80	100	100	0	100	0	100	100	45,00	Sangat Rendah
3	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persen	30	2,09	35	8,49	8,4	53,9	10,08	36	12.096	29,43	206,06	Sangat Tinggi
4	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Persen	45	74,61	55	82,15	97,64	100	98,2	100	98,88	100	124,11	Sangat Tinggi
5	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	65	50	70	100	71	100	79	100	86	100	120,70	Sangat Tinggi
6	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Persen	80	40	85	0	30	0	50	0	70	0	10,00	Sangat Rendah
7	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	Persen	65	83,33	70	0	33	0	50	0	67	0	25,64	Sangat Rendah
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
1	Persentase Partisipasi Perempuan di	Persen	50	0,077	50	0,077	7,82	0,072	7,83	0,072	7,84	0,109	0,71	Sangat Rendah

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Lembaga Pemerintah													
2	Jumlah Kursi yang diduduki perempuan di DPR	Jumlah	39	0,16	44	0,16	-	0,16	-	0,16	-	0,36	-	Sangat Rendah
3	Partisipasi Perempuan di lembaga swasta	Persen	44	0,71	49	0,7	94,5	0	94,5	0	94,5	0,02	0,61	Sangat Rendah
4	Rasio KDRT	Persen	0,05	0,04	0,03	0,06	0,02	0,04	0,02	0,04	0,02	0,6	736,00	Sangat Tinggi
5	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah umur	Persen	52	0,089	53	0,089	9	0	8	0	7	0	0,07	Sangat Rendah
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	52	93,45	53	94,63	50	95,15	51	95,24	52	95,15	183,66	Sangat Tinggi
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100		100		100		100	100,00	Sangat Tinggi
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi



No	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	dan PPT/PKT di Rumah Sakit													
9	Cakupan Layanan rehabilitas sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
14	Rasio APM perempuan/Laki-laki di SD	Persen	0,85	96,66	0,85	97,55	0,85	1,04	0,85	1,04	0,85	0	4.618,59	Sangat Tinggi
15	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP	Persen	0,85	75,26	0,85	76	0,85	1,01	0,85	1,01	0,85	0	3.606,59	Sangat Tinggi
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	0,85	62,14	0,85	65,52	0,85	1,06	0,85	1,06	0,85	0	3.053,65	Sangat Tinggi
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persen	0,85	0,97	0,85	0,97	0,85	1,03	0,85	1,03	0,85	0	94,12	Sangat Tinggi
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	0,85	100	0,85	100	0,85	0	0,85	0	0,85	100	7.058,82	Sangat Tinggi
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	Persen	36	0,456	38	0,425	32	0,465	34	0,465	36	0	1,04	Sangat Rendah
Urusan Pangan														
1	Kesediaan Pangan Utama	Persen	100	97,91	100	99,02	99,09	99	99,17	81,77	99,5	45,38	84,98	Tinggi
Urusan Pertanahan														
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Persen	46	0	48	0,00042	-	0,00033	-	1,49	-	4,04	0,00	

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Persen	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	80,00	Tinggi
3	Penyelesaian Izin Lokasi	Persen	100	0	100	0	0	0	100	16,67	100	100	29,17	Sangat Rendah
Urusan Lingkungan Hidup														
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Terintegrasinya RPPLH	Ada/Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	-	Sangat Rendah
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	-	Sangat Rendah
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Ada/Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	60,00	Rendah
4	Indeks Kualitas Udara	Indeks		0		53,33	94,22	80,96	94,33	70	94,44	95,61	87,12	Tinggi
5	Indeks Kualitas Air	Indeks		0		95,24	65,29	98,3	65,39	96,31	65,49	86,01	143,06	Sangat Tinggi
6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks		0		86,33	87,81	99,13	88,68	86,16	89,55	67,14	95,01	Sangat Tinggi
7	Timbulan Sampah yang di tangani	Persen	66	22	68	75	-	74,32	-	11,17	-	10	71,81	Sedang
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
1	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	3,2	0,98	3,26	0,99	14,36	96,9	37,08	97,4	40,78	99,99	248,73	Sangat Tinggi
2	Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran	Rasio	1	0,73	1	0,81	1,83	92,91	2,01	94,46	2,21	95,68	2.851,99	Sangat Tinggi
3	Rasio Pasangan ber-Akte Nikah	Rasio	1	0,61	1	0,62		61,78		67,9		70,21	61,50	Rendah

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Sangat Tinggi
5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Sangat Tinggi
6	Cakupan Penerbitan KTP	Persen	1	2,31	1	1,56	14,22	96,65	15,64	97,04	17,2	99,58	453,22	Sangat Tinggi
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Persen	75	73	85	81	83,26	100	85,75	100	88,32	100	108,52	Sangat Tinggi
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	Persen	100	100	100	100	0,9	100	0,9	100	0,9	100	6.706,67	Sangat Tinggi
2	Rata-Rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	0,65	100	0,7	100	100	100	100	100	100	100	5.994,07	Sangat Tinggi
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	1	0,99	1	0,99	0,9	0,99	0,9	1	0,9	1	106,04	Sangat Tinggi
4	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	100	100	0,9	100	0,9	100	0,9	100	6.706,67	Sangat Tinggi
5	Persentase posyandu aktif	Persen	100	20,4	100	36,47	0,9	40,25	0,9	40,51	0,9	40,51	2.706,26	Sangat Tinggi
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
1	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	Jumlah Anak	2,2	1,39	2,1	1,5	2,73	1,57	2,63	1,61	2,63	2,46	69,37	Sedang
2	Rasio Akseptor KB	Rasio	99	71	99	88	83,5	66,78	84	76,01	84,5	69,44	82,65	Tinggi
Urusan Perhubungan														

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah Arus Penumpang Umum (orang)	Orang	90203	12683	92007	24270	25,000	26881	27,000	31930	28,000	37172	71.716,17	Sangat Tinggi
2	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	605	58	666	0	60	0	65	0	70	0	1,92	Sangat Rendah
3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Termin al Bis	Persen	9	6	10	6	6	6	6	6	6	6	85,33	Tinggi
4	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	0,50	5,99	0,60	5,68	6,16	2,9	6,17	2,58	6,18	0,09	447,00	Sangat Tinggi
5	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu	Persen	80		85	0	-	6	-	0	-	11,27	-	Sangat Rendah
6	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio	0,07	0,0014	0,07	0,0013	0,050	0,0013	0,052	0,0015	0,054	0	1,87	Sangat Rendah
Urusan Komunikasi dan Informatika														
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	Persen	100	2,45	100	4,09	0,27	4,09	0,55	4,36	0,55	4,55	628,27	Sangat Tinggi
2	cakupan Layanan Informasi	Persen	-	83,59	-	83,59	0,05	83,59	0,19	100	0,46	100	80.516,90	Sangat Tinggi
3	Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon	Persen	80	34,66	85	39,02	0,52	53,72	0,6	59,62	0,68	68,34	6.081,33	Sangat Tinggi
4	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	0,3	37,15	0,35	38,46	0,35	40,58	0,32	48,69	0,3	69,77	14.687,70	Sangat Tinggi

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
5	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki Komputer Pribadi	Persen	0,44	36,56	0,46	37,79	0,36	38,39	0,34	39,15	0,31	39,44	10.285,10	Sangat Tinggi
Urusan Koperasi Usaha kecil dan Menengah														
1	Jumlah koperasi Aktif	Jumlah	-	42	-	53	67	31	19	38	25,71	-	123,13	Sangat Tinggi
2	Jumlah UKM Non BRL/LKM Aktif	Jumlah	-	2747	-	15	85	15	92	15	93	-	16,98	Sangat Rendah
3	Jumlah BPR/LKM Aktif	Jumlah	-	13	-	15	100	15	100	15	100	-	15,00	Sangat Rendah
4	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah	-	4522	-	5022	85,06	5017	10	5017	12	-	28.034,09	Sangat Tinggi
Urusan Penanaman Modal														
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	7	4	8	8	5	14	6	23	7	0	164,10	Sangat Tinggi
2	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	594.389	1.556.974.256	693.454	17.534.000.000	-	203.660.000	-	203.660.000.000	0	-	132.236.918	Sangat Tinggi
Urusan Kepemudaan dan Olahraga														
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	86	0,09	90	0,11	60	0,15	63	4	63	3	2,32	Sangat Rendah
2	Persentase Wirausaha Muda	Persen	85	100	85	100	85	100	85	100	85	100	117,65	Sangat Tinggi
3	Cakupan Pembinaan Atlit Muda	Persen	76	21,05	78	21,05	78	100	80	33,33	80	80	64,91	Rendah
4	Cakupan Pembinaan olahraga	Persen	100	33,33	100	100	50	100	55	21,05	55	42,11	89,63	Tinggi
5	Jumlah Presentasi Olahraga	Jumlah	1	2	1	2	5	2	5	2	5	3	108,00	Sangat Tinggi

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
6	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah	2	1	3	13	15	13	15	1	15	1	116,67	Sangat Tinggi
7	Cakupan Pelatih Bersertifikasi	Persen	55	33	60	33	60	33	65	33	65	19	50,00	Sangat Rendah
Urusan Kebudayaan														
1	Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	Kali	-	-	-	-	100	2	100	1	100	1	1,33	Sangat Rendah
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	100	100	100	100	4	100	2	100	2	100	2.540,00	Sangat Tinggi
3	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	Jumlah	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100,00	Sangat Tinggi
Urusan Perpustakaan														
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	Rasio Kunjung an	0,69	0,28	0,73	0,21	1,11	37	1,21	10	1,21	24	1.242,52	Sangat Tinggi
2	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Rasio	0,1	0,21	0,1	0,21	1,61	21	1,61	21	1,61	21	866,61	Sangat Tinggi
3	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Rasio		2,79		2,35	1,61	24	1,61	28	1,61	23	1.552,80	Sangat Tinggi
4	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaaan/Tahun	Orang	1.576	114	2.074	36	1.374	114	1474	36	1574	105	5,28	Sangat Rendah

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul Buku	6.112	34835	6.418	42708	4917	34835	4936	42708	4955	27173	671,50	Sangat Tinggi
6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki sertifikat	Persen	30	16,4	40	30,7	3	16	3	31	3	43	626,28	Sangat Tinggi
Urusan Kearsipan														
1	Peningkatan SDM Pengelola kearsipan		3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	93,33	Sangat Tinggi
2	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	100	50,77	100	50,77	68,25	51	61,54	51	68,25	51	66,77	Sedang
Urusan Perikanan														
1	Produksi perikanan	%	80,00	92,17	83,00	92,19	96,04	55,49	97,53	47,81	98,11	27	72,12	Sedang
2	Konsumsi ikan	%	93,46	96,52	93,66	99,55	100	84,75	100	127,76	100	123,62	109,14	Sangat Tinggi
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	18	97,35	18,5	97,72	96,43	23,68	97,59	19,73	98,38	100,23	243,14	Sangat Tinggi
Urusan Pariwisata														
1	Kunjungan Wisata	Persen	91,14	1,3	93,64	1,3	50	1,1	50	1,14	50	1	1,86	Sangat Rendah
2	Lama Kunjungan Wisata	Hari	5	3370,6	7	0	7	4618,3	7	5329,4	7	5885	58.718,69	Sangat Tinggi
Urusan Pertanian														
1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (%)	Persen	47	32,25	46	29,68	31,50	41,67	32,50	45,37	33,50		81,00	Tinggi

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2	Kontribusi sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB (%)	Persen	4,72	3,51	4,82	3,23	3,50	3,55	3,51		3,52		48,56	Sangat Rendah
3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB (%)	Persen	36,62	28,17	37,16	25,93	29,50	31,91	30,25		31,00		50,97	Sangat Rendah
4	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	Ton/Ha		3,8		4,8	4,25	4,3	4,28	4,9	4,3	4,1	103,67	Sangat Tinggi
5	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	76,26	49,61	81,26	21,63	10,38	13,09	9,41	100	7,98	16	296,20	Sangat Tinggi
Urusan Perdagangan														
1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Persen	13,95	0	15,35	1	20	5,5	20	0	27	0	6,80	Sangat Rendah
Urusan Perindustrian														
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	44,60	81	44,75	97	45,1	0,11	45,25	0,19	45,45	0,21	79,90	Tinggi
Sekretariat Dewan														
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Sangat Tinggi

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Sangat Tinggi
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Sangat Tinggi
Perencanaan Pembangunan														
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada		Ada	100,00	Sangat Tinggi

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	ditetapkan dengan PERDA													
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	100,00	Sangat Tinggi
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Sangat Tinggi
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada	Ada	Ada	100,00	Sangat Tinggi
5	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
6	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
Keuangan														

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
2	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00	Sangat Tinggi
3	Persentase SiLPA	Persen	0,00	0,01	0,00	0,05	3,00	0,11	2	0,11	1,5	0,06	4,39	Sangat Rendah
4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	20	24	20	20	20,11	27	20	28	20	25	123,85	Sangat Tinggi
5	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	20	20	20	48	47,64	19	10	14	10	22	147,98	Sangat Tinggi
Penelitian dan Pengembangan														
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	92	0	95	0	100	100	100	100	100	100	60,00	Rendah
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	92	0	95	0	100	100	100	100	100	100	60,00	Rendah
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	5,13	100	7,69	100	100	100	100	100	100	62,56	Rendah
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan Di Daerah	Persen	100	100	100	67	100	100	100	100	100	0	73,40	Sedang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan														

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Hari	90	90	90	74	90	63	90	64	90	62	78,44	Tinggi
2	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	80	1,96	85	2,87	85	3,38	85	0,22	85	0,4	2,11	Sangat Rendah
3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	25	1,96	25	1,19	25	1,19	25	1,85	25	5,29	9,18	Sangat Rendah
4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Jumlah	25	31	25	29	25	32	25	30	25	25	117,60	Sangat Tinggi
5	Jumlah Jabatan Administrasi Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Jumlah	735	1862	735	1726	735	1509	735	1320	735	1305	210,12	Sangat Tinggi
6	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Jumlah	2.487	1875	2.487	1974	2.487	2335	2.487	3156	2.487	3630	104,30	Sangat Tinggi
Pengawasan														
1	Persentase tindak lanjut	Persen	50	66	55	43	43	54	48	57	55	59	112,36	Sangat Tinggi
2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen	2,50	0,008	2,00	0,006	2,00	1	1,85	0,4	1,6	-	18,06	Sangat Rendah

RPJMD KABUPATEN BUOL TAHUN 2025-2029



N o	Indikator	Satuan	Target/Capaian										Rata-Rata Capaian	Interpretasi Sangat Tinggi(>91%) Tinggi(76%<=90%) Sedang (66%<=75%) Rendah (51%<=65%) Sangat Rendah (<=50)
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
3	Jumlah Temuan BPK	Jumlah	9	20	7	13	12	19	11	26	10	24	208,53	Sangat Tinggi



b. Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Buol Tahun 2024

Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Buol tahun 2024 menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat melalui pelayanan publik yang merata dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten Buol terus berupaya memperkuat tata kelola dan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan SPM di berbagai urusan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman dan ketertiban umum, dapat berjalan optimal. Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPM melalui penguatan perencanaan berbasis data, peningkatan kapasitas aparatur, serta alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran, sehingga pelayanan dasar dapat dirasakan secara adil dan menyeluruh oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Buol.

Tabel 2.12

Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Buol Tahun 2024

No.	Bidang Urusan	Capaian SPM	Permasalahan	Solusi
1	Pendidikan	98,39 %	✓ Pelayanan Anak Usia Dini berusia 5-6 tahun masih kurang dikarenakan masih kurangnya PAUD Negeri sehingga untuk menampung calon siswa di daerah tersebut belum maksimal dan perkembangan standar kualifikasi tenaga pendidik banyak yang belum S-1 dan bersertifikat. ✓ Pelayanan Anak Sekolah Menengah Pertama berusia 13-15 tahun masih kurang dikarenakan siswa yang berhenti karena bekerja, perkawinan dini, masih adanya penduduk yang bersekolah di Kabupaten/Kota lain. ✓ Pelayanan Kesetaraan Berusia 7- 18 Tahun masih sangat kurang maksimal dikarenakan Paket A, B Dan C kurang peminat dari penduduk usia 7-18 tahun untuk bersekolah, masih kurangnya Paket A,B dan C	✓ Pelayanan Anak Usia Dini perlu pembangunan yang merata diperlukan untuk menampung calon siswa bersekolah (jemput bola), tenaga pendidik yang perlu bersekolah ke jenjang S1 dan disertifikasi agar meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang semuanya membutuhkan anggaran yang besar. ✓ Pelayanan Sekolah Menengah Pertama diperlukan pendekatan / interaksi / pembelajaran tentang dampak berhenti sekolah dan perkawinan dini serta pencerahan bahwa sekolah untuk menunjang masa depan, diperlukan peningkatan minat calon siswa dari sekolah yang Laporan Penerapan SPM Kabupaten Buol Tahun 2023 Page 21 didukung Dinas Pendidikan agar



No.	Bidang Urusan	Capaian SPM	Permasalahan	Solusi
				bersekolah di kabupaten Buol seperti pembelajaran yang menarik, promosi sekolah, sarana dan prasana yang memadai, untuk aplikasi diperlukan pendekatan kepada pihak sekolah-sekolah yang belum terdaftar bahwa dengan ikut aplikasi tersebut bisa membantu operasional siswa dalam bidang pendidikan. ✓ Pelayanan Kesetaraan Berusia 7-18 Tahun perlu ditingkatkan lagi dengan peningkatan minat calon siswa dengan pembelajaran yang menarik, promosi sekolah paket, sarana dan prasana yang memadai.
2	Kesehatan	82,35 %	✓ Sasaran Pusdatin terlalu tinggi ✓ Masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya pada trimester Pertama sehingga tidak mendapatkan Pelayanan ANC sesuai standar ✓ Masih ada kehamilan yang tidak diinginkan (Drop Out) sehingga malu untuk memeriksakan kehamilannya sehingga Pelayanan ANC tidak sesuai standar ✓ Pelaksanaan PWS belum maksimal ✓ Pemamfaatan Buku KIA masih kurang/ belum maksimal ✓ Masih ada kehamilan diluar nikah ✓ Tidak terjalin kerjasama antara Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta, sehingga Pelayanan ANC di Faskes Swasta tidak dilaporkan ✓ Distribusi ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang siap memberikan pelayanan persalinan 24 jam belum merata,	✓ Pembinaan pelayanan Kesehatan ibu hamil (ANC Bumil) terhadap bidan koordinator/pengelola ibu puskesmas ✓ Peningkatan kapasitas bidan. ✓ Monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan ✓ Meningkatkan sarana dan prasarana ditempat pelayanan kesehatan ibu hamil ✓ Membentuk Forum Peduli KIA di setiap Desa ✓ Mengoptimalkan pelaksanaan kelas ibu hamil ✓ Membentuk Tim Terpadu serta layanan data terintegrasi antara Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, serta klinik Praktek Swasta sehingga setiap data pelayanan ibu hamil dapat terekam dalam system pencatatan pelaporan yang sama. ✓ Peningkatan kapasitas petugas bidan puskesmas dan bidan desa ✓ Memberikan edukasi kemasyarakatan tentang



No.	Bidang Urusan	Capaian SPM	Permasalahan	Solusi
			terutama di daerah-daerah terpencil dan perbatasan ✓ Masih ada Persalinan yang ditolong oleh Non Nakes ✓ Masih ada Persalinan Nakes yang ditolong dirumah (tidak sempat dibawa ke Fasilitas Kesehatan) ✓ Karena Faktor Ekonomi, masih ada ibu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan ✓ Masih kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat tentang pentingnya perkembangan dan tumbuh kembang anak ✓ Pemantauan pertumbuhan pada balita (penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan) sulit untuk dilakukan di rumah karena memerlukan alat dan kompetensi dalam pengukuran. ✓ Masih kurangnya kedisiplinan petugas dalam pencatatan register kohort bayi dan balita ✓ Kunjungan Balita di atas 2 tahun ke Posyandu atau fasilitas kesehatan cukup rendah ✓ Pelaksanaan posyandu remaja belum maksimal ✓ Adanya pergantian Petugas UKS yang sudah terlatih ✓ Belum Maksimalnya penggunaan Google Form dalam pemeriksaan Kesehatan ✓ Prilaku Masyarakat yang mana dipengaruhi oleh beberapa factor pendukung antara lain (waktu tempuh, jarak tempuh, Sehingga sarana dan prasarana Posbindu, serta dukungan kader, dan dukungan tenaga kesehatan. ✓ Kurangnya Minat Masyarakat yang mau datang berkunjung keposbindu dikarenakan masyarakat tidak	persalinan di fasilitas Kesehatan ✓ Pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) untuk mendekatkan akses ke Fasilitas ✓ Memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya penanganan Kesehatan bayi ✓ Optimalisasi pemanfaatan buku KIA sebagai instrument pemantauan bayi baru lahir. ✓ Memberikan edukasi kemasyarakatan tentang pemanfaatan Buku KIA ✓ Pembinaan Kesehatan balita ✓ Peningkatan kapasitas petugas tenaga bidan dan tenaga gizi tentang SDIDTK ✓ Monitoring dan evaluasi pencatatan pelaporan ✓ Pemanfaatan Teknologi informasi dalam penyelenggaraan Kelas ibu balita (Kelas online, webinar, WA group) ✓ Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan balita melalui kelas online. ✓ Meningkatkan komitmen Organisasi Profesi dalam Pemanfaatan Buku KIA ✓ Pelaksanaan kegiatan UKS dilaksanakan di dalam dan luar gedung. Pelaksanaan kegiatan UKS merupakan kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor di Kecamatan. ✓ Peningkatan Kapasitas petugas ✓ Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka ✓ Aktifitas Kunjungan Posbindu PTM, Sangat didukung oleh peran serta kader, tenaga kesehatan



No.	Bidang Urusan	Capaian SPM	Permasalahan	Solusi
			mengetahui akan manfaat Posbindu. ✓ Jumlah Posbindu Belum sesuai dengan Jumlah ketersediaan paket Posbindu KIT. dari 135 Fasilitas POSBINDU PTM di 12 kecamatan baru 92 Paket Posbindu yang tersedia/ yang ada. ✓ Istilah Posbindu PTM Belum populer dikalangan masyarakat pedesaan/kelurahan. ✓ Kunjungan yang berulang dengan orang yang sama (tidak ada By name By address) ✓ Mayoritas penduduk usia produktif petani dan nelayan sehingga ketersediaan waktu dalam melakukan screening terhambat dan tidak optimal ✓ Belum terbentuk Puskesmas Santun Lansia ✓ Kurangnya alat Skrining untuk pelayanan lansia diposyandu lansia ✓ Kurangnya kesadaran para lansia untuk memeriksakan Kesehatan setiap bulannya ✓ Pengukuran tekanan darah masih terbatas pada lansia yang dilaksanakan secara bersamaan dengan posindu lansia. ✓ Penyuluhan kesehatan belum dilakukan secara rutin baik dalam maupun luar gedung. penyuluhan hanya terbatas pada masyarakat tertentu yang mana dilakukan pada penderita hipertensi pada saat melakukan pemeriksaan atau berobat. ✓ Pergantian pengelola program PTM dipuskesmas yang selalu berganti setiap tahunnya ✓ Rangkap tugas pengelola program PTM dipuskesmas ✓ Indikator Pelayanan kesehatan pada diabetes melitus belum sesuai	dan pemerintah desa setempat serta letak geografis yang mudah untuk diakses bagi masyarakat setempat dan juga fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, strategis merupakan faktor terpenting. ✓ Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Posbindu PTM dapat dilakukan dilingkungan tempat tinggal, dalam wadah desa /kelurahan ataupun fasilitas public lainnya seperti sekolah, tempat kerja, tempat ibadah yang mana kegiatan ini dapat berlangsung secara terintegrasi dengan kegiatan masyarakat. ✓ Perlu adanya penambahan Paket Posbindu KIT ✓ Mensosialisasikan pedoman – pedoman Pelayanan kesehatan lansia melalui media KIE ✓ Edukasi masyarakat tentang pentingnya pelayanan Kesehatan pada lansia ✓ Penemuan Faktor resiko PTM sedini mungkin dilakukan pada individu dan kelompok yang sehat atau beresiko pada usia produktif, ✓ Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan PTM terpadu yang Komprehensif dan berkualitas Khususnya difasilitasi pelayanan kesehatan tingkat primer, termasuk system rujukan ke tingkat lanjut. ✓ Advokasi dan kemitraan ✓ Teridentifikasinya upaya-upaya lintas Sektor untuk mendukung penanggulangan PTM. ✓ Pengelola program sebaiknya tidak berganti-ganti dalam kurun waktu



No.	Bidang Urusan	Capaian SPM	Permasalahan	Solusi
			standar dikarenakan pasien Diabetes Melitus tidak melakukan kunjungan setiap bulannya ke FKTP untuk control GDS. ✓ Kurangnya dukungan tokoh masyarakat terhadap keaktifan posbindu PTM dalam screening posbindu PTM. ✓ Capaian Target dipengaruhi oleh faktor sumber daya tenaga /petugas puskesmas yang menangani Program penanganan orang dengan gangguan jiwa berat di wilayah kerja puskesmas . ✓ Keterbatasan ketersediaan therapy farmakologi bagi pasien orang dengan jiwa berat. ✓ Pengelola Program Keswa dan Napza yang selalu berganti ganti tiap Tahun. ✓ Kurang optimalnya pengisian form skrining (Strength and difficulties questionnaire – SDQ) Pada kategori usia : 4 – 10 tahun.usia11-18 tahun, oleh pengelola program, disekolah2,dan oleh guru Bimbingan Konseling ✓ Pemasungan yang masih ditemukan dilapangan ✓ Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang kurang memadai sehingga dalam pelayanan TBC belum maksimal. ✓ Selain itu Penyuluhan TBC secara massal yang sudah dijadwalkan juga seringkali tidak dapat dilaksanakan. ✓ Faktor penghambat lain yang ada di Puskesmas yaitu tingkat pendidikan pasien yang rendah juga mempengaruhi komunikasi yang kurang komunikatif antara petugas kesehatan dengan pasien sehingga pasien seringkali tidak memahami penjelasan yang dokter sampaikan.	yang singkat. (Maksimasi 5 tahun)yang mana sudah tertuang dalam SK Pengelola program PTM yang ditanda tangani oleh kepala dinas kesehatan. ✓ Perlu dilakukan pembinaan,bimtek secara berkala dan monitoring Aplikasi SIPTM bagi pengelola program PTM ✓ Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan PTM terpadu yang Komprehensif dan berkualitas Khususnya difasilitasi pelayanan kesehatan tingkat primer, termasuk system rujukan ke tingkat lanjut. ✓ Advokasi dan kemitraan ✓ Teridentifikasinya upaya-upaya lintas sektor untuk mendukung penanggulangan PTM. ✓ Penyelenggaraan pelatihan GME bagi pengelola program Kesehatan jiwa dan Napza ✓ Menganalkan gerakan stop pemasangan bagi penderita/pasien ODGJ ✓ Advokasi dan kemitraan ✓ Teridentifikasinya upaya-upaya lintas sektor untuk mendukung penanggulangan program kesehatan jiwa dan napza serta penanganan pasien ODGJB diwilayah kerja puskesmas kecamatan kabupaten/kota. ✓ System rujukan yang saling terintegrasi. ✓ Perlu adanya dana yang cukup dalam pengendalian dan penanganan penularan kasus TB, perlu disediakan insentif yang sesuai bagi nakes (selaku penanggung jawab program TB) baik yang berada di Dinas Kesehatan selaku (Wasor Kabupaten) dan petugas



No.	Bidang Urusan	Capaian SPM	Permasalahan	Solusi
			✓ Sumber daya manusia yang masih kurang terlatih pada program TBC. ✓ Terjadinya mutasi petugas yang sudah dilatih. ✓ Kurang optimalnya pelayanan skrining HIV-AIDS dan IMS dikarenakan kurangnya kerja sama antara pengelola TB dan bidan pada puskesmas ✓ Selain itu masih kurangnya kegiatan penyuluhan secara massal pada masyarakat khusus pada Ibu Hamil. ✓ Faktor penghambat lain yakni tingkat pendidikan pasien yang rendah juga mempengaruhi komunikasi antara petugas kesehatan dengan pasien sehingga pasien seringkali tidak memahami penjelasan yang dokter sampaikan atau petugas kesehatan kesehatan lainnya. ✓ Masih terbatasnya bahan dan alat diantaranya rotator di fasyankes, yang sekarang tersedia tinggal 2 (dua) unit yang ada di puskesmas Paleleh dan Biau dan yang lainnya dalam keadaan rusak.	TB di Puskesmas serta restrukturisasi ketenagaan dengan cara penambahan tenaga kesehatan agar pelaksanaan program penanggulangan TBC di Puskesmas dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. ✓ Perlu adanya penambahan/pengadaan TCM (Tes Cepat Molekuler) dan Mikroskop di laboratorium puskesmas dan di rumah sakit Pratama untuk diagnosa dalam penemuan sedini mungkin kasus TBC sebagai upaya dalam pemutusan rantai penularan sehingga pelaksanaan program penanggulangan TBC bisa berjalan dengan baik. ✓ Kegiatan di luar gedung dalam upaya penggulungan penyakit TBC harus lebih ditingkatkan dalam rangka penemuan kasus sedini mungkin, misalnya melalui kegiatan penyuluhan massal dan pemeriksaan dahak secara gratis yang dilaksanakan di tingkat RW. ✓ Meningkatkan peran serta petugas kesehatan, yang diperlukan dalam rangka meningkatkan program penanggulangan penyakit TB Paru yang dilakukan dengan memberikan dorongan dan bimbingan bagi masyarakat dan penderita TB Paru untuk dapat menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. ✓ Perlu adanya dana yang cukup dalam pengendalian dan penanganan penularan kasus HIV-AIDS, agar



No.	Bidang Urusan	Capaian SPM	Permasalahan	Solusi
				pelaksanaan program penanggulangan kasus HIV dapat dilaksanakan dengan baik. ✓ Perlu adanya penambahan/pengadaan rotator di puskesmas untuk diagnosa dalam penemuan sedini mungkin kasus HIV-AIDS sebagai upaya dalam pemutusan rantai penularan. ✓ Diharapkan adanya pendataan pada 8 (delapan) populasi kunci, terutama pada kelompok berisiko (Waria, WPS, Penasun dan LSL).
3	Pekerjaan Umum	100 %	✓ Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan SPM ✓ Dalam Hal Penempatan jabatan fungsional harus sesuai dengan disiplin ilmu ✓ Terbatasnya Anggaran dalam Penerapan Program Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Buol.	✓ Mengirimkan Pegawai untuk mengikuti Sosialisasi SPM baik yang diselenggarakan oleh Propinsi Sulawesi Tengah maupun Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. ✓ Mengoptimalkan Anggaran yang ada dalam Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Buol
4	Perumahan Rakyat	50%	✓ Untuk penanganan bencana pemerintah daerah memberikan wewenang ini kepada BPBD sehingga Data SPM terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban bencana daerah Kabupaten/Kota ✓ Masih Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan menata lingkungannya	✓ Diharapkan agar hal terkait Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota diarahkan ke BPBD Kabupaten Buol selaku leading sektor untuk penanganan bencana daerah ✓ Melakukan sosialisasi agar selalu menjaga dan menata lingkungan perumahan dan permukiman
5	Trantibum Linmas	97,70 %	✓ Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	✓ Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan



No.	Bidang Urusan	Capaian SPM	Permasalahan	Solusi
			✓ Kurangnya Personil dalam Penanganan panggulangan ✓ Kurangnya Sarana dan Prasaran Penunjang Operasional ✓ Minimnya ketersediaan Anggaran dalam pelaksanaan Program Kegiatan dan Penanganan Bencana ✓ Kualitas SDM personil penanggulangan bencana dalam setiap penanganan kebencanaan masih kurang ✓ Kurangnya Personil dalam Penanganan panggulangan ✓ Kurangnya Sarana dan Prasaran Penunjang Operasional ✓ Minimnya ketersediaan Anggaran dalam pelaksanaan Program Kegiatan dan Penanganan Bencana ✓ Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana / infrastruktur, kondisi existing yang ada masih belum mendukung efektifitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran. ✓ Cakupan layanan/akses dukungan sumber air untuk penanggulangan kebakaran masih relatif rendah ✓ Belum adanya Pos Sektor Damkar Kecamatan di 11 Kecamatan yang Ada di Kabupaten Buol	funksinya dalam menegakan Perda / Perkada untuk menciptakan Kabupaten Buol yang aman, tertib dan kondusif. ✓ Melakukan Koordinasi dengan OPD Terkait kurangnya Personil dalam Penanggulangan Bencana ✓ Melakukan Koordinasi dengan TIM TAPD untuk penambahan Anggaran sesuai kebutuhan ✓ Menambah suplai air (hydrant) di titik-titik yang tepat agar dapat dijangkau dengan mudah oleh petugas pemadam kebakaran. ✓ Tambahan anggaran untuk mendirikan / menambah pos sektor damkar di Kecamatan yang relatif jauh. ✓ Melakukan Koordinasi dengan OPD Terkait kurangnya Personil dalam Penanggulangan Bencana ✓ Melakukan Koordinasi dengan TIM TAPD untuk penambahan Anggaran sesuai kebutuhan. ✓ Menambah suplai air (hydrant) di titik-titik yang tepat agar dapat dijangkau dengan mudah oleh petugas pemadam kebakaran. ✓ Tambahan anggaran untuk mendirikan / menambah pos sektor damkar di Kecamatan yang relatif jauh.
6	Sosial	85,44 %	✓ Belum semua penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dapat tertangani; ✓ Terkait hal - hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang endukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal	✓ Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait , lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS; ✓ Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif



No.	Bidang Urusan	Capaian SPM	Permasalahan	Solusi
				masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. ✓ Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana prasarana pelayanan dalam penanganan PMK

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami dua kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Di antara penyesuaian tersebut adalah pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di sejumlah bidang agar adil, rasional, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Selanjutnya, Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Definisi ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Pengelolaan keuangan daerah adalah istilah kolektif untuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam mengelola keuangan daerah, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, ekonomis, efisien, dan tertib. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan ditentukan oleh seberapa baik pengelolaan keuangan daerah menyelesaikan inisiatif yang telah dimulai. Pengelolaan keuangan mencakup pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan, pengeluaran, dan



pendanaan daerah. Memaksimalkan pendapatan dari sumber internal dan meminimalkan pendapatan dari dana transfer akan membuat daerah menjadi lebih mandiri dan berkembang. Tingkat kompetensi keuangan daerah Kabupaten Buol juga dapat diketahui dengan melihat kondisi kinerja keuangan daerah, termasuk kinerja keuangan masa lalu dan prinsip-prinsip pengelolaannya.

2.2.1 Kinerja Keuangan Periode Sebelumnya

Salah satu unsur daerah yang tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pembiayaan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dijabarkan secara kuantitatif dalam APBD, yang disusun dalam suatu struktur yang menguraikan tugas pokok dan fungsi berdasarkan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil masyarakat dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, salah satu instrumen kebijakan yang digunakan di daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat adalah APBD. Menganalisis pelaksanaan APBD selama lima (5) tahun diperlukan untuk mengkaji pengelolaan keuangan daerah dan memberikan gambaran mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pelaksanaan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus memahami berbagai tujuan keuangan, pengeluaran, dan pendapatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum kita dapat mengkaji manajemen keuangan daerah. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menentukan kerangka kerja keuangan di masa depan dengan memperhitungkan peluang dan tantangan yang akan muncul. Adapun komponen-komponen APBD adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan Daerah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dirinci ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Pada tabel berikut akan dituangkan Realisasi APBD Tahun 2020-2024:



Tabel 2.13
Realisasi APBD Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	69.335.414.536,42	56.369.112.850,66	63.329.146.672,89	77.276.237.415,40	89.914.198.490,93
	B. Pendapatan Transfer	860.870.028.017,00	838.230.595.137,00	792.603.008.994,00	799.090.984.481,00	951.050.122.430,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	57.869.590.541,00	30.049.812.820,00	27.234.562.528,00	11.827.655.734,00	27.315.572.995,00
	JUMLAH PENDAPATAN	988.075.033.094,42	924.649.520.807,66	883.166.718.194,89	888.194.877.630,40	1.068.279.893.915,93
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	573.569.444.431,69	584.358.017.722,31	630.404.920.566,30	639.941.931.088,71	786.226.272.458,86
	B. Belanja Modal	187.303.569.968,00	165.863.625.089,18	90.052.343.471,00	135.187.111.105,99	166.246.435.653,00
	C. Belanja Tak Terduga	31.624.459.304,00	1.392.464.344,00	4.022.985.150,00	1.051.770.082,00	2.116.140.237,00
	D. Belanja Transfer	147.806.645.475,65	146.235.727.209,00	136.347.708.618,00	146.298.389.972,00	152.797.189.992,00
	JUMLAH BELANJA	792.497.473.703,69	924.649.520.807,66	860.827.957.805,30	922.479.202.248,70	1.107.386.038.340,86
	SURPLUS/DEFISIT	47.770.913.915,08	26.799.686.443,17	22.338.760.389,59	(34.284.324.618,30)	(39.106.144.425,93)
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	6.189.074.268,51	54.380.125.190,19	80.772.759.205,81	103.110.721.595,40	69.051.760.359,36
	B. Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	4.689.074.268,50	54.380.125.190,19	80.772.759.205,81	103.110.721.595,40	69.051.760.359,36
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	52.459.988.183,59	81.179.811.633,36	103.111.519.595,40	68.826.396.977,10	29.945.615.934,43

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol

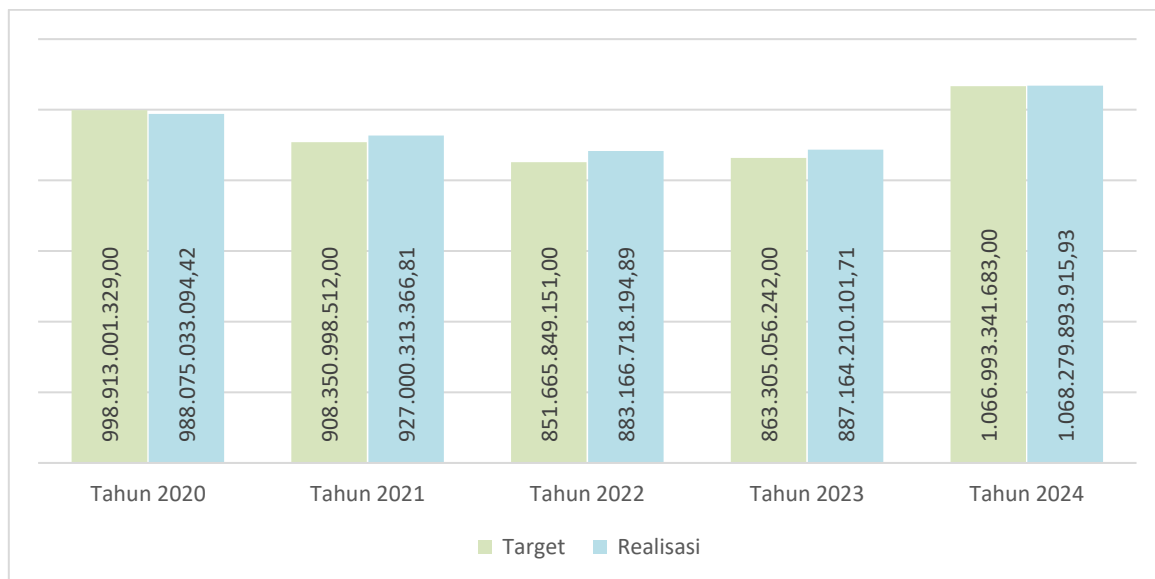


Dari Tabel diatas dapat dilihat beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah didefinisikan sebagai semua dana yang diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah, dan lain-lain pendapatan yang diakui sebagai penambah nilai ekuitas dana yang menjadi hak Daerah dalam periode satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Pendapatan Transfer; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa dalam 5 tahun terakhir Tahun 2024 menjadi tahun dengan Pendapatan daerah tertinggi di Kabupaten Buol dengan Total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.068.752.981.917,47,-. Angka ini ditopang dari Pendapatan Transfer yang memberikan kontribusi 89,03% atau sebesar Rp. 951.050.122.430,00,- dari total Pendapatan Daerah. Kemudian diikuti dengan Pendapatan Asli Daerah menyumbang Rp.90.387.286.492,47,- atau sebesar 8,42%. Dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 27.315.572.995,- atau sebesar 2,56%.

Analisis kinerja pendapatan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi masing-masing komponen pembentuk pendapatan daerah dengan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Perkembangan kinerja pendapatan daerah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Gambar 2.67

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Buol Tahun 2020-2024

Adapun Rincian Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Buol Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.14
Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Buol Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
4	Pendapatan Daerah	98,92	102,05	103,70	102,76	100,12
4.1	Pendapatan Asli Daerah	100,10	99,30	99,24	114,51	129,31
4.2	Pendapatan Transfer	98,74	102,33	101,56	101,45	98,51
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	100,07	99,93	368,09	190,06	85,39

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buol, 2025

Berdasarkan data yang disajikan di atas, kinerja pendapatan daerah secara keseluruhan terlihat cukup stabil antara tahun 2020 dan 2024. Hasilnya, selama lima tahun sebelumnya, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Buol secara umum cukup konsisten dan memenuhi target. Kabupaten Buol memiliki kinerja pendapatan terbaiknya pada tahun 2022, ketika realisasi pendapatan daerah mencapai 103,60 persen dari target pada tahun tersebut. Pencapaian ini ditopang oleh Pendapatan Transfer yang melebihi target sebesar 101,56%. Selanjutnya,



pencapaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 99,24% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar 368,09%.

Saat ini, pendapatan transfer masih merupakan porsi terbesar dari pendapatan daerah. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama lima tahun sebelumnya harus dihitung untuk menghasilkan estimasi pendapatan daerah di masa depan. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buol untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Rata-Rata pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Buol Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rerata
4	Pendapatan Daerah	0,34	(6,18)	(4,73)	0,45	20,42	2,06
4.1	Pendapatan Asli Daerah	13,32	(18,70)	12,34	33,02	6,74	9,34
4.2	Pendapatan Transfer	(3,73)	(2,63)	(5,44)	0,83	19,00	1,61
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	97,66	(44,02)	(15,94)	(86,36)	635,19	117,31

Data yang mencakup tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan dalam perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Buol. Namun secara persentase, capaian pendapatan masih dalam angka yang memuaskan karena dalam lima tahun terakhir semua sumber pendapatan masih dalam pertumbuhan positif.

2. Belanja Daerah

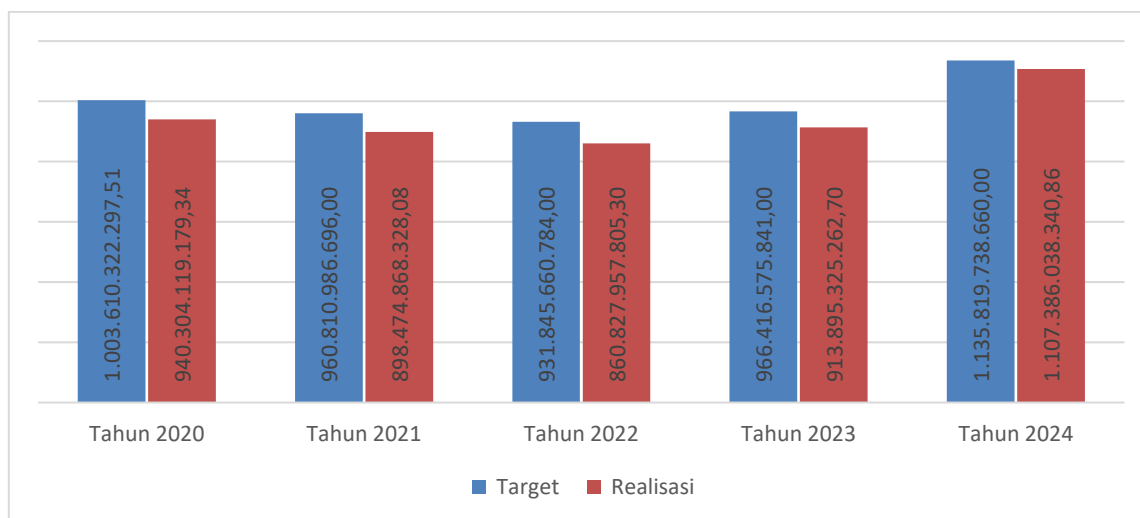
Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dianggap sebagai Belanja Daerah, demikian pula dengan pengeluaran lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dicatat sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang merupakan kewajiban Daerah dalam periode satu tahun anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, menjadi dasar dari penjelasan ini. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ada empat kategori untuk pembagian belanja daerah: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dengan memberikan nilai yang sama pada



pelaporannya, klasifikasi ini akan menjamin bahwa penganggaran di masa depan akan dapat diperbandingkan dan meningkatkan kualitas informasi yang diberikan.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Modal adalah merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dan Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir Belanja Terbesar terjadi pada Tahun 2024 dengan total belanja daerah sebesar Rp.1.106.975.377.457,12,-. Pada tahun 2024 kategori belanja paling besar yaitu pada Belanja Operasi sebesar Rp.785.957.404.395,12,- Kemudian Belanja Modal sebesar Rp.166.104.642.833,-, Belanja Transfer sebesar Rp.152.797.189.992,00 dan Belanja Tidak terduga sebesar Rp.2.116.140.237,-.

Analisis kinerja belanja daerah adalah proses evaluasi untuk mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam menggunakan anggarannya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Berikut adalah perbandingan target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Buol Tahun 2020-2024:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Gambar 2.68
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Buol Tahun 2020-2024

Adapun Rincian Persentase Realisasi Belanja Daerah Kab. Buol Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.15
Realisasi Belanja Daerah Kab. Buol Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
5	Belanja	93,69	93,51	92,38	94,57	97,50
5.1	Belanja Operasi	95,31	93,27	91,24	93,31	98,77
5.2	Belanja Modal	85,75	90,75	91,56	96,12	90,09
5.3	Belanja Tidak Terduga	89,25	30,34	64,65	36,45	99,83
5.4	Belanja Transfer	99,92	99,98	99,98	100,00	84,65

Tabel di atas menggambarkan bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Buol dalam merealisasikan belanja daerah, dimana setiap tahun tingkat penyerapannya terus meningkat dan berada di atas 90%. Selain itu, belanja modal juga terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buol telah meningkatkan kinerja realisasi belanja modal, terutama yang terkait dengan peningkatan infrastruktur daerah, sehingga dapat memberikan dampak yang besar bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Informasi yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan kebijakan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Buol, yang terutama difokuskan untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan menyediakan lebih banyak dana



untuk proyek-proyek modal, barang, dan jasa dibandingkan dengan belanja lainnya. Belanja modal lebih tinggi daripada jenis belanja lainnya. Pemerintah Kabupaten Buol menyumbang persentase terbesar dari kedua jenis belanja tersebut secara keseluruhan, maka dapat dikatakan bahwa belanja modal didedikasikan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan pelayanan publik.

Sementara itu Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Buol untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kab. Buol Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rerata
5	Belanja	(4,24)	(4,45)	(4,19)	6,16	21,17	2,89
5.1	Belanja Operasi	(4,87)	1,99	7,77	0,39	24,23	5,90
5.2	Belanja Modal	(17,64)	(11,46)	(45,70)	48,45	24,36	(0,40)
5.3	Belanja Tidak Terduga	26.307,08	(95,60)	187,10	(74,63)	(56,74)	5.253,80
5.4	Belanja Transfer	(2,40)	(1,06)	(6,76)	7,30	(98,55)	(20,30)

Data yang mencakup tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan dalam perkembangan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Buol. Namun secara persentase, capaian belanja masih dalam angka yang memuaskan karena dalam lima tahun terakhir masih dalam pertumbuhan positif.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Secara sederhana, pembiayaan daerah adalah alat untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Di Kabupaten Buol Penerimaan Pembiayaan Daerah Paling Tinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp.103.110.721.595,40,- sedangkan untuk pengeluaran



pembiayaan dalam lima tahun terakhir hanya terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp.1.500.000.000 sebagai Penyertaan Modal Daerah.

2.2.2 Neraca Daerah

Neraca daerah adalah salah satu dari laporan keuangan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah. Laporan ini memberikan gambaran tentang posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu, biasanya akhir tahun anggaran. Secara sederhana, neraca daerah menunjukkan apa yang dimiliki daerah (aset), apa yang menjadi kewajiban (Liabilitas) dan kekayaan bersih daerah (ekuitas dana).

Aset adalah Seluruh sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Kewajiban (Liabilitas) adalah Kewajiban yang harus dibayarkan pemerintah daerah kepada pihak lain, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban. Ekuitas menunjukkan nilai kekayaan yang dimiliki daerah setelah dikurangi semua utangnya. Berikut adalah Neraca Daerah Kabupaten Buol Tahun 2020-2024:



Tabel 2.17
Neraca Daerah

No	Uraian		Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	
1	ASET						
	A. Aset Lancar	76.633.775.873,50	116.573.781.064,33	137.068.518.913,59	116.399.883.595,28	99.671.511.744,77	
	B. Investasi Jangka Panjang	196.573.500,00	115.043.000,00	38.331.479.404,63	38.306.473.904,63	37.141.649.214,63	
	C. Aset Tetap	145.229.942.445,37	1.799.856.092.292,03	1.751.643.448.474,88	1.713.393.182.024,27	1.883.248.177.511,59	
	D. Aset Lainnya	161.665.369.356,60	82.963.767.546,70	88.389.839.952,25	190.018.187.001,30	130.429.047.373,30	
	JUMLAH ASET	2.019.919.668.743,92	2.037.082.323.115,69	2.015.433.286.745,35	2.058.117.726.525,48	2.150.490.385.844,29	
2	KEWAJIBAN						
	A. Kewajiban Jangka Pendek	7.638.292.697,72	15.388.675.303,33	13.942.369.817,44	9.407.962.111,77	9.934.130.769,26	
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN	7.638.292.697,72	15.388.675.303,33	13.942.369.817,44	9.407.962.111,77	9.934.130.769,26	
3	EKUITAS						
	Ekuitas	2.012.281.376.046,20	2.021.693.647.812,36	2.001.490.916.927,91	2.048.709.764.413,71	2.140.556.255.075,03	
	JUMLAH EKUITAS	2.012.281.376.046,20	2.021.693.647.812,36	2.001.490.916.927,91	2.048.709.764.413,71	2.140.556.255.075,03	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol



Dari Tabel diatas, secara keseluruhan, total aset daerah menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Ini menandakan bahwa kekayaan pemerintah daerah terus bertambah. Dapat dilihat untuk komponen Aset Daerah yang paling dominan terletak pada Aset tetap. Terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun 2020 sebesar Rp.1,45 milyar dan pada tahun 2024 menjadi Rp.1,88 Triliun. Peningkatan ini mengindikasikan adanya pembangunan fasilitas-fasilitas publik. Ini menunjukkan prioritas pemerintah daerah dalam investasi fisik untuk layanan kepada masyarakat. Kemudian Aset Lancar berfluktuasi. Puncaknya ditahun 2022, kemudian menurun ditahun-tahun terakhir. Penurunan ini wajar dan dapat diartikan bahwa kas yang ada digunakan untuk membiayai belanja, utamanya untuk pembangunan aset tetap. Kemudian Investasi Jangka Panjang memiliki nilai investasi yang melonjak tajam ditahun 2022 menjadi Rp. 38,33 Milyar dari tahun 2020 yang sempat menyentuh angka Rp.196,57 Milyar.

Sementara itu analisis Kewajiban menunjukkan kesehatan finansial yang sangat baik. Kewajiban jangka pendek jumlahnya relatif kecil dan berfluktuatif, namun secara umum terkendali dan tidak membahayakan posisi keuangan daerah. Kemudian kewajiban jangka panjang menunjukkan nilai nol. Ini adalah indikator yang sangat positif, karena artinya pemerintah daerah tidak memiliki utang jangka panjang yang harus dilunasi, menjadikannya bebas dari beban utang besar.

Analisis Ekuitas menunjukkan kekayaan bersih daerah (aset dikurangi kewajiban), menunjukkan tren kenaikan yang kuat dan konsisten. Nilai ekuitas terus bertumbuh seiring dengan kenaikan aset dan kondisi kewajiban yang sangat rendah. Ini menegaskan bahwa sebagian besar aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dibiayai oleh ekuitasnya sendiri, bukan dari pinjaman.

Secara keseluruhan, neraca daerah ini menggambarkan kondisi keuangan yang sangat sehat, kuat, dan mandiri. Pemerintah daerah berhasil meningkatkan kekayaannya secara signifikan, terutama melalui investasi besar pada aset tetap (pembangunan infrastruktur), tanpa harus menanggung beban utang jangka panjang. Hal ini menunjukkan tata kelola keuangan yang baik dan keberlanjutan fiskal yang tinggi.



2.2.3 Proyeksi Kerangka Pendanaan

Proyeksi Kerangka Pendanaan adalah perkiraan hasil keuangan di masa depan, yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Tujuannya adalah untuk memprediksi posisi keuangan pemerintah daerah dalam periode tertentu. Sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 menjelaskan bahwa Proyeksi Kerangka Pendanaan yang dilakukan mulai tahun 2026 hingga tahun 2030. Proyeksi pendapatan adalah perkiraan jumlah uang yang akan diterima oleh entitas dari berbagai sumber. Ini adalah langkah pertama dan paling krusial karena menjadi dasar untuk semua proyeksi lainnya. Proyeksi belanja adalah perkiraan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasional dan mencapai tujuan. Kemudian Proyeksi pembiayaan adalah perkiraan bagaimana entitas akan mendanai kegiatan dan investasinya, terutama jika pendapatan tidak mencukupi untuk menutupi seluruh belanja. Adapun proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Buol Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.18
Proyeksi Keuangan

No	Uraian	BASELINE TAHUN 2024	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah	89.914.198.490,93	89.135.886.334,00	101.484.854.430,56	106.320.024.152,09	111.396.952.359,69	116.727.726.977,68
	B. Pendapatan Transfer	951.050.122.430,00	920.512.261.690,00	958.693.405.499,08	1.006.628.075.774,03	1.056.959.479.562,73	1.109.807.453.540,87
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	27.315.572.995,00	13.007.000.000,00	14.340.217.500,00	15.057.228.375,00	15.810.089.793,75	16.600.594.283,44
	JUMLAH PENDAPATAN	1.068.279.893.915,93	1.022.655.148.024,00	1.074.518.477.429,64	1.128.005.328.301,12	1.184.166.521.716,17	1.243.135.774.801,98
2	BELANJA						
	A. Belanja Operasi	786.226.272.458,86	728.708.165.855,00	760.894.886.202,90	798.700.557.513,05	838.396.512.388,70	880.077.265.008,14
	B. Belanja Modal	166.246.435.653,00	144.632.391.987,00	153.088.755.914,06	160.743.193.709,77	168.780.353.395,25	177.219.371.065,02
	C. Belanja Tak Terduga	2.116.140.237,00	2.000.000.000,00	2.205.000.000,00	2.315.250.000,00	2.431.012.500,00	2.552.563.125,00
	D. Belanja Transfer	152.797.189.992,00	147.314.590.182,00	158.329.835.312,67	166.246.327.078,30	174.558.643.432,22	183.286.575.603,83
	JUMLAH BELANJA	1.107.386.038.340,86	1.022.655.148.024,00	1.074.518.477.429,64	1.128.005.328.301,12	1.184.166.521.716,17	1.243.135.774.801,98
	SURPLUS/DEFISIT	(39.106.144.425,93)	-	-	-	-	-
3	PEMBIAYAAN						
	A. Penerimaan Pembiayaan	69.051.760.359,36	-	-	-	-	-
	B. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	69.051.760.359,36	-	-	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	29.945.615.934,43					



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan bahwa total pendapatan diproyeksikan meningkat secara stabil setiap tahun dimulai dari Rp.1,022 triliun ditahun 2026 dan mencapai Rp.1,243 triliun ditahun 2030. Ini merupakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan optimisme terhadap penerimaan kas daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp89,135 milyar ditahun 2026 menjadi Rp116,727 milyar ditahun 2023. Ini merupakan cerminan upaya daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui pajak dan retribusi daerah. Namun komponen Pendapatan transfer menjadi pendapatan yang paling dominan. Ini mengindikasikan ketergantungan daerah keuangan daerah terhadap dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat. Kemudian pada peningkatan pendapatan lain-lain menunjukkan kenaikan secara konsisten, hal ini menunjukkan adanya potensi diversifikasi sumber penerimaan daerah di masa depan.

Pada analisis belanja daerah menunjukkan keseimbangan belanja dengan pendapatan, dimana semua pendapatan yang masuk langsung dialokasikan untuk membiayai belanja. Komponen belanja daerah yang paling besar terletak pada belanja operasi yang mencakup biaya rutin seperti gaji pegawai dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Kemudian Belanja modal diproyeksikan terus meningkat, mengindikasikan adanya komitmen pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur dan aset tetap lainnya. Sementara itu belanja tidak terduga juga dianggarkan menunjukkan adanya dana cadangan untuk mengantisipasi kejadian atau kebutuhan mendesak yang tidak terprediksi.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Buol dalam lima tahun ke depan merupakan hasil analisis gambaran umum daerah yang mencakup aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum, dan didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah selama lima tahun terakhir. Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan yang bersifat lintas sektor atau crosscutting, berskala makro, serta menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Buol yang masih relevan dalam lima tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut:



1. **Tantangan Geografis dan Tingginya Risiko Bencana Alam**

Kabupaten Buol memiliki wilayah yang luas yaitu 4.043,57 km² dengan topografi beragam mulai dari dataran rendah pesisir hingga pegunungan dengan puncak tertinggi mencapai 2.000 mdpl. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam hal aksesibilitas dan pemanfaatan lahan, terutama bagi Kecamatan Tiloan yang luas (1.437,70 km²) namun memiliki kepadatan penduduk sangat rendah sekitar 6,86 jiwa/km². Selain itu, kawasan karst dan pegunungan yang meliputi wilayah Kecamatan Biau dan Gadung membatasi pengembangan wilayah secara fisik. Kondisi geografis yang berupa daerah paparan dengan kedalaman laut kurang dari 200 m sepanjang pesisir juga menimbulkan kerawanan ekologis yang harus dikelola dengan hati-hati agar tidak mengganggu ekosistem. Faktor risiko bencana alam seperti banjir yang cukup tinggi (tercatat hingga 42 kasus di keseluruhan kabupaten tahun 2023) dan tanah longsor yang tersebar pada beberapa kecamatan menjadi tantangan tambahan dalam perencanaan ruang dan pengembangan wilayah.

2. **Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia**

Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Buol masih menghadapi berbagai tantangan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat belum sepenuhnya merata, baik antarwilayah maupun antar kelompok sosial. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, keterbatasan akses terhadap layanan publik yang berkualitas, serta rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian masyarakat.

Daya saing sumber daya manusia juga belum optimal untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Rendahnya kompetensi, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja menyebabkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi persaingan ekonomi dan perkembangan teknologi masih terbatas. Kondisi ini semakin diperburuk dengan belum optimalnya layanan pendidikan dan kesehatan, yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul.

Permasalahan di bidang pendidikan di Kabupaten Buol ditunjukkan oleh masih belum meratanya akses dan mutu layanan pendidikan antarwilayah. Tingkat partisipasi sekolah pada jenjang menengah masih relatif rendah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya memadai, baik dari segi ruang kelas, fasilitas pendukung, maupun



pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kualitas dan kompetensi tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan, sementara distribusinya belum merata. Kondisi ini turut memengaruhi capaian rata-rata lama sekolah, mutu lulusan, dan daya saing sumber daya manusia daerah.

Permasalahan dalam bidang kesehatan terutama terkait dengan masih adanya kesenjangan akses pelayanan kesehatan antarwilayah. Fasilitas pelayanan kesehatan di kecamatan terpencil masih terbatas, baik dari sisi jumlah, tenaga medis, maupun sarana dan prasarana pendukung. Masalah stunting, gizi buruk, dan penyakit menular masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat juga belum optimal. Selain itu, keterbatasan pembiayaan kesehatan dan sistem rujukan yang belum berjalan maksimal semakin membatasi kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.

3. **Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat**

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buol masih tergolong rendah dan menghadapi berbagai tantangan struktural. Hal ini ditunjukkan oleh capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang hanya sebesar 3,31 persen, terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tengah. Perlambatan pertumbuhan ini menunjukkan masih terbatasnya aktivitas ekonomi yang mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara signifikan.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan Kabupaten Buol pada tahun 2024 masih relatif tinggi, yakni sebesar 13,08 persen, yang mencerminkan belum optimalnya pemerataan hasil pembangunan. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya lapangan kerja yang layak, rendahnya produktivitas sektor unggulan, serta masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan sanitasi.

Kombinasi dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dan masih tingginya angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kabupaten Buol belum sepenuhnya meningkat. Permasalahan tersebut menjadi tantangan utama dalam upaya mendorong pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



4. **Belum Optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung perekonomian daerah**

Perekonomian Kabupaten Buol masih menghadapi kendala serius akibat belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan, belum sepenuhnya memadai baik dari sisi kualitas maupun jangkauan. Kondisi jalan yang rusak dan belum terhubung secara baik antarwilayah kecamatan maupun antar sentra produksi dengan pasar menyebabkan tingginya biaya distribusi barang dan jasa. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan publik serta melemahkan daya saing ekonomi daerah.

Selain jalan, infrastruktur pendukung lainnya seperti sarana transportasi, jaringan listrik, sistem irigasi, serta akses telekomunikasi dan internet juga masih belum merata. Keterbatasan tersebut menghambat optimalisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Kondisi ini semakin memperlebar kesenjangan antara wilayah perkotaan dengan perdesaan serta menjadi tantangan dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Buol.

5. **Belum optimalnya tata kelola pemerintahan**

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Buol masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera dibenahi untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. Permasalahan yang menonjol antara lain adalah efektivitas koordinasi antar perangkat daerah yang belum berjalan optimal, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan seringkali belum terintegrasi dengan baik. Kualitas perencanaan dan penganggaran juga masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam memastikan keterpaduan antara dokumen perencanaan dengan implementasi di lapangan.

Selain itu, pemanfaatan data dan sistem informasi pembangunan belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Keterbatasan kualitas sumber daya aparatur, baik dari segi kompetensi maupun pemanfaatan teknologi, turut memengaruhi efektivitas pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga masih perlu diperkuat, agar dapat mendorong terciptanya kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan ini menjadi tantangan strategis yang perlu ditangani, mengingat peran pentingnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, responsif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat Kabupaten Buol.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis dapat didefinisikan sebagai tantangan fundamental yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan sasaran, kebijakan, dan trajektori pembangunan daerah untuk jangka waktu menengah. Persoalan ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan program dan aktivitas pembangunan yang berdaya guna, berkesinambungan, dan terkoordinasi dengan agenda pembangunan di tingkat nasional dan regional. Proses mengidentifikasi isu strategis dilaksanakan dengan menganalisis beragam aspek mulai dari skala global, nasional, regional, hingga konteks lokal yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan daerah. Dengan pendekatan ini, formulasi kebijakan dan rancangan program pembangunan di Kabupaten Buol dapat diimplementasikan dengan lebih fokus, responsif, dan relevan dengan aspirasi serta problematika yang sedang dihadapi.



Gambar 2.69

Isu Stategis Global, Nasional, Regional, Sulawesi Tengah dan Buol



2.3.3 Isu Global

Beberapa isu global yang signifikan telah diidentifikasi sebagai faktor krusial dalam penyusunan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Buol, meliputi:

1. Ekonomi Global

Ekonomi global saat ini ditandai dengan interdependensi yang semakin kompleks, di mana perubahan pasar di satu negara dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara lain dengan cepat. Transformasi digital, perjanjian perdagangan multilateral, dan penguatan ekonomi negara berkembang telah mengubah lanskap ekonomi dunia secara signifikan. Tantangan seperti ketimpangan ekonomi, volatilitas pasar keuangan, dan ketidakpastian rantai pasok global semakin menonjol pasca pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik.

Kabupaten Buol sebagai daerah dengan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, dan sumber daya alam menghadapi tantangan dan peluang dari dinamika ekonomi global. Fluktuasi harga komoditas global seperti kelapa, kakao, dan hasil laut langsung mempengaruhi pendapatan petani dan nelayan lokal. Ketergantungan pada pasar ekspor membuat Buol rentan terhadap disrupsi ekonomi global, namun juga membuka peluang ketika permintaan global meningkat. Peran Kabupaten Buol dalam ekonomi global terbilang kecil namun memiliki potensi signifikan dalam rantai pasok komoditas tertentu. Pemda Buol perlu mengembangkan strategi diversifikasi ekonomi, peningkatan nilai tambah produk lokal, dan penciptaan keunggulan kompetitif. Penguatan kapasitas UMKM, pelatihan digital marketing, dan fasilitasi sertifikasi produk menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing global.

Transformasi ekonomi Buol menuju ekonomi yang lebih tangguh menghadapi gejolak global memerlukan investasi infrastruktur, pengembangan SDM, dan kebijakan yang mendukung inovasi.



Penguatan konektivitas digital dan transportasi akan mempermudah akses pasar, sementara kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset dapat mendorong inovasi produk berbasis sumber daya lokal. Sinkronisasi kebijakan daerah dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan global juga krusial untuk mengoptimalkan manfaat dari integrasi ekonomi.

2. Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda global 2015-2030 yang melanjutkan dan memperluas capaian Millennium Development Goals (MDGs). Dengan 17 tujuan dan 169 target, SDGs mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara komprehensif untuk mewujudkan prinsip "no one left behind". Dibandingkan MDGs, SDGs menekankan universalitas (berlaku untuk semua negara), integrasi (mempertimbangkan keterkaitan antar tujuan), dan partisipasi (melibatkan berbagai pemangku kepentingan).

Bagi Kabupaten Buol, SDGs menjadi kerangka strategis untuk perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Isu-isu prioritas seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), ketahanan pangan (SDG 2), pendidikan berkualitas (SDG 4), kesehatan (SDG 3), dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan (SDG 14 dan 15) menjadi fokus pembangunan daerah. Kerangka SDGs membantu Buol mengidentifikasi kesenjangan pembangunan dan menetapkan target yang terukur.

Pengaruh SDGs terhadap Kabupaten Buol terlihat dari perubahan pendekatan dalam dokumen perencanaan daerah yang semakin mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan. Program-program pembangunan daerah kini lebih mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDGs juga membuka akses pendanaan pembangunan dari berbagai sumber, termasuk



kemitraan internasional, khususnya untuk program-program yang selaras dengan prioritas global.

Peran Kabupaten Buol dalam pencapaian SDGs mencakup lokalisasi SDGs melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs, pengarusutamaan SDGs dalam RPJMD, dan penguatan sistem data untuk pemantauan capaian SDGs di tingkat daerah. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media menjadi pendekatan utama implementasi SDGs di Buol. Inovasi daerah yang selaras dengan SDGs, seperti program desa tangguh bencana, pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, menjadi kontribusi Buol terhadap pencapaian agenda global.

3. Pertumbuhan Penduduk & Urbanisasi Global

Pertumbuhan penduduk global terus berlanjut meskipun dengan laju yang melambat, dengan proyeksi mencapai 9,7 miliar pada 2050. Fenomena yang menonjol adalah urbanisasi yang pesat, di mana lebih dari 55% populasi dunia kini tinggal di wilayah perkotaan dan diproyeksikan meningkat menjadi 68% pada 2050. Perubahan demografi ini juga ditandai dengan aging population di negara maju sementara bonus demografi terjadi di banyak negara berkembang. Tantangan utama meliputi kebutuhan infrastruktur perkotaan, tekanan pada sumber daya, dan tuntutan layanan publik yang berkualitas.

Kabupaten Buol menghadapi dinamika penduduk yang kompleks, dengan migrasi penduduk muda ke kota-kota besar yang menimbulkan tantangan brain drain dan aging population di beberapa wilayah pedesaan. Konsentrasi penduduk di ibukota kabupaten menciptakan tekanan pada infrastruktur dan layanan dasar, sementara beberapa wilayah pedesaan mengalami penurunan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan penduduk juga meningkatkan



kebutuhan lapangan kerja, perumahan, dan layanan pendidikan serta kesehatan.

Pengaruh tren global ini mendorong Kabupaten Buol untuk mengembangkan perencanaan tata ruang yang lebih adaptif, memperkuat pusat-pusat pertumbuhan sekunder untuk mengurangi kesenjangan desa- kota, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Urbanisasi menjadi pendorong untuk memodernisasi sektor pertanian dan perikanan melalui teknologi, serta mengembangkan industri pengolahan yang dapat menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah.

Peran Kabupaten Buol dalam merespon isu ini meliputi penyusunan kebijakan kependudukan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan, pengembangan program kewirausahaan untuk menciptakan peluang ekonomi bagi kaum muda di daerah, dan peningkatan kualitas pendidikan untuk mempersiapkan SDM yang kompetitif. Inovasi seperti program "Desa Masuk Kota" yang memperkuat konektivitas digital, transportasi, dan ekonomi antara desa dan kota menjadi pendekatan strategis untuk mengelola urbanisasi dan memastikan pertumbuhan yang inklusif di seluruh wilayah kabupaten.

4. Disrupsi teknologi Global

Disrupsi teknologi global ditandai dengan akselerasi perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, internet of things, blockchain, dan otomatisasi yang mempengaruhi hampir semua sektor kehidupan. Revolusi Industri 4.0 telah mengubah paradigma produksi, pola konsumsi, model bisnis, dan interaksi sosial. Teknologi digital membuka peluang efisiensi, inovasi, dan inklusivitas, namun juga menciptakan tantangan berupa kesenjangan digital, transformasi ketenagakerjaan, dan isu keamanan siber yang semakin kompleks.



Bagi Kabupaten Buol, disrupsi teknologi menghadirkan tantangan signifikan berupa kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan, keterbatasan infrastruktur TIK, dan rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Namun, perkembangan teknologi juga membuka peluang untuk "leapfrogging" dalam pembangunan melalui adopsi solusi digital dalam pelayanan publik, pertanian presisi, pemasaran produk lokal, dan pendidikan jarak jauh. Pengaruh transformasi digital terlihat dari perubahan pola perdagangan lokal yang semakin terintegrasi dengan platform e-commerce nasional.

Pemda Buol berperan penting dalam menjembatani kesenjangan digital melalui pengembangan infrastruktur TIK, pelatihan literasi digital untuk berbagai lapisan masyarakat, dan insentif untuk adopsi teknologi di sektor prioritas. Program unggulan seperti "Desa Digital" yang mengintegrasikan layanan administrasi desa, sistem informasi pertanian, dan marketplace produk lokal menjadi contoh lokalisasi transformasi digital. Kolaborasi dengan operator telekomunikasi untuk memperluas jangkauan internet dan dengan perguruan tinggi untuk transfer teknologi tepat guna menjadi strategi kunci.

Transformasi digital Buol memerlukan pendekatan inklusif yang memastikan manfaat teknologi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemda perlu mengantisipasi implikasi sosial-ekonomi dari otomatisasi melalui program reskilling dan upskilling tenaga kerja. Penguatan regulasi terkait perlindungan data dan cybersecurity juga menjadi prasyarat penting. Visi "Smart Regency" dengan penerapan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan publik menjadi arah strategis Buol dalam merespon disrupsi teknologi global.

5. Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global telah menjadi ancaman eksistensial dengan dampak yang semakin nyata berupa peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam, kenaikan permukaan laut, perubahan pola



cuaca, dan degradasi ekosistem. Laporan IPCC mengindikasikan urgensi pembatasan pemanasan global maksimal 1,5°C untuk menghindari konsekuensi katastrofik. Kesepakatan Paris menjadi kerangka aksi global yang mendorong komitmen nasional melalui Nationally Determined Contributions (NDCs) untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Sebagai kabupaten pesisir, Buol sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim berupa abrasi pantai, intrusi air laut, bencana hidrometeorologi, dan gangguan pada produksi pertanian dan perikanan. Kenaikan permukaan laut mengancam permukiman pesisir dan infrastruktur vital, sementara perubahan pola curah hujan mempengaruhi kalender tanam dan hasil panen. Ketergantungan ekonomi pada sektor primer yang sensitif terhadap iklim meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat Buol.

Pengaruh perubahan iklim mendorong transformasi dalam perencanaan pembangunan Buol menuju pendekatan yang lebih adaptif dan tangguh. Pertimbangan risiko iklim diintegrasikan dalam perencanaan tata ruang, desain infrastruktur, dan program pembangunan sektor. Perubahan iklim juga menjadi katalisator inovasi seperti pengembangan varietas tanaman tahan kekeringan, diversifikasi mata pencaharian, dan adopsi praktik pertanian berkelanjutan.

Peran Kabupaten Buol dalam merespon krisis iklim mencakup aksi mitigasi melalui program perlindungan hutan dan lahan gambut, pengembangan energi terbarukan, dan pengelolaan sampah terpadu. Di sisi adaptasi, Buol memperkuat sistem peringatan dini bencana, mengembangkan infrastruktur tangguh iklim, dan membangun kapasitas adaptif masyarakat melalui pendidikan dan pemberdayaan. Inisiatif lokal seperti program "Pesisir Lestari" yang mengintegrasikan konservasi mangrove, mata pencaharian alternatif,



dan mitigasi bencana menunjukkan kontribusi Buol dalam aksi iklim global dengan manfaat lokal yang nyata.

6. Sumber Energi Alternatif

Transisi energi global dari bahan bakar fosil menuju sumber energi terbarukan menjadi agenda kritikal dalam menjawab tantangan keamanan energi, akses energi, dan mitigasi perubahan iklim. Penurunan dramatis biaya teknologi energi terbarukan seperti surya dan angin, inovasi dalam penyimpanan energi, dan kebijakan karbon netral telah mempercepat transformasi sektor energi. Investasi global dalam energi bersih terus meningkat, dengan proyeksi energi terbarukan akan memenuhi 90% pertumbuhan permintaan listrik global hingga 2050.

Kabupaten Buol memiliki potensi signifikan untuk pengembangan energi terbarukan, termasuk tenaga surya dengan rata-rata radiasi matahari 4,8 kWh/m²/hari, mikrohidro dari beberapa sungai berdebit stabil, dan biomassa dari limbah pertanian dan kehutanan. Namun, akses energi masih menjadi tantangan di beberapa wilayah terpencil dengan rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100%. Ketergantungan pada diesel untuk pembangkit listrik di area terisolasi menimbulkan beban ekonomi dan lingkungan.

Pengaruh transisi energi global terhadap Buol tercermin dalam perubahan pendekatan perencanaan energi daerah yang semakin memprioritaskan sumber terbarukan, efisiensi energi, dan elektrifikasi. Program-program energi terbarukan juga membuka peluang ekonomi baru, termasuk lapangan kerja dalam instalasi dan pemeliharaan sistem energi terbarukan, ekowisata berbasis energi hijau, dan potensi investasi. Peningkatan akses energi melalui solusi off-grid dan mini-grid di daerah terpencil berkontribusi pada pengurangan kesenjangan pembangunan.

Peran Kabupaten Buol dalam transisi energi mencakup pemetaan potensi energi terbarukan, pengembangan regulasi yang mendukung



investasi energi bersih, dan implementasi proyek percontohan. Kolaborasi dengan kementerian terkait, lembaga donor, dan sektor swasta menjadi pendekatan utama dalam mengatasi tantangan pendanaan dan teknologi. Program unggulan seperti "Desa Mandiri Energi" yang mengintegrasikan PLTS untuk fasilitas publik, penerangan jalan, dan usaha produktif mendemonstrasikan komitmen Buol terhadap pembangunan rendah karbon dan kemandirian energi lokal.

7. Geopolitik dan Geoekonomi Kawasan

Lanskap geopolitik dan geoekonomi kawasan mengalami dinamika kompleks yang ditandai dengan persaingan strategis antara kekuatan besar, penguatan regionalisme ekonomi melalui berbagai perjanjian perdagangan, dan reorientasi rantai pasok global. Kawasan Indo-Pasifik menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi global sekaligus arena kontestasi geopolitik, sementara ASEAN berupaya mempertahankan sentralitas dan resiliensi di tengah tekanan dari berbagai kekuatan eksternal. Isu-isu non-tradisional seperti keamanan maritim, ekstremisme, dan kejahatan transnasional turut mempengaruhi stabilitas regional.

Sebagai kabupaten pesisir di Indonesia bagian timur, posisi geografis Buol memiliki nilai strategis dalam konteks geopolitik dan geoekonomi regional. Perbatasan maritim Indonesia dengan Filipina menjadikan Buol memiliki signifikansi dalam keamanan kawasan, termasuk potensi perikanan ilegal, penyelundupan, dan isu keamanan maritim lainnya. Letak Buol pada jalur pelayaran antar-pulau juga memiliki potensi strategis dalam konektivitas maritim nasional dan pertumbuhan ekonomi berbasis bahari.

Pengaruh dinamika kawasan terhadap Buol terlihat dari peluang dan tantangan yang muncul dari perjanjian perdagangan regional seperti RCEP dan ASEAN Economic Community. Integrasi ekonomi membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk unggulan Buol,



namun juga meningkatkan tekanan kompetitif dari produk impor. Kebijakan Belt and Road Initiative dan Indo-Pacific Economic Framework turut memengaruhi arus investasi infrastruktur dan orientasi pembangunan konektivitas di level nasional yang berimbas pada Buol.

Peran Kabupaten Buol dalam konteks geopolitik dan geoekonomi kawasan meliputi penguatan kapasitas perbatasan dan wilayah pesisir, pengembangan ekonomi maritim berkelanjutan, dan partisipasi dalam kerjasama sub-regional seperti BIMP-EAGA (Brunei-Indonesia-Malaysia- Philippines East ASEAN Growth Area). Melalui program "Poros Maritim Lokal", Buol mengoptimalkan posisi geografisnya untuk memperkuat konektivitas dengan pulau-pulau sekitar dan menciptakan hub ekonomi maritim skala lokal. Diplomasi ekonomi pada forum investasi regional dan nasional juga menjadi strategi untuk menarik investasi strategis yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

2.3.4 Isu Strategis Nasional

Pembangunan Kabupaten Buol tidak terlepas dari konteks kebijakan nasional dan tantangan yang dihadapi Indonesia secara keseluruhan. Beberapa isu strategis nasional yang relevan meliputi:

- 1. Bonus Demografi**

Bonus demografi merupakan kondisi demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif, yang dapat menjadi modal pembangunan ekonomi jika dimanfaatkan dengan baik. Indonesia diproyeksikan mengalami puncak bonus demografi pada periode 2020-2035, dimana sekitar 70% penduduk berada pada usia produktif. Kondisi ini memberikan peluang peningkatan produktivitas ekonomi, tabungan nasional, dan investasi yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,2-0,5 persen per tahun jika dikelola dengan tepat.

Namun, bonus demografi juga menyimpan tantangan berupa kebutuhan penciptaan lapangan kerja berkualitas yang memadai, peningkatan kualitas



pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan program jaminan sosial untuk mengantisipasi peningkatan populasi lanjut usia di masa mendatang. Tanpa pengelolaan yang strategis, bonus demografi dapat berubah menjadi bencana demografi berupa pengangguran massal, instabilitas sosial, dan beban ekonomi. Kabupaten Buol sebagai bagian dari ekosistem nasional perlu mengembangkan strategi khusus untuk memanfaatkan bonus demografi dengan mempertimbangkan karakteristik lokalnya. Peran Kabupaten Buol mencakup pengembangan program pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri lokal dan regional, pemetaan kebutuhan tenaga kerja berbasis proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, serta fasilitasi pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi pemuda lokal.

Pemerintah Kabupaten Buol juga dapat berperan dalam pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan SDM seperti pusat pelatihan terpadu, inkubator bisnis bagi wirausaha muda, dan penguatan akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa daerah dan pengembangan pendidikan jarak jauh. Kolaborasi strategis dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan menjadi kunci untuk memaksimalkan pemanfaatan bonus demografi di Kabupaten Buol.

2. Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan merupakan isu krusial mengingat keterbatasan sumber daya dan kapasitas lingkungan dalam menopang aktivitas pembangunan. Indonesia menghadapi tantangan serius berupa degradasi hutan, pencemaran perairan, penipisan cadangan mineral, krisis air bersih, dan degradasi lahan pertanian yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan. Konsep ini menekankan pentingnya mempertimbangkan batas-batas ekologis dalam perencanaan pembangunan untuk mencegah kerusakan permanen pada ekosistem yang menopang kehidupan.

Penerapan pendekatan pembangunan berkelanjutan memerlukan penilaian komprehensif terhadap kapasitas ekosistem, pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Tujuannya adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan



untuk memenuhi kebutuhan mereka, melalui keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kabupaten Buol dengan kekayaan sumber daya alamnya berupa hutan, lahan pertanian, dan wilayah pesisir memiliki tanggung jawab besar dalam implementasi konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah Kabupaten Buol perlu melakukan pemetaan komprehensif terhadap kapasitas ekosistem lokal, termasuk daya dukung lahan, kapasitas penyediaan air, dan kemampuan asimilasi limbah oleh lingkungan sebagai dasar perencanaan tata ruang dan perizinan usaha.

Dalam pengelolaan sumber daya, Kabupaten Buol dapat mengembangkan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan, praktik pertanian regeneratif, sistem pengelolaan air terpadu, serta pengembangan energi terbarukan berbasis potensi lokal. Pengembangan sistem pemantauan lingkungan partisipatif yang melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal juga menjadi kunci untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang tidak melampaui kapasitas lingkungan dan tetap menghormati kearifan lokal dalam perlindungan alam.

3. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan mengatasi berbagai permasalahan di Jakarta seperti kemacetan, banjir, penurunan tanah, serta ketimpangan pembangunan Jawa-luar Jawa. IKN dirancang sebagai kota pintar, hijau, dan berkelanjutan yang diharapkan menjadi katalisator pengembangan ekonomi di Kalimantan dan kawasan Indonesia timur, dengan investasi total diperkirakan mencapai Rp466 triliun hingga tahap penyelesaian.

Pembangunan IKN membawa implikasi signifikan terhadap transformasi spasial nasional, redistribusi alokasi anggaran pembangunan, pergeseran pusat aktivitas ekonomi, dan reformasi tata kelola pemerintahan. Tantangan utama mencakup kebutuhan pendanaan yang besar, koordinasi lintas sektor dan wilayah, mitigasi dampak lingkungan, serta memastikan integrasi sosial-ekonomi dengan wilayah sekitarnya.

Meskipun secara geografis berjauhan dengan lokasi IKN, Kabupaten Buol perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan dinamika pembangunan nasional akibat pemindahan ibu kota. Kabupaten Buol dapat



mengidentifikasi peluang pengembangan produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar di IKN, seperti komoditas pertanian organik, produk olahan hasil laut, atau kerajinan khas daerah yang dapat menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan IKN.

Pemerintah Kabupaten Buol perlu memperkuat konektivitas dengan pusat-pusat ekonomi nasional melalui pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik yang terintegrasi dengan jaringan nasional. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur juga diperlukan untuk mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan memanfaatkan program-program pengembangan daerah yang menyertai pembangunan IKN, termasuk potensi redistribusi anggaran pembangunan untuk pemerataan ke daerah-daerah luar Jawa.

4. Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)

Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) merupakan faktor krusial dalam menentukan daya saing bangsa di era ekonomi berbasis pengetahuan. Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya investasi untuk penelitian dan pengembangan (kurang dari 0,3% PDB), terbatasnya jumlah peneliti berkualitas, lemahnya keterkaitan antara riset dengan kebutuhan industri, serta minimnya hak kekayaan intelektual yang dihasilkan. Penguatan ekosistem inovasi nasional menjadi prioritas untuk mendorong transformasi ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan IPTEKIN memerlukan pendekatan sistematis yang mencakup pengembangan infrastruktur penelitian, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang sains dan teknologi, penguatan kolaborasi triple helix (akademisi, industri, pemerintah), serta penciptaan lingkungan yang kondusif untuk inovasi melalui insentif fiskal dan non-fiskal. Fokus utama adalah mendorong riset terapan yang dapat menyelesaikan tantangan pembangunan dan meningkatkan produktivitas sektor ekonomi strategis.

Kabupaten Buol perlu mengambil peran aktif dalam penguatan IPTEKIN di tingkat daerah dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan lokalnya. Pemerintah Kabupaten Buol dapat mengembangkan pusat inovasi daerah yang berfokus pada teknologi pertanian, perikanan, dan



pengolahan hasil alam yang relevan dengan potensi ekonomi lokal. Pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi regional untuk program riset terapan dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan daerah juga menjadi langkah strategis.

Investasi dalam infrastruktur digital seperti perluasan akses internet dan pengembangan layanan publik berbasis teknologi menjadi prasyarat untuk mendorong adopsi teknologi di masyarakat. Kabupaten Buol juga dapat mengembangkan program peningkatan literasi digital dan pelatihan teknologi tepat guna bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan sektor ekonomi unggulan daerah. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi untuk perencanaan berbasis data dan pengambilan keputusan menjadi kunci untuk memaksimalkan dampak IPTEKIN terhadap kualitas tata kelola daerah.

5. Mempercepat Proses Eliminasi Kemiskinan Ekstrem

Eliminasi kemiskinan ekstrim merupakan prioritas pembangunan nasional untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai kondisi pendapatan di bawah \$1,9 per hari yang menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Indonesia telah berkomitmen mengeliminasi kemiskinan ekstrim hingga di bawah 1% pada tahun 2024, yang memerlukan pendekatan multi-dimensi dan terintegrasi.

Strategi nasional eliminasi kemiskinan ekstrim mencakup perluasan dan penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih), serta pengembangan statistik kemiskinan yang akurat untuk intervensi tepat sasaran. Tantangan utama meliputi identifikasi kelompok miskin ekstrim yang sering tidak terjangkau program, koordinasi lintas sektor, serta kebutuhan pendanaan yang besar. Kabupaten Buol perlu mengembangkan strategi eliminasi kemiskinan ekstrim yang kontekstual dengan karakteristik kemiskinan lokal. Langkah pertama adalah melakukan pemetaan dan identifikasi kantong-kantong kemiskinan ekstrim di tingkat desa dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, dan kelompok



rentan. Data ini menjadi dasar untuk pengembangan program intervensi yang tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Buol dapat mengembangkan program terintegrasi yang mencakup perlindungan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan UMKM dan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa untuk pengelolaan program penanggulangan kemiskinan. Integrasi data kemiskinan dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah menjadi kunci untuk memastikan alokasi sumber daya yang memadai untuk program eliminasi kemiskinan ekstrim, disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil untuk mengukur efektivitas program.

6. Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Rendah

Deindustrialisasi dini merupakan fenomena dimana kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian menurun sebelum negara mencapai tahap ekonomi maju, yang dialami Indonesia dengan kontribusi manufaktur terhadap PDB turun dari 29% pada tahun 2001 menjadi sekitar 20% saat ini. Bersamaan dengan itu, produktivitas sektor pertanian Indonesia masih rendah dengan nilai tambah per pekerja hanya sekitar sepertiga dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, meskipun mempekerjakan sekitar 30% dari total tenaga kerja.

Kombinasi deindustrialisasi dini dan rendahnya produktivitas pertanian menciptakan tantangan struktural berupa terbatasnya kesempatan kerja produktif, ketimpangan pendapatan, dan kerentanan ekonomi terhadap gejolak eksternal. Dibutuhkan transformasi struktural ekonomi melalui reindustrialisasi berbasis inovasi, modernisasi pertanian, dan pengembangan rantai nilai yang terintegrasi antara pertanian dengan industri pengolahan untuk menciptakan nilai tambah optimal.

Kabupaten Buol dengan karakteristik ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer perlu mengembangkan strategi khusus untuk mengatasi tantangan produktivitas. Pemerintah Kabupaten Buol dapat memprioritaskan modernisasi pertanian melalui implementasi teknologi tepat guna, perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan produksi, serta pengembangan sistem penyuluhan yang responsif



terhadap kebutuhan petani. Pengembangan kelembagaan petani seperti koperasi dan kelompok tani juga diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar dan akses terhadap pasar, teknologi, dan pembiayaan.

Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan skala kecil dan menengah menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan deindustrialisasi di tingkat lokal. Kabupaten Buol dapat mengidentifikasi komoditas unggulan daerah dan mengembangkan kawasan agroindustri terpadu yang menghubungkan pertanian hulu dengan industri pengolahan hilir. Pengembangan rantai nilai yang inklusif dengan melibatkan petani kecil, serta diversifikasi produk melalui inovasi dan standardisasi kualitas akan meningkatkan daya saing produk lokal dan membuka akses ke pasar yang lebih luas.

7. Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sektor strategis dalam diversifikasi ekonomi Indonesia mengingat potensinya dalam menciptakan nilai tambah, lapangan kerja inklusif, dan devisa dengan dampak lingkungan yang relatif minimal. Indonesia memiliki kekayaan budaya, alam, dan kreativitas yang dapat menjadi modal pengembangan ekonomi berbasis pengalaman dan kreativitas. Namun, kontribusi sektor ini masih belum optimal dengan pangsa PDB sekitar 7% dan menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, kapasitas SDM, dan ekosistem pendukung industri kreatif.

Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif memerlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup pengembangan destinasi, peningkatan aksesibilitas, penguatan amenities, penguatan kelembagaan, serta pemasaran yang efektif. Tren global menuju pariwisata berkelanjutan, digitalisasi pengalaman wisata, dan kreativitas berbasis budaya lokal membuka peluang bagi pengembangan produk dan layanan bernilai tambah tinggi yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Kabupaten Buol dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya memiliki potensi signifikan untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah Kabupaten Buol perlu mengidentifikasi dan mengembangkan destinasi wisata unggulan yang memiliki keunikan dan daya tarik khas, seperti ekowisata pesisir, wisata berbasis kearifan lokal,



atau wisata petualangan yang memanfaatkan konfigurasi alam Buol. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata seperti akses transportasi, akomodasi, dan fasilitas publik menjadi prasyarat untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman wisatawan.

Dalam pengembangan ekonomi kreatif, Kabupaten Buol dapat fokus pada subsektor yang memiliki keterkaitan dengan identitas dan potensi lokal, seperti kuliner, kerajinan, atau seni pertunjukan. Program peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, fasilitasi akses pembiayaan dan pasar, serta perlindungan kekayaan intelektual menjadi komponen penting untuk menumbuhkan ekosistem kreatif yang produktif. Pengembangan festival budaya atau event khusus dapat menjadi strategi untuk memperkenalkan potensi pariwisata dan produk kreatif Buol kepada pasar yang lebih luas, sekaligus memperkuat identitas dan kebanggaan lokal masyarakat.

8. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut

Ekonomi laut (blue economy) menjadi fokus strategis mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas laut mencapai 5,8 juta km² yang menyimpan potensi ekonomi bernilai ratusan miliar dolar. Potensi ini mencakup perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan berbasis laut, bioteknologi kelautan, dan transportasi laut yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan ekonomi laut berkelanjutan selaras dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang menekankan pengelolaan sumber daya kelautan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem.

Tantangan pengembangan ekonomi laut mencakup praktik perikanan ilegal, degradasi ekosistem laut, keterbatasan infrastruktur maritim, kapasitas SDM, dan teknologi pengelolaan sumber daya laut. Pendekatan yang diperlukan adalah pengelolaan berbasis ekosistem yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui perencanaan tata ruang laut, penguatan pengawasan, modernisasi sektor kelautan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kabupaten Buol dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan sumber daya laut memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis kelautan. Pemerintah Kabupaten Buol perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu, termasuk pemetaan



potensi sumber daya kelautan, zonasi wilayah laut, dan regulasi pemanfaatan yang memastikan keberlanjutan ekosistem laut sebagai modal pembangunan jangka panjang.

Pengembangan sektor perikanan berkelanjutan di Buol dapat dilakukan melalui modernisasi armada nelayan, pengembangan sentra perikanan terpadu, peningkatan kapasitas nelayan dalam praktik penangkapan ramah lingkungan, serta pengembangan budidaya laut yang produktif dan berkelanjutan. Diversifikasi ekonomi laut melalui pengembangan wisata bahari, industri pengolahan hasil laut bernilai tambah tinggi, serta integrasi dengan sektor ekonomi lainnya akan memaksimalkan manfaat ekonomi dari potensi kelautan Buol sekaligus membuka lapangan kerja produktif bagi masyarakat pesisir.

9. Percepatan Penurunan Stunting

Stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis merupakan tantangan pembangunan SDM Indonesia dengan prevalensi mencapai 21,6% pada tahun 2022. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan kognitif, produktivitas, dan potensi ekonomi jangka panjang dengan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 2-3% dari PDB per tahun. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 melalui pendekatan multi-sektor yang terintegrasi.

Strategi penanganan stunting nasional mencakup intervensi spesifik seperti perbaikan gizi ibu hamil dan balita, ASI eksklusif, imunisasi, serta intervensi sensitif meliputi peningkatan akses air bersih, sanitasi, ketahanan pangan keluarga, dan pendidikan pengasuhan. Implementasi yang efektif memerlukan koordinasi lintas sektor, penguatan sistem kesehatan dasar, serta partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta melalui pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Kabupaten Buol perlu mengembangkan strategi penanganan stunting yang komprehensif dan terintegrasi dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan faktor penyebab stunting di wilayahnya. Langkah awal adalah penguatan sistem pendataan dan pemantauan status gizi balita dan ibu hamil untuk identifikasi dini dan intervensi tepat sasaran. Pengembangan pusat kesehatan masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan layanan



kesehatan dan gizi dasar juga menjadi prioritas, termasuk penguatan kapasitas kader kesehatan dan tenaga kesehatan dalam deteksi dan penanganan stunting.

Pemerintah Kabupaten Buol dapat mengimplementasikan program terintegrasi yang menghubungkan aspek kesehatan, pangan, air bersih, dan pengasuhan melalui koordinasi lintas sektor. Program ketahanan pangan keluarga berbasis pekarangan, peningkatan akses air bersih dan sanitasi di daerah prioritas, serta edukasi pengasuhan dan gizi seimbang melalui pendekatan berbasis masyarakat menjadi komponen penting. Pengembangan model desa bebas stunting yang menjadi percontohan bagi desa lainnya juga dapat mempercepat penyebaran praktik baik dalam penanganan stunting di seluruh Kabupaten Buol.

10. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga dengan PDB per pekerja hanya sekitar 25% dari Singapura dan 50% dari Malaysia. Kesenjangan ini mencerminkan tantangan struktural berupa ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch), rendahnya adopsi teknologi, keterbatasan infrastruktur produktif, serta dominasi sektor informal dengan produktivitas rendah yang mempekerjakan lebih dari 55% tenaga kerja. Peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk mendorong transformasi ekonomi dan daya saing nasional.

Strategi peningkatan produktivitas memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup reformasi sistem pendidikan dan pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan industri, fasilitasi adopsi teknologi dan inovasi, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung produksi, formalisasi ekonomi informal, serta reformasi regulasi yang mendorong persaingan sehat dan mobilitas tenaga kerja antar sektor. Fokus pada sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja secara simultan menjadi kunci keberhasilan transformasi produktivitas.

Kabupaten Buol perlu mengembangkan strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang sesuai dengan struktur ekonomi dan karakteristik tenaga kerja lokalnya. Pemetaan kebutuhan keterampilan berdasarkan potensi ekonomi daerah menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi kesenjangan



keterampilan dan merancang program pelatihan yang tepat sasaran. Pengembangan balai latihan kerja atau kemitraan dengan lembaga pelatihan yang menawarkan kurikulum berbasis kompetensi untuk sektor unggulan daerah menjadi investasi penting dalam peningkatan kualitas SDM lokal.

Pemerintah Kabupaten Buol juga dapat mendorong adopsi teknologi dan inovasi di sektor-sektor ekonomi strategis melalui program pendampingan teknis, fasilitasi akses pembiayaan untuk modernisasi peralatan, dan pengembangan pusat demonstrasi teknologi tepat guna. Penguatan keterkaitan antara pendidikan formal, pelatihan vokasi, dan kebutuhan dunia usaha melalui kemitraan triple helix (pemerintah, akademisi, dan dunia usaha) menjadi pendekatan efektif untuk menyelaraskan pengembangan SDM dengan kebutuhan pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja Buol secara berkelanjutan.

11. Optimalisasi Alokasi Anggaran Wajib dan Strategi Efisiensi Belanja

Negara

Optimalisasi alokasi anggaran dan efisiensi belanja merupakan prasyarat untuk keberlanjutan fiskal dan efektivitas pembangunan di tengah keterbatasan sumber daya keuangan negara. Indonesia menghadapi tantangan berupa earmarking (alokasi wajib) anggaran yang mencapai lebih dari 60% dari belanja pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan transfer ke daerah yang membatasi ruang fiskal untuk program prioritas lainnya. Di sisi lain, masih terdapat inefisiensi dalam belanja seperti tumpang tindih program, lemahnya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta minimnya evaluasi dampak belanja pemerintah.

Reformasi pengelolaan keuangan negara diperlukan melalui penerapan prinsip money follows program prioritas, spending better bukan sekedar spending more, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil. Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran, pembenahan tata kelola pengadaan, serta modernisasi sistem perbendaharaan menjadi komponen penting dalam mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik yang berkualitas.



Kabupaten Buol sebagai entitas pemerintahan yang mengelola APBD perlu mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif. Pemerintah Kabupaten Buol dapat mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang mengintegrasikan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja) dengan dokumen penganggaran (KUA-PPAS, RKA, DPA) secara konsisten, serta memperkuat basis data perencanaan untuk memastikan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas pembangunan daerah.

Efisiensi belanja dapat didorong melalui rasionalisasi belanja operasional yang tidak produktif, penerapan standar biaya yang realistis, penguatan pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis pemerintahan seperti e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. Peningkatan kualitas belanja dapat dilakukan melalui pengembangan anggaran berbasis keluaran dan hasil yang terukur, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang memastikan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi program. Penguatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah juga menjadi investasi penting untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik di seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Buol.

12. Koperasi Merah Putih

Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang bertujuan untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Instruksi ini diambil dalam upaya meningkatkan kemandirian pangan dan pemerataan ekonomi di seluruh desa di Indonesia, yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menyediakan berbagai layanan penting, termasuk pengadaan sembako, simpan pinjam, serta pelayanan kesehatan melalui klinik dan apotek di tingkat desa.

Dalam konteks ini, Kabupaten Buol memainkan peranan penting karena memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan koperasi sesuai dengan karakteristik lokalnya. Pemerintah Kabupaten Buol diharapkan dapat memanfaatkan instruksi ini untuk membentuk koperasi yang dapat memberdayakan masyarakat, meningkatkan akses pasar, serta



menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal, seperti pertanian dan perikanan, Kabupaten Buol bisa menjadi contoh sukses dalam hal pengelolaan koperasi.

Instruksi Presiden ini menggarisbawahi langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah daerah dan kementerian untuk mendukung pendirian koperasi. Ini mencakup pengalokasian anggaran yang tepat, pelatihan bagi pengelola koperasi, dan penguatan infrastruktur pendukung. Selain itu, Bupati Buol dan dengan di dukung oleh Gubernur, diharapkan untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam pelaksanaan teknis pembentukan koperasi. Melalui dukungan ini, diharapkan kadar partisipasi masyarakat dalam program ini dapat meningkat serta mendukung keberhasilan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menyeluruh.

Keseluruhan upaya ini diharapkan akan berkontribusi tidak hanya pada kemandirian pangan, tetapi juga pada peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Buol dan seluruh Indonesia. Melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan koperasi ini dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata

2.3.5 Isu Strategis Regional

Pulau Sulawesi menempati posisi strategis dalam peta pembangunan Indonesia sebagai jembatan yang menghubungkan kepulauan nusantara dengan kawasan dinamis Asia Pasifik. Dengan lokasi geografis yang unik di tengah Kepulauan Indonesia, Sulawesi tidak hanya berfungsi sebagai simpul penting jalur perdagangan maritim, tetapi juga menyimpan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Potensi ini menempatkan Sulawesi sebagai kandidat kuat untuk menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional di luar Jawa. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan penanganan komprehensif terhadap beragam tantangan pembangunan yang masih dihadapi, mulai dari ketimpangan wilayah, infrastruktur yang belum memadai, hingga isu lingkungan dan sosial yang kompleks. Pembangunan Sulawesi yang berkelanjutan akan menjadi kunci dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional maupun global.



1. Infrastruktur dan Konektivitas

Pulau Sulawesi masih menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur dan konektivitas, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi seperti Makassar, Manado, dan Palu. Pembangunan infrastruktur jalan yang belum merata menyebabkan beberapa wilayah mengalami kesulitan akses, sementara pelabuhan dan bandara yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem logistik nasional. Proyek Trans Sulawesi yang menghubungkan seluruh provinsi di Sulawesi dari Makassar hingga Manado masih dalam proses penyelesaian, dengan beberapa segmen jalan masih belum terkoneksi dengan baik.

Kondisi geografis Sulawesi yang bergunung-gunung dan memiliki banyak teluk serta semenanjung menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan infrastruktur transportasi. Keterbatasan anggaran pembangunan juga menyebabkan prioritas pembangunan infrastruktur lebih banyak diarahkan ke wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan potensi ekonomi besar, sehingga menciptakan kesenjangan infrastruktur antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah pedalaman. Pelabuhan-pelabuhan kecil di berbagai wilayah Sulawesi belum memiliki fasilitas memadai untuk mendukung distribusi logistik secara efisien.

Kabupaten Buol sebagai salah satu kabupaten di pesisir utara Sulawesi Tengah menghadapi tantangan konektivitas yang signifikan. Akses jalan menuju Buol dari pusat-pusat ekonomi provinsi seperti Palu masih terbatas dan membutuhkan waktu tempuh yang panjang. Pelabuhan Leok di Buol belum dikembangkan secara optimal sebagai simpul transportasi barang dan penumpang, sehingga menghambat arus perdagangan dan mobilitas penduduk. Kondisi jalan dalam kabupaten juga masih memerlukan peningkatan untuk menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian dan perikanan dengan pasar.

Peran Kabupaten Buol dalam konteks pengembangan infrastruktur regional sangatlah strategis mengingat posisinya yang berada di jalur Trans Sulawesi bagian utara. Pengembangan pelabuhan Leok sebagai pelabuhan pengumpul regional dapat memperkuat konektivitas maritim di kawasan Teluk Tomini. Pemerintah Kabupaten Buol perlu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan nasional yang



melintasi wilayahnya, serta mengintegrasikan sistem transportasi kabupaten dengan jaringan transportasi regional. Peningkatan kualitas infrastruktur di Buol akan memberikan efek berganda bagi pengembangan ekonomi lokal serta memperkuat posisi Buol dalam sistem perdagangan regional Sulawesi.

2. Disparitas Ekonomi

Disparitas ekonomi antardaerah di Sulawesi masih menjadi isu yang mengemuka, dengan kesenjangan yang jelas antara pusat-pusat pertumbuhan seperti Makassar, Manado, dan Palu dengan kabupaten-kabupaten lain yang lebih terpencil. Perbedaan kinerja ekonomi ini tercermin dari indikator-indikator seperti PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap disparitas ini antara lain perbedaan ketersediaan infrastruktur, akses terhadap modal dan pasar, serta konsentrasi investasi di wilayah-wilayah tertentu. Kawasan perkotaan dan daerah dengan sumber daya alam berlimpah umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Struktur ekonomi yang berbeda antardaerah di Sulawesi juga memperdalam disparitas ekonomi. Wilayah dengan ketergantungan tinggi pada sektor primer seperti pertanian dan pertambangan umumnya memiliki nilai tambah ekonomi lebih rendah dibandingkan wilayah yang telah mengembangkan sektor sekunder dan tersier. Volatilitas harga komoditas pertanian dan perkebunan turut berperan dalam menciptakan ketidakstabilan ekonomi di daerah-daerah yang sangat bergantung pada ekspor produk primer. Transfer fiskal dari pemerintah pusat belum sepenuhnya mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah, meskipun telah ada upaya untuk mengalokasikan sumber daya lebih banyak ke daerah tertinggal.

Kabupaten Buol menghadapi tantangan disparitas ekonomi yang signifikan bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lebih maju di Sulawesi. Dengan PDRB per kapita yang masih di bawah rata-rata provinsi dan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, Buol perlu mengembangkan strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Ekonomi Buol masih didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, terutama komoditas kakao, kelapa,



dan cengkeh, yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Keterbatasan infrastruktur ekonomi seperti pasar, lembaga keuangan, dan kawasan industri pengolahan menyebabkan nilai tambah ekonomi masih rendah.

Peran strategis Kabupaten Buol dalam mengatasi disparitas ekonomi regional terletak pada upaya diversifikasi ekonomi dan pengembangan produk unggulan daerah. Pemerintah daerah Buol perlu memfasilitasi pengembangan rantai nilai komoditas pertanian dan perikanan melalui pembentukan klaster- klaster industri pengolahan skala kecil dan menengah. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan permodalan, termasuk kredit mikro dan koperasi, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Program pengembangan ekonomi berbasis masyarakat seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan kemitraan dengan swasta dalam pengembangan komoditas unggulan juga berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi antara Buol dengan daerah lain di Sulawesi.

3. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan investasi di Sulawesi. Beberapa KEK yang telah ditetapkan di Sulawesi seperti KEK Bitung di Sulawesi Utara dan KEK Palu di Sulawesi Tengah dirancang untuk menarik investor melalui berbagai insentif fiskal dan kemudahan perizinan. KEK ini diharapkan menjadi mesin pertumbuhan baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, dan mendorong alih teknologi. Konsep pengembangan KEK di Sulawesi umumnya disesuaikan dengan potensi dan keunggulan komparatif masing-masing wilayah, seperti fokus pada industri perikanan di Bitung dan agroindustri di Palu.

Namun, pengembangan KEK di Sulawesi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung, ketidaksiapan sumber daya manusia, dan koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Pembebasan lahan untuk KEK seringkali menjadi proses yang rumit dan memakan waktu lama, sementara pembangunan infrastruktur penunjang seperti pelabuhan, jalan akses, dan jaringan utilitas membutuhkan



investasi besar. Ketidakpastian regulasi dan perubahan kebijakan juga dapat mempengaruhi iklim investasi di KEK. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa pengembangan KEK tidak hanya menguntungkan investor besar tetapi juga menciptakan efek berganda bagi ekonomi lokal melalui keterkaitan industri dan peluang usaha bagi UMKM. Kabupaten Buol saat ini belum memiliki Kawasan Ekonomi Khusus, namun posisinya yang strategis di pesisir utara Sulawesi Tengah menawarkan potensi pengembangan kawasan industri berbasis sumber daya lokal. Sektor potensial yang dapat dikembangkan di Buol antara lain agroindustri berbasis kakao, kelapa, dan cengkeh, serta industri pengolahan hasil perikanan mengingat wilayah laut Buol yang kaya akan sumber daya perikanan. Meskipun bukan lokasi KEK, Buol dapat mengembangkan kawasan industri terpadu skala kecil dan menengah yang terintegrasi dengan sentra produksi pertanian dan perikanan, sehingga menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja baru.

Peran Kabupaten Buol dalam konteks pengembangan KEK regional adalah sebagai wilayah penyangga dan pemasok bahan baku untuk KEK Palu. Pemerintah Kabupaten Buol perlu mengidentifikasi potensi keterkaitan ekonomi dengan KEK Palu dan mempersiapkan infrastruktur serta sumber daya manusia untuk memanfaatkan peluang tersebut. Pengembangan sentra- sentra industri kecil berbasis komoditas unggulan Buol dapat dirancang untuk melengkapi rantai nilai industri yang dikembangkan di KEK Palu. Strategi ini memungkinkan Buol memperoleh dampak positif dari keberadaan KEK meskipun tidak berlokasi di wilayahnya. Selain itu, Buol dapat mengembangkan kawasan ekonomi lokal dengan insentif dan kemudahan perizinan untuk menarik investor skala menengah, terutama di sektor pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sulawesi memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam, meliputi hutan tropis, mineral tambang, lahan subur untuk pertanian, serta sumber daya kelautan yang melimpah. Pengelolaan sumber daya ini menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Aktivitas pertambangan emas, nikel, dan tembaga di beberapa wilayah Sulawesi telah memberikan kontribusi signifikan



terhadap pertumbuhan ekonomi namun juga menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan kerusakan hutan. Praktik pertambangan ilegal dan penebangan liar masih menjadi isu serius yang mengancam kelestarian sumber daya alam, terutama di kawasan-kawasan terpencil dengan pengawasan terbatas.

Degradasi sumber daya alam di Sulawesi juga dipicu oleh konversi lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan skala besar. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan kakao mengancam keberadaan hutan-hutan primer yang menjadi habitat beragam flora dan fauna endemik Sulawesi. Kurangnya perencanaan tata ruang yang komprehensif dan lemahnya penegakan hukum turut berkontribusi terhadap eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Konflik tenurial antara masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam sering terjadi akibat tumpang tindih klaim dan ketidakjelasan hak atas lahan dan sumber daya. Kabupaten Buol memiliki sumber daya alam yang beragam termasuk kawasan hutan yang luas, lahan pertanian dan perkebunan yang subur, serta potensi perikanan dan kelautan di Teluk Tomini. Pengelolaan sumber daya alam di Buol menghadapi tantangan serupa dengan daerah lain di Sulawesi, terutama terkait keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan konservasi. Sektor perkebunan kakao, kelapa, dan cengkeh merupakan tulang punggung ekonomi lokal, namun ekspansi perkebunan harus dikelola dengan baik untuk mencegah deforestasi berlebihan. Potensi pertambangan emas dan mineral lainnya di pedalaman Buol, jika tidak dikelola dengan prinsip berkelanjutan, berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan.

Peran strategis Kabupaten Buol dalam pengelolaan sumber daya alam regional terletak pada penerapan model pembangunan berkelanjutan yang memadukan konservasi dengan pemanfaatan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Buol perlu memperkuat implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang membagi zona pemanfaatan ekonomi dengan zona konservasi secara jelas. Pengembangan perkebunan dan pertanian berkelanjutan melalui praktik-praktik ramah lingkungan seperti agroforestri dan pertanian organik dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Keterlibatan masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam melalui



skema seperti hutan desa dan hutan kemasyarakatan berpotensi menciptakan model pengelolaan kolaboratif yang lebih adil dan berkelanjutan. Buol juga berpeluang mengembangkan ekowisata sebagai alternatif ekonomi yang memanfaatkan keanekaragaman hayati tanpa merusaknya.

5. Lingkungan dan Keberlanjutan

Isu lingkungan dan keberlanjutan di Sulawesi semakin kompleks seiring dengan intensifikasi aktivitas ekonomi dan pertumbuhan populasi. Deforestasi menjadi permasalahan utama di pulau ini, dengan tingkat kehilangan tutupan hutan yang signifikan akibat konversi lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Hutan-hutan primer yang menjadi rumah bagi spesies endemik Sulawesi seperti anoa, babirusa, dan tarsius semakin menyusut. Perubahan tutupan lahan ini berdampak pada ketersediaan air, erosi tanah, dan peningkatan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Degradasi daerah aliran sungai (DAS) karena pemanfaatan lahan yang tidak tepat telah menyebabkan sedimentasi di badan air dan penurunan kualitas air.

Pencemaran lingkungan menjadi isu lain yang mengancam keberlanjutan ekosistem di Sulawesi. Limbah industri, terutama dari aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral, sering dibuang tanpa pengolahan yang memadai ke sungai dan laut. Penggunaan merkuri dalam pertambangan emas skala kecil telah mencemari beberapa DAS penting di Sulawesi. Di wilayah pesisir, pencemaran dari limbah domestik, plastik, dan aktivitas perikanan mengancam ekosistem terumbu karang dan mangrove yang merupakan habitat penting bagi biota laut. Kesadaran masyarakat tentang praktik-praktik ramah lingkungan masih perlu ditingkatkan, sementara kapasitas pemerintah daerah dalam penegakan regulasi lingkungan masih terbatas.

Kabupaten Buol menghadapi tantangan lingkungan yang memerlukan perhatian serius. Wilayah hulu yang didominasi kawasan hutan mengalami tekanan dari perluasan perkebunan dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Beberapa DAS penting di Buol seperti Sungai Buol dan Sungai Paleleh menunjukkan gejala degradasi akibat erosi dan sedimentasi. Di wilayah pesisir, ekosistem mangrove dan terumbu karang



menghadapi ancaman dari pencemaran dan praktik perikanan yang merusak seperti penggunaan bom dan racun. Pengelolaan limbah domestik dan sampah plastik juga belum optimal, dengan infrastruktur pengelolaan sampah yang masih terbatas di pusat-pusat permukiman.

Dalam konteks regional, Kabupaten Buol memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah Sulawesi Tengah bagian utara. Inisiatif konservasi hutan melalui program seperti REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) dan perhutanan sosial dapat menjadi model bagi kabupaten lain. Pemerintah Buol perlu mengembangkan kebijakan terintegrasi untuk pengelolaan DAS dari hulu ke hilir, melibatkan masyarakat dalam rehabilitasi kawasan-kawasan kritis. Pengembangan ekowisata berbasis konservasi ekosistem pesisir dan laut seperti mangrove dan terumbu karang berpotensi menciptakan insentif ekonomi bagi upaya pelestarian. Program-program edukasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah juga perlu diperkuat untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi antara Buol dengan kabupaten-kabupaten tetangga dalam pengelolaan sumber daya lintas batas seperti DAS dan kawasan pesisir Teluk Tomini sangat penting untuk mencapai keberlanjutan lingkungan regional.

6. Pengelolaan Wilayah Maritim

Wilayah maritim Sulawesi yang luas mencakup Laut Sulawesi di utara, Teluk Tolo di timur, Laut Flores di selatan, dan Selat Makassar di barat, menjadikannya kawasan strategis dalam konteks maritim nasional dan regional. Pengelolaan wilayah maritim ini menghadapi tantangan kompleks termasuk penangkapan ikan ilegal dan tidak dilaporkan oleh kapal-kapal asing, overfishing di beberapa zona perairan, serta degradasi ekosistem laut akibat polusi dan praktik perikanan destruktif. Potensi perikanan tangkap dan budidaya yang sangat besar belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan, cold storage, dan industri pengolahan. Armada nelayan lokal umumnya masih didominasi oleh kapal-kapal kecil dengan teknologi penangkapan sederhana, sehingga sulit bersaing dengan kapal-kapal modern.



Tata kelola maritim di Sulawesi juga dihadapkan pada masalah koordinasi antar lembaga dan antar daerah. Kewenangan pengelolaan wilayah laut yang terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota seringkali menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan program. Pengawasan wilayah laut yang luas dengan sumber daya terbatas menjadi tantangan tersendiri dalam mencegah aktivitas ilegal. Potensi konflik pemanfaatan ruang laut antara sektor perikanan, pariwisata, konservasi, dan transportasi laut memerlukan perencanaan zonasi laut yang komprehensif. Sementara itu, masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut sering berada dalam kondisi ekonomi rentan dan kurang dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan maritim. Kabupaten Buol memiliki garis pantai yang panjang di sepanjang Teluk Tomini dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Wilayah laut Buol kaya akan berbagai jenis ikan pelagis dan demersal, serta memiliki ekosistem terumbu karang dan mangrove yang relatif masih terjaga. Masyarakat pesisir Buol, terutama di kecamatan-kecamatan seperti Biau, Momunu, dan Bokat, sangat bergantung pada sumber daya perikanan. Namun, infrastruktur pendukung perikanan seperti pelabuhan, tempat pelelangan ikan, dan fasilitas pengolahan masih terbatas. Pengawasan wilayah laut Buol juga belum optimal, dengan kasus-kasus penangkapan ikan ilegal dan praktik destructive fishing seperti penggunaan bom dan racun masih ditemukan di beberapa lokasi.

Peran strategis Kabupaten Buol dalam pengelolaan wilayah maritim regional terletak pada posisinya yang berada di kawasan Teluk Tomini. Buol dapat menjadi bagian penting dalam kerja sama pengelolaan Teluk Tomini yang melibatkan beberapa provinsi dan kabupaten/kota di sekitarnya. Pembangunan pelabuhan perikanan terpadu di Buol dapat memperkuat rantai nilai perikanan regional. Pemerintah Buol perlu mengembangkan program pemberdayaan nelayan melalui modernisasi armada, pelatihan teknik penangkapan ramah lingkungan, dan akses ke permodalan. Pengembangan kawasan konservasi perairan seperti taman wisata perairan atau daerah perlindungan laut berbasis masyarakat dapat menjadi model pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Kolaborasi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam pengumpulan data



dan monitoring kondisi ekosistem laut sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis sains. Buol juga perlu berpartisipasi aktif dalam forum-forum koordinasi pengelolaan maritim regional seperti Forum Teluk Tomini untuk mengadvokasi kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir lokal.

7. Ketahanan Bencana

Pulau Sulawesi merupakan wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam karena posisi geologisnya yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar (Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik). Gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan letusan gunung berapi menjadi ancaman seismik yang signifikan, sebagaimana dibuktikan oleh bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi Palu 2018 yang menewaskan ribuan orang. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, dan kekeringan juga sering terjadi dengan intensitas yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di banyak daerah masih belum memadai, dengan infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini, dan kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

Tantangan dalam membangun ketahanan bencana di Sulawesi mencakup aspek kelembagaan, infrastruktur, dan sosial-budaya. Koordinasi antar lembaga dalam manajemen bencana seringkali belum berjalan optimal, terutama pada saat tanggap darurat yang memerlukan respons cepat. Alokasi anggaran untuk pengurangan risiko bencana masih terbatas dan lebih banyak difokuskan pada pemulihan pascabencana daripada mitigasi dan kesiapsiagaan. Integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang belum dilaksanakan secara konsisten. Faktor sosial-budaya seperti pola pemukiman di zona rawan bencana dan keyakinan tradisional tentang bencana juga mempengaruhi efektivitas upaya pengurangan risiko bencana.

Kabupaten Buol memiliki kerentanan terhadap beberapa jenis bencana alam, terutama banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan potensi tsunami. Kondisi topografi Buol yang memiliki kawasan pegunungan dengan kemiringan lereng curam meningkatkan risiko longsor, terutama di musim hujan. Beberapa DAS seperti Sungai Buol sering mengalami banjir akibat



sedimentasi dan perubahan tutupan lahan di daerah hulu. Secara geologi, Buol berada pada zona seismik aktif yang berpotensi mengalami gempa tektonik, sementara wilayah pesisir memiliki kerentanan terhadap ancaman tsunami. Kapasitas pemerintah dan masyarakat Buol dalam mitigasi dan penanganan bencana masih perlu ditingkatkan, termasuk dalam hal perencanaan kontinjensi, sistem peringatan dini, dan infrastruktur evakuasi.

Peran Kabupaten Buol dalam membangun ketahanan bencana regional mencakup upaya-upaya mitigasi di tingkat lokal yang berkontribusi pada pengurangan risiko bencana regional. Pemerintah Buol perlu memperkuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan sumber daya manusia terlatih dan peralatan yang memadai. Pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat untuk bencana banjir dan longsor dapat menjadi model bagi daerah lain dengan karakteristik serupa. Penguatan kerja sama antara Buol dengan kabupaten tetangga dalam pengelolaan DAS lintas wilayah sangat penting untuk mitigasi banjir. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahan bencana dan penerapan standar bangunan aman gempa perlu ditegakkan, terutama untuk fasilitas publik. Program edukasi dan sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana perlu diperkuat di semua lapisan masyarakat, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Buol juga perlu berpartisipasi aktif dalam forum-forum koordinasi penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan regional untuk memastikan integrasi upaya dan saling dukung sumber daya dalam situasi darurat.

8. Ketidaksesuaian Tata Ruang

Penataan ruang di Sulawesi menghadapi tantangan kompleks akibat dinamika pembangunan, pertumbuhan populasi, dan aktivitas ekonomi yang intensif. Permasalahan utama dalam tata ruang meliputi ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi, tumpang tindih pemanfaatan lahan, dan ketidakpatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota seringkali belum sepenuhnya terharmonisasi, menyebabkan kebingungan dalam pengelolaan ruang dan potensi konflik antarsektor. Konversi lahan pertanian produktif dan kawasan lindung



menjadi kawasan terbangun terjadi secara masif tanpa perencanaan yang komprehensif, mengancam ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Lemahnya penegakan hukum dalam implementasi tata ruang menjadi permasalahan serius di Sulawesi. Izin pemanfaatan ruang seringkali diberikan tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan atau kesesuaian dengan rencana tata ruang. Pertumbuhan kawasan permukiman tidak terencana (informal settlements) di perkotaan dan periurban menciptakan tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur dan layanan dasar. Sementara itu, kawasan-kawasan strategis seperti wilayah pesisir, daerah aliran sungai, dan kawasan rawan bencana belum dikelola secara terpadu dengan mempertimbangkan karakteristik khasnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan tata ruang masih terbatas, sehingga aspirasi dan kebutuhan lokal seringkali tidak terakomodasi.

Kabupaten Buol menghadapi permasalahan tata ruang yang khas sebagai daerah dengan karakter agropolitan dan minapolitan. Sebagai kabupaten yang memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan yang besar, Buol perlu menyeimbangkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan produktif dengan upaya konservasi lingkungan. Ekspansi perkebunan kakao dan kelapa di beberapa kecamatan telah mengkonversi kawasan hutan dan meningkatkan risiko degradasi DAS. Pertumbuhan pusat-pusat permukiman di sepanjang jalan utama dan pesisir pantai belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem prasarana dan sarana yang memadai. Penataan kawasan pesisir juga masih menghadapi tantangan dalam mengakomodasi berbagai kepentingan seperti permukiman nelayan, pariwisata, konservasi mangrove, dan pengembangan pelabuhan.

Peran strategis Kabupaten Buol dalam penataan ruang regional terletak pada implementasi konsep pembangunan berkelanjutan yang memadukan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah Buol perlu memperkuat implementasi RTRW Kabupaten dengan memastikan konsistensi perizinan dengan rencana tata ruang dan meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang. Pengembangan pola ruang yang memprioritaskan perlindungan kawasan-kawasan sensitif seperti DAS



hulu, kawasan pesisir, dan area rawan bencana perlu diperkuat. Penataan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan agropolitan dan minapolitan dengan infrastruktur yang memadai dapat menjadi model pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan tata ruang melalui forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan kelompok masyarakat peduli tata ruang sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif. Buol juga perlu berkoordinasi dengan kabupaten-kabupaten tetangga dalam pengelolaan kawasan perbatasan dan sumber daya lintas wilayah seperti DAS dan kawasan hutan untuk menciptakan penataan ruang yang koheren di tingkat regional.

9. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sulawesi memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dengan keindahan alam, keanekaragaman budaya, dan warisan sejarah yang unik. Destinasi terkenal seperti Tana Toraja dengan tradisi pemakaman yang khas, Taman Nasional Bunaken dengan keindahan bawah lautnya, dan Wakatobi yang dikenal sebagai surga penyelaman menjadi magnet bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Namun, pengembangan pariwisata di Sulawesi masih menghadapi berbagai tantangan seperti aksesibilitas yang terbatas ke destinasi-destinasi potensial, infrastruktur pendukung pariwisata yang belum memadai, dan promosi yang belum optimal. Ketidakmerataan kunjungan wisatawan juga menjadi isu, dengan beberapa destinasi mengalami overtourism sementara banyak destinasi potensial lainnya belum dikenal.

Ekonomi kreatif sebagai sektor pendukung pariwisata belum berkembang optimal di Sulawesi. Kerajinan tradisional seperti tenun, anyaman, dan ukiran kayu memiliki nilai budaya tinggi namun seringkali menghadapi kendala dalam inovasi produk, pemasaran, dan keberlanjutan. Industri kuliner lokal, seni pertunjukan, dan festival budaya juga belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengembangan pariwisata komprehensif. Kapasitas sumber daya manusia dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek standar pelayanan, kewirausahaan, dan kemampuan digital. Kolaborasi antar pemangku kepentingan termasuk pemerintah, swasta, komunitas kreatif, dan



masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan juga belum berjalan optimal.

Kabupaten Buol memiliki potensi pariwisata yang belum sepenuhnya dioptimalkan, dengan berbagai daya tarik alam dan budaya. Pantai-pantai indah seperti Pantai Bongo dengan pasir putihnya, Air Terjun Karang Kepal, dan kawasan mangrove dapat dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Kekayaan budaya masyarakat Buol termasuk tradisi Moduduya (seni tutur), tarian tradisional, dan kerajinan anyaman dari daun pandan juga berpotensi menjadi daya tarik wisata budaya. Namun, pengembangan pariwisata di Buol masih terkendala oleh infrastruktur pendukung yang terbatas seperti akomodasi, aksesibilitas, dan amenities wisata. Sektor ekonomi kreatif di Buol masih dalam tahap awal pengembangan, dengan beberapa produk unggulan seperti kerajinan anyaman dan kuliner khas lokal yang memerlukan dukungan pengembangan kapasitas dan pemasaran.

Peran strategis Kabupaten Buol dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif regional terletak pada diversifikasi produk wisata Sulawesi melalui pengembangan destinasi alternatif yang unik. Buol dapat memposisikan diri sebagai destinasi ekowisata dan wisata budaya yang autentik, menawarkan pengalaman berbeda dari destinasi mainstream di Sulawesi. Pemerintah Buol perlu memperkuat kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata seperti aksesibilitas dan akomodasi. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di setiap destinasi potensial dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Program pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan desain, teknik produksi, dan pemasaran digital perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Buol juga berpotensi mengembangkan agrowisata berbasis komoditas unggulan seperti kakao dan cengkeh yang terintegrasi dengan industri pengolahan skala kecil, menciptakan pengalaman wisata edukatif sekaligus membuka pasar baru bagi produk pertanian lokal. Penguatan kerja sama dengan tour operator dan platform digital dalam promosi destinasi Buol sangat penting untuk meningkatkan awareness dan kunjungan wisatawan.



10. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan di Sulawesi menghadapi tantangan kompleks seiring dengan dinamika perubahan iklim, konversi lahan pertanian, dan pertumbuhan populasi. Meskipun beberapa wilayah di Sulawesi menjadi sentra produksi beras seperti Sulawesi Selatan, ketahanan pangan masih menjadi isu krusial terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur pertanian terbatas dan lahan yang kurang subur. Produktivitas pertanian masih belum optimal akibat teknologi budidaya yang konvensional, sistem irigasi yang tidak memadai, dan akses terbatas terhadap input pertanian berkualitas seperti bibit unggul dan pupuk. Perubahan iklim dengan pola curah hujan yang semakin tidak menentu dan meningkatnya kejadian iklim ekstrem seperti kekeringan dan banjir semakin mengancam stabilitas produksi pangan.

Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal belum berkembang optimal di Sulawesi. Ketergantungan pada beras sebagai makanan pokok masih sangat tinggi, sementara pangan lokal seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian yang secara historis menjadi basis ketahanan pangan di beberapa daerah semakin tergeser. Rantai pasok pangan juga masih menghadapi tantangan, termasuk infrastruktur penyimpanan dan distribusi yang terbatas, tingginya tingkat kehilangan pasca panen, dan fluktuasi harga yang merugikan petani. Kapasitas adaptasi petani terhadap perubahan iklim masih terbatas, dengan sistem peringatan dini dan teknologi pertanian ramah iklim yang belum meluas.

Kabupaten Buol memiliki potensi pangan yang cukup beragam dengan lahan pertanian yang produktif untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Sektor perkebunan dengan komoditas kakao, kelapa, dan cengkeh juga menjadi sumber pendapatan penting bagi petani yang menopang ketahanan pangan dalam aspek akses ekonomi. Potensi perikanan laut di sepanjang pesisir Teluk Tomini memberikan sumber protein yang melimpah bagi masyarakat. Namun, pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan seperti irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas penyimpanan masih belum memadai di beberapa kecamatan. Konversi lahan pertanian menjadi perkebunan dan permukiman juga



menjadi tantangan bagi produksi pangan lokal, sementara perubahan iklim semakin meningkatkan risiko gagal panen.

Peran strategis Kabupaten Buol dalam memperkuat ketahanan pangan regional mencakup upaya peningkatan produktivitas dan diversifikasi pertanian. Pemerintah Buol perlu memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, dan jalan usaha tani untuk mendukung intensifikasi produksi pangan. Program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) perlu diimplementasikan dengan konsisten untuk mencegah konversi lahan produktif. Pengembangan pertanian terpadu yang mengintegrasikan tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan diversifikasi sumber pendapatan petani. Pemberdayaan kelompok tani melalui penyuluhan dan pelatihan teknologi pertanian adaptif perubahan iklim seperti sistem tanam jajar legowo, penggunaan varietas tahan kekeringan, dan pertanian presisi sangat penting untuk meningkatkan resiliensi petani. Buol juga perlu mengembangkan program diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, termasuk pengolahan hasil pangan lokal menjadi produk dengan nilai tambah dan daya simpan lebih tinggi. Penguatan kelembagaan seperti lumbung pangan desa dan koperasi pertanian dapat memperkuat cadangan pangan lokal dan meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai pasok.

11. Konflik Sosial dan Politik

Sulawesi memiliki sejarah konflik sosial yang kompleks dengan akar permasalahan yang beragam, termasuk faktor etnis, agama, politik, dan sumber daya alam. Konflik Poso antara komunitas Muslim dan Kristen pada akhir 1990-an dan awal 2000-an menjadi contoh konflik berbasis identitas yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Meskipun situasi keamanan telah jauh membaik, potensi konflik laten masih ada di beberapa daerah, terutama yang memiliki keragaman etnis dan agama. Segregasi permukiman berdasarkan identitas agama dan etnis di beberapa wilayah pascakonflik menunjukkan bahwa rekonsiliasi sosial belum sepenuhnya tercapai. Konflik lain yang sering muncul adalah sengketa lahan dan sumber daya alam, baik antara masyarakat dengan



korporasi maupun antar kelompok masyarakat, terutama di daerah dengan aktivitas pertambangan dan perkebunan skala besar.

Dinamika politik lokal juga menjadi pemicu konflik, terutama pada momentum pilkada dengan mobilisasi identitas etnis dan agama untuk kepentingan politik. Patronase politik berbasis kekerabatan dan etnis masih kuat di beberapa daerah, mempengaruhi distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik. Polarisasi politik nasional seringkali memengaruhi dinamika politik lokal, dengan isu-isu nasional yang belum tentu relevan dengan konteks lokal menjadi faktor pemicu ketegangan. Ketimpangan pembangunan dan akses terhadap sumber daya ekonomi antar kelompok juga menjadi faktor yang dapat memperburuk tensi sosial, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kesempatan ekonomi terbatas.

Kabupaten Buol, meskipun tidak mengalami konflik terbuka sebesar beberapa daerah lain di Sulawesi, tetap memiliki potensi konflik sosial yang perlu diantisipasi. Keragaman etnis di Buol dengan populasi Buol, Gorontalo, Bugis, dan kelompok etnis lainnya dapat menjadi sumber dinamika sosial yang kompleks. Konflik lahan antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan terjadi di beberapa lokasi, terutama terkait dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan kakao. Perselisihan batas wilayah antar desa juga kadang muncul, terutama di daerah dengan potensi sumber daya alam yang tinggi. Dalam konteks politik lokal, persaingan antar elit berbasis kekerabatan dan patron-klien masih mewarnai proses politik, dengan potensi mobilisasi identitas etnis dan agama pada momentum pilkada.

Peran strategis Kabupaten Buol dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial di tingkat regional terletak pada penguatan mekanisme dialog dan kerja sama antar kelompok. Pemerintah Buol perlu memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antarkelompok dalam mencegah konflik. Sistem deteksi dini konflik sosial perlu dibangun di tingkat desa dan kecamatan, melibatkan tokoh-tokoh adat, agama, dan pemuda sebagai "early responders" dalam mengenali dan mengatasi potensi konflik. Penguatan kapasitas aparat desa dan



kecamatan dalam mediasi konflik dan teknik resolusi konflik damai sangat penting untuk menangani perselisihan secara lokal sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dalam konteks konflik lahan, pemerintah Buol perlu mengembangkan kebijakan dan program yang memfasilitasi dialog antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah, termasuk melalui skema kemitraan yang lebih adil dan transparan. Pembangunan ekonomi inklusif yang melibatkan berbagai kelompok etnis dan sosial juga penting untuk mencegah kesenjangan ekonomi yang dapat memicu konflik. Buol dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan keragaman sosial melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal yang mempromosikan toleransi dan kerja sama antarkelompok.

12. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Sulawesi masih dihadapkan pada berbagai tantangan mendasar meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Disparitas kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih lebar, dengan kesenjangan infrastruktur pendidikan, ketersediaan tenaga pengajar berkualitas, dan akses terhadap fasilitas penunjang pembelajaran. Angka putus sekolah masih cukup tinggi di beberapa daerah, terutama pada jenjang pendidikan menengah, karena faktor ekonomi dan aksesibilitas. Relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi ekonomi lokal juga masih menjadi isu, dengan banyak lulusan yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal maupun regional.

Tantangan lain dalam pengembangan SDM di Sulawesi adalah ketimpangan akses terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi berkualitas. Institusi pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan vokasi masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah-daerah terpencil memiliki akses terbatas. Biaya pendidikan tinggi juga menjadi hambatan bagi banyak keluarga berpenghasilan rendah. Kemitraan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dalam pengembangan kurikulum dan pelatihan kerja juga belum berjalan optimal, menyebabkan kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Rendahnya budaya literasi dan pembelajaran sepanjang hayat di masyarakat turut



berkontribusi pada lambatnya peningkatan kualitas SDM secara menyeluruh.

Kabupaten Buol menghadapi tantangan pengembangan SDM yang khas sebagai daerah dengan basis ekonomi agraris dan maritim. Akses dan kualitas pendidikan di Buol masih perlu ditingkatkan, terutama di kecamatan-kecamatan terpencil dengan infrastruktur pendidikan terbatas. Angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi masih relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional. Ketersediaan tenaga pendidik berkualitas, terutama untuk mata pelajaran sains, teknologi, dan bahasa asing masih menjadi kendala. Program pendidikan vokasi yang sesuai dengan potensi unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata juga masih terbatas, sehingga banyak lulusan tidak terserap optimal dalam sektor-sektor produktif lokal.

Peran strategis Kabupaten Buol dalam pengembangan SDM regional mencakup penguatan sistem pendidikan yang berorientasi pada keunggulan lokal dan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah Buol perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata di seluruh kecamatan, termasuk laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas teknologi informasi. Program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi perlu diperkuat, dengan skema ikatan dinas yang menjamin kembalinya lulusan untuk berkontribusi di daerah. Pengembangan SMK dengan jurusan yang selaras dengan potensi unggulan daerah seperti agribisnis, teknologi pengolahan hasil pertanian, kemaritiman, dan pariwisata dapat menjadi fokus untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang relevan dengan kebutuhan lokal. Kerja sama dengan perguruan tinggi regional dalam program penelitian dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pengembangan teknologi tepat guna untuk sektor pertanian, perikanan, dan UMKM lokal perlu diperkuat. Buol juga dapat menjadi pionir dalam pengembangan model pendidikan kontekstual yang mengintegrasikan kearifan lokal dan pengetahuan modern, serta program literasi digital untuk menyiapkan masyarakat menghadapi transformasi digital. Penguatan pendidikan karakter dan kewirausahaan sejak tingkat dasar juga penting untuk



membentuk generasi muda yang inovatif, adaptif, dan memiliki jiwa kepemimpinan.

13. Layanan Kesehatan dan Kualitas Hidup

Layanan kesehatan di Sulawesi telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan akses dan kualitas. Disparitas fasilitas kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih sangat jelas, dengan rumah sakit dan tenaga medis spesialis terkonsentrasi di kota-kota besar. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerah terpencil seringkali menghadapi keterbatasan infrastruktur, peralatan medis, dan obat-obatan. Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata juga menjadi kendala utama, dengan rasio dokter dan tenaga kesehatan lainnya per penduduk yang masih jauh dari standar ideal di banyak kabupaten. Akses terhadap layanan kesehatan spesialis dan emergensi masih terbatas bagi masyarakat di daerah terpencil akibat kendala geografis dan transportasi.

Permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat Sulawesi mencakup triple burden of diseases, yaitu penyakit menular yang masih tinggi (seperti tuberkulosis, malaria, dan penyakit infeksi lainnya), meningkatnya penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan jantung, serta masalah gizi yang kompleks termasuk stunting dan defisiensi mikronutrien. Perilaku hidup bersih dan sehat belum sepenuhnya menjadi budaya di banyak komunitas, terutama terkait sanitasi dan higiene. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meskipun terus meningkat, masih belum menjangkau seluruh penduduk, sementara implementasinya di daerah terpencil masih menghadapi berbagai kendala operasional.

Kabupaten Buol menghadapi tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Dengan topografi yang bergunung-gunung dan pemukiman yang tersebar, akses terhadap fasilitas kesehatan masih menjadi kendala bagi penduduk di kecamatan-kecamatan terpencil. Jumlah tenaga medis, terutama dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya, masih belum memenuhi kebutuhan optimal. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan puskesmas pembantu masih memerlukan peningkatan kualitas dalam hal infrastruktur,



peralatan medis, dan laboratorium. Permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat Buol mencakup penyakit infeksi seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit berbasis lingkungan, serta meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Stunting pada balita juga masih menjadi isu kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius.

Peran strategis Kabupaten Buol dalam peningkatan layanan kesehatan dan kualitas hidup regional mencakup penguatan sistem kesehatan primer yang menjangkau hingga daerah terpencil. Pemerintah Buol perlu memprioritaskan pembangunan dan peningkatan kualitas puskesmas dan jaringannya, termasuk Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa, dengan peralatan dan fasilitas yang memadai. Program rekrutmen dan retensi tenaga kesehatan, termasuk melalui insentif khusus bagi yang bertugas di daerah terpencil, perlu diperkuat. Pengembangan sistem rujukan yang efektif dengan dukungan transportasi medis seperti ambulans dan ambulans laut sangat penting untuk mengatasi kendala geografis dalam akses terhadap layanan kesehatan tingkat lanjut. Penguatan upaya promotif dan preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) perlu diprioritaskan untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan. Program intervensi spesifik dan sensitif untuk mengatasi stunting, termasuk pemberdayaan Posyandu dan edukasi gizi kepada keluarga, perlu diimplementasikan secara komprehensif. Buol juga dapat memperkuat integrasi kearifan lokal dalam praktik kesehatan masyarakat, termasuk pemanfaatan tanaman obat tradisional yang dikombinasikan dengan pendekatan kedokteran modern. Pemanfaatan teknologi telemedicine untuk menghubungkan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dengan rumah sakit rujukan di kota besar dapat menjadi inovasi untuk meningkatkan jangkauan layanan kesehatan spesialisik.

14. Konektivitas Digital

Konektivitas digital di Sulawesi mengalami perkembangan pesat namun masih dihadapkan pada tantangan kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur telekomunikasi seperti jaringan fiber optic, menara Base Transceiver Station (BTS), dan satelit belum



menjangkau seluruh wilayah secara merata. Aksesibilitas internet masih menjadi tantangan di daerah-daerah terpencil dan pegunungan dengan topografi yang menantang. Kualitas layanan internet juga bervariasi signifikan antar wilayah, dengan kecepatan dan stabilitas koneksi yang masih rendah di banyak daerah pedesaan. Kendala pasokan listrik yang belum stabil di beberapa wilayah turut mempengaruhi keandalan infrastruktur telekomunikasi digital.

Pemanfaatan teknologi digital dalam sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan di Sulawesi juga belum optimal. Adopsi e-commerce oleh UMKM masih terbatas, terutama di daerah pedesaan dengan akses internet terbatas dan literasi digital rendah. Implementasi pembelajaran jarak jauh masih menghadapi kendala infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia, sebagaimana terlihat selama masa pandemi COVID-19. Layanan e-government telah dikembangkan di banyak daerah namun interoperabilitas antar sistem dan pemanfaatan oleh masyarakat masih belum maksimal. Kesenjangan kemampuan digital (digital literacy gap) antar generasi dan kelompok sosial-ekonomi juga menjadi tantangan dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif.

Kabupaten Buol menghadapi tantangan konektivitas digital dengan karakteristik wilayah yang terdiri dari pegunungan dan pesisir. Jangkauan layanan telekomunikasi dan internet masih belum merata di seluruh kecamatan, dengan beberapa desa terpencil masih mengalami blank spot atau sinyal lemah. Infrastruktur pendukung seperti menara BTS dan jaringan kabel fiber optic masih terbatas di beberapa wilayah. Akses internet berkecepatan tinggi sebagian besar hanya tersedia di pusat kota kabupaten dan beberapa ibukota kecamatan. Literasi digital masyarakat Buol juga masih perlu ditingkatkan, terutama di kalangan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya yang dapat memperoleh manfaat signifikan dari teknologi digital dalam aktivitas ekonomi dan sosial mereka.

Peran strategis Kabupaten Buol dalam pengembangan konektivitas digital regional mencakup upaya mempercepat pembangunan infrastruktur digital hingga ke pelosok desa. Pemerintah Buol perlu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta penyedia layanan



telekomunikasi untuk memperluas jangkauan jaringan internet melalui program Universal Service Obligation (USO) dan Palapa Ring. Pengembangan Desa Digital sebagai model percontohan di beberapa desa dengan potensi ekonomi tinggi dapat mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pertanian, perikanan, dan UMKM. Program literasi digital yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi produktif seperti pemasaran produk pertanian dan perikanan secara online perlu diperkuat untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Implementasi e-government yang terintegrasi di tingkat kabupaten dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, termasuk melalui aplikasi mobile untuk layanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat. Pengembangan pusat-pusat akses internet komunal seperti Balai Digital Desa dan pojok internet di fasilitas publik dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan digital. Buol juga dapat memelopori implementasi solusi teknologi tepat guna seperti energi terbarukan (panel surya) untuk mengatasi keterbatasan listrik di daerah terpencil yang mendukung infrastruktur digital. Kemitraan dengan perguruan tinggi dan industri teknologi dalam program penelitian dan pengembangan solusi digital untuk permasalahan lokal seperti sistem informasi pertanian presisi, pemantauan cuaca, dan peringatan dini bencana juga perlu diperkuat.

15. Pengembangan Industri Hilir

Pengembangan industri hilir di Sulawesi menghadapi berbagai tantangan meskipun potensi sumber daya alam (SDA) sebagai bahan baku sangat melimpah. Sebagian besar komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan masih diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi dengan nilai tambah rendah. Kesenjangan antara produksi bahan baku dan kapasitas industri pengolahan lokal menyebabkan nilai ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati oleh daerah mengalir ke luar daerah. Industri pengolahan di Sulawesi masih didominasi oleh industri skala kecil dan menengah dengan teknologi sederhana, produktivitas rendah, serta daya saing yang terbatas.

Faktor-faktor yang menghambat pengembangan industri hilir antara lain infrastruktur pendukung yang belum memadai, seperti pasokan listrik yang



tidak stabil, keterbatasan akses jalan, serta pelabuhan yang belum optimal. Selain itu, akses terhadap pembiayaan dan teknologi, serta ketersediaan tenaga kerja terampil yang terbatas, juga menjadi kendala utama.

Upaya pengembangan industri hilir di Sulawesi belum sepenuhnya terintegrasi dengan strategi pengembangan wilayah yang komprehensif. Kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan belum berkembang sesuai rencana karena berbagai kendala investasi dan infrastruktur. Sinergi antara produsen bahan baku (petani, nelayan, dan penambang skala kecil) dengan industri pengolahan juga belum terbangun dengan baik, yang sering menyebabkan ketidakpastian pasokan bahan baku. Regulasi dan insentif untuk mendorong investasi di sektor industri pengolahan belum cukup menarik bagi investor, sementara kapasitas pemerintah daerah dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan industri masih perlu ditingkatkan.

Kabupaten Buol memiliki potensi besar untuk pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal, terutama dari komoditas perkebunan dan perikanan. Kakao, kelapa, dan cengkeh yang menjadi komoditas unggulan Buol sebagian besar masih dijual dalam bentuk biji atau belum diolah, sehingga nilai tambah ekonomi yang diperoleh masih rendah. Potensi perikanan laut di sepanjang pesisir Teluk Tomini juga belum dimanfaatkan secara optimal melalui industri pengolahan ikan. Kendala utama dalam pengembangan industri hilir di Buol antara lain keterbatasan infrastruktur penunjang industri, seperti pasokan listrik yang tidak stabil, akses jalan dari sentra produksi ke lokasi industri, serta pelabuhan untuk distribusi produk. Selain itu, kapasitas wirausaha dan tenaga kerja lokal dalam industri pengolahan juga masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan teknis dan manajerial. Peran strategis Kabupaten Buol dalam pengembangan industri hilir regional terletak pada fokus terhadap rantai nilai komoditas unggulan yang memiliki keunggulan komparatif.

Pemerintah Kabupaten Buol perlu memprioritaskan pembangunan kawasan industri terpadu skala kecil dan menengah yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan jalan akses. Pengembangan industri pengolahan kakao menjadi produk setengah jadi seperti pasta, bubuk, dan mentega kakao atau produk jadi seperti coklat



dapat menjadi fokus utama, mengingat Buol merupakan penghasil kakao berkualitas. Di sektor kelapa, pengembangan industri pengolahan kelapa terpadu yang menghasilkan berbagai produk turunan seperti Virgin Coconut Oil (VCO), tepung kelapa, gula kelapa, dan produk turunan kelapa lainnya juga memiliki prospek cerah. Sementara itu, di sektor perikanan, pengembangan industri pengolahan ikan, seperti pengasinan, pengasapan, pembuatan abon, serta produk olahan modern lainnya, dapat meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang daya simpan hasil perikanan.

Selain komoditas perkebunan dan perikanan, jagung juga memiliki potensi yang besar sebagai bahan baku untuk industri hilir di Kabupaten Buol. Sebagai salah satu komoditas pertanian utama, jagung dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam berbagai bentuk pengolahan, seperti produksi tepung jagung, keripik jagung, dan produk makanan olahan lainnya. Selain itu, jagung juga dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan bioetanol atau pakan ternak. Pengolahan jagung menjadi produk setengah jadi atau jadi akan meningkatkan nilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani lokal.

Sektor perikanan di Kabupaten Buol juga memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan panjang pesisir yang cukup luas, wilayah ini memiliki sumber daya ikan yang melimpah, baik dari perikanan laut maupun budidaya. Hilirisasi dari sektor perikanan ini dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai produk olahan ikan, seperti ikan asin, ikan asap, abon ikan, serta produk olahan modern seperti nugget ikan dan fillet ikan. Pengolahan ikan menjadi produk-produk tersebut tidak hanya akan meningkatkan nilai jual, tetapi juga dapat memperpanjang daya simpan produk perikanan yang dapat meningkatkan keberlanjutan pendapatan bagi nelayan.

Pemerintah Kabupaten Buol perlu memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam pengembangan teknologi tepat guna untuk industri pengolahan lokal. Program pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses pasar dan permodalan sangat penting untuk menumbuhkan wirausaha industri lokal. Pengembangan kemitraan antara petani dan nelayan dengan industri



pengolahan melalui skema kemitraan yang adil dan transparan dapat menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku dan pembagian nilai tambah yang lebih merata.

Selain itu, Buol juga perlu membangun branding produk-produk olahan lokal berbasis indikasi geografis dan nilai-nilai lokal untuk meningkatkan daya saing di pasar regional dan nasional. Kolaborasi dengan kabupaten-kabupaten tetangga dalam pengembangan klaster industri berbasis komoditas serupa dapat menciptakan ekonomi skala yang lebih efisien dan memperkuat posisi tawar dalam rantai nilai global. Dengan demikian, pengembangan industri hilir di Buol tidak hanya akan meningkatkan perekonomian daerah tetapi juga memperkuat posisi Buol sebagai pusat industri pengolahan yang berkelanjutan di Sulawesi.

16. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik di Sulawesi telah mengalami peningkatan seiring dengan implementasi reformasi birokrasi, namun masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Standar pelayanan minimum di berbagai sektor seperti administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, dan pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil. Prosedur pelayanan yang berbelit-belit, ketidakjelasan biaya dan waktu penyelesaian, serta praktik pungutan liar masih ditemui di beberapa instansi pelayanan publik. Kesenjangan akses terhadap pelayanan dasar antara masyarakat perkotaan dan pedesaan masih signifikan, dengan penduduk di daerah terpencil harus menempuh jarak jauh dan biaya tambahan untuk mengakses layanan pemerintah.

Adopsi teknologi informasi dalam pelayanan publik belum optimal dan merata. Meskipun banyak pemerintah daerah telah mengembangkan sistem e-government, implementasinya masih bervariasi dengan banyak daerah masih mengandalkan sistem manual yang rentan terhadap inefisiensi dan korupsi. Interoperabilitas antar sistem informasi pemerintah masih menjadi kendala, menyebabkan masyarakat harus menyediakan data yang sama berulang kali ketika mengakses layanan berbeda. Kapasitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik juga masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal profesionalisme, etika pelayanan, dan pemahaman terhadap standar pelayanan. Mekanisme



pengaduan dan penanganan keluhan masyarakat belum berjalan efektif di banyak instansi pemerintah.

Kabupaten Buol menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merata di seluruh wilayahnya. Kondisi geografis dengan kecamatan-kecamatan yang tersebar dan sebagian sulit dijangkau menyebabkan kesenjangan akses terhadap layanan pemerintah. Infrastruktur pelayanan publik seperti kantor kecamatan, puskesmas, dan sekolah di beberapa wilayah terpencil masih memerlukan peningkatan kualitas. Implementasi e-government di Buol masih dalam tahap awal pengembangan, dengan beberapa layanan dasar seperti administrasi kependudukan dan perizinan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Kapasitas aparatur pemerintah di tingkat kabupaten hingga desa dalam memberikan pelayanan prima masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pemahaman terhadap standar operasional prosedur dan etika pelayanan publik.

Peran strategis Kabupaten Buol dalam peningkatan kualitas pelayanan publik regional terletak pada inovasi pelayanan yang adaptif dengan kondisi geografis dan sosial-budaya setempat. Pemerintah Buol perlu memprioritaskan pengembangan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang terintegrasi dengan sistem digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Program jemput bola dan layanan keliling ke desa-desa terpencil dapat menjadi solusi untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang sulit menjangkau kantor pemerintahan. Pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi dengan sistem kabupaten dapat mempercepat aliran data dan informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan di tingkat akar rumput.

Pemerintah Buol juga perlu memperkuat kapasitas aparatur melalui pelatihan pelayanan prima dan pengembangan budaya kerja berorientasi pelayanan. Penerapan sistem pengukuran kinerja berbasis indikator pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat secara berkala dapat menjadi instrumen untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pengembangan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses seperti aplikasi mobile dan media sosial, disertai dengan mekanisme penanganan yang responsif, juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat



dalam pengawasan pelayanan publik. Buol dapat menjadi model bagi daerah lain dengan karakteristik serupa dalam pengembangan standar pelayanan yang adaptif dengan kondisi geografis menantang namun tetap memenuhi standar minimum nasional. Kolaborasi dengan kabupaten tetangga dalam berbagi praktik baik dan sumber daya pelayanan untuk daerah perbatasan dapat menciptakan efisiensi dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan publik di tingkat regional.

2.3.6 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tengah

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sulawesi Tengah menghadapi tantangan serius dalam hal kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, menjadi kendala utama dalam upaya peningkatan daya saing provinsi. Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, serta kesenjangan digital semakin memperburuk kondisi tersebut, menyebabkan ketimpangan kualitas SDM antarwilayah yang signifikan.

Berbagai program peningkatan kualitas SDM telah diimplementasikan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, pengembangan pendidikan vokasi yang sejalan dengan kebutuhan industri, hingga program pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja. Namun, efektivitas program-program tersebut masih terkendala oleh terbatasnya anggaran, distribusi tenaga pendidik dan kesehatan yang tidak merata, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Perhatian khusus juga perlu diberikan pada pengembangan kompetensi digital masyarakat mengingat era digitalisasi yang semakin masif.

Kabupaten Buol, sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tengah, memiliki tantangan spesifik terkait pengembangan SDM. Dengan IPM yang masih di bawah rata-rata provinsi, Buol menghadapi persoalan klasik berupa tingginya angka putus sekolah, terbatasnya jumlah guru berkualitas, serta akses kesehatan yang belum optimal. Lokasi geografis Buol yang berada di pesisir utara Sulawesi Tengah dan berbatasan langsung dengan



Gorontalo menjadikannya strategis namun sekaligus terisolasi dari pusat pembangunan provinsi. Meski demikian, Buol telah menginisiasi program unggulan seperti Buol Cerdas melalui beasiswa pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pemuda yang berpotensi mendorong peningkatan kualitas SDM lokal.

Potensi unggulan Kabupaten Buol di sektor perkebunan, terutama kakao dan kelapa, serta perikanan memberikan peluang bagi pengembangan SDM yang terarah. Program-program pelatihan dan pendampingan bagi petani dan nelayan, serta pengembangan keterampilan pengolahan hasil pertanian dan perikanan menjadi nilai tambah ekonomi, dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kualitas SDM berbasis potensi lokal. Kolaborasi dengan perguruan tinggi regional dan lembaga pelatihan nasional perlu diperkuat untuk mempercepat peningkatan kapasitas SDM Buol dalam menghadapi persaingan global.

2. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sulawesi Tengah menyimpan kekayaan destinasi pariwisata yang luar biasa, mulai dari keindahan alam Taman Nasional Lore Lindu yang merupakan situs warisan dunia, pesona bawah laut Teluk Tomini dan Togean yang menakjubkan, hingga kekayaan budaya megalitik yang unik. Namun, pengembangan sektor pariwisata ini belum optimal jika dibandingkan dengan potensinya. Keterbatasan aksesibilitas, minimnya infrastruktur pendukung pariwisata, kurangnya promosi yang efektif, serta belum terintegrasinya pengelolaan destinasi wisata menjadi kendala utama. Pandemi COVID-19 juga telah memberikan pukulan berat bagi sektor ini, yang membutuhkan strategi pemulihan komprehensif.

Ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, terutama pada subsektor kerajinan, kuliner, dan seni pertunjukan yang berbasis pada kearifan lokal. Produk-produk kerajinan berbahan damar, anyaman rotan, tenun Donggala, serta kuliner khas seperti kaledo dan palu mujair memiliki potensi pasar yang luas. Tantangannya terletak pada keterbatasan akses terhadap teknologi produksi, modal usaha, dan pasar yang lebih luas, serta kurangnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Pengembangan ekosistem



ekonomi kreatif yang mendukung inovasi dan kolaborasi antarsektor masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan nilai tambah ekonomi.

Kabupaten Buol memiliki potensi pariwisata yang belum tergali secara optimal, terutama wisata bahari di sepanjang pesisir utara yang memiliki pantai eksotis dan terumbu karang yang masih terjaga, serta wisata budaya berbasis kearifan lokal masyarakat Buol. Keunikan tradisi Buwano Kati (pernikahan adat) dan ritual Monambo menjadi daya tarik tersendiri yang dapat dikembangkan. Namun, pengembangan pariwisata di Buol masih terkendala oleh minimnya infrastruktur pendukung, promosi yang terbatas, serta belum terbangunnya ekosistem pariwisata yang terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Buol telah mengembangkan inisiatif Festival Teluk Tomini sebagai upaya mempromosikan potensi pariwisata daerah, namun masih membutuhkan dukungan lebih luas.

Ekonomi kreatif di Kabupaten Buol berfokus pada kerajinan anyaman dari bahan alami seperti rotan dan bambu, pengolahan hasil laut, serta produk olahan makanan berbasis kakao dan kelapa. Potensi ini dapat menjadi pendukung sektor pariwisata sekaligus penggerak ekonomi lokal.

Pengembangan Kampung Kreatif di beberapa desa potensial di Buol dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan pariwisata. Peran strategis Kabupaten Buol terletak pada posisinya yang dapat menjadi penghubung jalur wisata antara Sulawesi Tengah dan Gorontalo, sehingga pengembangan destinasi wisata terintegrasi dengan daerah sekitarnya dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian lokal.

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Merata dan Berkadil

Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan serius dalam hal pemerataan pembangunan sarana dan prasarana. Kesenjangan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah pesisir dan pegunungan masih sangat kentara. Akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan yang layak, listrik, air bersih, dan sanitasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik geografis Sulawesi Tengah yang bergunung-gunung dan memiliki banyak teluk, sehingga menyulitkan pembangunan infrastruktur yang merata. Bencana alam yang



sering terjadi, seperti gempa bumi dan likuifaksi Palu pada 2018, juga telah merusak banyak infrastruktur vital yang membutuhkan waktu dan dana besar untuk rehabilitasi.

Upaya pemerintah provinsi dalam membangun infrastruktur strategis seperti Jalan Trans Sulawesi, pelabuhan, dan bandara telah memberikan dampak positif bagi peningkatan konektivitas, namun belum sepenuhnya menyelesaikan masalah ketimpangan infrastruktur. Pembangunan yang terpusat di kawasan perkotaan dan koridor ekonomi utama menyebabkan daerah-daerah pinggiran semakin tertinggal. Pendekatan pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan pendekatan pembangunan berbasis komunitas dapat menjadi solusi alternatif untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dengan biaya yang lebih efisien.

Kabupaten Buol menghadapi tantangan spesifik dalam pembangunan infrastruktur karena posisi geografisnya yang relatif terisolasi dari pusat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Kondisi jalan penghubung antarkecamatan yang belum sepenuhnya mantap, akses listrik yang belum 24 jam di beberapa daerah pedesaan, serta terbatasnya jaringan telekomunikasi dan internet menjadi hambatan serius bagi pembangunan. Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor perkebunan dan perikanan, infrastruktur pendukung seperti irigasi, pelabuhan perikanan, dan sarana pengolahan hasil pertanian juga belum memadai, yang berdampak pada nilai tambah ekonomi yang belum optimal.

Peran strategis Kabupaten Buol dalam pembangunan infrastruktur Sulawesi Tengah terletak pada posisinya sebagai penghubung antara Sulawesi Tengah dan Gorontalo di pesisir utara. Pengembangan pelabuhan Leok di Buol berpotensi menjadi simpul transportasi laut yang menghubungkan kawasan timur Indonesia dan Filipina Selatan. Pembangunan jalan lintas utara Sulawesi yang menghubungkan Buol dengan Gorontalo dan Toli-toli juga memiliki nilai strategis dalam membuka keterisolasian wilayah. Pendekatan pembangunan infrastruktur di Buol yang mengintegrasikan kebutuhan masyarakat lokal dengan kepentingan regional akan menciptakan multiplier effect bagi pembangunan ekonomi



dan pemerataan akses layanan dasar, sekaligus meningkatkan daya saing wilayah dalam konteks pembangunan Sulawesi Tengah secara keseluruhan.

4. Pembangunan Antar Daerah serta Desa-Kota

Kesenjangan pembangunan antar daerah di Sulawesi Tengah masih menjadi tantangan serius yang menghambat pemerataan kesejahteraan. Konsentrasi aktivitas ekonomi dan pembangunan yang terpusat di kawasan perkotaan, terutama Kota Palu sebagai ibukota provinsi, menyebabkan daerah-daerah pinggiran semakin tertinggal. Disparitas PDRB antarwilayah, tingkat kemiskinan, dan akses terhadap layanan dasar masih sangat mencolok. Kabupaten di wilayah pegunungan tengah seperti Sigi dan Poso, serta kabupaten kepulauan seperti Tojo Una-Una dan Banggai Kepulauan menghadapi tantangan pembangunan yang lebih kompleks dibandingkan kabupaten di wilayah pesisir dan pusat pertumbuhan. Pendekatan pembangunan yang berfokus pada sektor unggulan masing-masing daerah dan penguatan konektivitas antarwilayah menjadi kunci untuk mereduksi kesenjangan ini.

Ketimpangan pembangunan desa-kota di Sulawesi Tengah juga tercermin dari tingginya arus urbanisasi, terutama kaum muda yang meninggalkan desa untuk mencari penghidupan yang lebih baik di perkotaan. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan permasalahan sosial di perkotaan seperti pemukiman kumuh dan pengangguran, tetapi juga menguras potensi SDM produktif di pedesaan. Program-program pembangunan desa seperti Dana Desa belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja yang menarik bagi generasi muda di pedesaan. Pengembangan sektor pertanian yang masih tradisional, terbatasnya diversifikasi ekonomi pedesaan, serta minimnya infrastruktur pendukung seperti teknologi informasi dan transportasi menjadi faktor pendorong kesenjangan desa-kota.

Kabupaten Buol sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan pedesaan, menghadapi tantangan serius dalam konteks pembangunan antar daerah dan desa-kota. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, nilai tambah ekonominya masih rendah karena keterbatasan infrastruktur dan akses pasar. Kesenjangan pembangunan antara ibukota kabupaten dengan desa-desa terpencil



masih sangat terasa, terutama di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Gorontalo. Fenomena migrasi penduduk produktif dari Buol ke pusat-pusat pertumbuhan seperti Palu, Gorontalo, bahkan Manado, telah menguras potensi SDM lokal yang seharusnya menjadi penggerak pembangunan daerah.

Peran strategis Kabupaten Buol dalam konteks pembangunan antar daerah dan desa-kota di Sulawesi Tengah terletak pada potensinya sebagai pusat pertumbuhan baru di wilayah utara. Pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan seperti kakao, kelapa, dan perikanan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang menyebar hingga ke pedesaan. Posisi geografis Buol yang berbatasan langsung dengan Gorontalo membuka peluang kerjasama antardaerah yang lebih luas, terutama dalam pengembangan infrastruktur bersama dan pemasaran produk. Program pembangunan desa terpadu yang menghubungkan produksi pertanian dan perikanan dengan industri pengolahan dan pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja yang menarik di pedesaan, sehingga mengurangi arus urbanisasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Sulawesi Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat beragam, mulai dari hutan tropis yang menyimpan keanekaragaman hayati tinggi, lahan potensial untuk pertanian dan perkebunan, sumber daya mineral seperti nikel dan emas, hingga potensi kelautan dan perikanan yang melimpah di sepanjang pesisir dan Teluk Tomini. Namun, eksploitasi SDA yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti deforestasi, degradasi lahan, pencemaran, dan hilangnya habitat alami berbagai spesies endemik. Pertambangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur, serta praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan SDA. Konflik kepentingan antara konservasi dan pemanfaatan ekonomi seringkali menyulitkan implementasi pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

Upaya pengelolaan SDA berkelanjutan di Sulawesi Tengah menghadapi tantangan berupa lemahnya penegakan hukum, terbatasnya kapasitas



kelembagaan, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Program-program seperti Perhutanan Sosial, Pengembangan Ekowisata, serta Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu telah diinisiasi, namun implementasinya belum optimal. Perubahan iklim yang semakin nyata dampaknya, seperti kekeringan berkepanjangan, banjir, dan naiknya permukaan air laut, menambah kompleksitas dalam pengelolaan SDA. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat adat dan lokal, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta integrasi kearifan lokal dalam pemanfaatan SDA menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan.

Kabupaten Buol dengan luas wilayah sekitar 4.043 km² memiliki kekayaan SDA yang beragam, terutama di sektor perkebunan, kehutanan, dan kelautan. Sebagai daerah penghasil kakao, kelapa, dan cengkeh, Buol menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perluasan lahan perkebunan dan pelestarian hutan. Kawasan hutan lindung Buol yang menjadi hulu beberapa sungai penting mengalami tekanan akibat perambahan dan penebangan liar. Di sektor kelautan, pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut belum optimal akibat praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan pengelolaan wilayah pesisir yang belum terintegrasi. Konflik kepentingan antara konservasi dan pemanfaatan ekonomi, serta terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengelolaan SDA menjadi kendala serius.

Peran strategis Kabupaten Buol dalam pengelolaan SDA berkelanjutan di Sulawesi Tengah terletak pada posisinya yang memiliki ekosistem lengkap dari pegunungan hingga pesisir. Pengembangan model pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu yang menghubungkan kawasan hulu-hilir dapat menjadi percontohan bagi kabupaten lain. Inisiatif "Buol Hijau" yang mengedepankan praktik pertanian dan perkebunan berkelanjutan, seperti agroforestri kakao organik, telah menunjukkan dampak positif bagi lingkungan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Di wilayah pesisir, pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang dikelola bersama masyarakat nelayan telah berkontribusi pada pemulihan stok ikan dan ekosistem terumbu karang. Integrasi kearifan lokal "Butomu" dalam pengelolaan sumber daya alam yang menekankan keseimbangan



antara pemanfaatan dan pelestarian dapat menjadi model pendekatan pengelolaan SDA berkelanjutan yang kontekstual dengan kondisi sosial budaya masyarakat Sulawesi Tengah.

6. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Sulawesi Tengah dengan bentang alam yang didominasi pegunungan, teluk, dan kepulauan menghadapi tantangan besar dalam pengembangan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur. Keterisolasian beberapa wilayah, terutama daerah pegunungan tengah dan kepulauan, masih menjadi kendala utama dalam pemerataan pembangunan. Infrastruktur transportasi seperti jalan, pelabuhan, dan bandara belum terintegrasi secara optimal, menyebabkan biaya logistik yang tinggi dan terhambatnya distribusi barang dan jasa. Kondisi jalan Trans Sulawesi yang belum sepenuhnya mantap, terbatasnya layanan transportasi laut yang menghubungkan pulau-pulau kecil, serta minimnya bandara dengan penerbangan reguler menjadi bottleneck dalam pengembangan ekonomi wilayah. Bencana alam yang sering terjadi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi.

Upaya peningkatan konektivitas di Sulawesi Tengah telah dilakukan melalui berbagai program strategis seperti pengembangan Jalan Trans Sulawesi, pembangunan pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Pantoloan dan Ampana, serta peningkatan kualitas dan layanan Bandara Mutiara Sis Al- Jufri Palu. Namun, konektivitas digital masih menjadi tantangan serius dengan masih banyaknya blank spot di daerah pedesaan dan terpencil. Kesenjangan digital ini semakin terasa dampaknya di era digitalisasi, di mana akses terhadap internet dan telekomunikasi menjadi kebutuhan dasar. Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan potensi ekonomi wilayah menjadi kunci untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas secara keseluruhan.

Kabupaten Buol menghadapi tantangan spesifik dalam hal konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur akibat posisinya yang berada di ujung utara Sulawesi Tengah dan berbatasan dengan Gorontalo. Kondisi jalan penghubung antara Buol dengan kabupaten tetangga seperti Toli-toli yang belum sepenuhnya mantap, serta minimnya transportasi umum



antarwilayah, menyebabkan keterisolasian relatif dari pusat-pusat pertumbuhan provinsi. Pelabuhan Leok yang belum optimal fungsinya, serta bandara perintis yang masih terbatas layanannya, belum mampu menjawab kebutuhan mobilitas penduduk dan distribusi komoditas. Konektivitas digital juga masih menjadi kendala dengan masih tingginya persentase desa yang belum terjangkau layanan internet dan sinyal telepon yang stabil, terutama di kecamatan- kecamatan pedalaman seperti Biau, Momunu, dan Tiloan.

Peran strategis Kabupaten Buol dalam peningkatan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur Sulawesi Tengah terletak pada posisinya yang dapat menjadi simpul penghubung antara Sulawesi Tengah dan Gorontalo di pesisir utara. Pengembangan Pelabuhan Leok menjadi pelabuhan pengumpul regional dapat memperkuat konektivitas maritim yang menghubungkan Sulawesi Tengah dengan Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, bahkan Filipina Selatan. Pembangunan jalan lintas utara Sulawesi yang menghubungkan Buol-Gorontalo-Manado dapat menjadi alternatif jalur transportasi darat yang mempersingkat waktu tempuh antara bagian utara dan selatan Sulawesi. Pengembangan infrastruktur digital melalui program "Buol Smart Village" yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan jaringan internet dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi digital dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan publik online. Integrasi berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah akan menciptakan sistem konektivitas yang efisien dan mendukung pengembangan ekonomi Buol secara menyeluruh.

7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif

Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan signifikan dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih. Berbagai indikator seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan di provinsi ini masih memerlukan peningkatan. Permasalahan klasik seperti tumpang tindih kebijakan, ego sektoral antarinstansi, rendahnya kualitas pelayanan publik,



serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran masih sering dijumpai. Pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi 2018, tata kelola tanggap bencana dan rehabilitasi-rekonstruksi juga menjadi sorotan karena lambatnya pemulihan dan kurang terkoordinasinya penanganan bencana.

Upaya reformasi birokrasi di Sulawesi Tengah telah diinisiasi melalui berbagai program seperti pengembangan e-government, penerapan sistem pengadaan barang/jasa elektronik, serta penguatan pengawasan internal. Namun, implementasinya masih terkendala oleh rendahnya kapasitas aparatur, terbatasnya infrastruktur teknologi informasi, serta belum terbangunnya budaya birokrasi yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan juga belum optimal, menyebabkan kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat sipil, masih perlu diperkuat untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak luas.

Kabupaten Buol menghadapi tantangan khusus dalam pengembangan tata kelola pemerintahan karena keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur. Nilai SAKIP Kabupaten Buol yang masih relatif rendah, terbatasnya implementasi e-government, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi masih perlu diperkuat. Koordinasi antarinstansi dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan juga belum optimal, menyebabkan inefisiensi dan kurang terarahnya intervensi pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi tantangan seperti rendahnya realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah), kurang optimalnya efisiensi belanja, serta tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Kabupaten Buol telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui berbagai inovasi. Program "Buol Transparan" yang membuka akses publik terhadap informasi penganggaran dan pengadaan



barang/jasa pemerintah telah meningkatkan kepercayaan publik. Pengembangan aplikasi "Buol Mobile" yang mengintegrasikan berbagai layanan publik secara daring juga telah memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Pendekatan musrenbang partisipatif yang mengadopsi metodologi "bottom-up planning" telah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Peran strategis Kabupaten Buol dalam konteks peningkatan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah terletak pada potensinya sebagai laboratorium inovasi governance di daerah yang relatif terisolasi. Model kolaborasi pemerintah-masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, pengembangan desa tanggap bencana, serta sistem pelayanan terpadu berbasis kecamatan dapat menjadi praktik baik yang dapat direplikasi oleh kabupaten lain dengan karakteristik serupa. Penguatan koordinasi lintas batas dengan Gorontalo juga dapat menjadi model kerjasama antar daerah yang efektif dalam penanganan isu-isu strategis bersama seperti pengelolaan wilayah perbatasan, distribusi komoditas, dan penanganan bencana.

8. Isu Strategis dalam Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol
Ada empat isu strategis jangka menengah Kabupaten Buol yaitu:
a) Peningkatan Kualitas SD, Kesehatan Penduduk dan Penguatan Budaya Lokal

Pilar SDM Buol masih dihadapkan pada tantangan pemerataan kualitas pendidikan (partisipasi, literasi, akses ke pendidikan tinggi) serta kesenjangan kota–desa. Di sisi kesehatan, kasus stunting, gizi buruk, dan ketidakmerataan layanan primer menuntut penguatan tenaga/fasilitas, promosi PHBS, dan sanitasi. Di saat yang sama, modernisasi berpotensi mengikis bahasa, seni, dan kearifan lokal—karena itu penguatan budaya penting sebagai identitas, kohesi sosial, dan basis pariwisata. Inklusi bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan perlu ditingkatkan melalui kebijakan dan implementasi yang lebih sistematis.

- Pemerataan mutu dan akses pendidikan, terutama wilayah pedesaan.
- Perluasan layanan kesehatan dasar, gizi, air minum dan sanitasi.
- Revitalisasi budaya (bahasa/seni/kearifan lokal) sebagai kohesi & daya tarik wisata.



- Pengarusutamaan gender & perlindungan kelompok rentan dalam program publik.

b) Transformasi Ekonomi Berbasis Nilai Tambah dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan

Potensi pertanian–perkebunan–perikanan besar, namun produktivitas, irigasi, teknologi budidaya, akses modal/pasar, dan industri pengolahan masih terbatas sehingga nilai tambah rendah dan ekonomi rentan fluktuasi harga. Diversifikasi ke pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital perlu dipacu. Pada saat yang sama, pemanfaatan SDA harus menegakkan zonasi RTRW dan praktik ramah lingkungan (agroforestri, perhutanan sosial, ekowisata) untuk menyeimbangkan konservasi–pemanfaatan, termasuk di bentang pegunungan–pesisir Buol (kakao, kelapa, cengkeh) yang menghadapi tekanan konversi hutan dan praktik tidak ramah lingkungan.

- Percepatan hilirisasi hasil pertanian/perikanan dan penguatan akses pembiayaan/pasar.
- Penguatan pariwisata alam–budaya dan ekonomi kreatif/digital.
- Penegakan RTRW, perhutanan sosial & ekowisata; kendalikan deforestasi/pencemaran.

c) Pemenuhan Infrastruktur Publik dan Konektivitas Layanan Dasar

Kondisi jalan antar-kecamatan/desa (terutama pedalaman/pegunungan) masih banyak yang rusak/belum beraspal, menaikkan biaya logistik dan menahan arus barang–jasa. Akses air minum layak dan sanitasi belum merata; listrik dan telekomunikasi/internet masih terbatas di wilayah terpencil. Infrastruktur pendukung ekonomi—irigasi, pasar, dan pelabuhan—belum memadai untuk mendukung produksi, distribusi, dan ekspor.

- Rehabilitasi/peningkatan jalan dan pemeliharaan rutin yang konsisten.
- Perluasan jaringan air minum & sanitasi serta pengelolaan sampah.
- Listrik pedesaan dan perluasan jaringan telekomunikasi/internet.
- Revitalisasi irigasi, pasar, dan pelabuhan sebagai simpul nilai tambah & logistik.



d) Tata Kelola Pemerintahan, Kepastian Hukum dan Regulasi yang Adaptif Birokrasi masih menghadapi isu efisiensi/efektivitas layanan, keterbatasan e-government, dan kompetensi aparatur; transparansi–akuntabilitas keuangan, penganggaran berbasis kinerja, dan partisipasi publik perlu diperkuat. Sinkronisasi lintas level (pusat–provinsi–kabupaten–desa) masih terkendala tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral. Di ranah hukum, persepsi ketidakadilan dan akses keadilan yang terbatas bagi kelompok marginal perlu diatasi, seiring peningkatan ketertiban sosial dan kualitas regulasi daerah yang selaras peraturan lebih tinggi serta responsif terhadap perubahan.

- Digitalisasi layanan & manajemen kinerja aparatur (merit system, peningkatan kapasitas TI).
- Penguatan penganggaran berbasis kinerja, akuntabilitas, dan partisipasi warga.
- Sinkronisasi lintas level dan kelembagaan untuk menghindari tumpang tindih.

Akses keadilan, ketertiban sosial, dan harmonisasi regulasi daerah yang adaptif.

9. Sumber Daya Manusia, Kualitas Kependudukan dan Penguatan Budaya
Pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Buol menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas pendidikan yang masih terbatas. Angka partisipasi sekolah, tingkat literasi, dan akses terhadap pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan. Kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi isu penting yang perlu diatasi melalui pemerataan infrastruktur pendidikan dan tenaga pengajar berkualitas.

Aspek kesehatan penduduk Kabupaten Buol juga menjadi perhatian dengan masih terdapatnya kasus stunting, gizi buruk, dan akses pelayanan kesehatan yang belum merata. Perlunya peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis, fasilitas kesehatan, serta program preventif untuk mengatasi masalah kesehatan dasar. Edukasi mengenai pola hidup sehat dan sanitasi juga perlu diperkuat hingga ke tingkat rumah tangga.



Penguatan budaya lokal menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai tradisional masyarakat Buol. Pelestarian bahasa daerah, seni tradisional, dan kearifan lokal perlu mendapat perhatian khusus sebagai bentuk identitas dan kebanggaan daerah. Program revitalisasi budaya dapat menjadi sarana untuk memperkuat kohesi sosial sekaligus menjadi potensi pengembangan pariwisata berbasis budaya.

Ketimpangan gender dan perlindungan terhadap kelompok rentan masih menjadi isu yang perlu penanganan sistematis. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik, perlindungan anak, dan akses layanan bagi penyandang disabilitas masih memerlukan penguatan kebijakan dan implementasi program yang inklusif. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan kesetaraan juga perlu ditingkatkan.

10. Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Kabupaten Buol memiliki potensi ekonomi yang besar terutama dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, namun produktivitas dan nilai tambah produk masih belum optimal. Permasalahan klasik seperti teknologi budidaya yang masih tradisional, sistem irigasi yang belum memadai, serta keterbatasan akses petani dan nelayan terhadap modal dan pasar masih menjadi hambatan signifikan. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan perlu didorong untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal.

Ketergantungan ekonomi pada sektor primer (pertanian dan perikanan) menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas. Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital masih belum berkembang optimal. Potensi pariwisata alam dan budaya Kabupaten Buol yang kaya belum dikelola dengan baik sehingga belum memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Pengelolaan sumber daya alam, terutama hutan, lahan, dan pesisir masih menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan. Praktik eksploitasi berlebihan, konversi hutan menjadi perkebunan monokultur, serta pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan menjadi ancaman



terhadap kualitas dan ketersediaan sumber daya alam. Belum adanya pemetaan terpadu dan rencana pengelolaan yang komprehensif menyebabkan konflik penggunaan lahan yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan ketidakadilan sosial.

Isu investasi dan iklim usaha juga menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi Kabupaten Buol. Proses perizinan yang panjang, kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta kualitas tenaga kerja yang belum memadai menjadi faktor penghambat masuknya investasi. Program pemberdayaan UMKM lokal juga masih terbatas dalam hal pendampingan, akses permodalan, dan pemasaran produk.

11. Infrastruktur Publik yang Memadai dan Merata

Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Buol masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan. Banyak jalan penghubung antar kecamatan dan desa yang masih dalam kondisi rusak atau belum beraspal, terutama di wilayah pedalaman dan pegunungan. Hal ini menyebabkan kesulitan mobilitas penduduk, terhambatnya distribusi hasil pertanian, dan tingginya biaya logistik. Pemeliharaan infrastruktur jalan yang sudah ada juga belum optimal, sehingga sering rusak kembali setelah musim hujan.

Akses terhadap air bersih dan sanitasi masih menjadi isu krusial di beberapa wilayah Kabupaten Buol. Jaringan perpipaan PDAM belum menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah pedesaan dan pegunungan. Masyarakat masih banyak yang mengandalkan sumber air yang tidak terjamin kualitasnya. Sistem sanitasi dan pengelolaan limbah juga masih minim, dengan tingkat kepemilikan jamban sehat yang belum merata dan sistem pengelolaan sampah yang belum terorganisir dengan baik.

Ketersediaan listrik dan telekomunikasi masih menjadi kendala pembangunan di beberapa wilayah terpencil. Meskipun program listrik desa telah berjalan, namun masih terdapat daerah yang belum terjangkau listrik atau mengalami pemadaman bergilir. Jaringan telekomunikasi dan internet juga belum merata, menghambat akses informasi dan pengembangan ekonomi digital di wilayah pedesaan. Pengembangan sumber energi terbarukan seperti mikrohidro dan tenaga surya belum dimanfaatkan secara optimal.



Infrastruktur pendukung ekonomi seperti irigasi, pasar, dan pelabuhan juga memerlukan perhatian khusus. Sistem irigasi untuk pertanian masih terbatas dan banyak yang rusak, menyebabkan produktivitas pertanian tidak optimal. Infrastruktur pasar tradisional maupun modern yang representatif masih minim, sementara pelabuhan sebagai pintu keluar masuk barang belum memadai untuk mendukung kegiatan ekspor hasil pertanian dan perikanan. Pengembangan kawasan ekonomi khusus atau sentra industri juga masih belum terbangun dengan baik.

12. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Berintegritas, Profesional dan Melayani

Birokrasi pemerintahan di Kabupaten Buol masih menghadapi tantangan dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Prosedur pelayanan yang berbelit-belit, waktu penyelesaian yang lama, dan kurangnya transparansi menjadi keluhan masyarakat. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) masih terbatas dan belum terintegrasi antar instansi, sehingga koordinasi antar lembaga pemerintah belum optimal dalam penyelesaian masalah publik.

Kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan kompetensi pegawai, terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan pemahaman regulasi, menjadi kendala dalam memberikan pelayanan prima. Penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kompetensi (mismatched), sistem rekrutmen yang belum sepenuhnya berbasis merit, serta program pengembangan kapasitas yang belum berjalan sistematis turut menjadi penyebab rendahnya kinerja aparatur.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah masih perlu penguatan. Perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, alokasi yang belum fokus pada prioritas pembangunan, serta lemahnya pengawasan dalam implementasi program pembangunan menjadi isu penting. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan juga belum optimal, menyebabkan program yang dilaksanakan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Koordinasi antar tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten, dan desa) masih menghadapi kendala dalam sinkronisasi kebijakan dan program. Tumpang tindih kewenangan, ego sektoral, dan keterbatasan komunikasi menyebabkan program pembangunan tidak terintegrasi dan tidak berkelanjutan. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola dana desa juga masih diperlukan untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

13. Hukum yang Berkeadilan, Keamanan Sosial dan Regulasi yang Adaptif
Penegakan hukum di Kabupaten Buol masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi dan keadilan. Masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya bebas dari intervensi dan diskriminasi. Akses terhadap keadilan bagi masyarakat marginal dan pedesaan juga masih terbatas karena minimnya lembaga bantuan hukum dan sosialisasi mengenai hak-hak hukum masyarakat. Penyelesaian sengketa alternatif berbasis kearifan lokal belum dimanfaatkan secara optimal.

Keamanan dan ketertiban sosial masih menghadapi beberapa isu seperti konflik lahan, konflik antar kelompok masyarakat, dan kejahatan konvensional. Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras juga menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan perlu diperkuat melalui revitalisasi sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan penguatan forum kemitraan polisi dan masyarakat.

Regulasi daerah masih menghadapi permasalahan dalam hal kualitas dan harmonisasi. Beberapa peraturan daerah dibuat tanpa kajian mendalam, tidak adaptif terhadap perkembangan zaman, atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses pembuatan regulasi juga belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, terutama kelompok yang terdampak langsung. Evaluasi regulasi yang sudah ada juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan pembangunan.

Isu perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat masih memerlukan penanganan yang lebih serius. Regulasi yang melindungi hak-hak



kelompok rentan masih terbatas dan belum diimplementasikan secara optimal. Kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan anak, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih terjadi dan memerlukan pendekatan hukum dan sosial yang komprehensif.

14. Ekosistem Berkelanjutan

Kabupaten Buol menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Deforestasi dan degradasi hutan akibat perambahan, konversi menjadi perkebunan, dan logging ilegal masih menjadi ancaman serius. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem, penyedia air, dan pencegah bencana alam. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat perlu diperkuat dengan melibatkan komunitas lokal dan masyarakat adat dalam perlindungan dan pemanfaatan hutan secara lestari.

Degradasi lingkungan pesisir dan laut juga menjadi perhatian penting. Praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, pencemaran pesisir, dan kerusakan terumbu karang mengancam keberlanjutan sumber daya laut yang menjadi andalan ekonomi masyarakat pesisir. Kawasan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung pantai dan habitat berbagai biota laut juga mengalami pengurangan akibat alih fungsi menjadi tambak dan pemukiman. Pengelolaan terpadu wilayah pesisir dengan melibatkan masyarakat nelayan perlu dikembangkan.

Perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap Kabupaten Buol, terutama pada sektor pertanian dan kerentanan terhadap bencana. Perubahan pola hujan, kenaikan suhu, dan kejadian cuaca ekstrem menyebabkan gangguan pada produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim belum terintegrasi dalam perencanaan pembangunan, dan kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan iklim masih terbatas.

Pengelolaan sampah dan limbah masih menjadi masalah lingkungan yang serius. Sistem pengelolaan sampah yang terorganisir belum menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah pedesaan. Tempat pembuangan akhir sampah belum dikelola dengan baik, sementara budaya membuang sampah sembarangan masih menjadi kebiasaan di sebagian masyarakat.



Pengolahan limbah domestik dan industri belum memiliki sistem yang memadai sehingga berpotensi mencemari sumber air dan tanah. Pendekatan ekonomi sirkular dengan prinsip reduce, reuse, recycle perlu dikembangkan.

15. Pembangunan Daya Saing Usaha Daerah

Daya saing produk unggulan Kabupaten Buol masih rendah karena keterbatasan dalam standarisasi mutu, pengemasan, branding, dan pemasaran. Produk-produk lokal seperti hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan masih dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa proses pengolahan yang memberikan nilai tambah. Kapasitas pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi produksi, manajemen mutu, dan strategi pemasaran masih terbatas, menyebabkan produk lokal kalah bersaing di pasar yang lebih luas.

Ekosistem kewirausahaan di Kabupaten Buol belum berkembang optimal untuk mendukung tumbuhnya usaha-usaha baru yang inovatif. Akses terhadap permodalan, terutama bagi pelaku UMKM dan start-up lokal masih terbatas. Program pelatihan kewirausahaan dan inkubasi bisnis belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Jaringan kerjasama antara pelaku usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah (triple helix) dalam pengembangan inovasi juga belum terbangun dengan baik.

Infrastruktur pendukung ekonomi digital seperti jaringan internet yang stabil, sistem pembayaran elektronik, dan platform e-commerce lokal masih belum memadai. Kesiapan pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi digital dan memanfaatkan peluang ekonomi digital juga masih rendah. Transformasi digital UMKM perlu didorong untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional usaha.

Koordinasi antar stakeholder dalam pengembangan ekonomi lokal masih perlu ditingkatkan. Belum adanya roadmap pengembangan produk unggulan daerah yang komprehensif dan terintegrasi menyebabkan program pengembangan ekonomi berjalan secara parsial dan tidak berkelanjutan. Sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan sektor swasta, dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus juga belum optimal. Penguatan forum



kemitraan publik-swasta untuk dialog kebijakan dan kerjasama program perlu difasilitasi.

Kapasitas sumber daya manusia bidang ekonomi dan bisnis masih perlu ditingkatkan. Keterampilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan para pelaku usaha lokal masih terbatas. Lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi belum sepenuhnya mampu menyediakan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan sektor usaha. Jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda juga perlu dipupuk melalui program pendidikan kewirausahaan sejak dini dan penciptaan role model wirausaha sukses yang bisa menginspirasi.

16. Rencana Kawasan Transmigrasi

a) Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Air Terang-Tiloan

Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Air Terang-Tiloan memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kawasan transmigrasi terpadu yang mandiri sebagai pusat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta untuk menyediakan sistem prasarana, sarana, dan utilitas yang diperlukan. RKT ini berfokus pada pengembangan sentra produksi unggulan, pusat jasa, serta distribusi produk, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Dalam mencapai tujuan tersebut, RKT ini mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2021.

Kebijakan yang diusulkan dalam RKT ini meliputi pembangunan enam Satuan Kawasan Permukiman (SKP) sebagai pusat pertumbuhan yang berfokus pada komoditas unggulan serta menjaga daya dukung dan daya tampung ruang peruntukan. Selain itu, RKT ini juga mempersiapkan upaya mitigasi bencana yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dari segi isu strategis, beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan RKT ini muncul, antara lain adalah perubahan kondisi aktual penggunaan lahan, perubahan status kepemilikan lahan, serta kepadatan populasi yang beragam pada setiap kecamatan. Di Kecamatan Bokat, misalnya, terdapat 16.935 jiwa dalam luas 9.392,93 hektar, sedangkan Kecamatan Momunu memiliki jumlah penduduk



terbesar dengan 18.907 jiwa pada luas 11.103,90 hektar. Dinamika kependudukan yang tinggi ini menuntut perencanaan yang matang agar tidak timbul permasalahan kepadatan dan pemanfaatan lahan yang berlebihan.

Rekomendasi yang diperkuat dalam pelaksanaan RKT ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, perlu ada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat melalui program-program yang terfokus pada keterampilan pertanian dan pengembangan komoditas unggulan. Kedua, penguatan infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas kesehatan sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, integrasi antara aktivitas perekonomian lokal dengan pasar yang lebih luas harus difasilitasi melalui pengembangan fasilitas distribusi dan penyimpanan produk lokal. Terakhir, adopsi praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus diterapkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan keberlangsungan kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.

Dalam konteks struktur ruang, RKT Air Terang mencakup area seluas 49.530,72 hektar, yang terdiri dari 53 desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Di dalam kawasan ini terdapat pemukiman yang sudah ada dan direncanakan untuk dibangun Satuan Permukiman Baru (SP Baru) serta Satuan Permukiman Pugar (SP Pugar). Luas masing-masing SKP direncanakan untuk tidak kurang dari 6.000 hektar dan tidak lebih dari 12.000 hektar sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Dari hasil analisis, komoditas unggulan yang diharapkan untuk dikembangkan di kawasan ini mencakup tanaman pangan seperti jagung dan kacang hijau, serta tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan cengkeh, yang semuanya memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi lokal. Pengembangan ini tidak hanya harus memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan, agar manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan, serta dukungan dari pemerintah



daerah dan pusat, RKT Air Terang-Tiloan diharapkan dapat mencapai tujuannya dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta pembangunan wilayah secara keseluruhan

b) Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Paleleh

Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) di Paleleh, Kabupaten Buol, memiliki tujuan utama untuk merumuskan struktur dan peruntukan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan kawasan perdesaan. Di samping itu, RKT ini juga berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam konteks ini, pemerintah juga menyusun kebijakan yang jelas, termasuk penetapan RKT sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan, sistem pelayanan pusat permukiman perdesaan, dan kebijakan pengembangan sektor pertanian yang strategis.

Profil kawasan transmigrasi menunjukkan bahwa luas total kawasan mencapai 20.419,20 hektar, dengan rincian terdiri dari Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 16.648,14 hektar (81,53%) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 3.771,07 hektar (18,47%). Terdapat tiga kecamatan yang menjadi bagian dari RKT ini, masing-masing Kecamatan Paleleh, Paleleh Barat, dan Gadung, dengan total populasi sekitar 30.321 jiwa yang tersebar di 30 desa. Dalam struktur ruang, beberapa pusat pertumbuhan ekonomi akan dibangun, termasuk pusat satuan pemukiman di desa-desa seperti Pionoto, Timbulon, dan Taat. Dalam upaya mendukung pelaksanaan RKT, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi kelestarian lingkungan hidup, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang belum merata. Keberlangsungan pengembangan kawasan transmigrasi sangat tergantung pada pengelolaan yang terencana dan ramah lingkungan, serta keterlibatan aktif dari masyarakat dalam setiap tahap implementasi.

Terkait dengan jenis-jenis transmigrasi yang direncanakan, RKT Paleleh mencakup transmigrasi umum dan swakarsa. Transmigrasi umum berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam mencari pekerjaan, di mana



biaya program ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan, transmigrasi swakarsa membutuhkan kontribusi dari peserta dalam pembiayaan, dengan dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan dan akses sumber daya.

Rekomendasi penting untuk pelaksanaan RKT mencakup peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pendidikan dan pelatihan, pengembangan usaha mikrobisnis lokal, serta penyuluhan kesehatan bagi masyarakat. Diperlukan juga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar ekosistem tetap terjaga, serta dukungan layanan kesehatan bagi masyarakat prasejahtera. Melalui pembinaan terhadap generasi muda dan peningkatan peranan perempuan dalam kegiatan ekonomi, diharapkan RKT ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, pelaksanaan RKT Paleleh diharapkan tidak hanya berhasil dalam hal transmigrasi, tetapi juga berkontribusi kepada pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat yang lebih luas.



Tabel 2.19
Isu Strategis

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KABUPATEN BUOL
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi sumber daya alam	Kondisi geografi yang sangat beragam dan potensi bencana yang tinggi	Adaptasi terhadap perubahan iklim	Perubahan Iklim Global	Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Rendah; Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut	Pengelolaan Sumber Daya Alam; Pengelolaan Wilayah Maritim	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Potensi sumber daya alam	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Penurunan kemiskinan	Ekonomi Global	Mempercepat Proses Eliminasi Kemiskinan Ekstrem; Produktivitas Tenaga Kerja	Disparitas Ekonomi; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Pengembangan Industri Hilir	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Daya dukung daya tampung lingkungan hidup	Kondisi geografi yang sangat beragam dan potensi bencana yang tinggi	Adaptasi terhadap perubahan iklim	Perubahan Iklim Global	Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan	Ketahanan Pangan	Ekosistem Berkelanjutan
Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Kondisi geografi yang sangat beragam dan potensi bencana yang tinggi	Adaptasi terhadap perubahan iklim	Sumber Energi Alternatif	Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Rendah	Ketahanan Pangan	Ekosistem Berkelanjutan
Lingkungan hidup berkualitas	Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	tata kelola lingkungan hidup	Sustainable Development Goals (SDG's) Sebagai Kelanjutan Dari Tujuan Pembangunan	Percepatan Penanganan Stunting	Lingkungan dan Keberlanjutan; Layanan Kesehatan dan Kualitas Hidup	Ekosistem Berkelanjutan; Rencana Kawasan Transmigrasi



POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KABUPATEN BUOL
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			Milenium (Millenium Development Goals)			
Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Kondisi geografi yang sangat beragam dan potensi bencana yang tinggi	Adaptasi terhadap perubahan iklim	Perubahan Iklim Global	Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan	Ketahanan Bencana	Ekosistem Berkelanjutan
Demografi	Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Kerentanan sosial	Pertumbuhan Penduduk & Urbanisasi Global	Bonus Demografi; Percepatan Penanganan Stunting	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia, Kualitas Kependudukan, dan Penguatan Budaya
UMKM dan Ekonomi Kreatif	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Penurunan kemiskinan	Disrupsi Teknologi Global	Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN); Mempercepat Proses Eliminasi Kemiskinan Ekstrem; Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Produktivitas Tenaga Kerja; Koperasi Merah Putih	Disparitas Ekonomi; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Pembangunan Daya Saing Usaha Daerah



POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KABUPATEN BUOL
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Inovasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	tata kelola pemerintahan	Geopolitik dan Geoekonomi Kawasan	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN); Optimalisasi Alokasi Anggaran Wajib dan Strategi Efisiensi Belanja Negara	Konflik Sosial dan Politik; Kualitas Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Berintegritas, Profesional, dan Melayani; Hukum yang Berkeadilan, Keamanan Sosial, dan Regulasi yang Adaptif
Ketersediaan RTRW dan dukungan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan strategis nasional dan daerah	Belum Optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung perekonomian daerah	tata kelola lingkungan hidup	Sustainable Development Goals (SDG's) Sebagai Kelanjutan Dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals)	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut	Infrastruktur dan Konektivitas; Ketidakesesuaian Tata Ruang; Konektivitas Digital	Infrastruktur Publik yang Memadai dan Merata; Rencana Kawasan Transmigrasi



BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi dan Misi

Presiden Republik Inonesia Prabowo Subianto telah menyatakan visi Indonesia tahun 2025-2029 adalah “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”, yang kemudian dijabarkan pada 8 (delapan) Misi Indonesia yang dikenal dengan 8 (delapan) Asta Cita, yaitu:

- **Asta Cita 1**
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- **Asta Cita 2**
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- **Asta Cita 3**
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- **Asta Cita 4**
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- **Asta Cita 5**
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- **Asta Cita 6**
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.



- **Asta Cita 7**

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

- **Asta Cita 8**

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam mendukung Visi Indonesia tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus mampu menjadi dalam penyelenggaraan pembangunannya. Sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045, dalam tahap awal periode 2025-2029, Sulawesi Tengah perlu membenahi dan melakukan penguatan fondasi, hingga nantinya dapat dilanjutkan pada tahapan akselerasi transformasi dan ekspansi global di segala bidang pada akhir periode hingga terwujudnya Sulawesi Tengah Emas di Tahun 2045. Visi Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2025-2045 adalah **“Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**. Agar terdapat kesinambungan pembangunan selama lima tahun ke depan, maka harapan dan cita-cita seluruh masyarakat agar Provinsi Sulawesi Tengah menjadi wilayah yang maju dan sejahtera dalam lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Untuk itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih menetapkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yaitu: **“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”**, yang kemudian dijabarkan pada 4 (empat) Misi Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penyediaan Lapangan Kerja;
2. Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
3. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Berorientasi pada Konektivitas Antar Wilayah dan Antar Sektor.



4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif serta Keamanan Daerah yang tangguh berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Untuk itu di dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformative sesuai dengan focus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPD Kabupaten Buol Tahun 2025-2045. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJPD Kabupaten Buol Tahun 2025-2045. Kemudian diselaraskan dengan Kebijakan RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Melalui semangat persatuan, kesatuan, dan kebersamaan seluruh elemen Masyarakat Kabupaten Buol bisa berhasil sebagai daerah dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045 melalui cita-cita daerah Kabupaten Buol 20 (dua puluh) tahun kedepan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buol Tahun 2025-2045 dengan Visi menjadikan **“Buol Daerah Agropolitan yang Maju dan Berkelanjutan”** Tahun 2045. Maka Pemerintah Kabupaten Buol bercita-cita mempunyai Visi 5 (lima) Tahun pada masa periode pertama pelaksanaan RPJPD 2025-2045 sebagai wujud ***Penguatan Pondasi Transformasi Daerah*** khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Berangkat dari hal sebagaimana tersebut di atas, maka harapan dan cita-cita seluruh masyarakat agar Kabupaten Buol menjadi wilayah agropolitan yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Untuk itu Bupati dan Wakil Bupati Buol terpilih menetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2025-2029, yaitu:

“Mewujudkan Buol Agamis Sebagai Daerah Agropolitan yang Maju dan Berkelanjutan”

Visi Tahun 2025-2029 dirumuskan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buol Tahun 2025-2045, yang diselaraskan dengan Kebijakan

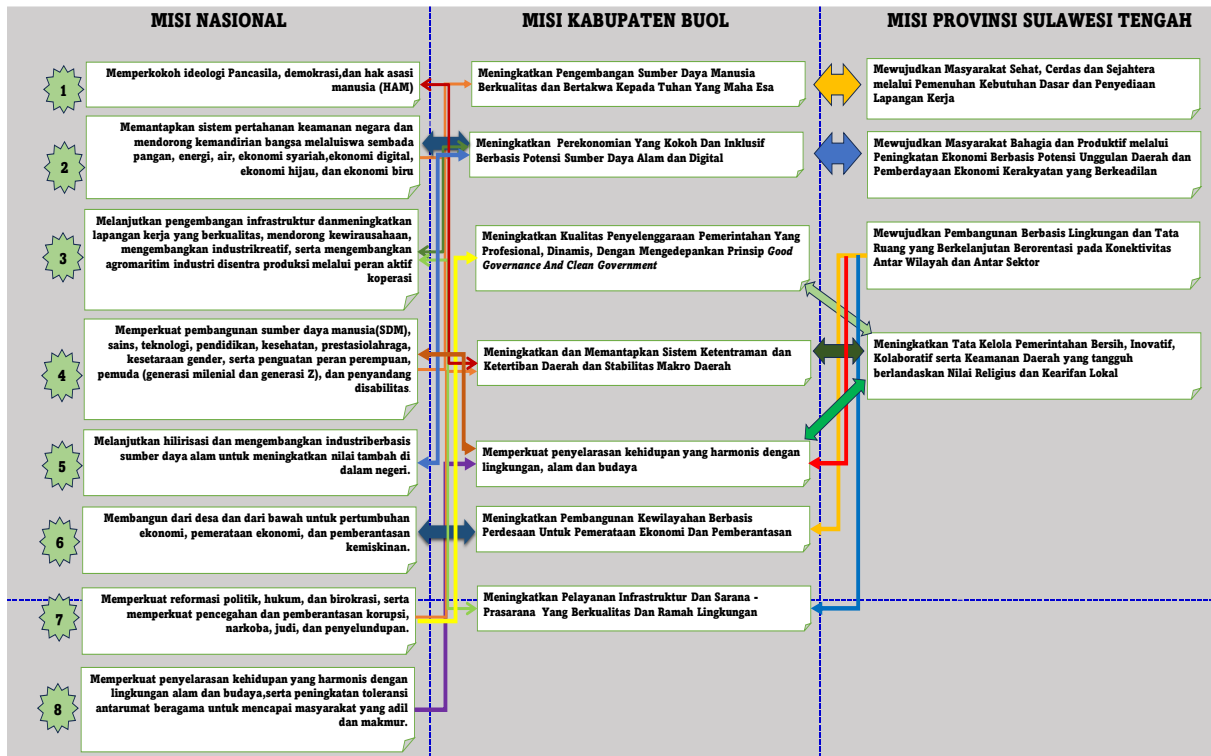


RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana terlihat pada gambar sinkronisasi berikut ini:



Gambar 3.1
Keselarasan dan Harmonisasi Visi, Misi Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Buol

Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat sinkronisasi dan keselarasan antara Visi Jangka Panjang Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Buol dan selaras dengan Visi Jangka Menengah Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagai **Penguatan Pondasi Transformasi** dalam Tahapan periode awal RPJPD Kabupaten Buol Tahun 2025-2045.



Gambar 3.2

Keterkaitan Visi RPJPN dan RPJMN , RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Buol 2025-2029

Adapun makna Visi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

Buol Agamis

Mencerminkan komitmen daerah untuk menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buol.

Daerah Agropolitan

Mengembangkan pertanian secara berkelanjutan dan meningkatkan nilai-nilai tambah produk pertanian, serta memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan dan fasilitas seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang berkeadilan.

Maju

Memiliki kelebihan, utama, terbaik, berada pada posisi lebih tinggi atau menang diantara yang lain dalam kompetensi dan daya saing.

Berkelanjutan



Melanjutkan dan Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Buol yang sudah berjalan dengan baik, melakukan Integrasi Program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, serta melakukan kolaborasi pembangunan daerah dengan Pemerintah Pemerintahan Desa terencana dan terukur sehingga tidak merusak lingkungan.

Adapun target sasaran visi Pemerintah Kabupaten Buol dilaksanakan melalui capaian 5 (lima) sasaran strategis dan indikator visi, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Strategis dan Indikator Visi

	Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045	Target sasaran		Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Buol 2025-2045	Target Sasaran	
		Baseline 2025	Sasaran 2029		Baseline 2025	Sasaran 2029
I	PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA			PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA		
1	PDRB perkapita (Rp Juta)	140,14-141,20	258,7	PDRB perkapita (Rp Juta)	55,5-64,10	80
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	49,15	58,75	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	44,24	49,10
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	40,97 - 41,45	45,50-550,00	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	17,55-22,5	23,13
II	PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN BERKURANG			PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN BERKURANG		
1	Tingkat Kemiskinan (%)	11,06-11,56	8,87 – 9,50	Tingkat Kemiskinan (%)	12,55	10,00
2	Rasia Gini (Indeks)	0,298 – 0,302	0,290 – 0,300	Rasia Gini (Indeks)	0,233-0,264	0,226
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,93	2,21	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	2,04	2,78
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	12,72	12,95 – 14,20	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,50-7,73	4,92
III	PENINGKATAN KEPEMIMPINAN DAN PENGARUH DI DAERAH YANG MENINGKAT			PENINGKATAN KEPEMIMPINAN DAN PENGARUH DI DAERAH YANG MENINGKAT		
1	Indeks Inovasi Daerah	75 – 80 Sangat Inovatif	77 – 83 Sangat Inovatif	Indeks Inovasi Daerah	35,00 Inovatif	48,75 Inovatif
2	Indeks Daya Saing Daerah	3,43	3,82	Indeks Daya Saing Daerah	3,40	3,80



	Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045	Target sasaran		Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Buol 2025-2045	Target Sasaran	
		Baseline 2025	Sasaran 2029		Baseline 2025	Sasaran 2029
IV	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA			PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA		
1	Indeks Modal Manusia	0,5	0,54	Indeks Pembangunan Manusia	71,07- 71,19	75,80
V	PENURUNAN EMISI GRK MENUJU NET ZERRO EMISSION			PENURUNAN EMISI GRK MENUJU NET ZERRO EMISSION		
1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	77,96	85,77	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-	-
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,75	82,6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	86,26	87,08

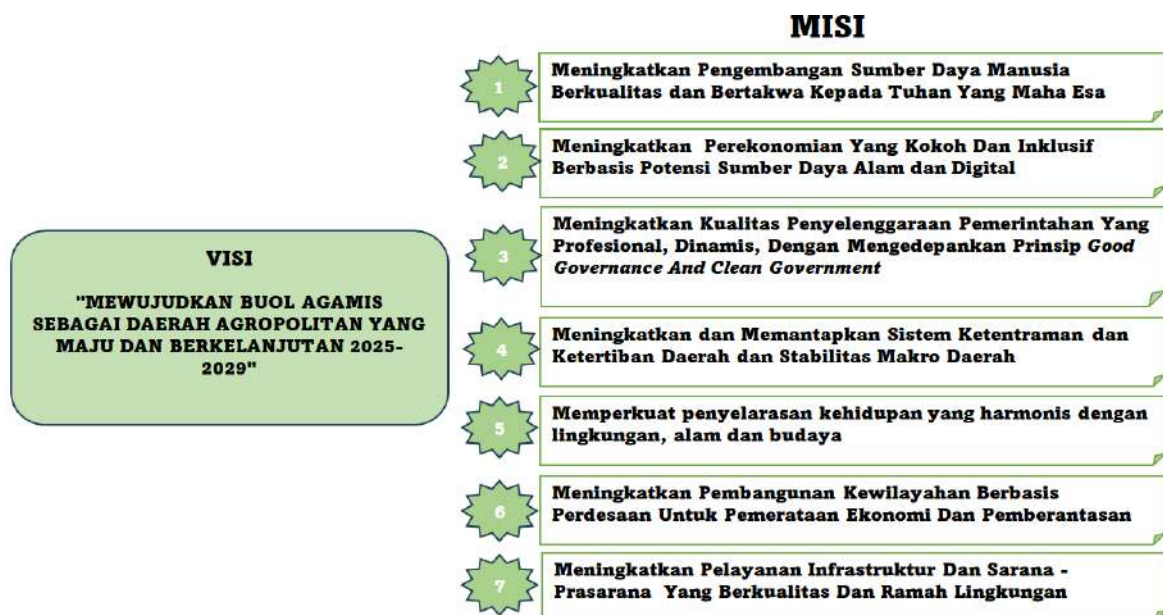
Untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui tujuh misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Meningkatkan Perekonomian Yang Kokoh Dan Inklusif Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Digital;
3. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance And Clean Government;
5. Meningkatkan dan Memantapkan Sistem Ketentraman, Ketertiban dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
6. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya;
7. Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Perdesaan Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan;
8. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dan Sarana - Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan.

Misi pembangunan memegang peranan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi fondasi utama dalam perumusan arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama periode lima tahun. Misi pembangunan merupakan penjabaran dari visi kepala daerah yang

bersifat lebih operasional dan terukur, sehingga berfungsi sebagai panduan normatif dan strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan mengimplementasikan program prioritas. Pentingnya misi pembangunan dalam RPJMD terletak pada kemampuannya untuk memastikan konsistensi antara visi kepala daerah dengan tujuan pembangunan daerah, serta menjamin bahwa semua program dan kegiatan yang dirancang memiliki keselarasan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Melalui misi yang jelas dan terstruktur, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas pembangunan secara lebih fokus dan efisien, baik dalam sektor ekonomi, sosial, infrastruktur, maupun tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan misi pembangunan dalam RPJMD bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga menjadi instrumen substantif untuk menjamin pembangunan yang terarah, berkesinambungan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, maka dapat dilihat adanya keselarasan Visi dan Misi sebagai langkah-langkah strategis dalam mewujudkan Visi, hal dapat digambarkan sebagai berikut:

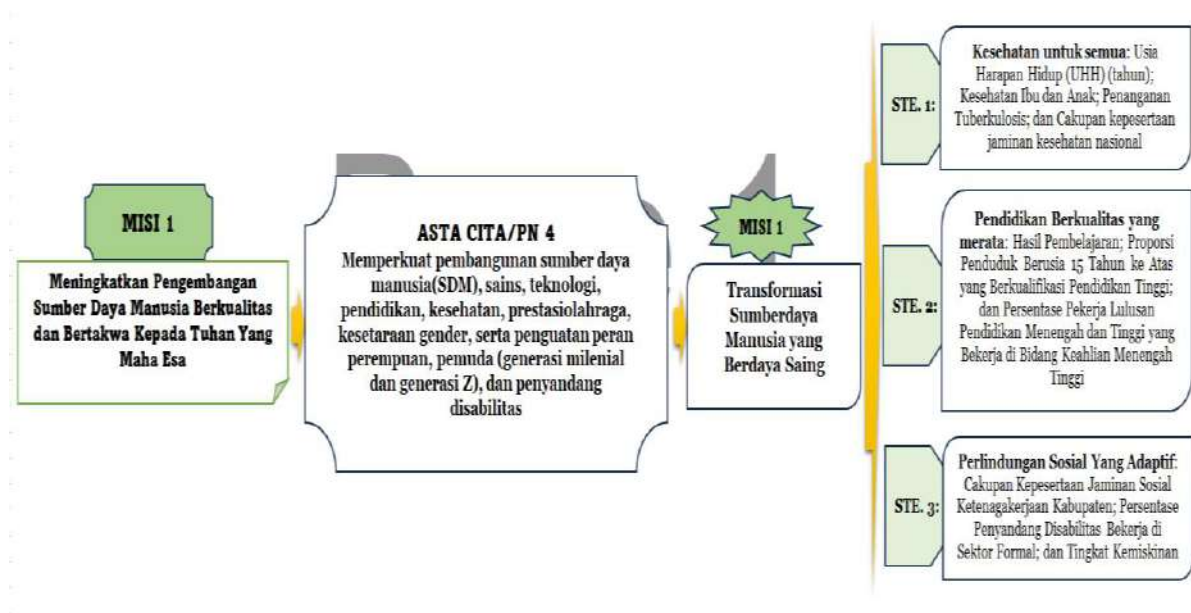


Gambar 3.3
Keselarasan Visi dan Misi Kabupaten Buol

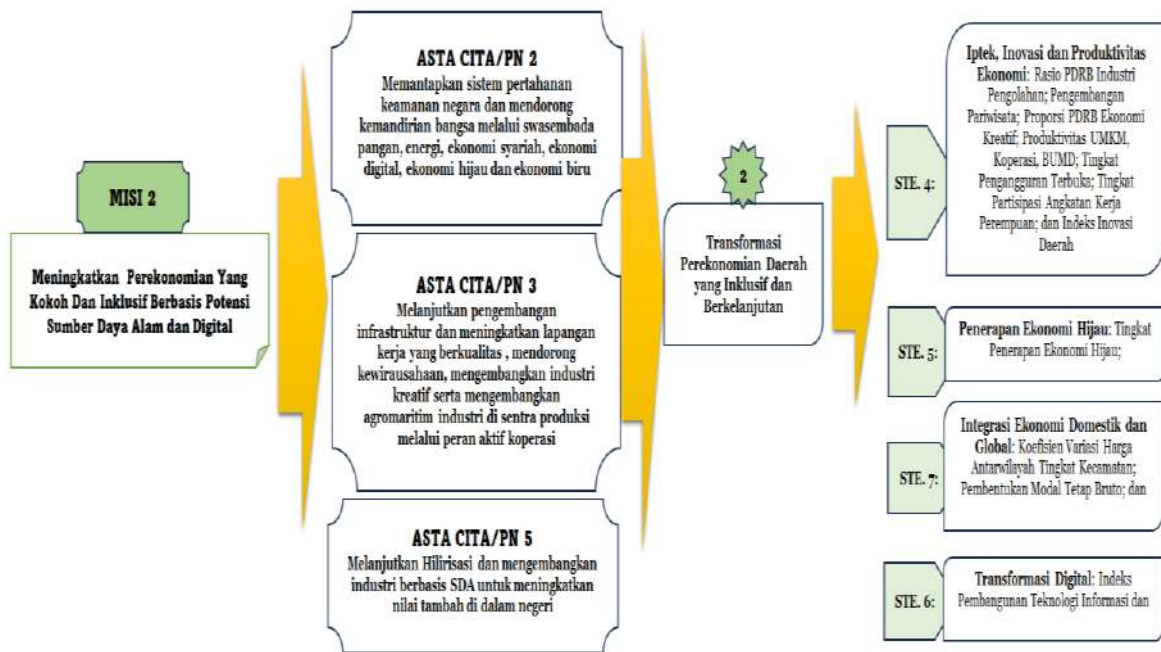


A. Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029, Misi RPJMN (Asta Cita/Prioritas Nasional) Tahun 2025-2029 dan Misi /Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 5 ayat (2), maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Buol Periode 2025–2029, di samping berpedoman pada RPJPD Kabupaten Buol Periode 2025-2045, perlu juga memperhatikan RPJM Nasional sehingga penjabaran program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buol menjadi bagian integral dari program nasional. Dengan demikian, maka Misi yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang tertuang dalam RPJMD harus memiliki keselarasan dengan misi yang tertuang dalam RPJMN sebagai arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Buol sesuai gambar dan tabel berikut:



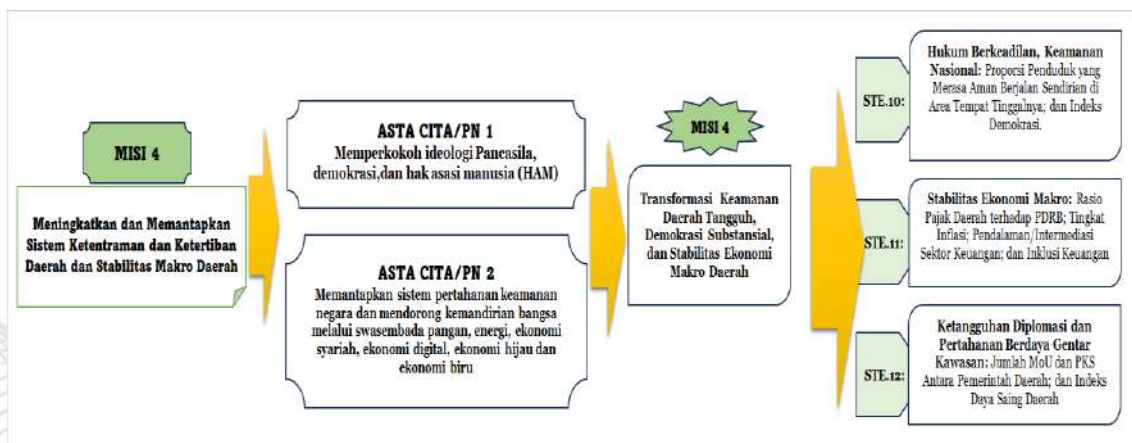
Gambar 3.4
Diagram Keselarasan Misi 1



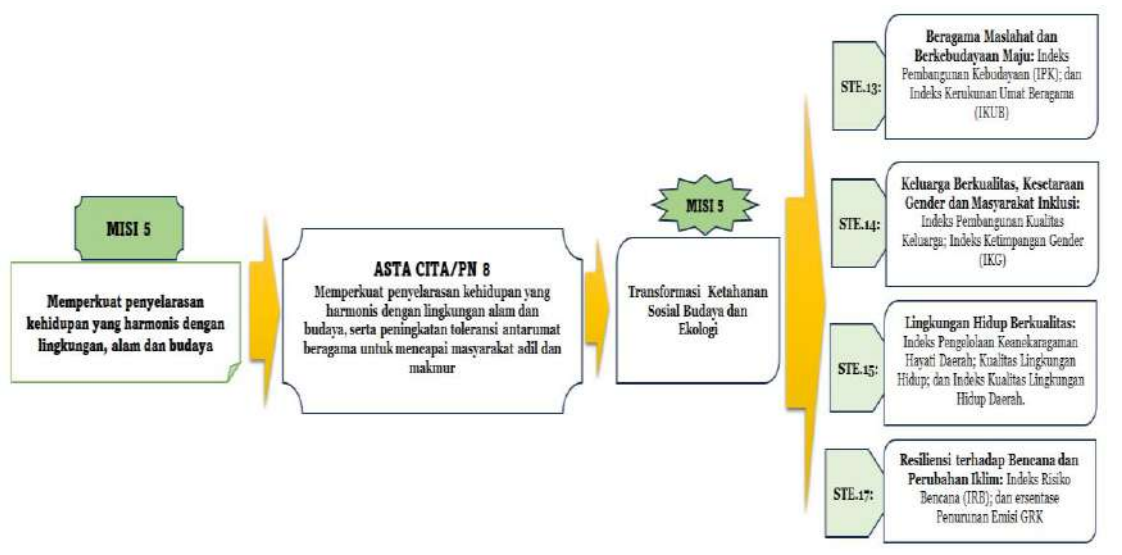
Gambar 3.5
Diagram Keselarasan Misi 2



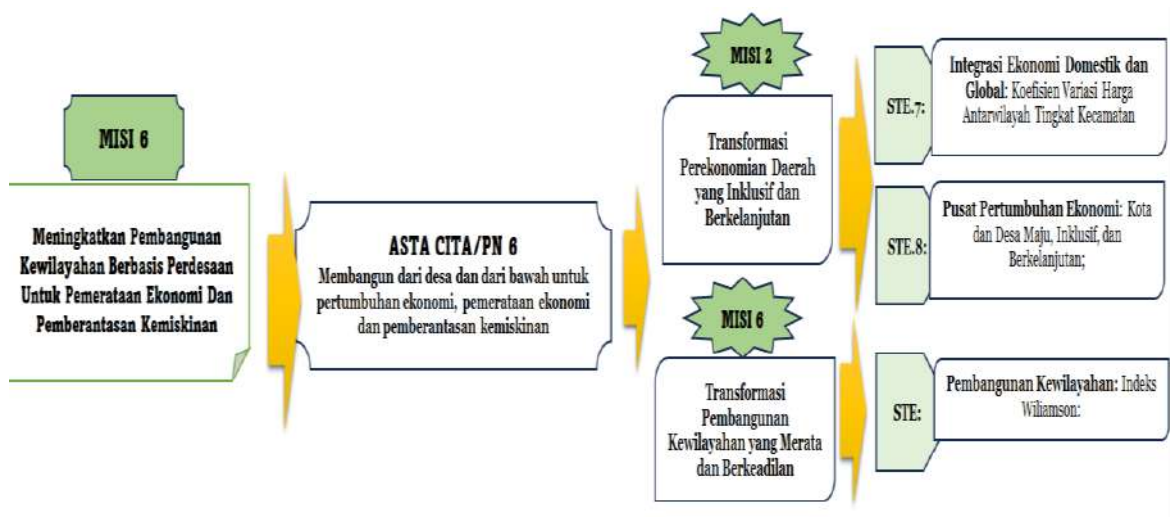
Gambar 3.6
Diagram Keselarasan Misi 3



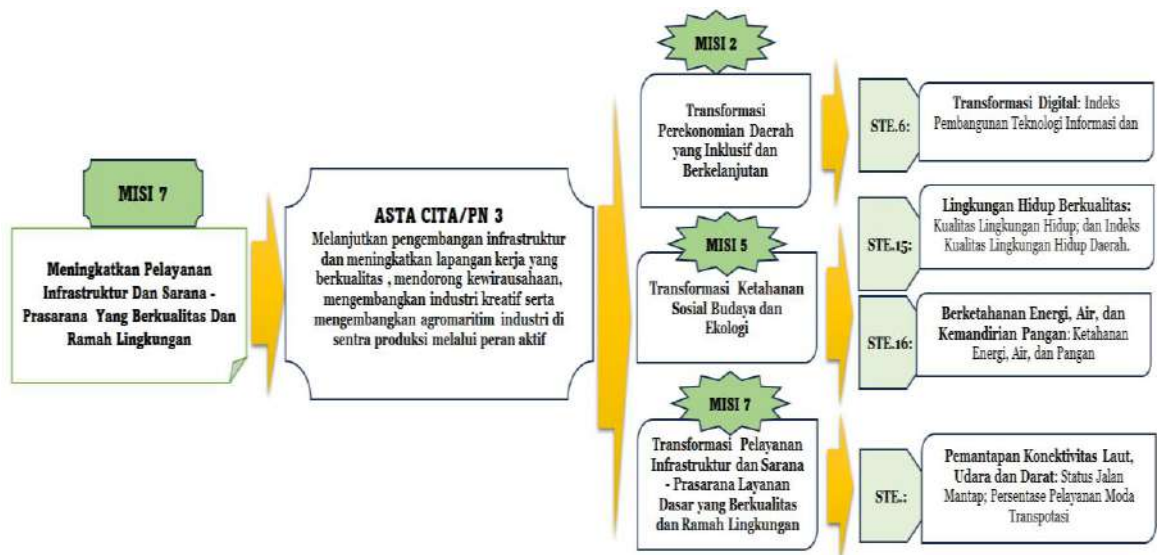
Gambar 3.7
Diagram Keselarasan Misi 4



Gambar 3.8
Diagram Keselarasan Misi 5



Gambar 3.9
Diagram Keselarasan Misi 6



Gambar 3.10
Diagram Keselarasan Misi 7

Selain dalam bentuk gambar diagram di atas, keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029, Misi RPJMN (Asta Cita/ Prioritas Nasional) Tahun 2025-2029 dan Misi /Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029, Misi RPJMN (Asta Cita/ Prioritas Nasional) Tahun 2025-2029 dan Misi /Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita / PN)	Misi RPJPD Tahun 2025-2045
Misi 1 : Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	ASTA CITA/PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Misi 1 Transformasi Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing:
		STE. 1 Kesehatan untuk semua
		STE. 2 Pendidikan Berkualitas yang merata
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Yang Kokoh Dan Inklusif	ASTA CITA/PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	STE. 3 Perlindungan Sosial Yang Adaptif
		Misi 2 Transformasi Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan;



Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita / PN)	Misi RPJPN Tahun 2025-2045	
Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Digital	melalui swasembada pangan, energi, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	STE. 4	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
		STE. 5	Penerapan Ekonomi Hijau
		STE. 6	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	ASTA CITA/PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		
	ASTA CITA/PN 5 Melanjutkan Hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Dengan Mengedepankan Prinsip <i>Good Governance And Clean Government</i>	ASTA CITA/PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan	Misi 3 Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Berbasis Teknologi	
		STE. 9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Misi 4: Meningkatkan dan Memantapkan Sistem Ketentraman dan Ketertiban Daerah dan Stabilitas Makro Daerah	ASTA CITA/PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Misi 4 Transformasi Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	
	ASTA CITA/PN 2 Memantapkan sistem	STE. 10	Hukum Berkeadilan,



Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita / PN)	Misi RPJPN Tahun 2025-2045	
	pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru		Keamanan Nasional
		STE. 11	Stabilitas Ekonomi Makro
		STE. 12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
Misi 5 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya	ASTA CITA/PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	Misi 5 Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
		STE. 13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		STE. 14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusi
		STE. 15	Lingkungan Hidup Berkualitas
		STE. 17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Perdesaan Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan	ASTA CITA/ PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Misi 2 Transformasi Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	
		STE. 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		STE. 8	Pusat Pertumbuhan Ekonomi
		Misi 6 Transformasi Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	



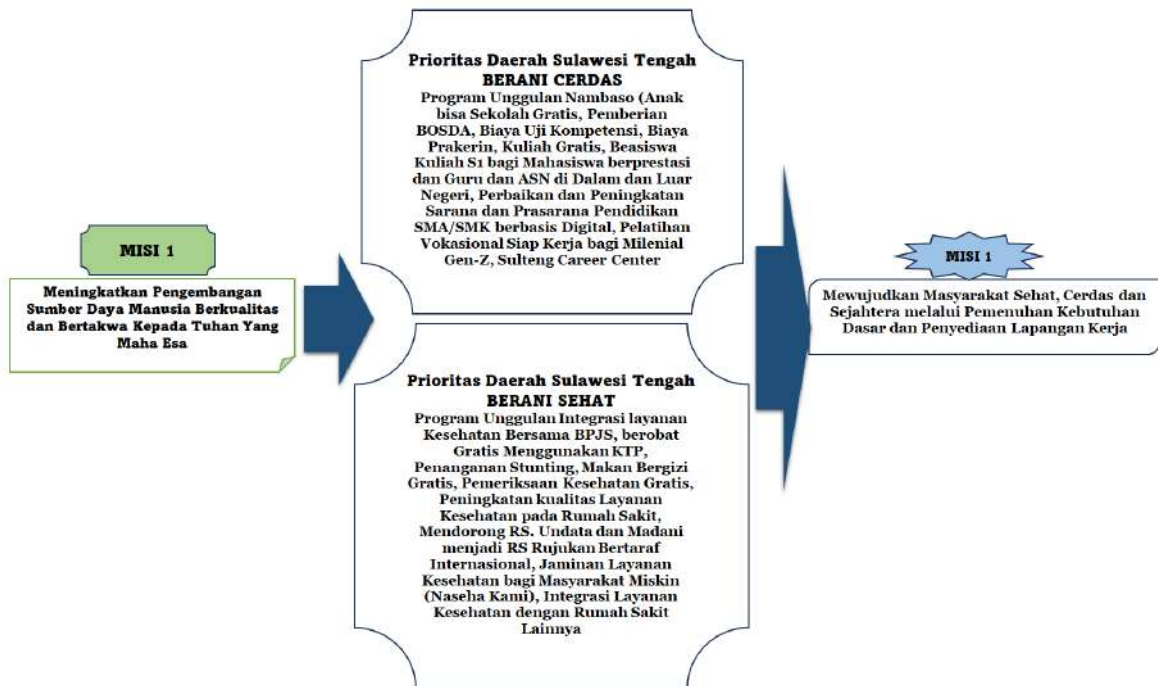
Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita / PN)	Misi RPJPN Tahun 2025-2045	
		STE.	Pembangunan Kewilayahan
Misi 7 : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dan Sarana - Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan	ASTA CITA/PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Misi 2 Transformasi Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	
		STE. 6	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		Misi 5 Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
		STE. 15	Lingkungan Hidup Berkualitas
		STE. 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		Misi 7 Transformasi Pelayanan Infrastruktur dan Sarana - Prasarana Layanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
		STE.	Pemantapan Konektivitas Laut, Udara dan Darat

B. Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 5 ayat (2), maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Buol Periode 2025–2029, di samping berpedoman pada RPJPD Kabupaten Buol Periode 2025-2045, dan memperhatikan RPJM Nasional, perlu juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga penjabaran program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buol menjadi bagian integral dari program nasional dan program Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian, maka Misi yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang



tertuang dalam RPJMD harus memiliki keselarasan dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Buol sesuai gambar dan tabel berikut :



Gambar 3.11
Diagram Keselarasan Misi 1





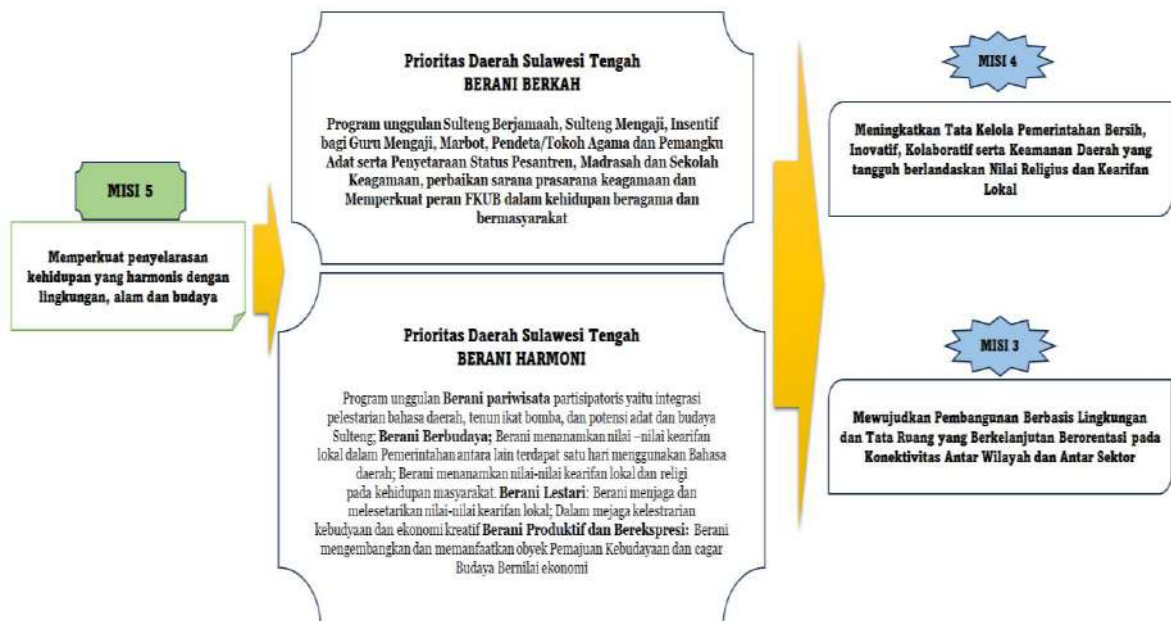
Gambar 3.12
Diagram Keselarasan Misi 2



Gambar 3.13
Diagram Keselarasan Misi 3



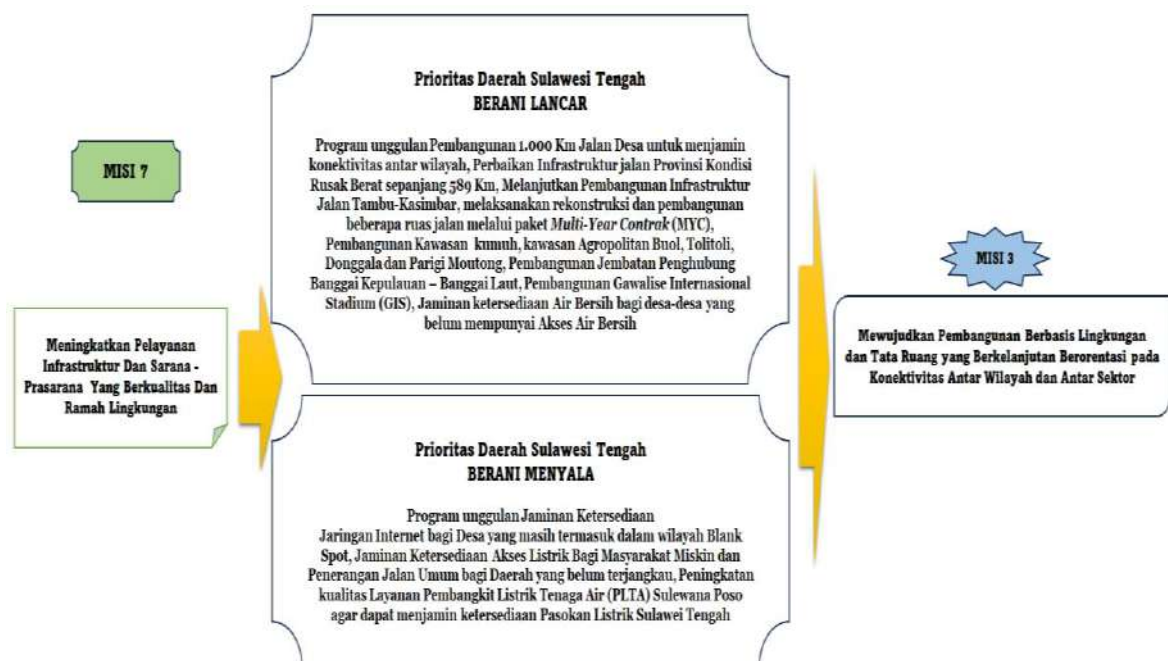
Gambar 3.14
Diagram Keselarasan Misi 4



Gambar 3.15
Diagram Keselarasan Misi 5



Gambar 3.16
Diagram Keselarasan Misi 6



Gambar 3.17
Diagram Keselarasan Misi 7

Selain dalam bentuk gambar diagram di atas, keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.3
Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Misi RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029
Misi 1 Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Misi 1 Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penyediaan Lapangan Kerja	Berani Cerdas
		Berani Sehat
Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Yang Kokoh Dan Inklusif Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Digital	Misi 2 Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan	Berani Sejahtera
		Berani Makmur
Misi 3 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Dengan Mengedepankan Prinsip <i>Good Governance And Clean Government</i>	Misi 4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif serta Keamanan Daerah yang tangguh berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal	Berani Berintegritas
Misi 4 Meningkatkan dan Memantapkan Sistem Ketentraman dan Ketertiban Daerah dan Stabilitas Makro Daerah	Misi 4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif serta Keamanan Daerah yang tangguh berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal	Berani Berintegritas
Misi 5 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya	Misi 3 Mewujudkan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Berorientasi pada Konektivitas Antar Wilayah dan Antar Sektor	Berani Harmoni



Misi RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029
	Misi 4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif serta Keamanan Daerah yang tangguh berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal	Berani Berkah
Misi 6 Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Perdesaan Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan	Misi 3 Mewujudkan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Berorientasi pada Konektivitas Antar Wilayah dan Antar Sektor	Berani Harmoni
Misi 7 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dan Sarana - Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan	Misi 3 Mewujudkan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Berorientasi pada Konektivitas Antar Wilayah dan Antar Sektor	Berani Lancar Berani Menyala

Dengan memperhatikan Misi Pembangunan Daerah, maka Penjelasan Misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buol tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- **Misi I : Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Daerah berkomitmen melaksanakan kebijakan strategis yang menyentuh empat aspek utama: pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat, serta pembentukan karakter spiritual. Di bidang pendidikan, upaya yang dilakukan meliputi peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui perluasan program wajib belajar 12 tahun, peningkatan kapasitas pendidik, serta perbaikan sarana prasarana pendidikan. Pemerintah juga akan memperluas program beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan berprestasi, serta mendorong digitalisasi pembelajaran untuk memperkecil kesenjangan mutu antarwilayah.



Misi ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih inklusif, merata, dan berkualitas di sektor pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Di bidang pendidikan, kebijakan diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan bagi semua kelompok usia melalui program wajib belajar 13 tahun, penguatan lembaga PAUD dan pendidikan nonformal, serta penyediaan beasiswa bagi pelajar dari keluarga tidak mampu dan berprestasi. Pemerintah juga akan melaksanakan program peningkatan kompetensi pendidik, penguatan manajemen sekolah, dan pembangunan sarana prasarana pendidikan yang layak, termasuk pemanfaatan teknologi pembelajaran digital untuk menjangkau daerah terpencil.

Dalam rangka meningkatkan keterampilan masyarakat, akan dikembangkan program pelatihan vokasi dan kewirausahaan berbasis potensi lokal yang menyasar kelompok usia produktif, perempuan, dan penyandang disabilitas. Lembaga pelatihan kerja akan diperkuat dan diintegrasikan dengan dunia usaha dan industri guna meningkatkan relevansi keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah juga akan memfasilitasi program magang dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Pada aspek kesehatan, kebijakan difokuskan pada penguatan layanan kesehatan dasar dan promotif-preventif melalui revitalisasi Puskesmas, optimalisasi Posyandu, perluasan cakupan imunisasi, serta program penurunan angka stunting dan gizi buruk. Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) akan diperkuat agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Selain itu, pengembangan sistem informasi kesehatan digital akan didorong untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi layanan.

Di bidang kesehatan, kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan individu dan masyarakat melalui penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, serta ketersediaan tenaga medis dan paramedis yang kompeten. Program prioritas meliputi percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan cakupan imunisasi dasar, serta perluasan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui sinergi dengan program nasional dan daerah. Edukasi kesehatan berbasis komunitas juga akan digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup



bersih dan sehat.

Sementara itu, pembinaan mental dan spiritual masyarakat akan dilakukan secara sistematis untuk membentuk karakter SDM yang berakhlak mulia dan religius. Hal ini dilakukan melalui penguatan pendidikan agama di sekolah, pemberdayaan lembaga keagamaan, serta pengembangan program dakwah dan pembinaan moral di tengah masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik tersebut, misi ini bertujuan menciptakan SDM yang tidak hanya cerdas dan sehat secara jasmani, tetapi juga mandiri secara ekonomi serta berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Secara keseluruhan, misi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang cerdas, terampil, sehat, dan produktif, sebagai modal dasar dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

- **Misi II : *Meningkatkan Perekonomian Yang Kokoh Dan Inklusif Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Digital.***

Misi ini menegaskan arah pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada kekuatan lokal, terutama pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, terintegrasi, dan bernilai tambah tinggi. Pemerintah Daerah akan mendorong transformasi ekonomi melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan industri pengolahan. Kebijakan utama diarahkan pada pengembangan rantai nilai (value chain) dari hulu ke hilir yang mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi pelaku ekonomi lokal, terutama petani, nelayan, pelaku UMKM, dan koperasi.

Pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, program yang dilaksanakan mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi produksi, penyediaan sarana produksi yang terjangkau dan berkualitas, pelatihan teknologi tepat guna, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan usaha tani, dan pasar lelang komoditas. Pemerintah juga akan mendorong pembentukan kawasan ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah, sekaligus mempercepat hilirisasi hasil produksi agar tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah.



Sektor industri dan perdagangan akan diarahkan untuk mendukung proses hilirisasi dan pengolahan produk lokal dengan mendorong investasi pada industri kecil dan menengah, fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha lokal dan investor, serta pembangunan sentra industri terpadu. Penguatan sistem logistik, pengembangan pasar digital, dan peningkatan kapasitas SDM wirausaha juga menjadi prioritas untuk memperluas akses pasar dan daya saing produk lokal.

Dalam sektor pariwisata, pembangunan difokuskan pada pengembangan destinasi wisata berbasis alam, budaya, dan kearifan lokal yang terintegrasi dengan ekonomi kreatif. Kebijakan diarahkan pada peningkatan infrastruktur destinasi, promosi digital, serta pelatihan pelaku wisata dan masyarakat sekitar kawasan pariwisata.

Seluruh strategi tersebut dijalankan dalam kerangka penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dan peningkatan pendapatan masyarakat secara merata. Pemerintah Daerah akan bersinergi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

- **Misi III: *Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance And Clean Government;***

Misi ini menitikberatkan pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sebagai dasar utama dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk membangun birokrasi yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas aparatur, digitalisasi layanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal. Profesionalisme aparatur diwujudkan melalui reformasi manajemen ASN, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur secara berkelanjutan, serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian.

Sebagai bagian dari implementasi prinsip good governance, Pemerintah Daerah akan mendorong keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi pelayanan publik



akan dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi perizinan dan layanan administrasi, serta pembangunan Mal Pelayanan Publik sebagai pusat pelayanan terpadu yang cepat, transparan, dan ramah masyarakat.

Sementara itu, penerapan prinsip clean government diarahkan pada penguatan integritas birokrasi dan pencegahan korupsi melalui sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), pengembangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta peningkatan fungsi inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan internal yang efektif. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah akan dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, dengan target mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK secara berkelanjutan. Dengan demikian, misi ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan, bersih dari praktik-praktik penyimpangan, serta mampu melayani dan memberdayakan masyarakat secara maksimal.

- **Misi IV: *Meningkatkan dan Memantapkan Sistem Ketentraman dan Ketertiban Daerah dan Stabilitas Makro Daerah***

Sementara itu, demokrasi substansial diperkuat melalui peningkatan kualitas partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan, transparansi tata kelola pemerintahan, serta penguatan lembaga perwakilan dan lembaga pengawasan independen di daerah. Di sisi lain, stabilitas ekonomi makro daerah diwujudkan melalui kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, pengendalian inflasi daerah, penguatan basis pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan efisiensi belanja publik. Pengelolaan investasi dan perdagangan juga diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Dengan integrasi kebijakan tersebut, daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas multidimensional yang menjadi syarat utama keberhasilan pembangunan jangka menengah dan panjang.

- **Misi V : *Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya.***

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini menjadi dasar keharmonisan dalam



keberagaman agama, suku, dan budaya di tanah air pada umumnya dan khususnya Kabupaten Buol. Hal ini menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Buol dalam memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Memperkuat penyelarasan kehidupan dengan lingkungan, alam, budaya, dan kerukunan umat beragama akan menciptakan kehidupan yang damai, berkelanjutan, dan harmonis. Kita hidup sebagai makhluk sosial, makhluk budaya, dan makhluk ciptaan Tuhan yang bertanggung jawab menjaga ciptaan-Nya. Hal ini penting agar kehidupan kita tidak hanya nyaman untuk saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang (prinsip pembangunan berkelanjutan) .

Harmoni dalam keberagaman yang sejati dan sehat haruslah dilandaskan dan diinspirasi oleh pemahaman dan pengakuan bahwa “martabat alamiah dan hak-hak yang setara dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Bukan keharmonisan atau toleransi yang semu, tapi keharmonisan yang ditunjukkan dalam kemampuan bekerja sama, berkolaborasi, untuk saling menghormati dan melindungi sesama manusia sekalipun berbeda.

Penguatan harmoni anggota keluarga manusia dapat dilakukan melalui Peningkatan ketangguhan keluarga diarahkan untuk memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya secara optimal, menjadi wadah sosialisasi antar generasi dan kontrol sosial bagi seluruh anggotanya, serta memiliki resiliensi dalam menghadapi perubahan dan konflik.

Peningkatan kualitas perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Buol Kota Layak Anak melalui penguatan sistem perlindungan anak dan pengasuhan yang layak untuk menjamin bahwa setiap anak, sejak dalam kandungan, termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, menikmati hak-haknya, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan, melalui (a) pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak; serta (b) perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.

Peningkatan kualitas pemuda diarahkan untuk mendorong peningkatan



kualitas pendidikan formal dan nonformal, penguasaan karakter dan kompetensi individu sebagai modal dasar ketahanan dari perilaku berisiko, kesehatan jiwa maupun raga, ketenagakerjaan yang layak, partisipasi aktif dan kepemimpinan dalam pembangunan, serta inklusivitas dan kesetaraan gender, melalui (a) peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, dan pencegahan perilaku berisiko; (b) peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan; serta (c) peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik.

Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan diarahkan untuk menurunkan ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, memperkuat agenda dan mendorong peran aktif perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, serta membangun tata kelola pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender yang efektif dan berkelanjutan.

Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia diarahkan untuk menurunkan kesenjangan antara penduduk rentan lanjut usia dan penyandang disabilitas dengan penduduk lainnya, memberikan kesetaraan hak dan jaminan kehidupan yang layak, mengurangi ketimpangan kondisi sosio-ekonomi untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta mendorong peran aktif penduduk penyandang disabilitas dan penduduk lanjut usia untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam berbagai sektor Pembangunan.

- **Misi VI : Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Perdesaan Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan.**

Kemajuan suatu daerah dipengaruhi oleh distribusi hasil pembangunan dan keseimbangan alokasi sumber daya pada setiap wilayah. Membangun dari desa dan dari bawah adalah strategi yang berorientasi pada penguatan akar perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat lokal serta memperhatikan pemenuhan hak dasar warga untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan inklusif. Desa, sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan dan ekonomi, memegang potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengedepankan pembangunan dari desa dan dari bawah, daerah



mengakui peran penting komunitas desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kelestarian lingkungan, dan ketahanan sosial-budaya. Membangun dari desa tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan dan tata kelola yang menggambarkan kemandirian desa, namun juga meliputi pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan aksesibilitas ke berbagai sumber daya. Melalui strategi yang berfokus pada pendekatan dari desa dan dari bawah, Daerah berupaya agar seluruh masyarakat mendapatkan dampak positif dari pembangunan menyeluruh, penurunan disparitas ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Pembangunan dari desa dan dari bawah menjadi pendekatan utama dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Penduduk miskin dan rentan menjadi fokus dalam pelaksanaan perlindungan sosial, untuk membantu mengurangi beban kelompok tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, energi, pengasuhan, layanan sosial, perumahan dan sanitasi yang layak, serta kebutuhan individu maupun keluarga lainnya sesuai dengan hambatan yang dihadapi.

Pendekatan untuk meningkatkan kemandirian penduduk miskin dan rentan dilakukan dengan mengedepankan potensi, kapabilitas, motivasi, dan akses bagi mereka untuk dapat berdaya mendapatkan ruang untuk berpartisipasi pada sektor-sektor ekonomi utama. Kesempatan yang setara menjadi kebijakan kunci untuk memastikan infrastruktur dan layanan dasar, serta kondisi pemukiman lainnya, tersedia bagi penduduk untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi sejahtera.

Upaya holistik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas penduduk miskin dan rentan diarahkan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan secara berkesinambungan. Kebijakan pemberantasan kemiskinan dikembangkan sebagai bagian dari agenda pembangunan utama untuk memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Penduduk miskin, rentan, dan menuju kelas menengah didorong untuk menjadi faktor dan rantai pasok utama yang berperan dalam kegiatan ekonomi utama yang dapat mengeluarkan mereka dari kondisi miskin dan rentan.

Penguatan dan perbaikan tata Kelola program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi menjadi agenda utama untuk mendukung kebijakan ini,



termasuk integrasi program lintas lembaga dan sektor, peningkatan adaptabilitas dan inklusivitas, pemanfaatan dan peningkatan akses terhadap teknologi, penggunaan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi sebagai sumber rujukan dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk penargetan program, serta pemantauan yang intensif dan berkala dalam mengidentifikasi kebutuhan kelompok yang paling rentan dan mengakselerasi graduasi penduduk menuju sejahtera secara berkesinambungan.

Perlindungan dan pemberdayaan penduduk didukung dengan kebijakan kewilayahan yang bersifat afirmatif. Untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, perencanaan regional yang terintegrasi menjadi langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan yang merata.

Hubungan desa-kota yang saling mendukung sebagai satu kesatuan fungsi wilayah berperan sebagai kunci pemerataan ekonomi. Desa dapat menjadi bagian dari rantai pasok untuk mendukung ekosistem ekonomi kota, sementara kota menyediakan akses pasar, teknologi, dan inovasi. Kota-kota dirancang sebagai simpul pertumbuhan yang mendukung pembangunan wilayah sekitar.

Selain itu, pembangunan di desa dan kota harus memastikan akses yang setara bagi kelompok rentan di daerah miskin perkotaan dan perdesaan terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Investasi pada Kawasan strategis diarahkan untuk memanfaatkan potensi wilayah atau Desa tertinggal dan mempercepat pengurangan kesenjangan.

- **Misi VII: Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dan Sarana - Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan.**

Misi pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan infrastruktur dan sarana prasarana layanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan merupakan upaya strategis untuk menciptakan fondasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Misi ini diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat dalam mengakses infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, pendidikan, dan layanan kesehatan, dengan kualitas yang memadai serta memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Secara konkret, kebijakan yang ditempuh meliputi perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang merata dan berbasis kebutuhan masyarakat,



khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan alokasi anggaran infrastruktur, pelaksanaan proyek padat karya yang melibatkan tenaga kerja lokal, serta sinergi dengan program pembangunan pusat dan provinsi. Dalam rangka menjamin kualitas layanan, dilakukan penguatan standar teknis pembangunan, pemeliharaan infrastruktur secara berkala, serta digitalisasi sistem monitoring dan evaluasi proyek.

Untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, pembangunan infrastruktur diarahkan pada konsep ramah lingkungan dengan penerapan prinsip green infrastructure, seperti penggunaan bahan bangunan berkelanjutan, sistem drainase ramah lingkungan, pembangunan ruang terbuka hijau, dan pemanfaatan energi terbarukan pada fasilitas umum. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan turut diperkuat guna mendorong partisipasi aktif serta meningkatkan rasa kepemilikan terhadap infrastruktur yang dibangun. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan tercipta layanan dasar yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin kelayakan hidup generasi mendatang.

Implementasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dilaksanakan dengan tujuh fokus kerja **Prioritas Daerah** yaitu:

- **BUOL HEBAT**

Menjadi komitmen pemerintah dalam penguatan transformasi daerah yang tercermin melalui Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Adaptif, Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing.

- **BUOL MAKMUR**

Menjadi komitmen pemerintah dalam penguatan transformasi daerah yang tercermin melalui Pengembangan Perekonomian Daerah Yang Inklusif Berbasis Sumber Daya Alam dan Digitalisasi.

- **BUOL SIGAP**

Menjadi komitmen pemerintah dalam penguatan transformasi daerah yang tercermin melalui Pemantapan Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital.

- **BUOL NYAMAN**

Menjadi komitmen Pemerintah dalam menghadirkan **Transformasi Sosial**



yang tercermin melalui terwujudnya **Stabilitas, Kondusivitas**, serta **Kenyamanan** dalam berkehidupan melalui **peningkatan ketentraman dan ketertiban daerah serta optimalisasi pendapatan asli daerah**.

- **BUOL HARMONI**

Menjadi komitmen Pemerintah dalam menghadirkan **Transformasi Sosial** yang tercermin melalui penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan pengembangan budaya lokal serta peningkatan moderasi beragama.

- **BUOL MERATA**

Menjadi komitmen pemerintah dalam penguatan transformasi daerah yang tercermin melalui Percepatan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Perdesaan dan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

- **BUOL LANCAR**

Menjadi komitmen pemerintah dalam penguatan transformasi daerah yang tercermin melalui Pengembangan dan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Sarana Prasarana Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran

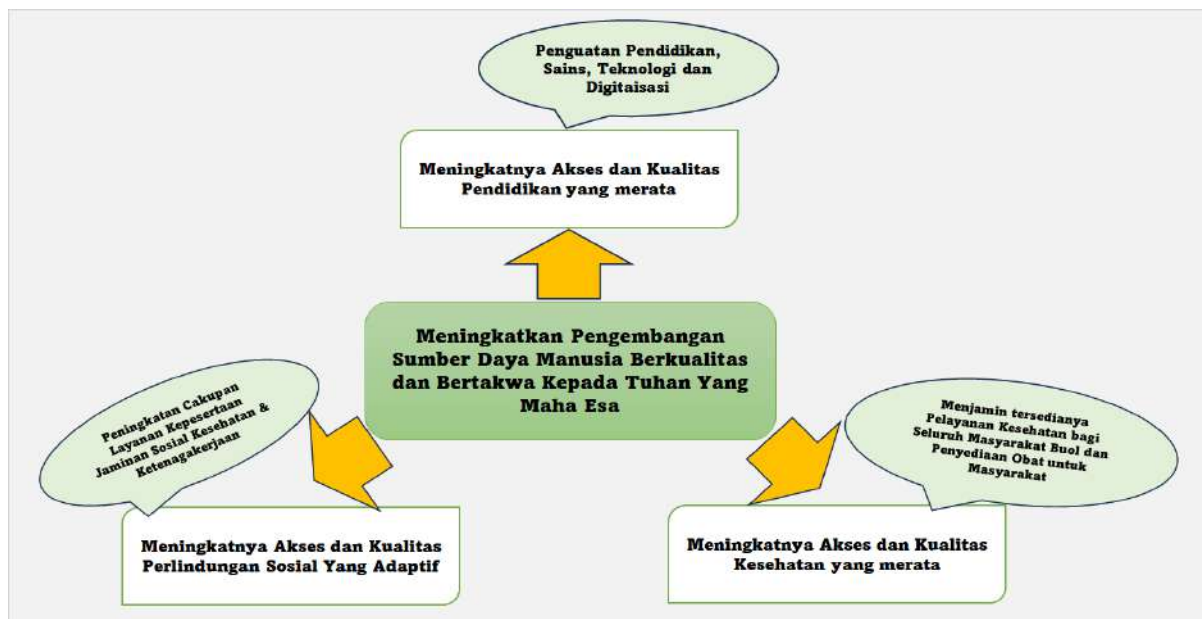
Sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2025-2029, maka perencanaan terintegrasi melalui desain kerangka berpikir logis sederhana dituangkan ke dalam rumusan Tujuan dan Sasaran berikut.

A. Tujuan dan Sasaran Misi 1

- **Misi I : Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.**

Pembangunan manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buol. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya yang holistik dan terintegrasi dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari pilar utama pembangunan manusia. Dengan upaya yang terarah dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Buol berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, sebagai fondasi menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui perencanaan yang terintegrasi, pencapaian Misi 1 dapat digambarkan melalui kerangka kerja logis sebagai berikut:



Gambar 3.18
Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 1

Berdasarkan gambar di atas, Misi dicapai melalui tujuan **Mewujudkan Pembangunan Manusia dan Masyarakat Yang Adaptif, Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing**, dengan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang merata;
2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan yang merata;
3. Meningkatnya Akses dan Kualitas Perlindungan Sosial Yang Adaptif.

Perwujudan kualitas masyarakat Kabupaten Buol yang sehat dan cerdas digambarkan melalui indikator Indeks Modal Manusia (IMM). Indikator ini untuk mengukur kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas ekonomi suatu wilayah. Kerangka kerja logis sederhana yang menjabarkan bagaimana pencapaian tujuan dan sasaran ini digambarkan berikut:



MISI 1	Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa			
TUJUAN	Mewujudkan Pembangunan Manusia dan Masyarakat Yang Adaptif, Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing			
INDIKATOR KINERJA	INDOKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)			
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang merata	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan yang merata	Meningkatnya Akses dan Kualitas Perlindungan Sosial Yang Adaptif	
INDIKATOR KINERJA	Indeks Pendidikan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
PRIORITAS DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Adaptif, Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing			
PROGRAM PRIORITAS	Penguatan Pendidikan, Sains, Teknologi dan Digitalisasi	Memastikan tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat Buol dan Penyediaan Obat untuk Masyarakat	Peningkatan Cakupan Layanan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan & Ketenagakerjaan	
URUSAN PEMERINTAHAN	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Bidang Perputakaan Daerah	BIDANG KETENAGAKERJAAN
PENUNJANG	Semua Urusan Pemerintahan Daerah			

Gambar 3.19
Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 1

Berdasarkan gambar tersebut di atas, bahwa 3 (tiga) sasaran dapat dicapai melalui indikator-indikator pada masing-masing sasaran dimaksud, berikut:

1. Sasaran Pertama: *Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang merata*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui indikator Indeks Pendidikan.
2. Sasaran Kedua: *Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan yang merata*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH).
3. Sasaran Ketiga: *Meningkatnya Akses dan Kualitas Perlindungan Sosial Yang Adaptif*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui indikator : Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten dan Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal.

Berdasarkan Misi 1 di atas, ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan menjadi target capaian selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran dapat disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 1 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Tahun 2025 – 2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET			SAT.
			BASELINE	TAHUN	AKHIR	
			2025	2026	2030	
Mewujudkan Pembangunan Manusia Adaptif, Berakhlak Mulia, Unggul dan Berdaya Saing		INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	71,07-71,19	72,25-72,34	76,98-76,95	
Sasaran Strategis :						
1.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,28	69,74	71,58	
2.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	71,66	72,01	72,23	
3.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Perlindungan Sosial Yang Adaptif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	62,17	63,74	70,00	
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	20,00	21,87	29,37	

B. Tujuan dan Sasaran Misi 2

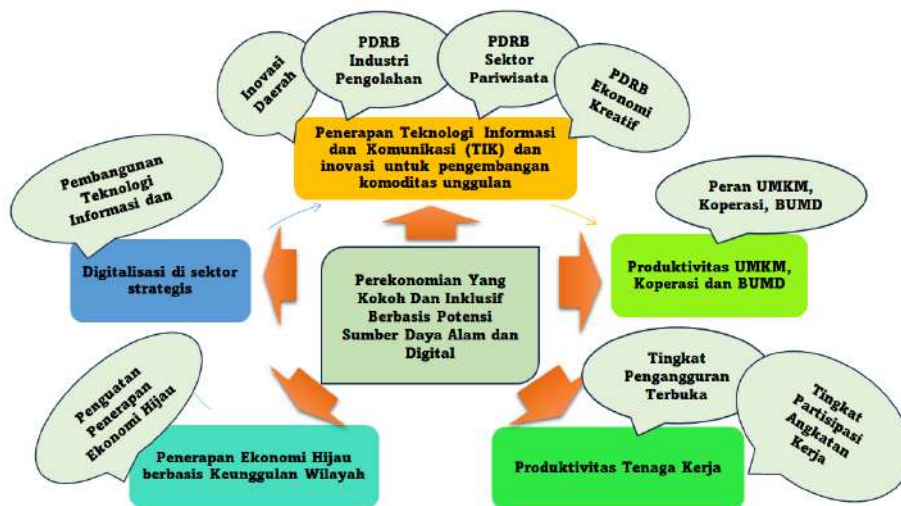
● Misi 2. Meningkatkan Perekonomian Yang Kokoh Dan Inklusif Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Digital.

Perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing menjadi pilar utama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan globalisasi, disrupsi teknologi, serta ketidakpastian ekonomi global, daerah dituntut untuk mampu membangun struktur ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Ekonomi berkualitas tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari pemerataan, ketahanan, keberlanjutan, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan rakyat. Pembangunan

ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi daerah yang kuat, inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan global. Penguatan ekonomi lokal dilakukan melalui optimalisasi potensi unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, serta pemanfaatan teknologi digital dan inovasi.

Kebijakan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi, dengan dukungan regulasi yang adaptif, pelayanan publik yang efisien, dan infrastruktur pendukung yang memadai. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan katalisator dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Melalui perencanaan yang terintegrasi, pencapaian Misi 2 dapat digambarkan melalui kerangka kerja logis sebagai berikut:



Gambar 3.20
Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 2

Berdasarkan gambar di atas, Misi dicapai melalui tujuan **Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berkualitas dan Berdaya Saing**, dengan 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan;
2. Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD;
3. Menurunnya Tingkat Pengangguran.
4. Penerapan Ekonomi Hijau berbasis Keunggulan Wilayah;
5. Meningkatnya digitalisasi di sektor strategis.



Perwujudan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, digambarkan melalui indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Pendapatan per Kapita Kabupaten Buol. Indikator ini untuk mengukur kontribusi sektor dan sub-sektor struktur ekonomi kabupaten Buol terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per Kapita Kabupaten Buol. Kerangka kerja logis sederhana yang menjabarkan bagaimana pencapaian tujuan dan sasaran ini digambarkan berikut:

MISI 2	Meningkatkan Perekonomian Yang Kokoh Dan Inklusif Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Digital									
TUJUAN	Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
INDIKATOR KINERJA	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)					Pendapatan per Kapita (Rp)				
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan				Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja		Penerapan Ekonomi Hijau berbasis Keunggulan Wilayah.	Meningkatnya digitalisasi di sektor strategis	
INDIKATOR KINERJA	Indeks Inovasi Daerah	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	Pengembangan Pariwisata (Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minum (%))	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
PRIORITAS DAERAH	PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG INKLUSIF BERBASIS SDA BERKELANJUTA DAN DIGITALISASI									
PROGRAM PRIORITAS	Mengembangkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumberdaya Alam Unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi dan bereorientasi pasar						Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani			
URUSAN PEMERINTAHAN	Bidang Litbang, Bidang Koperasi & UMKM, Bidang Perindustrian, Bidang Pariwisata, Bidang Tenaga Kerja, Bidang Pertanian, Bidang Perikanan.									
PENUNJANG	Semua Urusan Pemerintahan Daerah									

Gambar 3.21
Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 2

Berdasarkan gambar tersebut di atas, bahwa 5 (lima) sasaran dapat dicapai melalui indikator-indikator pada masing-masing sasaran dimaksud, berikut:

1. Sasaran Pertama: *Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan.* Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui indikator Indeks Inovasi Daerah; Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan, Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman; dan Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif.



2. Sasaran Kedua: *Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui indikator : Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD.
3. Sasaran Ketiga: *Menurunnya Tingkat Pengangguran*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
4. Sasaran Keempat: *Penerapan Ekonomi Hijau berbasis Keunggulan Wilayah*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui indikator : Indeks Ekonomi Hijau.
5. Sasaran Kelima: *Meningkatnya digitalisasi di sektor strategis*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui indikator : Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Berdasarkan Misi 2 di atas, ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan menjadi target capaian selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 2 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Tahun 2025 – 2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET			SAT.
			BASELIN E	TAHUN	AKHIR	
			2025	2026	2030	
2	Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,50-7,73	3,86-7,03	5,28-4,22	
		Pendapatan per Kapita (Rp)	55,50-64,10	61,63-68,08	86,13-83,98	
Sasaran Strategis:						
2.1	Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan	Indeks Inovasi Daerah	35,00	38,44	52,19	
		Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	14,50-22,50	16,66-22,66	25,28-23,28	
		Pengembangan Pariwisata (Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi	0,50-0,58	0,72-0,78	1,61-1,59	



NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET			SAT.
			BASELIN E	TAHUN	AKHIR	
			2025	2026	2030	
		Makan dan Minum (%)				
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,0 - 2,5	1,3 - 2,8	2,5 – 4	
2.2	Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	1,29	1,50	2,34	
2.3	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,50-2,90	2,52-2,82	2,60-2,50	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,32	57,1	72,66	
2.4	Penerapan Ekonomi Hijau berbasis Keunggulan Wilayah.	Indeks Ekonomi Hijau	62,86	63,82	67,67	
2.5	Meningkatnya digitalisasi di sektor strategis	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	41,88	44,50	55,00	

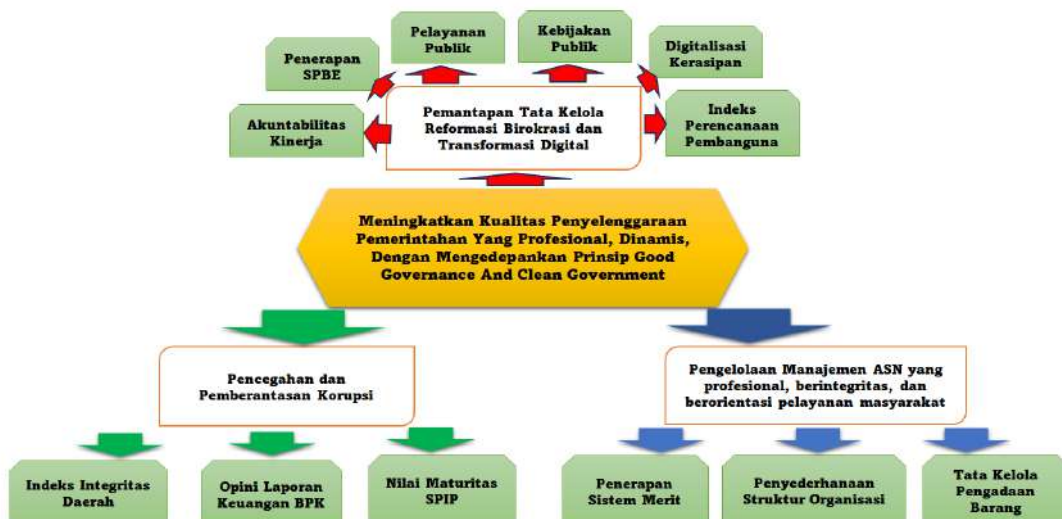
C. Tujuan dan Sasaran Misi 3

- **Misi 3. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Dengan Mengedepankan Prinsip *Good Governance And Clean Government*.**

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Arah kebijakan ini menekankan pentingnya transformasi tata kelola pemerintahan agar lebih profesional, adaptif terhadap perubahan, serta mengedepankan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kepatuhan hukum (*rule of law*). Hal ini selaras dengan prinsip **Good Governance** dan semangat mewujudkan **Clean Government** yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemerintahan yang profesional dan dinamis bukan hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga mencerminkan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik, kinerja, serta inovasi birokrasi. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga sebagai pelayan publik dan motor perubahan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis prinsip good governance dan clean government akan menciptakan kepercayaan publik dan mendukung akselerasi pembangunan yang berorientasi pada hasil dan kesejahteraan masyarakat

Melalui perencanaan yang terintegrasi, pencapaian Misi 3 dapat digambarkan melalui kerangka kerja logis sebagai berikut:



Gambar 3.22
Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 3

Berdasarkan gambar di atas, Misi dicapai melalui tujuan **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas**, dengan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel dan Adaptif;
2. Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan Masyarakat.

Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas, digambarkan melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Buol. Indikator ini untuk mengukur kontribusi



Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Digitalisasi Pemerintahan; Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit; Peningkatan Kapasitas ASN; Pengawasan dan Pengendalian; dan Pelayanan Publik Berkualitas. Kerangka kerja logis sederhana yang menjabarkan bagaimana pencapaian tujuan dan sasaran ini digambarkan berikut:

MISI 3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance And Clean Government											
TUJUAN	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas											
INDIKATOR KINERJA	INDEKS REFORMASI BIROKRASI											
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya kualitas Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel dan Adaptif										Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan masyarakat	
INDIKATOR KINERJA	Indeks SPBE	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Integritas Daerah	Opini Laporan Keuangan BPK	Nilai Sakip	Tingkat Digitalisasi Kerasipan	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai Maturitas SPIP	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks Sistem Merit	% Penyederhanaan Struktur Organisasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang
PRIORITAS DAERAH	PEMANTAPAN TATA KELOLA REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI DIGITALISASI											
PROGRAM PRIORITAS	Pemantapan Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital									Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
URUSAN PEMERINTAHAN	Bidang Kependudukan & Pencatatan Sipil, Bidang Komunikasi & Informatika, Bidang Perencanaan Pembangunan, Bidang Keuangan, Bidang Kepegawaian, Bidang Pengawasan, Setda & Setwan dan Kerasipan											
PENUNJANG	Semua Urusan Pemerintahan Daerah											

Gambar 3.23
Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 3

Berdasarkan gambar tersebut di atas, bahwa 2 (dua) sasaran dapat dicapai melalui indikator-indikator pada masing-masing sasaran dimaksud, berikut:

1. Sasaran Pertama: Meningkatnya kualitas Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel dan Adaptif. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui Indeks SPBE; Indeks Pelayanan Publik; Indeks Integritas Daerah; Opini Laporan Keuangan oleh BPK; Nilai SAKIP, Tingkat Digitalisasi Kearsipan; Indeks Kualitas Kebijakan; Nilai Maturitas SPIP; dan Indeks Perencanaan Pembangunan.
2. Sasaran Kedua: Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan Masyarakat. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui indikator : Indeks Sistem Merit;

Penyederhanaan Struktur Organisasi; dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang.

Berdasarkan Misi 3 di atas, ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan menjadi target capaian selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 3 Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Buol Tahun 2025 – 2029

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET	AKHIR	SAT.
			2025	2026	2030	
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas	Indeks Reformasi Birokrasi	62,50	65,72	80,32	
	Sasaran Strategis:					
3.1	Meningkatnya kualitas Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel dan Adaptif	Indeks SPBE - (Indeks Pemerintahan Digital)	3,20	3,24	3,61	
		Indeks Pelayanan Publik	2,1	2,28	3,0	
		Indeks Integritas Daerah	75,00	75,95	79,8	
		Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	WTP	
		Indeks Perencanaan Pembangunan	68	71,4	85	
		Tingkat Digitalisasi Kerasipan	40	49	85	



NO.	TUJUAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET	AKHIR	SAT.
			2025	2026	2030	
3.2	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan masyarakat	Indeks Kualitas Kebijakan	32,18	40,54	74,00	
		Nilai SAKIP	60,33	63,96	72,57	
		Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	
		Indeks Sistem Merit	176,5	203,2	310	
		Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	100	100	100	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang	43,4	50,32	78	

D. Tujuan dan Sasaran Misi 4

● Misi 4. Meningkatkan dan Memantapkan Sistem Ketentraman dan Ketertiban Daerah dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.

Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat utama dalam mendukung keberlangsungan pembangunan dan investasi di daerah. Stabilitas sosial dan keamanan wilayah berkontribusi langsung terhadap iklim usaha yang kondusif, kelancaran pelayanan publik, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Di sisi lain, **stabilitas ekonomi makro daerah** mencerminkan kondisi fiskal dan moneter yang sehat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terkendalinya inflasi, serta terkonsolidasinya belanja daerah yang produktif. Oleh karena itu, peningkatan sinergi antara fungsi ketenteraman, penegakan hukum, serta penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi satu kesatuan arah kebijakan yang saling menguatkan.

Kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan aman adalah prasyarat utama pembangunan. Ketika masyarakat merasa aman, investasi tumbuh, ekonomi bergerak, dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sinergi antara penguatan sistem keamanan daerah dengan pengendalian ekonomi makro menjadi langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Melalui perencanaan yang terintegrasi, pencapaian Misi 4 dapat digambarkan melalui kerangka kerja logis sebagai berikut:



Gambar 3.24
Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 4

Berdasarkan gambar di atas, Misi dicapai melalui tujuan **Mewujudkan Stabilitas Makro Ekonomi Daerah dan Kondusivitas Daerah**, dengan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Daerah serta Demokrasi Substansial;
2. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
3. Meningkatnya Diplomasi dan Kerjasama Antar Daerah.

Perwujudan Stabilitas Makro Ekonomi Daerah dan Kondusivitas Daerah digambarkan melalui indikator Tingkat Inflasi Daerah. Indikator ini untuk mengukur kontribusi Penegakan Perda dan Ketertiban Umum, Pencegahan Konflik dan Kewaspadaan Dini, Pengendalian Inflasi Daerah dan Penguatan Fiskal Daerah. Kerangka kerja logis sederhana yang menjabarkan bagaimana pencapaian tujuan dan sasaran ini digambarkan berikut:

MISI 4	Meningkatkan dan Memertipkan Sistem/Ketertarikan dan Ketertiban Daerah, Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah						
TUJUAN	Meningkatkan Stabilitas Makro Ekonomi Daerah dan Ketertarikan Daerah						
INDIKATOR KINERJA	Indikator KINERJA (KINERJA)						
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Kualitas Hukum, Ketertarikan dan Ketertiban Daerah serta Demokrasi Substansial			Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah			Meningkatnya Diplomasi dan Kerjasama Antar Daerah
INDIKATOR KINERJA	Indeks Reformasi Hukum	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	Indeks Demokrasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	Pendapatan/Intermedial Sektor Keuangan	Jumlah MoU dan PKJ Antara Pemerintah Daerah
PRIORITAS DAERAH	Penguatan Stabilitas Ketertarikan dan Ketertiban Daerah yang Kondusif dan Stabilitas Makro Daerah						
PROGRAM PRIORITAS	Penguatan Ketertarikan dan Ketertiban Daerah, Hukum Berkeadilan dan Demokrasi		Pencapaian dan Pemberantasan Narkoba	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Optimalisasi Mutu Keuangan dan Intermedial Sektor Keuangan	Pemeliharaan Hubungan Kerjasama Antar Daerah yang Kondusif
URUSAN PEMERINTAHAN	Bidang Keuangan, Bidang Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sende						
PENUNJANG	Sesuai Urusan Pemerintahan Daerah						

Gambar 3.25
Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 4

Berdasarkan gambar tersebut di atas, bahwa 3 (tiga) sasaran dapat dicapai melalui indikator-indikator pada masing-masing sasaran dimaksud, berikut:

1. Sasaran Pertama: *Meningkatnya Kualitas Hukum, Ketertarikan dan Ketertiban Daerah serta Demokrasi Substansial*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui Indikator Indeks Reformasi Hukum; Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya; dan Indeks Demokrasi.
2. Sasaran Kedua: *Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui indikator : Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB; Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.
3. Sasaran Ketiga: *Meningkatnya Diplomasi dan Kerjasama Antar Daerah*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui indikator : Persentasi MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buol dengan Daerah Lainnya.

Berdasarkan Misi 4 di atas, ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan menjadi target capaian selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran dapat disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.7
Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 3 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Buol Tahun 2025 – 2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET			SAT.
			BASELINE	TAHUN	AKHIR	
			2024	2025	2030	
4	Mewujudkan Stabilitas Makro Ekonomi Daerah dan Kondusivitas Daerah	TINGKAT INFLASI DAERAH (%)	4,97	4,58	3,00	
3,30	Sasaran Strategis:					
4.1	Meningkatnya Kualitas Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Daerah serta Demokrasi Substasial	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	53,25	54,12	57,60	
		Indeks Reformasi Hukum	77,88	80,70	92,00	
		Indeks Stabilitas Politik Daerah	100	100	100	
4.2	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,84	1,10	2,14	
		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	6,61	7,33	10,20	
		Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan	46,00	48,40	58,00	
4.3	Meningkatnya Diplomasi dan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah MoU dan PKS Antara Pemerintah Daerah	25	30	50	

**E. Tujuan dan Sasaran Misi 5**

- **Misi 5. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya.**

Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi merupakan fondasi penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Ketahanan sosial mencerminkan kohesi sosial, solidaritas, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan bencana. Sementara itu, ketahanan budaya berkaitan dengan pelestarian nilai-nilai lokal, identitas, serta penguatan karakter masyarakat yang berakhlak dan toleran. Ketahanan ekologi mengarah pada pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tetap lestari dan produktif.

Kebijakan ini diarahkan pada penguatan sistem sosial yang inklusif dan responsif, pelestarian budaya lokal sebagai kekuatan identitas daerah, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup dari tekanan eksploitasi dan degradasi. Pemerintah daerah didorong untuk membangun sistem adaptif terhadap perubahan sosial dan ekologis, serta meningkatkan peran masyarakat adat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan dalam Pembangunan. Moderasi beragama dan penguatan kebudayaan merupakan pilar penting dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat jati diri bangsa, serta mendorong pembangunan manusia yang utuh dan berkarakter. Dalam konteks pembangunan daerah, upaya memperkuat moderasi beragama diarahkan untuk menumbuhkan sikap toleran, saling menghormati perbedaan, serta mencegah berkembangnya paham-paham ekstremisme dan radikalisme.

Sementara itu, penguatan budaya diarahkan untuk mengembangkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, menghargai warisan budaya, serta terbuka terhadap kemajuan zaman. Kebudayaan maju berarti kebudayaan yang hidup, adaptif, kreatif, dan mampu memperkuat identitas lokal dalam bingkai kebangsaan atau daerah. Masyarakat yang toleran, berbudaya maju, dan berakar pada nilai-nilai luhur adalah fondasi penting bagi pembangunan yang damai, inklusif, dan berkelanjutan. Moderasi beragama tidak hanya soal toleransi antarumat, tetapi juga tentang membangun nalar sehat dalam beragama yang harmonis dengan budaya lokal. Sementara kebudayaan adalah ruang ekspresi identitas lokal yang harus terus dirawat, dihidupkan, dan dikembangkan sebagai kekuatan sosial dan ekonomi.

Melalui perencanaan yang terintegrasi, pencapaian Misi 5 dapat digambarkan melalui kerangka kerja logis sebagai berikut:



Gambar 3.26
Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 5

Berdasarkan gambar di atas, Misi dicapai melalui tujuan **Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**, dengan 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Moderasi Beragama dan Berkebudayaan Maju;
2. Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusi;
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
4. Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan;
5. Meningkatnya ketahanan dan resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Perwujudan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi digambarkan melalui indikator Persentase Penurunan Emisi GRK. Indikator ini untuk mengukur kontribusi Ketahanan Sosial, elestarian Budaya dan Warisan Lokal, Penguatan Ekologi dan Lingkungan, Peningkatan Kapasitas Komunitas dan Ekologi Berbasis Budaya terhadap penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya. Kerangka kerja logis sederhana yang menjabarkan bagaimana pencapaian tujuan dan sasaran ini digambarkan berikut:



MISI 5	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya									
TUJUAN	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi									
INDIKATOR KINERJA	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah			
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Moderasi Beragama	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusi					Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Ketahanan & Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
INDIKATOR KINERJA	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Pemuda	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%); Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	
PRIORITAS DAERAH	Memperkuat Penyelarasan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Budaya Yang Komprehensif									
PROGRAM PRIORITAS	Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendidikan dan Perawatan Rumah Ibadah			Pelestarian Seni Budaya		Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak		Merajut Pelestarian Lingkungan Hidup		Mencapai Swasembada Pangan
URUTAN PEMERINTAHAN	Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Pangan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Kebencanaan Daerah, Bidang Kebudayaan, Bidang Ketahanan, Ketertarikan Umat dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Kepemudaan dan Bidang Pengendalian Persediaan & Keluarga Berencana									
Pemangku	Semua Urusan Pemerintahan Daerah									

Gambar 3.27
Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 5

Berdasarkan gambar tersebut di atas, bahwa 5 (lima) sasaran dapat dicapai melalui indikator-indikator pada masing-masing sasaran dimaksud, berikut:

1. Sasaran Pertama: *Meningkatnya Moderasi Beragama dan Berkebudayaan Maju*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).
2. Sasaran Kedua: *Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusi*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui indikator: Indeks Perlindungan Anak; Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga; Indeks Ketimpangan Gender; Indeks Pembangunan Gender; dan Indeks Pembangunan Pemuda.
3. Sasaran Ketiga: *Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui Indikator Persentase Penurunan Emisi GRK.
4. Sasaran Keempat: *Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui Indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).
5. Sasaran Kelima: *Meningkatnya Ketahanan dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB).

Berdasarkan Misi 5 di atas, ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan menjadi target capaian selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 5 Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Buol Tahun 2025 – 2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET			SAT
			BASELINE	TAHUN	AKHIR	
			2025	2026	2030	
5	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,08	64,24	68,88	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	86,26	86,47	87,29	
	Sasaran Strategis:					
5.1	Meningkatnya Moderasi Beragama dan Berkebudayaan Maju	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,7 – 77,74	78,07 – 78,13	79,57 – 79,71	
5.2	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusi	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,08	64,24	68,88	
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,330	0,320	0,291	
		Indeks Perlindungan Anak	55,05	56,20	59,40	
		Indeks Pembangunan Gender	90,22	91,80	95,00	
		Indeks Pembangunan Pemuda	5	10	10	
5.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	388.371,04	458.259,34	693.812,54	



NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET			SAT
			BASELINE	TAHUN	AKHIR	
			2025	2026	2030	
5.4	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	7,72	7,34	5,82	
		Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Indeks)	82,12	82,69	84,98	
5.5	Meningkatnya Ketahanan dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	210,44	202,32	169,82	

F. Tujuan dan Sasaran Misi 6

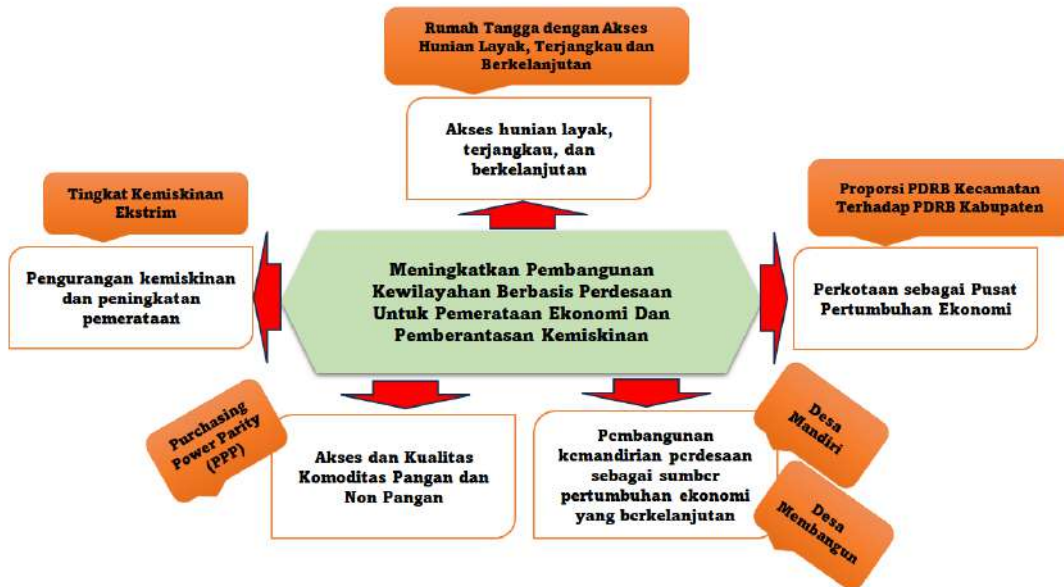
● Misi 6. Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Perdesaan Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan.

Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan merupakan upaya strategis untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal, serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur. Dalam konteks ini, pembangunan diarahkan untuk memperkuat integrasi wilayah pusat dan pinggiran, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal secara berimbang dan inklusif.

Kebijakan ini juga mencakup penyusunan tata ruang yang berkualitas, penataan kawasan strategis, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, termasuk kawasan perdesaan, pesisir, pegunungan, dan daerah terpencil. Pembangunan yang adil dan merata adalah kunci untuk menciptakan keadilan sosial, memperkuat kohesi wilayah, dan memastikan tidak ada warga negara atau daerah yang tertinggal. Dengan memperkuat perencanaan wilayah, infrastruktur yang merata, serta pengembangan potensi lokal, daerah dapat mendorong pertumbuhan inklusif

dan memperkuat fondasi ekonomi serta sosial secara berkelanjutan.

Melalui perencanaan yang terintegrasi, pencapaian Misi 3 dapat digambarkan melalui kerangka kerja logis sebagai berikut:



Gambar 3.28
Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 6

Berdasarkan gambar di atas, Misi dicapai melalui tujuan **Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**, dengan 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya Perkotaan (Kecamatan) sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
3. Meningkatnya pembangunan kemandirian perdesaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Meningkatnya Akses dan Kualitas Komoditas Pangan dan Non Pangan;
5. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan.

Perwujudan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan digambarkan melalui indikator Gini Rasio dan Tingkat Kemiskinan. Indikator ini untuk mengukur kontribusi Pembangunan infrastruktur wilayah, pemerataan pelayanan dasar, pengembangan Kawasan perdesaan dan strategis, revitalisasi wilayah perdesaan tertinggal dan penguatan ruang terhadap produktivitas ekonomi suatu wilayah. Kerangka kerja logis sederhana yang menjabarkan bagaimana pencapaian

tujuan dan sasaran ini digambarkan berikut:

MISI 6	Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Perdesaan Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan						
TUJUAN	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan						
INDIKATOR KINERJA	GIRI RASIO			Persentase Tingkat Kemiskinan			
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Meningkatnya Perkotaan (Kecamatan) sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Meningkatnya pembangunan kemandirian prdesaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Komoditas Pangan dan Non Pangan	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	
INDIKATOR KINERJA	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Proporsi PDRE Kecamatan Terhadap PDRE Kabupaten (%)		Persentase Desa Mandiri (%)	Indeks Desa Membangun (%)	Purchasing Power Parity (PPP)	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)
PRIORITAS DAERAH	Percepatan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Perdesaan dan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh						
PROGRAM PRIORITAS	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UNIKM, BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Melalui Program Kredit Usaha				Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk masyarakat Perdesaan / Perkotaan dan Rakyat yang membutuhkannya		
URUSAN PEMERINTAHAN	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bidang Sosial, dan Bidang Pangan, Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
	Semua Urusan Pemerintahan Daerah						

Gambar 3.29
Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 6

Berdasarkan gambar tersebut di atas, bahwa 5 (lima) sasaran dapat dicapai melalui indikator-indikator pada masing-masing sasaran dimaksud, berikut:

1. Sasaran Pertama: *Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan.
2. Sasaran Kedua: *Meningkatnya Perkotaan (Kecamatan) sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui indikator : Proporsi PDRB Kecamatan Terhadap PDRB Kabupaten.
3. Sasaran Ketiga: *Meningkatnya pembangunan kemandirian perdesaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui indikator Persentase Desa Mandiri dan Indeks Desa Membangun.
4. Sasaran Keempat : *Meningkatnya Akses dan Kualitas Komoditas Pangan dan Non Pangan*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui indikator Purchasing Power Parity (PPP).
5. Sasaran Kelima : *Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui indikator Tingkat Kemiskinan Ekstrem.

Berdasarkan Misi 6 di atas, ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan menjadi



target capaian selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 6 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Tahun 2025 – 2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TERGET			SAT.
			BASELINE	TAHUN	AKHIR	
			2025	2026	2030	
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	GINI RASIO	0,233-0,264	0,231-0,255	0,224-0,217	
		Persentase Tingkat Kemiskinan	12,55	11,91	9,36	
	Sasaran Strategis:					
6.1	Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	0	75,61	75,61	
6.2	Meningkatnya Perkotaan (Kecamatan) sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Proporsi PDRB Kecamatan Terhadap PDRB Kabupaten (%)	10	11	15	
6.3	Meningkatnya pembangunan kemandirian pcrdesaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Persentase Desa Mandiri (%)	11,11	12,96	20,37	
		Indeks Desa	0,7522	0,7776	0,8698	
6.4	Meningkatnya Akses dan Kualitas Komoditas Pangan dan Non Pangan	Purchasing Power Parity (PPP)	14,20	15,28	19,60	
6.5	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	3,04	2,53	0,50	



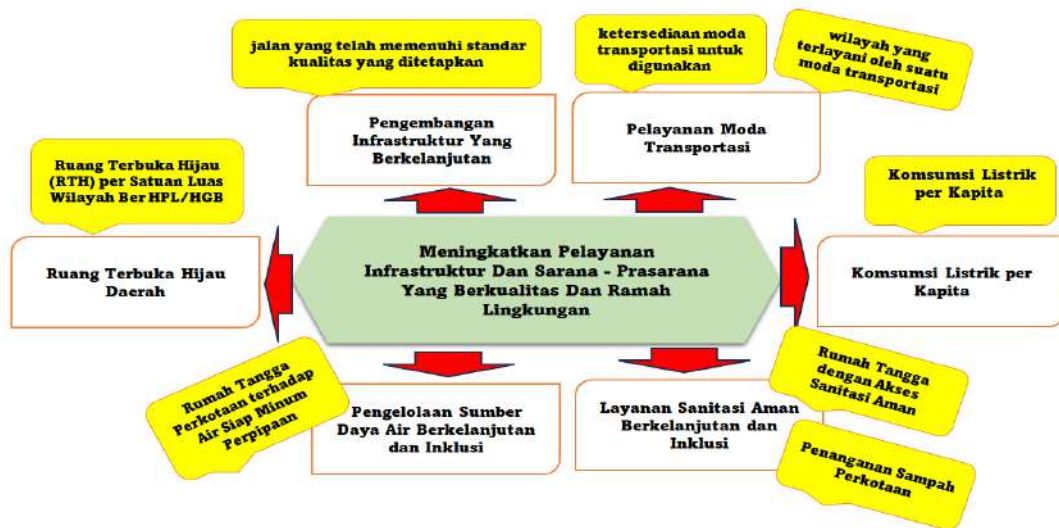
NO	TUJUAN	INDIKATOR	TERGET			SAT.
			BASELINE	TAHUN	AKHIR	
			2025	2026	2030	
	peningkatan pemerataan					

G. Tujuan dan Sasaran Misi 7

● Misi 7 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dan Sarana - Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan.

Infrastruktur merupakan penggerak utama pembangunan daerah. Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan berarti pembangunan fisik yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keberlanjutan sumber daya, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Arah kebijakan ini menitikberatkan pada perluasan akses dan kualitas infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik, sanitasi, transportasi, dan TIK), serta mendorong efisiensi, ketahanan, dan inklusivitas pembangunan infrastruktur. Pembangunan dilakukan dengan prinsip hemat lahan, rendah karbon, ramah lingkungan, serta memperhatikan keberpihakan terhadap kelompok rentan dan wilayah tertinggal. Infrastruktur yang berkelanjutan bukan hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kualitas hidup dan daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang. Pemerintah daerah perlu mengarahkan investasi pembangunan fisik agar berpihak pada masyarakat, sensitif terhadap lingkungan, dan tahan terhadap tantangan masa depan. Dengan pendekatan ini, pembangunan infrastruktur akan menjadi tulang punggung kemajuan yang adil, tangguh, dan lestari. Melalui perencanaan yang terintegrasi, pencapaian Misi 7 dapat digambarkan melalui kerangka kerja logis sebagai berikut:



Gambar 3.30
Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 7

Berdasarkan gambar di atas, Misi dicapai melalui tujuan **Mewujudkan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah dan Antar Sektor** dengan 6 (enam) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Yang Berkelanjutan;
2. Meningkatnya Pelayanan Moda Transportasi;
3. Meningkatnya Komsumsi Listrik per Kapita;
4. Meningkatnya Layanan Sanitasi Aman Berkelanjutan dan Inklusi;
5. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air berkelanjutan dan inklusif;
6. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Daerah.

Perwujudan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah dan Antar Sektor digambarkan melalui indikator Indeks Layanan Infrastruktur Daerah. Indikator ini untuk mengukur kontribusi Pembangunan Infrastruktur Dasar, Transportasi dan Konektivitas, Infrastruktur Hijau, dan Infrastruktur Layanan Lingkungan terhadap produktivitas ekonomi suatu wilayah. Kerangka kerja logis sederhana yang menjabarkan bagaimana pencapaian tujuan dan sasaran ini digambarkan berikut:



MISI 7	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dan Sarana - Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan							
TUJUAN	Mewujudkan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah dan Antar Sektor							
INDIKATOR KINERJA	INDEKS LAYANAN INFRASTRUKTUR DAERAH							
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Moda Transportasi		Meningkatnya Konsumsi Listrik per Kapita	Meningkatnya Layanan Sanitasi Aman Berkelanjutan dan Inklusi		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan dan Inklusi	Tersedia Ruang Terbuka Hijau Daerah
INDIKATOR KINERJA	Persentase jalan yang telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.	Tingkat ketersediaan moda transportasi untuk digunakan	Persentase wilayah yang terlayani oleh suatu moda transportasi.	% Persentase Konsumsi Listrik per Kapita	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Persentase Capaian Penanganan Sampah Perkotaan	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Slay Minum Perpipaan (%)	% Irigasi dalam Kondisi Baik
PRIORITAS DAERAH	Pengembangan dan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Sarana Prasarana Daerah							
PROGRAM PRIORITAS	Meningkatkan dan melanjutkan pembangunan Infrastruktur publik							
URUSAN PEMERINTAHAN	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perhubungan, Bidang Lingkungan Hidup							
PENUNJANG	Semua Urusan Pemerintahan Daerah							

Gambar 3.31
Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 7

Berdasarkan gambar tersebut di atas, bahwa 6 (enam) sasaran dapat dicapai melalui indikator-indikator pada masing-masing sasaran dimaksud, berikut:

1. Sasaran Pertama: *Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Yang Berkelanjutan*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui Indikator Persentase jalan yang telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
2. Sasaran Kedua: *Meningkatnya Pelayanan Moda Transportasi*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui indikator : Tingkat ketersediaan moda transportasi untuk digunakan dan Persentase wilayah yang terlayani oleh suatu moda transportasi.
3. Sasaran Ketiga: *Meningkatnya Konsumsi Listrik per Kapita*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui Indikator Persentase Konsumsi Listrik per Kapita.
4. Sasaran Keempat: *Meningkatnya Layanan Sanitasi Aman Berkelanjutan dan Inklusi*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui Indikator Persentase Capaian Penanganan Sampah Perkotaan dan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Selain itu, keberhasilan sasaran ini juga terkait dengan peningkatan akses terhadap **sanitasi aman**, yaitu fasilitas dan pengelolaan air limbah rumah tangga yang memenuhi standar kesehatan dan



lingkungan. Sanitasi aman adalah fasilitas dan pengelolaan air limbah dimana jamban/mck memiliki tangki septik dan disedot secara berkala 3-5 tahun. Hal ini penting untuk mencegah pencemaran air tanah, menjaga kualitas lingkungan, serta mendukung derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

5. Sasaran Kelima: *Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air berkelanjutan dan inklusif*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui Indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipa dan Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik.
6. Sasaran Keenam: *Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Daerah*. Perwujudan capaian keberhasilannya digambarkan melalui Indikator Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB.

Berdasarkan Misi 7 di atas, ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan menjadi target capaian selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 7 Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Buol Tahun 2025 – 2029**

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET			SAT.
			BASELINE	TAHUN	AKHIR	
			2025	2026	2030	
7	Mewujudkan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah dan Antar Sektor	INDEKS LAYANAN INFRASTRUKTUR DAERAH	44,69	47,31	57,78	
	Sasaran Strategis:					
7.1	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Persentase jalan yang telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan	23	25,29	32,16	
7.2	Meningkatnya Pelayanan Moda Transportasi	Tingkat ketersediaan moda transportasi untuk digunakan	40,00	40,00	60,00	
		Persentase wilayah yang terlayani oleh	50,00	50,00	70,00	



NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET			SAT.
			BASELINE	TAHUN	AKHIR	
			2025	2026	2030	
		suatu moda transportasi.				
7.3	Meningkatnya Komsumsi Listrik per Kapita	Persentase Komsumsi Listrik per Kapita	22,16	23,83	30,50	
7.4	Meningkatnya Layanan Sanitasi Aman Berkelanjutan dan Inklusi	Persentase Capaian Penanganan Sampah Perkotaan	60,00	66,00	85,00	
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	5,0-7,5	5,84-9,38	9,20-16,88	
7.5	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air berkelanjutan dan inklusif	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30,29	32,19-33,72	39,78-47,43	
		Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	66,68	68,76	75,00	
7.6	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Daerah	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	22	23,6	30	

3.3 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan adalah kajian grand design perencanaan komprehensif tentang tahapan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2025-2029 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dalam mencapai target dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan disusun berdasarkan kajian, analisis dan evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan berpedoman pada dokumen perencanaan provinsi dan nasional serta selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Buol periode 2025-2029.

Pilihan strategi tidak dapat dilepaskan dari nilai dan prinsip dasar pembangunan yang menjadi komitmen daerah, Adapun strategi yang dilaksanakan adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:



Tabel 3.11
Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol

NO.	MISI	STRATEGI
1.	Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	▪ Peningkatan akses dan mutu pendidikan, terutama pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan vokasi. ▪ Integrasi pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran. ▪ Penguatan pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal dan kebutuhan pasar kerja. ▪ Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga pelatihan agar profesional dan inspiratif. ▪ Pemberdayaan lembaga keagamaan dan pesantren dalam membina generasi yang religius dan berdaya saing. ▪ Pengembangan inovasi dan teknologi pembelajaran untuk mendorong literasi digital dan adaptasi transformasi teknologi. ▪ Penguatan peran keluarga, sekolah, dan komunitas dalam menanamkan nilai-nilai moral, toleransi, dan tanggung jawab sosial. ▪ Penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan, termasuk optimalisasi peran puskesmas, klinik, dan rumah sakit daerah. ▪ Peningkatan pemerataan tenaga kesehatan, terutama di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. ▪ Revitalisasi program kesehatan ibu dan anak, gizi, serta sanitasi lingkungan. ▪ Pemanfaatan teknologi informasi kesehatan (e-health) untuk memperluas layanan konsultasi dan monitoring kesehatan. ▪ Perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui integrasi dengan program daerah. ▪ Promosi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pemberdayaan



NO.	MISI	STRATEGI
		masyarakat dalam deteksi dini penyakit. ▪ Penguatan sistem surveilans dan respons cepat terhadap penyakit menular dan bencana kesehatan. ▪ Penguatan sistem perlindungan sosial adaptif, yang mengintegrasikan program reguler dengan respons darurat bencana atau krisis. ▪ Pemutakhiran dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta sistem data sektoral lainnya. ▪ Peningkatan layanan sosial berbasis komunitas, termasuk Panti Sosial, LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), dan Kampung Siaga. ▪ Penguatan kelembagaan sosial dan peran aktor lokal (relawan, pekerja sosial, dan CSR sektor swasta). ▪ Pengembangan program pemberdayaan sosial ekonomi keluarga rentan untuk mencegah kemiskinan kronis. ▪ Integrasi layanan sosial lintas sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
2.	Meningkatkan Perekonomian Yang Kokoh Dan Inklusif Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Digital	▪ Penguatan sektor ekonomi produktif berbasis potensi unggulan daerah. ▪ Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan wirausaha baru. ▪ Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif melalui inkubasi dan digitalisasi. ▪ Pembangunan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah. ▪ Peningkatan investasi dan penyederhanaan perizinan usaha. ▪ Peningkatan akses pembiayaan usaha rakyat dan koperasi. ▪ Pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan. ▪ Pengembangan Ekonomi Syariah.
3.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis,	▪ Penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara menyeluruh.



NO.	MISI	STRATEGI
	Dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance And Clean Government	▪ Reformasi birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi dan digitalisasi proses kerja. ▪ Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara. ▪ Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan layanan digital publik. ▪ Optimalisasi sistem pengendalian internal dan pengawasan aparatur. ▪ Peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi dan humanism. ▪ Peningkatan tata Kelola perencanaan Pembangunan berbasis data dan geospasial.
4.	Meningkatkan dan Memantapkan Sistem Ketentraman dan Ketertiban Daerah dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	▪ Penguatan peran Satpol PP, Linmas, dan perangkat keamanan daerah dalam penegakan Perda dan perlindungan masyarakat. ▪ Peningkatan kapasitas deteksi dini, pencegahan konflik sosial, serta sistem penanganan bencana dan kedaruratan. ▪ Peningkatan koordinasi Forkopimda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). ▪ Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan pengendalian inflasi melalui TPID. ▪ Optimalisasi penerimaan asli daerah dan pengendalian belanja daerah untuk menjaga defisit fiskal. ▪ Penguatan data dan kebijakan ekonomi makro daerah melalui integrasi perencanaan dan penganggaran.
5.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya	▪ Penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan ormas keagamaan dalam merawat toleransi. ▪ Pendidikan moderasi beragama melalui lembaga pendidikan, komunitas, dan media publik. ▪ Penguatan fungsi kelembagaan kebudayaan daerah, termasuk sanggar seni dan pusat budaya.



NO.	MISI	STRATEGI
		▪ Pelestarian nilai, praktik, dan warisan budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat. ▪ Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni, budaya, dan tradisi lokal. ▪ Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya daerah. ▪ Digitalisasi dan dokumentasi warisan budaya. ▪ Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga. ▪ Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. ▪ Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. ▪ Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Sistem Kewaspadaan Pangan ▪ Peningkatan Mitigasi Risiko Bencana Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan
6.	Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Perdesaan Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan	▪ Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal (pertanian, pariwisata, perikanan, dll.). ▪ Peningkatan konektivitas antarwilayah melalui infrastruktur jalan, jembatan, transportasi publik, dan akses digital. ▪ Penyediaan infrastruktur dasar (air bersih, listrik, sanitasi, perumahan layak) secara merata. ▪ Pengembangan kawasan perdesaan dan Pembangunan perdesaan melalui pendekatan tematik dan partisipatif. ▪ Penguatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis data spasial. ▪ Sinergi program antar-OPD dan antar-level pemerintahan dalam pembangunan wilayah. ▪ Penguatan mekanisme perlindungan sosial adaptif, dan Peningkatan efektivitas program perlindungan sosial terpadu



NO.	MISI	STRATEGI
7.	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dan Sarana - Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan	▪ Percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar di seluruh wilayah, khususnya desa tertinggal dan sulit dijangkau. ▪ Pembangunan infrastruktur hijau (green infrastructure) yang adaptif terhadap perubahan iklim dan hemat energi. ▪ Integrasi perencanaan pembangunan infrastruktur dengan tata ruang dan daya dukung lingkungan. ▪ Digitalisasi infrastruktur dan perluasan jaringan TIK berbasis desa/kelurahan. ▪ Peningkatan partisipasi swasta dan kemitraan publik-swasta (PPP) dalam pembangunan infrastruktur. ▪ Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi proyek infrastruktur.

Arah kebijakan pembangunan yang tepat akan berkontribusi terhadap percepatan pencapaian hasil dari sebuah proses pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Buol Tahun 2025-2029, yang akan dilaksanakan melalui 7 misi dan 7 tujuan, maka perlu dirumuskan arah kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buol. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Buol Tahun 2025-2045, tema atau fokus pembangunan pada tahap kesatu (Tahun 2025 – 2029) adalah “Penguatan Fondasi Transformasi Buol Daerah Agropolitan Yang Maju dan Berkelanjutan”. Dan Hal ini juga yang menjadi acuan dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dan hal tersebut menjadi



acauan dalam penahapan pembangunan selama empat tahun kedepan.

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatkan Produktivitas Pertanian untuk Meneguhkan Posisi Buol Sebagai Daerah Agropolitan dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Mengembangkan Sektor Pertanian dan SDA Berkelanjutan Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Kewilayahan, Potensi Desa dan Ekonomi Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah menuju Buol Daerah Agropolitan maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Penguatan Fondasi Transformasi Buol Daerah Agropolitan Yang Maju dan Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Buol, arah kebijakan disusun sebagai pedoman strategis yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan nilai-nilai utama yang terkandung dalam visi serta mendukung pencapaian tujuan yang termuat dalam misi.

Arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola yang efektif dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta percepatan inovasi yang berkelanjutan. Di samping itu, pendekatan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan kebijakan guna memastikan terciptanya sinergi dan efisiensi dalam mencapai target-target strategis. Dengan arah kebijakan yang terarah dan terpadu, diharapkan visi besar yang telah ditetapkan bukan hanya menjadi cita-cita, melainkan menjadi realitas yang terwujud melalui langkah-langkah strategis dan implementasi yang konsisten. Berikut ini merupakan arah kebijakan dari masing-masing misi Kabupaten Buol tahun 2025-2029.



Tabel 3.12
Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa		
Sasaran 1.1.1		
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang merata	Peningkatan akses dan mutu pendidikan, terutama pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan vokasi.	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah)
		Pengembangkan Pendidikan Vokasi Padat Karya bagi Masyarakat
		Penguatan sistem tata kelola pendidikan dasar
		Mendorong peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah, dan vokasi secara bertahap dan merata
		Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan berkelanjutan dan rekrutmen yang selektif.
	Integrasi pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran.	Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
		Mendorong penguatan pembelajaran berbasis nilai-nilai moral, etika, toleransi, dan moderasi beragama di lingkungan sekolah.
		Meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menginternalisasikan pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dan program pembinaan keagamaan yang mendukung pengembangan karakter peserta didik
		Memfasilitasi kerja sama antara sekolah dengan tokoh agama, organisasi keagamaan, dan lembaga kemasyarakatan dalam pembinaan akhlak dan kepribadian peserta didik.
	Penguatan pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal dan kebutuhan pasar kerja.	Mendorong penyelenggaraan program pendidikan nonformal yang relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal.
		Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk mendukung program pelatihan kerja dan pemagangan.
		Mendorong pengembangan kewirausahaan berbasis keterampilan lokal melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan akses pembiayaan.
		Memperluas akses masyarakat terhadap program pendidikan kesetaraan, terutama bagi kelompok rentan, putus sekolah, dan pekerja informal.
		Mendorong pengembangan kewirausahaan berbasis keterampilan lokal melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan akses pembiayaan.
	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga pelatihan agar profesional dan inspiratif.	Meningkatkan kualitas rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik serta tenaga pelatihan yang kompeten dan sesuai kebutuhan daerah
		Menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan (continuous professional development) bagi guru, instruktur, dan tenaga kependidikan.
		Mendorong sertifikasi kompetensi dan peningkatan kualifikasi akademik tenaga pendidik dan pelatih sesuai standar nasional.



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Memberikan penghargaan, insentif, dan promosi berbasis kinerja bagi tenaga pendidik dan pelatihan berprestasi.
		Memperkuat peran komunitas belajar guru dan forum tenaga pelatihan sebagai wadah peningkatan mutu secara kolaboratif.
	Pemberdayaan lembaga keagamaan dan pesantren dalam membina generasi yang religius dan berdaya saing.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pesantren, madrasah diniyah, dan lembaga keagamaan lainnya melalui dukungan sarana, prasarana, dan tata kelola yang profesional.
		Mendorong partisipasi lembaga keagamaan dalam program sosial kemasyarakatan, pendidikan nonformal, dan pembinaan moral generasi muda.
		Mendukung digitalisasi dan transformasi pengelolaan pendidikan di pesantren melalui pelatihan teknologi dan manajemen berbasis informasi.
	Pengembangan inovasi dan teknologi pembelajaran untuk mendorong literasi digital dan adaptasi transformasi teknologi.	Penguatan Budaya Literasi untuk kreativitas dan inovasi
		Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan.
		Meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam literasi digital, pengembangan media ajar digital, dan pembelajaran berbasis teknologi.



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Penguatan peran keluarga, sekolah, dan komunitas dalam menanamkan nilai-nilai moral, toleransi, dan tanggung jawab sosial.	Menyediakan infrastruktur teknologi pembelajaran yang memadai, termasuk internet, perangkat keras, dan perangkat lunak penunjang di sekolah-sekolah.
		Meningkatkan kemitraan antara sekolah, orang tua, dan komunitas dalam pembinaan karakter peserta didik melalui forum komunikasi dan program kolaboratif.
		Mendorong pelaksanaan pendidikan nilai-nilai moral, toleransi, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
		Mengembangkan program parenting dan pendidikan keluarga untuk meningkatkan peran orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak secara holistik.
		Menumbuhkan budaya sekolah yang inklusif, ramah anak, dan bebas dari kekerasan, diskriminasi, serta intoleransi.
		Memfasilitasi pelatihan dan penyediaan modul pendidikan karakter untuk guru, wali murid, dan komunitas sebagai panduan pembinaan nilai-nilai luhur.
Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan yang merata	Penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan, termasuk optimalisasi peran puskesmas, klinik, dan rumah sakit daerah.	Penguatan Kapasitas pelayanan kesehatan dan Tata Kelola
		Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan dasar di puskesmas, klinik, dan posyandu
		Mengoptimalkan fungsi puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan primer dan promosi kesehatan



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan pemerataan tenaga kesehatan, terutama di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.	Meningkatkan kapasitas rumah sakit daerah sebagai fasilitas rujukan yang responsif dan terstandar
		Memperkuat kebijakan distribusi tenaga kesehatan berbasis kebutuhan daerah
		Meningkatkan kapasitas dan pelatihan tenaga kesehatan secara periodik
		Mengembangkan skema rekrutmen dan penugasan tenaga kesehatan berbasis kontrak atau ikatan dinas
	Revitalisasi program kesehatan ibu dan anak, gizi, serta sanitasi lingkungan.	Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
		Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi
		Memperluas cakupan dan kualitas sanitasi lingkungan yang aman dan layak
	Pemanfaatan teknologi informasi kesehatan (e-health) untuk memperluas layanan konsultasi dan monitoring kesehatan.	Mengembangkan dan memperluas platform layanan kesehatan digital (e-health)
		Mendorong pemanfaatan telemedisin dan aplikasi mobile kesehatan
		Meningkatkan kapasitas SDM kesehatan dan tenaga IT
	Perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui integrasi dengan program daerah.	Mendorong integrasi program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke dalam skema JKN
		Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan
		Mengalokasikan anggaran daerah secara tepat sasaran
		Mengoptimalkan peran fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah dalam pelaksanaan JKN



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Promosi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini penyakit.	Penguatan Kapasitas ketahanan kesehatan
		Meningkatkan edukasi dan kampanye publik tentang PHBS
		Memperkuat upaya promotif dan preventif di fasilitas layanan kesehatan primer
	Penguatan sistem surveilans dan respons cepat terhadap penyakit menular dan bencana kesehatan.	Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat
		Meningkatkan kapasitas sistem surveilans epidemiologi berbasis data dan teknologi digital
		Memperkuat jejaring laboratorium kesehatan daerah dan mekanisme deteksi dini, pelaporan cepat, dan respons awal
		Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan petugas surveilans
Sasaran 1.1.3		
Meningkatnya Akses dan Kualitas Perlindungan Sosial Yang Adaptif	Penguatan sistem perlindungan sosial adaptif, yang mengintegrasikan program reguler dengan respons darurat bencana atau krisis.	Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap risiko bencana, krisis ekonomi, dan guncangan sosial melalui integrasi data dan program.
		Meningkatkan akurasi dan pembaruan data penerima manfaat secara berkala melalui sistem satu data kesejahteraan sosial yang terintegrasi dan berbasis digital.
		Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap bencana dan krisis melalui skema perlindungan sosial berbasis komunitas.
		Memperkuat mekanisme pengaduan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pelaksanaan



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pemutakhiran dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta sistem data sektoral lainnya.	bantuan sosial agar lebih transparan dan tepat sasaran.
		Melaksanakan pemutakhiran data DTKS secara berkala dan partisipatif melalui pelibatan pemerintah desa, kelurahan, dan masyarakat.
		Mengintegrasikan DTKS dengan sistem data sektoral lainnya
		Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi informasi
		Memperkuat mekanisme verifikasi dan validasi data melalui pemanfaatan NIK dan kolaborasi lintas instansi, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	Peningkatan layanan sosial berbasis komunitas, termasuk Panti Sosial, LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), dan Kampung Siaga.	Meningkatkan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam memberikan pelayanan yang bermartabat, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
		Mendorong revitalisasi dan penguatan kelembagaan serta tata kelola Panti Sosial dan LKS agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan.
		Memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola layanan sosial komunitas agar lebih kompeten dan adaptif terhadap perkembangan sosial.



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Penguatan kelembagaan sosial dan peran aktor lokal (relawan, pekerja sosial, dan CSR sektor swasta).	Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan relawan sosial dalam kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial berbasis komunitas.
		Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat melalui dukungan regulasi, fasilitasi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas organisasi sosial lokal.
		Mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme pekerja sosial melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karier berbasis kompetensi.
		Meningkatkan peran dan partisipasi relawan sosial dalam kegiatan pelayanan sosial, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan kelompok rentan.
		Mendorong sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terarah dan berkelanjutan.
	Pengembangan program pemberdayaan sosial ekonomi keluarga rentan untuk mencegah kemiskinan kronis.	Mengembangkan program pemberdayaan berbasis keluarga miskin dan rentan melalui pelatihan keterampilan, literasi keuangan, dan akses permodalan.
		Mendorong penguatan kewirausahaan keluarga melalui pelatihan usaha produktif, pendampingan usaha mikro, serta fasilitasi pemasaran hasil produksi lokal.
		Meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga untuk menciptakan ketahanan sosial ekonomi.



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Integrasi layanan sosial lintas sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.	Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk mengukur dampak program pemberdayaan terhadap penurunan kemiskinan kronis.
		Mendorong penyusunan dan pelaksanaan program layanan sosial yang terintegrasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
		Mengembangkan sistem rujukan terpadu antara layanan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan berbasis data dan teknologi informasi.
		Meningkatkan koordinasi antarlembaga pemerintah daerah serta mitra non-pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program lintas sektor.
		Mengoptimalkan pemanfaatan Satu Data Tunggal(DTSEN) dan sistem data sektoral lainnya sebagai dasar perumusan layanan terpadu.
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Yang Kokoh Dan Inklusif Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Digital		
Sasaran 2.1.1		
Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan	Penguatan sektor ekonomi produktif berbasis potensi unggulan daerah.	Identifikasi dan pemetaan potensi unggulan daerah sebagai basis pengembangan sektor ekonomi produktif yang berdaya saing.
		Pembangunan Pariwisata Berkualitas & Berkelanjutan
		Percepatan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi dan bereoreintasi pasar



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan akses pembiayaan, teknologi, dan digitalisasi usaha bagi pelaku ekonomi lokal.
		Aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung Hilirisasi
Sasaran 2.1.2		
Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD	Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif melalui inkubasi dan digitalisasi.	Peningkatan Produktivitas UMKM & Koperasi
		Peningkatan kapasitas kewirausahaan dan manajerial pelaku UMKM dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendampingan, dan kurikulum berbasis kebutuhan pasar
		Penguatan ekosistem inkubasi usaha yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan pemerintah daerah.
		Fasilitasi transformasi digital UMKM, termasuk adopsi teknologi informasi, penggunaan platform e-commerce, dan digital marketing.
	Peningkatan akses pembiayaan usaha rakyat dan koperasi.	Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual
		Peningkatan Produkivitas Badan Usaha Milik Daerah
		Penguatan kelembagaan koperasi dan usaha rakyat
		Fasilitasi akses ke sumber-sumber pembiayaan formal
		Penguatan kemitraan strategis
Sasaran 2.1.3		



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menurunnya Tingkat Pengangguran	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan wirausaha baru.	Peningkatan akses dan kualitas pelatihan vokasi dan keterampilan kerja
		Pengembangan program kewirausahaan terpadu
		Pembangunan dan penguatan balai latihan kerja (BLK)
		Penguatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, pendidikan vokasi, dan lembaga pelatihan
Sasaran 2.1.4		
Penerapan Ekonomi Hijau berbasis Keunggulan Wilayah	Pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan.	Pengembangan sektor-sektor ekonomi ramah lingkungan
		Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan masyarakat
		Penguatan insentif dan regulasi daerah yang mendorong investasi hijau, efisiensi energi, dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.
		Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan
	Pengembangan Ekonomi Syariah.	Penguatan kelembagaan keuangan syariah
		Peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah
		Pengembangan wirausaha syariah dan UMKM halal
		Pemanfaatan dana sosial Islam (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf)
Sasaran 2.1.5		
Meningkatnya digitalisasi di sektor strategis	Pembangunan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah.	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung ekonomi



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Penguatan konektivitas antarwilayah
		Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur ekonomi
		Pengembangan kawasan strategis dan sentra ekonomi lokal
	Peningkatan investasi dan penyederhanaan perizinan usaha.	Optimalisasi Investasi strategis Daerah
		Peningkatan Perdagangan domestik, antarwilayah, antar daerah dan peningkatan partisipasi dalam rantai nilai regional dan nasional
		Penyederhanaan regulasi dan prosedur perizinan usaha
		Penguatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
		Penguatan koordinasi lintas sektor dan antar level pemerintahan
		Peningkatan kualitas iklim investasi
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance And Clean Government		
Sasaran 3.1.1		
Meningkatnya kualitas Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel dan Adaptif;	Penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara menyeluruh.	Tranformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
		Peningkatan kualitas perencanaan kinerja yang terukur dan selaras
		Optimalisasi Belanja Daerah
		Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan partisipasi publik dalam pemantauan kinerja pemerintah
		Integrasi sistem pelaporan kinerja dengan sistem penganggaran
	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan layanan digital publik.	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Penerapan Digitalisasi Kerasipan
		Penguatan kebijakan dan arsitektur SPBE
		Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
		Peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi layanan publik digital
	Optimalisasi sistem pengendalian internal dan pengawasan aparatur.	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
		Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		Penguatan koordinasi antara pengawasan internal dan eksternal
		Monitoring dan evaluasi berkala terhadap tindak lanjut hasil pengawasan



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi dan humanism.	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
		Pengembangan sistem layanan digital terintegrasi
		Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur
		Penguatan budaya pelayanan berbasis nilai-nilai humanisme
	Peningkatan tata Kelola perencanaan Pembangunan berbasis data dan geospasial.	Penerapan Sistem Perencanaan Pembangunan Bernbasis Geospasial dan Data
		Penguatan sistem perencanaan pembangunan berbasis data dan informasi geospasial
		Pengembangan kapasitas SDM perencana dan pengelola data
		Penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal
		Integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi
Sasaran 3.1.2		
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan Masyarakat	Reformasi birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi dan digitalisasi proses kerja.	Penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dan Transformasi jabatan struktural menjadi jabatan fungsional



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan kompetensi ASN dalam penguasaan teknologi dan adaptasi terhadap sistem kerja digital
		Digitalisasi proses kerja pemerintahan dan Integrasi sistem informasi antarperangkat daerah
		Monitoring dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi digital dan organisasi secara berkelanjutan
	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara.	Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN
		Penguatan sistem pengembangan kompetensi ASN
		Peningkatan akses dan kualitas pelatihan teknis, manajerial, dan kepemimpinan
		Penanaman nilai-nilai dasar ASN (BerAKHLAK)
		Monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi ASN
Misi 4 : Meningkatkan dan Memantapkan Sistem Ketentraman dan Ketertiban Daerah dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		
Sasaran 4.1.1		
Meningkatnya Kualitas Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Daerah serta Demokrasi Substasial;	Penguatan peran Satpol PP, Linmas, dan perangkat keamanan daerah dalam penegakan Perda dan perlindungan masyarakat.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Daerah
		Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
		Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik
		Peningkatan sinergi dan koordinasi lintas sektor
		Penguatan peran Linmas dalam menjaga keamanan lingkungan, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan masyarakat desa



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan kapasitas deteksi dini, pencegahan konflik sosial, serta sistem penanganan bencana dan kedaruratan	Fasilitasi penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, stabilitas politik daerah, dan ketahanan sosial berbasis nilai kebangsaan.
		Peningkatan Peran Intelijen Daerah
		Peningkatan koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah, TNI/Polri, tokoh masyarakat, dan lembaga non-pemerintah
Sasaran 4.1.2		
Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;	Penguatan data dan kebijakan ekonomi makro daerah melalui integrasi perencanaan dan penganggaran.	Penguatan sistem data dan informasi ekonomi makro daerah
		Integrasi proses perencanaan dan penganggaran berbasis data
		Peningkatan kapasitas analisis ekonomi makro daerah
		Monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi daerah secara berkala
	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan pengendalian inflasi melalui TPID.	Penguatan kelembagaan dan koordinasi TPID
		Peningkatan kualitas data dan sistem informasi pangan dan inflasi
		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap sektor Keuangan
		Penguatan sinergi lintas sektor
		Pemantauan dan evaluasi kinerja TPID secara berkala
	Optimalisasi penerimaan asli daerah dan pengendalian belanja daerah untuk menjaga defisit fiskal.	Optimalisasi Pendapatan Daerah
		Peningkatan kapasitas dan intensifikasi sumber-sumber PAD
		Ekstensifikasi potensi penerimaan baru



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan efisiensi belanja operasional dan belanja pegawai
		Pemantauan dan evaluasi fiskal daerah secara berkala
Sasaran 4.1.3		
Meningkatnya Diplomasi dan Kerjasama Antar Daerah;	Peningkatan koordinasi Forkopimda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).	Peningkatan Hubungan Kerjasama Antar Daerah Yang Kondusif
		Penguatan kelembagaan dan kapasitas FKDM
		Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
Misi 5 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya		
Sasaran 5.1.1		
Meningkatnya Moderasi Beragama dan Berkebudayaan Maju;	Penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan ormas keagamaan dalam merawat toleransi.	Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan transformatif untuk mewujudkan Kehidupan moderasi Beragama
		Peningkatan kapasitas kelembagaan FKUB dan ormas keagamaan
	Pendidikan moderasi beragama melalui lembaga pendidikan, komunitas, dan media publik.	Memfasilitasi ruang dialog, silaturahmi lintas agama, dan kegiatan moderasi beragama
		Meningkatkan kapasitas pendidik, tokoh agama, dan komunitas lokal
		Mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal
	Memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, ormas keagamaan, dan media	



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Penguatan fungsi kelembagaan kebudayaan daerah, termasuk sanggar seni dan pusat budaya.	Memperkuat kelembagaan dan manajemen sanggar seni, komunitas budaya, dan pusat budaya
		Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya generasi muda, dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan seni-budaya
	Pelestarian nilai, praktik, dan warisan budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat.	Membangun kolaborasi antara pemerintah, seniman, budayawan, sekolah, dan dunia usaha
		Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Daerah
		Memberdayakan komunitas adat dan pelaku budaya lokal
	Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni, budaya, dan tradisi lokal.	Membangun jejaring dan kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah dalam pelestarian budaya
		Menyediakan dan mengoptimalkan ruang publik dan fasilitas budaya
		Mendorong penyelenggaraan event seni dan budaya daerah secara rutin dan partisipatif
	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya daerah.	Meningkatkan literasi budaya dan apresiasi seni
		Mengidentifikasi dan mengembangkan subsektor ekonomi kreatif yang memiliki akar budaya lokal
		Mendorong kolaborasi antara pelaku budaya, UMKM kreatif, dan dunia usaha
	Digitalisasi dan dokumentasi warisan budaya.	Mendorong digitalisasi arsip, naskah kuno, rekaman tradisi lisan, dan dokumentasi pertunjukan seni
		Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
		Memfasilitasi pelatihan dan penguatan kapasitas SDM kebudayaan dalam bidang dokumentasi, pengarsipan, dan teknologi digital.
Sasaran 5.1.2		



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif;	Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Peningkatan Ketangguhan Keluarga
		Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Perlindungan dari Kekerasan
		Penguatan Kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan
		Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan
		Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan
		Penguatan tata kelola dan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan
		Peningkatan Kualitas Pemuda
		Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga dan Pengembangan Kebudayaan Olahraga yang Inklusif
Sasaran 5.1.3		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.	Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Memperkuat sistem perizinan dan pemantauan lingkungan
		Meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap sumber pencemar dan perusak lingkungan
Sasaran 5.1.4		



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan;	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Sistem Kewaspadaan Pangan	Mengembangkan sistem informasi lingkungan dan mekanisme pelaporan pencemaran yang responsif dan transparan
		Meningkatkan kapasitas dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah
		Mengembangkan sistem kewaspadaan dini terhadap kerawanan pangan
		Mendukung program diversifikasi pangan lokal
Sasaran 5.1.5		
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.	Peningkatan Mitigasi Risiko Bencana Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan	Melibatkan peran aktif masyarakat, lembaga distribusi, dan pelaku usaha pangan
		Pengelolaan Risiko Bencana yang efisien dan tepat guna
		Pembangunan Berketahanan Iklim
		Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan berisiko tinggi
		Mendorong pembangunan infrastruktur yang adaptif dan tangguh bencana
		Melindungi dan merehabilitasi ekosistem strategis
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Perdesaan Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan		
Sasaran 6.1.1		
Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan;	Penyediaan infrastruktur dasar (air bersih, listrik, sanitasi, perumahan layak) secara merata.	Memperluas cakupan layanan air bersih dan sanitasi layak
		Mendorong peningkatan akses listrik bagi rumah tangga belum teraliri



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni
		Mengembangkan skema pembiayaan inovatif dan kolaboratif
		Memperkuat peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat
		Fasilitasi inovasi teknologi tepat guna
		Revitalisasi kawasan kumuh perkotaan dan pedesaan
Sasaran 6.1.2		
Meningkatnya Perkotaan (Kecamatan) sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;	Peningkatan konektivitas antarwilayah melalui infrastruktur jalan, jembatan, transportasi publik, dan akses digital.	Peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dasar
		Mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan
		Mengembangkan sistem transportasi publik yang terjangkau, aman, dan ramah lingkungan
		Memperluas akses digital (telekomunikasi dan internet)
		Meningkatkan integrasi antara perencanaan infrastruktur fisik dan infrastruktur digital
	Penguatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis data spasial.	Memperkuat koordinasi antarinstansi dan antarlevel pemerintahan
		Meningkatkan kualitas dan konsistensi dokumen rencana tata ruang
		Mempercepat penyusunan dan pembaruan peta dan basis data spasial
		Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Mengintegrasikan sistem informasi geospasial dalam perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan daerah dalam pengelolaan data spasial dan penerapan sistem informasi geospasial
Sasaran 6.1.3		
Meningkatnya pcmbangunan kemandirian prdesaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;	Pengembangan kawasan perdesaan dan Pembangunan perdesaan melalui pendekatan tematik dan partisipatif.	Mendorong penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan perdesaan
		Memperkuat koordinasi lintas sektor dan antarlevel pemerintahan
		Mengembangkan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi di kawasan perdesaan, termasuk jalan desa, irigasi, pasar desa, dan konektivitas digital
		Meningkatkan akses layanan dasar di perdesaan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, melalui pendekatan yang inklusif dan berkeadilan
	Sinergi program antar-OPD dan antar-level pemerintahan dalam pembangunan wilayah.	Mendorong kemitraan antara desa, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil dalam pengembangan ekonomi perdesaan dan inovasi sosial
		Mendorong penyelarasan perencanaan dan penganggaran pembangunan wilayah
		Memperkuat koordinasi lintas sektor dan antarwilayah
		Mengembangkan mekanisme kolaboratif dalam pelaksanaan program lintas-OPD
		Meningkatkan penggunaan sistem informasi perencanaan terpadu berbasis data dan spasial



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Sasaran 6.1.4		
Meningkatnya Akses dan Kualitas Komoditas Pangan dan Non Pangan;	Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal (pertanian, pariwisata, perikanan, dll.).	Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unggulan lokal
		Mendorong pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi lokal
		Meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha lokal
		Memperkuat kelembagaan ekonomi lokal
Sasaran 6.1.5		
Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan.	Penguatan mekanisme perlindungan sosial adaptif, dan Peningkatan efektivitas program perlindungan sosial terpadu	Meningkatkan promosi potensi ekonomi lokal secara digital dan fisik untuk menarik pasar dan investasi, baik domestik maupun luar daerah
		Memperluas cakupan dan kualitas layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan layak) bagi masyarakat miskin dan rentan
		Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pekerjaan produktif, pelatihan keterampilan, dan peluang wirausaha
		Mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan kelompok rentan melalui akses pembiayaan, bantuan usaha, dan pendampingan usaha mikro
		Memperkuat perlindungan sosial adaptif yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan bencana



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi, CSR, dan pendekatan kewirausahaan sosial Meningkatkan validitas dan pemutakhiran data kemiskinan sebagai dasar perencanaan dan penargetan program secara tepat sasaran
Misi 7 : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dan Sarana - Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan		
Sasaran 7.1.1		
Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Yang Berkelanjutan;	Percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar di seluruh wilayah, khususnya desa tertinggal dan sulit dijangkau.	Meningkatkan alokasi anggaran dan efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar
		Memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan dunia usaha melalui skema pembiayaan alternatif
	Pembangunan infrastruktur hijau (green infrastructure) yang adaptif terhadap perubahan iklim dan hemat energi.	Mendorong integrasi program lintas sektor dan lintas level pemerintahan
		Mendorong penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur
		Meningkatkan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur ramah lingkungan
	Peningkatan partisipasi swasta dan kemitraan publik-swasta (PPP) dalam pembangunan infrastruktur.	Mendorong pemanfaatan teknologi hijau dan material ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur
		Mendorong penguatan regulasi dan kelembagaan daerah untuk mendukung pelaksanaan skema Kerja Sama
		Membangun ekosistem investasi yang kondusif



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi proyek infrastruktur.	Memperkuat koordinasi antar-OPD, BUMD, dan sektor swasta
		Memperkuat sistem perencanaan pembangunan infrastruktur yang berbasis data, kebutuhan wilayah, dan analisis kelayakan
		Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah
		Peningkatan kolaborasi antar-lembaga dan antar pemerintah daerah
	Integrasi perencanaan pembangunan infrastruktur dengan tata ruang dan daya dukung lingkungan.	Penguatan sistem evaluasi berbasis kinerja (performance-based evaluation)
		Mendorong keselarasan perencanaan pembangunan infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
		Memperkuat analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan
		Mengintegrasikan aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
	Digitalisasi infrastruktur dan perluasan jaringan TIK berbasis desa/kelurahan.	Mendorong pembangunan dan pemerataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
		Meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat, BUMN, dan sektor swasta
Sasaran 7.1.2		
Meningkatnya Pelayanan Moda Transportasi;	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi	Mengintegrasikan platform digital desa dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
		Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pengembangan sistem transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan ramah lingkungan
		Penguatan konektivitas antarwilayah dan antarpusat kegiatan ekonomi
Sasaran 7.1.3		
Meningkatnya Komsumsi Listrik per Kapita;	Peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan layanan listrik	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di sektor transportasi
		Memperluas jaringan listrik ke wilayah terpencil, desa tertinggal, dan daerah yang belum teraliri listrik
		Mendorong pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT)
		Mengembangkan skema subsidi dan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat miskin dan rentan
Sasaran 7.1.4		
Meningkatnya Layanan Sanitasi Aman Berkelanjutan dan Inklusif;	Perluasan cakupan infrastruktur sanitasi layak dan aman	Meningkatkan kerja sama dengan PLN, swasta, dan komunitas lokal
		Mempercepat pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sanitasi dasar
		Meningkatkan cakupan layanan sanitasi terpusat dan berbasis masyarakat
		Menguatkan edukasi dan perubahan perilaku masyarakat
Sasaran 7.1.5		
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air berkelanjutan dan inklusif;	Pengembangan infrastruktur sumber daya air yang adaptif dan berkelanjutan	Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi berbasis data spasial dan digital
		Meningkatkan kapasitas infrastruktur sumber daya air



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Mengembangkan sistem pengelolaan air terpadu berbasis daerah aliran sungai
		Mendorong pemanfaatan teknologi hemat air dan konstruksi hijau
Sasaran 7.1.6		
Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Daerah.	Peningkatan pembangunan dan revitalisasi ruang terbuka hijau publik dan privat	Memperkuat perlindungan kawasan resapan air, sempadan sungai, dan sumber mata air
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) publik dan privat
		Melakukan revitalisasi RTH eksisting
		Mendorong pemanfaatan lahan tidak produktif dan aset milik pemerintah/swasta untuk dikembangkan sebagai RTH yang ramah lingkungan dan inklusif



3.2.2 Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 dalam RPJMN Tahun 2025-2029

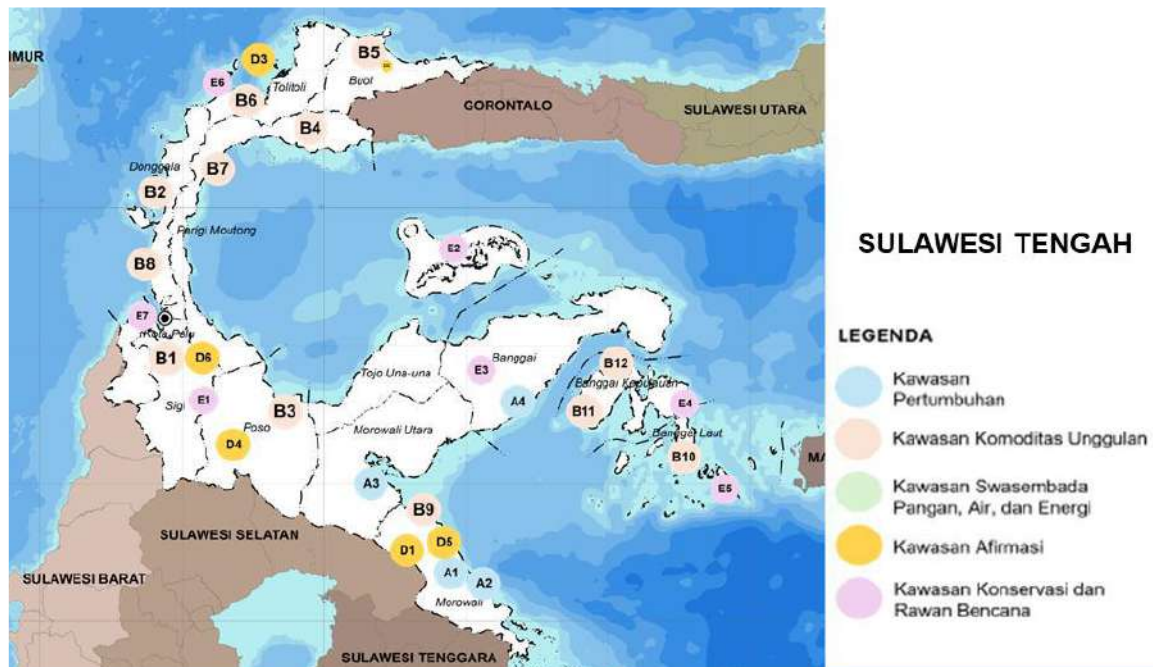
Aspek pertumbuhan dan pemerataan wilayah menjadi hal yang krusial dalam agenda kewilayahan, khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM. Dalam mendorong pembangunan wilayah dan kemandirian wilayah kedepan, maka dalam RPJMN Tahun 2025-2029 telah diidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan dan pemerataan wilayah beserta ekosistemnya melalui penyusunan daftar Lokasi prioritas, dengan tujuan untuk:

- a. Menterjemahkan pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) dalam agenda kewilayahan;
- b. Menterjemahkan prioritas transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola serta landasan transformasi ke dalam agenda pembangunan wilayah dan mengarahkan sumber pendanaan pembangunan (belanja K/L, transfer ke daerah)
- c. Menterjemahkan visi, misi, dan program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih ke dalam 5 bentuk kelompok Kawasan.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi prioritas yaitu:

- a. Sektor pendorong dan komoditas unggulan wilayah yang menjadi modal dasar pembangunan ekonomi wilayah serta akan dipertimbangkan dalam mengembangkan ekosistem pembangunan ekonomi wilayah (sentra produksipengolahan-riset/inovasi- pasar (lokal/nasional/ global);
- b. Kawasan strategis pusat pertumbuhan wilayah dan daerah afirmasi;
- c. Pola dan struktur ruang RTRW;
- d. Infrastruktur dasar dan konektivitas;
- e. Risiko kebencanaan;
- f. Daya dukung dan daya tampung lingkungan serta lokasi prioritas ketahanan iklim bidang kelautan, pesisir, air, dan pertanian;
- g. Tema dan arah pembangunan wilayah di dalam RPJMN 2025-2029 maupun RKP 2025 yang sudah diintegrasikan dengan Visi, Misi dan Program Presiden Terpilih.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan Pulau Sulawesi yaitu **Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA**, dimana pembangunan Pulau Sulawesi diarahkan untuk menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang berfokus pada pengembangan industri hilirisasi mineral dan lumbung pangan nasional. Secara khusus, tema arah pembangunan kewilayahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 adalah **Sentra Pertanian serta Pusat Pengolahan Hasil Pertambangan**, dan selanjutnya untuk Kabupaten Buol, tema arah Pembangunan kewilayahan Kabupaten Buol tahun 2025-2029 adalah **Kawasan Komoditas Unggulan (Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan) dan Kawasan Afirmasi Kecamatan Perbatasan Prioritas**, seperti disajikan pada gambar 3.32 dan tabel 3.13 berikut ini :





A. Kawasan Pertumbuhan Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Morowali (Bahodopi) 1. Kabupaten Morowali Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara 2. Kabupaten Morowali 3. Kabupaten Morowali Utara Kawasan Hilirisasi Gas Bumi 4. Kabupaten Banggai	D. Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) 1. KPP Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Kecamatan Perbatasan Prioritas 2. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Buol 3. Kecamatan Perbatasan, Kabupaten Toli-Toli Kawasan Transmigrasi (KT) 4. KT Tampolore, Kabupaten Poso 5. KT Bungku, Kabupaten Morowali 6. KT Palolo, Kabupaten Sigi
B. Kawasan Komoditas Unggulan Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan 1. Kabupaten Sigi 2. Kabupaten Donggala 3. Kabupaten Poso 4. Kabupaten Parigi Moutong 5. Kabupaten Buol 6. Kabupaten Tolitoli Kawasan Perikanan dan Hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT) 7. Kabupaten Parigi Moutong 8. Kabupaten Donggala 9. Kabupaten Morowali 10. Kabupaten Banggai Laut 11. Kabupaten Banggai Kepulauan Kawasan Sentra Hilirisasi Rumput Laut 12. Kabupaten Banggai Kepulauan	E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Kawasan Konservasi: Kawasan Konservasi Sulawesi Tengah 1. Taman Nasional Lore Lindu, Kab. Sigi dan Kab. Poso 2. Taman Nasional Kepulauan Togean, Kab. Tojo Una-Una 3. Kabupaten Banggai 4. Kabupaten Banggai Kepulauan 5. Kabupaten Banggai Laut 6. Kabupaten Tolitoli Kawasan Rawan Bencana: Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami 7. Kota Palu

Gambar 3.32
Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Tabel 3.13
Highlight Indikasi Intervensi Lokasi Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
B1 B2 B3 B4 B5 B6	Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan: B2: Kabupaten Donggala B3: Kabupaten Poso B4: Kabupaten Parigi Moutong B5: Kabupaten Buol B6: Kabupaten Tolitoli	Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Tolitoli, melalui: a. Penguatan konektivitas jalan, dengan output: preservasi ruas jalan Tolai– Sausu di Kabupaten Parigi Moutong dan Tagolu– Tentena di Kabupaten Poso b. Pemanfaatan sarana prasarana pendukung produksi pertanian, dengan output: penyediaan sarana prasarana pascapanen pertanian serta alat dan mesin pertanian pra panen. c. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI), dan gangguan lainnya, dengan output: pelatihan kelompok tani



No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		dan pembentukan regu pengendalian OPT d. Peningkatan mutu produk, dengan output: sertifikasi produk mutu pestisida dan pelatihan kelompok tani e. Penguatan regenerasi petani, dengan output: pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur, pelatihan pertanian bagi non aparatur, sertifikasi profesi bidang pertanian, serta pengembangan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian f. Pelaksanaan bantuan langsung petani, dengan output: pemberian bantuan langsung petani untuk pembelian pupuk serta layanan validasi dan verifikasi pupuk. g. Teknologi pertanian, dengan output: pembangunan irigas perpipaan pertanian, pembangunan irigasi perpompaan pertanian, pengembangan jaringan irigasi pertanian, serta Pembangunan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim h. Akses pembiayaan inklusif, dengan output: fasilitasi/pembinaan/pendampingan akses pembiayaan, penyediaan asuransi pertanian, serta fasilitasi dan pembinaan investasi i. Efisiensi rantai nilai, dengan output: fasilitasi pembinaan dan pendampingan efisiensi rantai nilai j. Pengembangan hilirisasi kelapa, dengan output: pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditas perkebunan, sarana pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunan, neraca komoditas kelapa dan produk turunannya, fasilitas pusat penyediaan bahan baku industri tempurung dan sabut kelapa, inkubasi koperasi, pengembangan industri pengolahan kelapa, restrukturisasi mesin/peralatan industri, dan pendampingan pembiayaan bagi usaha mikro.



No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
D2 D3	Kawasa Afirmasi Kecamatan Perbatasan Prioritas: D2: Kec. Paleleh Barat, Kec. Gadung, Kec. Bokat, Kec. Biau, dan Kec. Karamat, Kabupaten Buol D3: Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemean, dan Kec. Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli	Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan, dengan <i>output</i> : pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas.

Sumber; RPJMN Tahun 2025-2029

3.2.3 Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Selain arah kebijakan diatas, terdapat juga arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Sulawesi Tengah emas yakni Pembangunan berbasis klaster. Pembangunan dilakukan berbasis klaster perwilayahan seperti yang tertuang dalam Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 - 2042, yaitu:

- Klaster Perkotaan Pasigala** meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi;
- Klaster Agropolitan** yaitu **Agropolitan Bolipamuso** dan **Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara**. Agropolitan Bolipamuso meliputi Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Poso; Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Tolitoli;
- Klaster Industri Morubang** meliputi sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara; dan
- Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju** meliputi sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Tojo Una-Una.



Gambar 3.33
Klaster Perwilayahan Provinsi Sulawesi Tengah

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastuktur wilayah sebagai upaya meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Upaya ini dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan tujuan penataan ruang Provinsi Sulawesi Tengah yaitu mewujudkan pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, sumber daya wilayah pesisir dan kelautan industri, pertahanan keamanan serta pariwisata yang produktif dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis mitigasi bencana.

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastuktur wilayah tersebut didapat ditempuh melalui: Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik Sulawesi Tengah. Serta Menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tengah dengan tata Kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar yang berkualitas. Pencapaian tersebut ditandai dengan **menurunnya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Sulawesi Tengah serta meningkatnya pelayanan dasar perumahan** (air minum, sanitasi layak, rumah layak



huni korban bencana, penanganan Kawasan kumuh dan ketersediaan listrik) **dan pekerjaan umum** (kemantapan jalan).

Berdasarkan hal tersebut di atas, arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Buol dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 adalah berada pada **Klaster Agropolitan** yaitu **Agropolitan Bolipamuso**. Agropolitan Bolipamuso meliputi **Kabupaten Buol**, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Poso. Adapun arah kebijakan dalam Pengembangan Agropolitan Bolipamuso, adalah:

- a. Hulu pengembangan pertanian berada di Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, sebagian Kabupaten Sigi, sebagian Kabupaten Parigi Moutong, dan sebagian Kabupaten Donggala;
- b. Hilir produksi pertanian berupa pengolahan hasil pertanian, Perkebunan dan perikanan serta pemasaran berada di pusat kegiatan yaitu: (1) Parigi Moutong sebagai agroindustri; dan Poso sebagai sentra agribisnis dan sentra agrowisata.
- c. Peningkatan aksesibilitas jalur Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan.

Jadi Kabupaten Buol pada arahan konsep kebijakan pengembangan Klaster Agropolitan Bolipamuso adalah sebagai **hulu pengembangan pertanian** Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan arahan pengembangan kewilayahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042.

3.2.4 Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Upaya Provinsi Sulawesi Tengah untuk berkontribusi dalam Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui pembangunan perwilayahan yang dielaborasi dari RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, kebutuhan pembangunan Sulawesi Tengah sebagai wilayah penunjang ekonomi IKN, dan upaya pengembangan Sulawesi Tengah untuk mencapai Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045.

Gambar berikut memperlihatkan arah kebijakan Klaster Perwilayahan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045.



Gambar 3.34

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 Berdasarkan 4 Klaster Perwilayahan Provinsi Sulawesi Tengah

Detail dari Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Indonesia Emas 2045 terdiri atas 3 Pilar yang merupakan satu kesatuan dalam pengembangan tiap wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Sulawesi Tengah sebagai Pusat Ekonomi Global KTI;
2. Sulawesi Tengah sebagai Penunjang Ekonomi IKN dan Industri Berbasis SDA;
3. Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Indonesia yang Hijau, Ekologis, dan Produktif.

Tabel berikut memperlihatkan penerapan 3 Pilar Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Indonesia Emas 2045.

Tabel 3.14

Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 untuk Indonesia Emas

	01. Kota Palu 02. Kabupaten Sigi 03. Kabupaten Donggala 04. Kabupaten Buol 05. Kabupaten Toli-Toli 06. Kabupaten Parigi Moutong 07. Kabupaten Poso



	08. Kabupaten Morowali 09. Kabupaten Morowali Utara 10. Kabupaten Banggai 11. Kabupaten Banggai Kepulauan 12. Kabupaten Banggai Laut 13. Kabupaten Tojo Una-Una

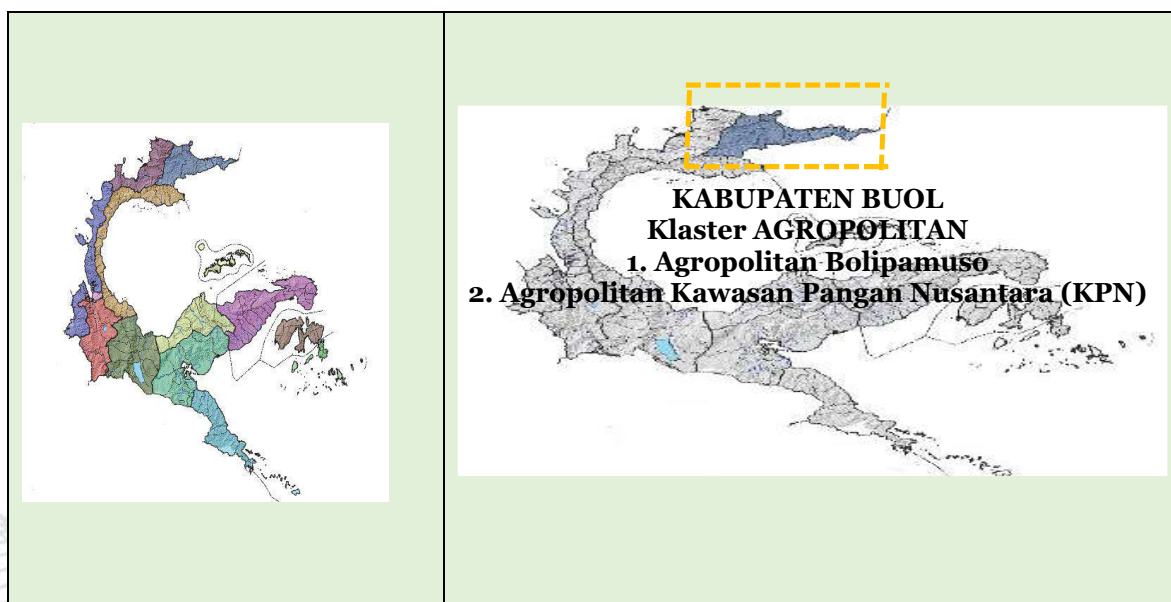
PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH SULTENG 2025-2045
1	SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI ● Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) ● Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan ● Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi ● Digitalisasi layanan publik ● Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Stabilitas ● Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi ● Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan ● Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana ● Produktivitas Agropolitan berbasis Pertanian Modern di BOLIPAMUSO, KPN Minapolitan BALATOJU Berkelanjutan ● Produktivitas Industri MORUBANG dan KEK PALU ● Metropolitan PASIGALA pusat layanan perkotaan dan ekonomi global ● <i>Geopark City</i> (Kota Taman Bumi) PASIGALA ● Layanan kesehatan, RS bertaraf internasional ● Layanan jasapendidikan bertaraf internasional ● Perdagangan dan jasa global ● Layanan jasa pariwisata skala global.
2	SULAWESI TENGAH sebagai PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Pengembangan • Kawasan-Kawasan Agropolitan dan Minapolitan dengan konsep Pertanian Modern dengan produk: tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan • Kawasan-Kawasan Industri yang produktif dan dan KEK dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup • Kawasan-Kawasan Pariwisata (KSP dan KPP).Produk: • Hasil pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan; Hasil industry berbasis SDA; Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata.
3	SULAWESI TENGAH sebagai WILAYAH INDONESIA YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH SULTENG 2025-2045
	Penerapan: Ekonomi hijau, ekonomi biru, dan bioekonomi; Mitigasi Bencana, Kota Hijau, dan Taman Bumi untuk pengembangan wilayah, kota yang aman, produktif dan berkelanjutan; pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan. Pengembangan: Industri dan penggunaan energi terbarukan; transportasi publik ramah lingkungan dan terintegrasi antar wilayah; Riset ekologi, pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, kebumihan dan kebencanaan bertaraf internasional; Riset khusus pengembangan perkebunan kapas dan industri tekstil Sulteng; Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan; Peningkatan luasan RTH Publik dan RTH Privat pekarangan masyarakat, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, mengembangkan hutan produksi; Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, dan Produktif; Peningkatan kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK; Penguatan karakter & jati diri sebagai wilayah yang hijau, ekologis, dan produktif.

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Buol dalam penerapan 3 Pilar Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Indonesia Emas 2045, dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15

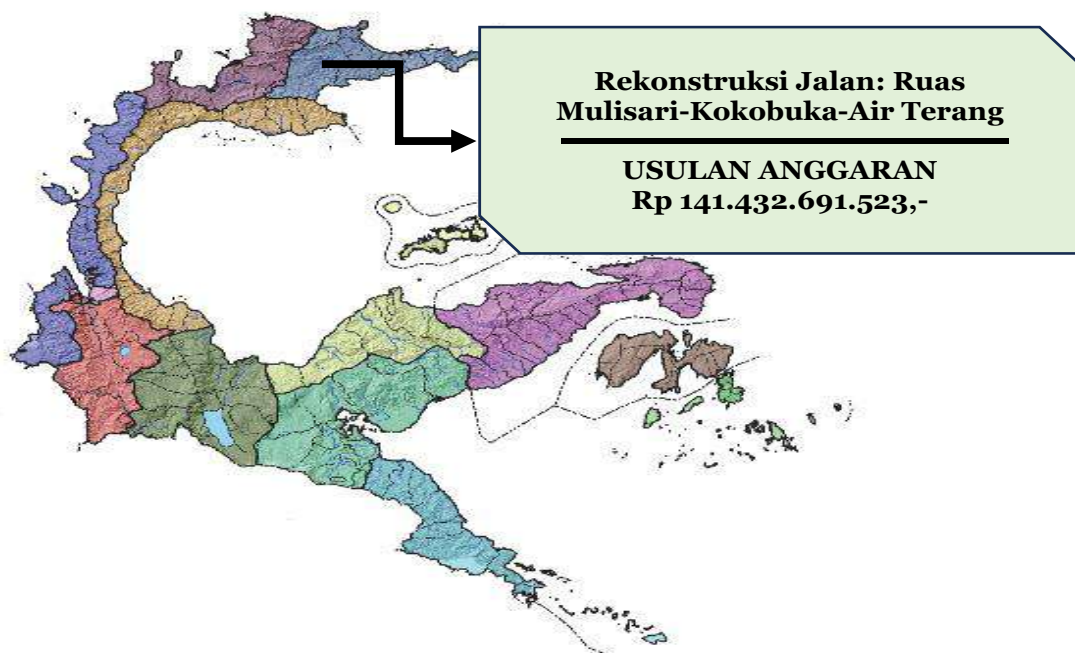
**Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Buol
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045**





PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH SULTENG 2025-2045
1	KABUPATEN BUOL Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (AGROPOLITAN (AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI, DAN PARIWISATA); Sekolah vokasi agribisnis pertanian, perikanan, peternakan)• Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan• Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kawasan Agropolitan berbasis pertanian moderen: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan • EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perikanan, peternakan,
2	KABUPATEN BUOL MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Suplai produk : Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, dan layanan pariwisata.
3	KABUPATEN BUOL SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU,EKOLOGIS, dan PRODUKTIF: • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Pengembangan Kota Hijau di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan • Penerapan mitigasi bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga •

	Transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi di Klaster Agropolitan BOLIPAMUSO • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas Kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura). Pengembangan Kebun Raya Buol • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.



Gambar 3.35

Usulan Paket Multi Years Contract Provinsi Sulawesi Tengah
Rekonstruksi Ruas Jalan Mulisari-Kokobuka- Air Terang Tahun 2026-2030

Kabupaten Buol ditetapkan sebagai daerah agropolitan karena memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama pada sektor pertanian. Kondisi geografis yang didominasi oleh lahan subur, ketersediaan air yang memadai, serta keanekaragaman komoditas unggulan seperti padi, jagung, kelapa, kakao, dan tanaman hortikultura, menjadikan Buol memiliki daya saing tinggi dalam pengembangan kawasan berbasis pertanian. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa sektor



pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buol, sehingga menjadi pilar utama dalam struktur ekonomi daerah.

Dengan dukungan potensi alam yang kuat dan peran strategis sektor pertanian dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, konsep agropolitan menjadi landasan pengembangan wilayah yang tepat. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Buol diarahkan untuk memperkuat sistem produksi, pengolahan, hingga distribusi hasil pertanian secara terpadu, sehingga mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Penetapan ini sekaligus menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjadikan Kabupaten Buol sebagai sentra agribisnis yang mandiri dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.

Dalam rangka mendukung implementasi program agropolitan di Kabupaten Buol, telah ditetapkan sejumlah wilayah yang menjadi fokus utama pengembangan karena memiliki potensi sumber daya alam yang unggul serta kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bukal, Kecamatan Momunu, Kecamatan Bokat, Kecamatan Paleleh, Kecamatan Bunobogu, dan Kecamatan Lakea.

Wilayah kecamatan ini dikenal sebagai sentra penghasil komoditas pertanian yang beragam, mulai dari tanaman pangan, perkebunan hingga hortikultura yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Kondisi lahan yang subur, ketersediaan air, serta dukungan infrastruktur dasar menjadi modal penting dalam pengembangan kawasan agropolitan yang terintegrasi. Selain itu, aktivitas ekonomi di wilayah ini memiliki dampak langsung terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Buol, khususnya dari sektor pertanian yang menjadi kontributor terbesar.

Dengan menjadikan ketujuh kecamatan tersebut sebagai lokus pengembangan, program agropolitan diharapkan mampu memperkuat rantai nilai agribisnis, meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta mendorong terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Langkah ini menjadi strategi penting untuk mewujudkan Kabupaten Buol sebagai daerah pertanian yang



maju, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2.4 Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah maka dibutuhkan serangkaian program daerah yang dirancang sesuai dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, serta diselaraskan dengan program prioritas provinsi dan nasional.

Pada kurun waktu 2025-2029, Kabupaten Buol juga mendapat prioritas kegiatan yang menunjang program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Beberapa rencana proyek strategis dan nasional yang berlokasi di Kabupaten Buol dan pemanfaatannya akan dirasakan masyarakat Buol. Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan diatas, menjadi sebuah amanat yang harus diprioritaskan.

Berikut ini disajikan Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 pada tabel, berikut:



Tabel 3.16
Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat RPJMD
Kabupaten Buol Tahun 2025-2029

NO.	MISI	TUJUAN	PRIORITAS DAERAH (PD)	PROGRAM PRIORITAS		PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT	
1	Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Mewujudkan Pembangunan Manusia Adaptif, Berakhlak Mulia, Unggul dan Berdaya Saing	BUOL HEBAT : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Adaptif, Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing	1	Penguatan Pendidikan, Sains, Teknologi dan Digitaisasi	1	Membangun Sekolah-Sekolah Unggul Terintegrasi dan Memperbaiki Sekolah-Sekolah Yang Perlu Renovasi
						2	Menfasilitasi Kerjasama Antara Pemda dengan Perguruan Tinggi dalam Bidang Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU)
				2	Menjamin tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat Buol, Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Masyarakat	3	Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Meningkatkan Status Rumah Sakit Pratama Pandangan
2	Meningkatkan Perekonomian Yang Kokoh Dan Inklusif Berbasis Potensi	Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang	BUOL MAKMUR : Pengembangan Perekonomian Daerah Yang Inklusif Berbasis	3	Mencapai Swasembada Pangan	4	Mencetak dan Meningkatkan Produktifitas Lahan Pertanian dengan



NO.	MISI	TUJUAN	PRIORITAS DAERAH (PD)	PROGRAM PRIORITAS		PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT	
	Sumber Daya Alam dan Digital	Berkualitas dan Berdaya Saing	Sumber Daya Alam dan Digitalisasi				Lumbung Pangan Desa
				4	Mengembangkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumberdaya Alam Unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi dan bereorientasi pasar	5	Percepatan Investasi berbasis SDA dan ketenagakerjaan dan industri
				5	Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani		
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Dengan Mengedepankan Prinsip <i>Good Governance And Clean Government</i>	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas	BUOL SIGAP: Pemantapan Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital	6	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	Percepatan Transformasi Digitalisasi Reformasi Birokrasi
				7	Pemantapan Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital		
4	Meningkatkan dan Memantapkan Sistem Ketentraman dan Ketertiban Daerah dan Stabilitas Makro Daerah	Mewujudkan Stabilitas dan Kondusifitas Daerah	BUOL NYAMAN : Penguatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Daerah yang Kondusif dan Stabilitas Makro Daerah	8	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Daerah dan Pemeliharaan Hubungan Antar Daerah Yang Kondusif	7	Penertiban Hewan Ternak guna menjamin Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan



NO.	MISI	TUJUAN	PRIORITAS DAERAH (PD)	PROGRAM PRIORITAS		PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT	
				9	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
				10	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba		
5	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	BUOL HARMONI : Memperkuat Penyelarasan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Budaya Yang Harmonis	11	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	8	Rembuk Budaya
				12	Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah		
				13	Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif		
				14	Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak		
6	Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Perdesaan Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Merata yang dan Berkeadilan	BUOL MERATA : Percepatan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Perdesaan dan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	15	Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk masyarakat Perdesaan / Perkotaan dan Rakyat yang membutuhkannya	9	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, dan Menjamin Penyediaan Rumah Layak Huni Bersanitasi Baik Bagi Masyarakat.
				16	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM, BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan		



NO.	MISI	TUJUAN	PRIORITAS DAERAH (PD)	PROGRAM PRIORITAS		PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT	
					Merah Putih Melalui Program Kredit Usaha		
7	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dan Sarana - Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah dan Antar Sektor	BUOL LANCAR : Pengembangan dan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Sarana Prasarana Daerah	17	Meningkatkan dan melanjutkan pembangunan Infrastruktur publik	10	Meningkatkan Infrastruktur Jalan Dalam Kota dan Buol Terang



Adapun keselarasan program – program prioritas nasional dan provinsi Sulawesi Tengah, baik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat diselaraskan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Kabupaten Buol

17 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		17 PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN BUOL	
1	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	1	Penguatan Pendidikan, Sains, Teknologi dan Digitalisasi
2	Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	2	Menjamin tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat Buol, Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Masyarakat
3	Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi	3	Mengembangkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumberdaya Alam Unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi dan bereorientasi pasar
4	Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	4	Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
5	Pemberantasan Kemiskinan	5	Pemantapan Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital
6	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
7	Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia.: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Daerah dan Pemeliharaan Hubungan Antar Daerah Yang Kondusif
8	Penguatan Pendidikan, Sains dan Teknologi serta Digitalisasi	8	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
9	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	9	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
10	Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak serta Penyandang Disabilitas	10	Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah



17 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		17 PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN BUOL	
11	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	11	Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif
12	Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih dan Pestisida Langsung Ke Petani	12	Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak
13	Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas, Terjangkau, Bersanitasi Baik Untuk Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dan Rakyat Yang Membutuhkan	13	Mencapai Swasembada Pangan
14	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya	14	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup
15	Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Untuk Membuka Lapangan Kerja Yang Seluas-Luasnya Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	15	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM, BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Melalui Program Kredit Usaha
16	Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah	16	Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk masyarakat Perdesaan / Perkotaan dan Rakyat yang membutuhkannya
17	Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Prestasi Olahraga	17	Meningkatkan dan melanjutkan pembangunan Infrastruktur publik

Tabel 3.18
Program Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah dan
Program Prioritas Kabupaten Buol

14 PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SULAWESI TENGAH		17 PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN BUOL	
1	Peningkatan infrastruktur Pendidikan	1	Penguatan Pendidikan, Sains, Teknologi dan Digitalisasi



14 PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SULAWESI TENGAH			17 PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN BUOL
2	Menjamin Pendidikan kesetaraan	2	Menjamin tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat Buol, Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Masyarakat
3	Peningkatan kapasitas tenaga pengajar	3	Mengembangkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumberdaya Alam Unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi dan bereorientasi pasar
4	Penguatan Riset, Teknologi dan Digitalisasi	4	Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
5	Peningkatan kualitas Pendidikan keagamaan	5	Pemantapan Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital
6	Peningkatan sapsas dan kualitas layanan Kesehatan	6	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
7	Sulteng peduli stunting	7	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Daerah dan Pemeliharaan Hubungan Antar Daerah Yang Kondusif
8	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga kesehatan	8	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
9	Peningkatan daya saing sektor unggulan daerah	9	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
10	Menjamin ketersediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan BUMDES	10	Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah
11	Menjaga kelestarian kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif	11	Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif
12	Membangun keseimbangan ekonomi dan iklim investasi yang kondusif	12	Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak
13	Meningkatkan dan melanjutkan pembangunan Infrastruktur publik	13	Mencapai Swasembada Pangan
14	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berkualitas	14	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup
		15	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM, BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Melalui Program Kredit Usaha



14 PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SULAWESI TENGAH		17 PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN BUOL	
		16	Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk masyarakat Perdesaan / Perkotaan dan Rakyat yang membutuhkannya
		17	Meningkatkan dan melanjutkan pembangunan Infrastruktur publik

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) *Quick Wins* Nasional

Visi Presiden periode 2025 – 2029 adalah “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi tersebut dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam **8 (Delapan) Asta Cita**. Asta Cita tersebut memuat **17 Program Prioritas Presiden** yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa **Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins**. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Adapun Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) *Quick Wins* tersebut disandingkan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kabupaten Buol, dapat dilihat pada gambar berikut:

PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT NASIONAL		PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT KABUPATEN BUOL	
1	Memberi Makan Siang dan Susu Gratis di Sekolah dan Pesantren serta Bantuan Gizi untuk Balita dan Ibu Hamil	1	Membangun Sekolah-Sekolah Unggul Terintegrasi dan Memperbaiki Sekolah-Sekolah Yang Perlu Renovasi
2	Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten	2	Menfasilitasi Kerjasama Antara Pemda dengan Perguruan Tinggi dalam Bidang Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU)
3	Mencetak dan Meningkatkan Produktifitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah dan Nasional	3	Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Meningkatkan Status Rumah Sakit Pratama Pandangan
4	Membangun Sekolah-Sekolah Unggul Terintegrasi di Setiap Kabupaten dan Memperbaiki Sekolah-Sekolah Yang Perlu Renovasi	4	Mencetak dan Meningkatkan Produktifitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa
5	Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu_Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha Untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut	5	Percepatan Investasi berbasis SDA; ketenagakerjaan dan industri; membangun Balai Latihan Kerja (BLK)
6	Menaikkan Gaji ASN (Terutama Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh), TNI/POLRI dan Pejabat Negara	6	Percepatan Transformasi Digitalisasi Reformasi Birokrasi
7	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik Untuk Yang Membutuhkan, Terutama Generasi Milenial, Generasi Z dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	7	Penertiban Hewan Ternak guna menjamin Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan
8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan Meningkatkan Rasio Penerimaan Negara Terhadap Produk Domestik Bruto Ke 23 %	8	Pelestarian Kebudayaan (Rembuk Budaya)
		9	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, dan Menjamin Penyediaan Rumah Layak Huni Bersanitasi Baik Bagi Masyarakat.
		10	Meningkatkan Infrastruktur Jalan Dalam Kota dan Buol Terang

Gambar 3.36

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) *Quick Wins* Nasional dan Kabupaten Buol

Kegiatan Prioritas Utama

Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini juga disusun dengan memerhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan *stakeholders* lainnya.

Indikasi Kegiatan Prioritas Utama yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR.
2. Penguatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut.
3. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Yang Berkualitas (PHTC).



4. Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan.
5. Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir.
6. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) / Lumbung Pangan Lainnya.
7. Pengembangan Pangan Aquatik (Blue Food)
8. Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU.
9. Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.
10. Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (e.g. pelatihan, in -service training), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja.
11. Penurunan Kematian Ibu dan Anak.
12. Konservasi Sumber Daya Air

Adapun Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) *Quick Wins* Kabupaten Buol disandingkan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat pada gambar berikut:

PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT PROVINSI SULAWESI TENGAH		PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT KABUPATEN BUOL	
1	Peningkatan kualitas SDM melalui pelaksanaan program Nambaso (Anak Miskin Bisa Sekolah)	1	Membangun Sekolah-Sekolah Unggul Terintegrasi dan Memperbaiki Sekolah-Sekolah Yang Perlu Renovasi
2	Peningkatan kualitas tenaga pengajar	2	Memfasilitasi Kerjasama Antara Pemda dengan Perguruan Tinggi dalam Bidang Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU)
3	Digitalisasi pendidikan	3	Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Meningkatkan Status Rumah Sakit Pratama Pandangan
4	Jaminan layanan kesehatan melalui Program "Naseha Kami"	4	Mencetak dan Meningkatkan Produktifitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa
5	Sulteng peduli stunting	5	Percepatan Investasi berbasis SDA; ketenagakerjaan dan industri; membangun Balai Latihan Kerja (BLK)
6	Ketenagakerjaan dan industri	6	Percepatan Transformasi Digitalisasi Reformasi Birokrasi
7	Peningkatan kapasitas LKM Desa	7	Penertiban Hewan Ternak guna menjamin Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan
8	Birokrasi yang berkualitas dengan menjunjung tinggi budaya kearifan lokal dan nilai religius	8	Pelestarian Kebudayaan (Rembuk Budaya)
		9	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, dan Menjamin Penyediaan Rumah Layak Huni Bersanitasi Baik Bagi Masyarakat.
		10	Meningkatkan Infrastruktur Jalan Dalam Kota dan Buol Terang

Gambar 3.37
Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) *Quick Wins* Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Buol



3.4 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Program prioritas merupakan intisari dari semangat dan substansi RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029. Dengan demikian program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.19
Program Pembangunan Daerah

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
1	Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Mewujudkan Pembangunan Manusia Adaptif, Berakhlak Mulia, Unggul dan Berdaya Saing		INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Perlindungan Sosial Yang Adaptif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
2	Meningkatkan Perekonomian Yang Kokoh Dan Inklusif Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Digital	Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
				Pendapatan per Kapita (Rp)
			Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk	Indeks Inovasi Daerah
				Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
			pengembangan komoditas unggulan	Pengembangan Pariwisata (Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%))
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)
			Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD
			Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
			Penerapan Ekonomi Hijau berbasis Keunggulan Wilayah.	Indeks Ekonomi Hijau
			Meningkatnya digitalisasi di sektor strategis	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Dengan Mengedepankan Prinsip <i>Good Governance And Clean Government</i>	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas		Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya kualitas Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel dan Adaptif	Indeks SPBE
				Indeks Pelayanan Publik
				Indeks Integritas Daerah
				Opini Laporan Keuangan BPK
				Indeks Perencanaan Pembangunan
				Tingkat Digitalisasi Kerasipan
				Indeks Kualitas Kebijakan



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
				Nilai SAKIP
				Nilai Maturitas SPIP
			Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan masyarakat	Indeks Sistem Merit
				Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang
4	Meningkatkan dan Memantapkan Sistem Ketentraman dan Ketertiban Daerah dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Mewujudkan Stabilitas Makro Ekonomi Daerah dan Kondusivitas Daerah		TINGKAT INFLASI DAERAH (%)
			Meningkatnya Kualitas Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Daerah serta Demokrasi Substansial	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)
				Indeks Reformasi Hukum
				Indeks Demokrasi Daerah
			Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
				Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
				Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan
			Meningkatnya Diplomasi dan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah MoU dan PKS Antara Pemerintah Daerah



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
5	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
			Meningkatnya Moderasi Beragama dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
				Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
			Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
				Indeks Perlindungan Anak
				Indeks Pembangunan Gender
				Indeks Pembangunan Pemuda
				Persentase Penurunan Emisi GRK (%)
			Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)
			Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)
6	Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Perdesaan Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan		GINI RASIO
				Persentase Tingkat Kemiskinan
			Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
			Meningkatnya Perkotaan (Kecamatan) sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Proporsi PDRB Kecamatan Terhadap PDRB Kabupaten (%)
			Meningkatnya pembangunan kemandirian	Persentase Desa Mandiri (%)
			pcrdesaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Desa Membangun (%)
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Komoditas Pangan dan Non Pangan	Purchasing Power Parity (PPP)
			Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)
7	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dan Sarana - Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah dan Antar Sektor		INDEKS LAYANAN INFRASTRUKTUR DAERAH
			Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Persentase jalan yang telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan
			Meningkatnya Pelayanan Moda Transportasi	Tingkat ketersediaan moda transportasi untuk digunakan
				Persentase wilayah yang terlayani oleh suatu moda transportasi.
			Meningkatnya Komsumsi Listrik per Kapita	Persentase Komsumsi Listrik per Kapita
			Meningkatnya Layanan Sanitasi Aman Berkelanjutan dan Inklusi	Persentase Capaian Penanganan Sampah Perkotaan



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
				Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air berkelanjutan dan inklusif	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
				Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik (%)
			Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Daerah	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB

Penentuan program prioritas juga memperhatikan poin-poin penting janji politik kepala daerah terpilih. Bupati Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 menterjemahkan Visi dan Misinya melalui program dan janji politisnya sebagai berikut:



Tabel 3.20
Misi, Tujuan, Sasaran, Outcome, Indikator dan Program Prioritas Kabupaten Buol Tahun 2025-2029

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
1	Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Mewujudkan Pembangunan Manusia Adaptif, Berakhlak Mulia, Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan		Indeks Pembangunan Manusia	
					Indesk Pendidikan	
				Meningkatnya keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan kesetaraan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Terimplementasinya kurikulum muatan lokal yang memperkuat karakter, budaya, dan potensi peserta didik berbasis kearifan lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
				Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang merata dan berkualitas pada seluruh jenjang pendidikan	Persentase guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
				Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang berizin dan memenuhi standar layanan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
				Meningkatnya kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan bahasa dan sastra daerah dalam penguatan literasi dan pengembangan karakter peserta didik	Persentase Pengembangan bahasa dan Sastra	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
				Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Stnadar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
				Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan		Angka Usia Harapan Hidup	
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Meningkatnya mutu dan distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan (%)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Perlindungan Sosial Yang Adaptif	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
				Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	
					Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Meningkatnya Pekerja Indonesia Yang Terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
					Laju Pertumbuhan Ekonomi	
2	Meningkatkan Perekonomian Yang Kokoh Dan Inklusif	Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang			Pendapatan Perkapita	



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
	Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Digital	Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan		Indeks Inovasi Daerah	
					Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	
					Pengembangan Pariwisata (Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%))	
					Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	
				Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				Terlaksanannya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Kecil yang Memperoleh Fasilitasi dan Sertifikasi Usaha (%)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif		Pertumbuhan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
						KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD		Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD	
				Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
				Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
				Terlaksannya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
				Terlaksananya pertumbuhan UKM	Jumlah pertumbuhan UMKM pangan lokal binaan (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				Terlaksananya Pengembangan UMKM	Update dan pengumpulan Data UMKM (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			Menurunnya Tingkat Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	
				Menigkatnya Pekerja Indonesia Yang Terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
				Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
				Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
				Menigkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			Penerapan Ekonomi Hijau berbasis Keunggulan Wilayah.		Indeks Ekonomi Hijau	
				Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi komoditas pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
					Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Kg)	
				Terlindunginya lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan daerah	Cakupan luas lahan pertanian/perkebunan yang ditetapkan menjadi LP2B (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				Terjaganya kesehatan hewan dan keamanan produk hewan untuk mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
				Meningkatnya upaya mitigasi terhadap bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian/perkebunan (%)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
					Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian/perkebunan (%)	
				Terciptanya iklim investasi dan usaha pertanian yang kondusif dan berkelanjutan	Persentase Izin Usaha/Rekomtek Pertanian/Perkebunan yang diterbitkan (%)	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
				Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
				Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
				Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya digitalisasi di sektor strategis		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
				Meningkatnya penerapan e-government melalui pemanfaatan aplikasi informatika yang terintegrasi dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan	Persentase aplikasi layanan pemerintahan daerah yang terintegrasi dalam sistem informasi berbasis SPBE dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (%)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
				mengedepankan prinsip good governance and clean government		
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Dengan Mengedepankan Prinsip <i>Good Governance And Clean Government</i>	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas	Meningkatnya kualitas Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel dan Adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
					Indeks SPBE	
					Indeks Pelayanan Publik	
					Indeks Integritas Daerah	
					Opini Laporan Keuangan BPK	
					Nilai Sakip	
					Tingkat Digitalisasi Kerasipan	
					Indeks Kualitas Kebijakan	
					Nilai Maturitas SPIP	
				Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (%)	



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
				Meningkatnya penerapan e-government melalui pemanfaatan aplikasi informatika yang terintegrasi dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan mengedepankan prinsip good governance and clean government	Persentase aplikasi layanan pemerintahan daerah yang terintegrasi dalam sistem informasi berbasis SPBE dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (%)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
				Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 Hari yang Memiliki KIA (%)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
					Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga (KK) (%)	
					Persentase Penduduk yang Telah Melakukan Perekaman KTP-el (%)	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Angka Usia 0-17 Tahun kurang 1 Hari yang Memiliki Akta Kelahiran (%)	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
					Persentase Penduduk yang Meninggal memiliki Akta Kematian (%)	



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
				Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Ketersediaan Database kependudukan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
				Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah secara tepat waktu, akuntabel, dan efisien dalam rangka mendukung penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah yang berkualitas	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, akurat, dan akuntabel sebagai dasar dalam penyajian nilai aset yang sesuai pada neraca daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
				Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Pada Perangkat Daerah (%) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran N-1 Pada Perangkat Daerah (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
					Persentase Pemenuhan Dokumen Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada 2 Elemen (%)	
				Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi (%)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
				Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
				Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
			Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan masyarakat		Indeks Sistem Merit	
					Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	
					Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang	
				Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
				Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	PROGRAM KEBIJAKAN PELAYANAN PENGANDAAAN BARANG DAN JASA
4	Meningkatkan dan Memantapkan Sistem Ketentraman dan Ketertiban Daerah dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Mewujudkan Stabilitas Makro Ekonomi Daerah dan Kondusivitas Daerah	Meningkatnya Kualitas Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Daerah		Tingkat Inflasi Daerah	
					Indeks Reformasi Hukum	
					Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di	



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
			serta Demokrasi Substansial		Area Tempat Tinggalnya (%)	
					Indeks Demokrasi	
				Cakupan layanan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Yang Terdaftar (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
				Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
				Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
				Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang diTegakkan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	
					Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	
					Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan	
				Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah secara tepat waktu, akuntabel, dan efisien dalam rangka mendukung penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
				pelaporan keuangan daerah yang berkualitas		
				Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, akurat, dan akuntabel sebagai dasar dalam penyajian nilai aset yang sesuai pada neraca daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
				Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Meningkatnya Diplomasi Kerjasama Daerah dan Antar		Jumlah MoU dan PKS Antara Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	PROGRAM PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH
					Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	
5	Memperkuat penyelarasan				Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
	kehidupan harmonis dengan lingkungan, dan budaya yang dengan alam	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Moderasi Beragama dan Berkebudayaan Maju		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	
				Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusi		Indeks Perlindungan Anak	
					Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	
					Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
					Indeks Pembangunan Pemuda	
				Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase keluarga dengan ketahanan keluarga kategori baik (%)	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
				Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pengembangan	Persentase peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan berdasarkan bidang strategis (politik, ekonomi, sosial) (%)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
				Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani secara komprehensif (%)	Program Perlindungan Perempuan
				Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak dalam situasi khusus yang mendapatkan layanan perlindungan sesuai standar (%)	Program Perlindungan Khusus Anak
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Persentase Penurunan Emisi GRK	
				Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
					Indeks Kualitas Udara	
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
			Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	
					Indeks Ketahanan Pangan Daerah	
				Meningkatnya ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan pokok dan strategis di tingkat daerah	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
				Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
					Jumlah pertumbuhan UMKM pangan lokal binaan	
					Jumlah rata-rata konsumsi energi (kkal) per kapita per hari	
					Jumlah desa pembinaan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	
					Indeks Resiko Bencana	



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
			Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
					Persentase Tanggap Darurat Bencana	
					Persentase Penanganan Pasca Bencana	
6	Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Perdesaan Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Merata Berkeadilan yang dan			Gini Rasio	
					Persentase Tingkat Kemiskinan	
			Meningkatnya akses hunian terjangkau, layak, dan berkelanjutan		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	
				Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase Warna Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan
				Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Perumahan dan Kawasan Kumuh di bawah 10Ha yang ditangani	
				Meningkatnya Perkotaan (Kecamatan) sebagai	Proporsi PDRB Kecamatan Terhadap PDRB Kabupaten (%)	



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
			Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Terlaksannya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
				Terlaksannya Pertumbuhan UKM	Jumlah pertumbuhan UMKM pangan lokal binaan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya pembangunan kemandirian perdesaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		Persentase Desa Mandiri (%)	
					Indeks Desa Membangun (%)	
				Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat Desa serta Kemandirian Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	Program Penataan Desa
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Komoditas Pangan dan Non Pangan		Purchasing Power Parity (PPP)	
				Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi komoditas pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
					Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Kg)	
				Terlindunginya lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk	Cakupan luas lahan pertanian/perkebunan yang ditetapkan menjadi LP2B (%)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
				mendukung ketahanan pangan daerah		
			Mempercepat pengurangan kemiskinan peningkatan pemerataan dan		Tingkat Kemiskinan Ekstrim (%)	
				Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Program Pemberdayaan Sosial
				Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
					Jumlah pertumbuhan UMKM pangan lokal binaan (%)	
					Jumlah rata-rata konsumsi energi (kkal) per kapita per hari (Kkal/Kapita/Hari)	
					Jumlah desa pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (Desa/Kelurahan)	
7	Meningkatkan Pelayanan	Mewujudkan Pelayanan			Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
	Infrastruktur Dan Sarana - Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan	Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah dan Antar Sektor	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Yang Berkelanjutan		Persentase jalan yang telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.	
				Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Meningkatnya Akseibilitas Masyarakat yang Aman dan Nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
			Meningkatnya Pelayanan Modal Transportasi		Tingkat ketersediaan moda transportasi untuk digunakan	
					Persentase wilayah yang terlayani oleh suatu moda transportasi.	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Darat	Persentase Layanan Angkutan Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Meningkatnya Konsumsi Listrik per Kapita		Persentase Persentase Konsumsi Listrik per Kapita	
				Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
			Meningkatnya Layanan Sanitasi Aman Berkelanjutan dan Inklusi		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	
					Persentase Capaian Penanganan Sampah Perkotaan	
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Limbah		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air berkelanjutan dan inklusif		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	
					Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Irigasi		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
					Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	
			Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Daerah		Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan	



NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
	"MEWUJUDKAN BUOL AGAMIS, SEBAGAI DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"					
					Luas Wilayah Ber HPL/HGB	
				Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya



Tabel 3.21
Integrasi Janji Politik dengan Program Nomenklatur

MISI		Program Unggulan (Janji Kampanye)	Nomenklatur Program Kepmendagri	Penanggung Jawab OPD
Misi 1	Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Pengembangan suasana hidup toleransi beragama	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program bantuan perbaikan dan pembangunan rumah ibadah		
		Pengembangan budaya tertib dan mengedepankan kearifan lokal	Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan pusat seni dan budaya		
		Penyediaan pusat kegiatan dan pengembangan bakat dan minat kaum muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Memfasilitasi pemuda, pelajar, mahasiswa dan warga masyarakat berprestasi		
Misi 2	Meningkatkan Perekonomian Yang Kokoh Dan Inklusif Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Digital	Masyarakat pro-aktif dan tanggap dalam mengantisipasi setiap peluang yang ada	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Menjaga ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan		
		Produk peraturan/regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan kerja sama antara lembaga, daerah dan wilayah serta pihak swasta baik domestik maupun luar negeri	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



MISI		Program Unggulan (Janji Kampanye)	Nomenklatur Program Kepmendagri	Penanggung Jawab OPD
		Pengembangan jaringan kerja sama ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan		
		Peningkatan produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pertanian dan Pangan
Misi 3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Dengan Mengedepankan Prinsip <i>Good Governance And Clean Government</i>	Kelembagaan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Konsep peran baru pemerintahan daerah yang katalistik, yang diuraikan secara jelas dan disepakati oleh stakeholders pemerintahan		
		Pedoman organisasi dan tatalaksana, profil perangkat daerah, uraian tugas, uraian jabatan, dan rumpun jabatan yang jelas dan memenuhi kebutuhan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah
		Instrumen penilaian kinerja dan kompetensi jabatan yang implementatif;		
		Aparatur pemerintah yang dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat maupun kondisi global		
		Aparat pemerintah yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan paradigma		
		Sistem kepegawaian yang mantap, teruji dan menjamin penjenjangan karir pegawai secara sehat		
		Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah		



MISI		Program Unggulan (Janji Kampanye)	Nomenklatur Program Kepmendagri	Penanggung Jawab OPD
		Konsep peningkatan kemampuan masyarakat dalam persaingan global	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Produk peraturan/regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat		
		Peluang partisipasi masyarakat yang dapat dijangkau (accessible)		
Misi 4	Meningkatkan dan Memantapkan Sistem Ketentraman dan Ketertiban Daerah dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Mewujudkan peningkatan peran dan partisipasi pemuda dalam Pembangunan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Terwujudnya peningkatan kualitas generasi muda yang sehat jasmani rohani dan berdaya saing		
		Meningkatkan daya saing masyarakat melalui pengembangan keterampilan dan teknologi		
		Terbangunnya dasar dan fondasi bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan eksistensi adat, budaya, kearifan lokal yang dapat mewarnai dan menjadi spirit dalam berbagai aktivitas pembangunan		
		Mewujudkan peningkatan taraf Kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan serta pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan untuk seluruh masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan jangkauan dan intensitas pelayanan KB	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian



MISI		Program Unggulan (Janji Kampanye)	Nomenklatur Program Kepmendagri	Penanggung Jawab OPD
		Mewujudkan penataan kependudukan dan catatan sipil		Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Mewujudkan pengarusutamaan gender dan keluarga sejahtera berkualitas	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
Misi 5	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya	Revitalisasi UMKM dengan mempermudah akses permodalan, mekanisme kinerja kelembagaan UMKM, akses pasar dan jaminan ketersediaan transportasi	Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Pengembangan daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna		
		Pengembangan pasar regional dan internasional serta menjaga kesinambungan pasar yang sudah ada		
		Mantapnya manajemen pariwisata mendukung pengembangan ekonomi lokal		
		Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi penyiapan tenaga kerja siap pakai	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Kemudahan pelayanan perizinan diseluruh tingkatan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Penanaman



MISI		Program Unggulan (Janji Kampanye)	Nomenklatur Program Kepmendagri	Penanggung Jawab OPD
				Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Masyarakat yang pro-aktif dan tanggap dalam mengantisipasi peluang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Misi 6	Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Perdesaan Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah secara konsisten	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Terwujudnya peningkatan ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata		
		Terwujudnya pemukiman layak huni	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Pengembangan sistem transportasi dan telekomunikasi yang handal dan efisien	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		Terwujudnya peningkatan ketersediaan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara guna memperlancar arus orang dan barang	Program Pengelolaan Penerbangan, Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan	Program Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Dinas Lingkungan Hidup



MISI		Program Unggulan (Janji Kampanye)	Nomenklatur Program Kepmendagri	Penanggung Jawab OPD
		Terwujudnya kewaspadaan dini terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Misi 7	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dan Sarana - Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan	Meningkatkan penguatan integritas partai politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penguatan dukungan dalam pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal, khususnya di kawasan industri baru		
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer Keuangan Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Penguatan pengendalian inflasi daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian



MISI	Program Unggulan (Janji Kampanye)	Nomenklatur Program Kepmendagri	Penanggung Jawab OPD
			dan Perdagangan

Tabel 3.22

Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Buol

NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
BERANI CERDAS							
	Pendidikan	Rata rata lama sekolah	9,04 (2024) 9,80 (2025) 10,38 (2030)	9,20 (2024) 9,80 - 10,00 (2025) 14,00 (2030)	- Tidak terdapat pungutan bagi SMA/SMK/SLB Negeri dan swasta - Gratis Pembiayaan SPP SMA/SMK/SLB swasta (khusus siswa Miskin) - Memberikan bantuan Seragam Sekolah SMA/SMK/SLB bagi siswa miskin - Pembiayaan Pendidikan Kesetraaan Program Paket C 25 Tahun ke atas	- Gratis Pembiayaan PAUD/SD/SMP Negeri (tidak ada pungutan) - Gratis Pembiayaan SPP PAUD/SD/SMP swasta (khusus siswa Miskin) - Memberikan bantuan Seragam Sekolah maupun bantuan Perlengkapan Peserta Didik berupa Alat Tulis, Sepatu dan Tas bagi siswa miskin. - Pembiayaan Pendidikan Kesetraaan Program Paket A/B/C (Pendataan Peserta Didik Putus Sekolah 7-18 Tahun Kewenangan Kabupaten, 19-21 Kewenangan Pusat	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
						Terdapat 3 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Buol (Kec. Bokat, Gadung dan Tiloan). - Pembentukan PKBM baru berdasarkan Data Angka Putus Sekolah yang Tinggi (Kec. Biau).	
		Harapan Lama Sekolah	13,34 (2024) 13,50 (2025) 13,64 (2030)	13,18 (2024) 13,90 (2025) 15,00 (2030)	- Pembiayaan biaya prakerin untuk SMK - Biaya Uji Kompetensi untuk SMK - Beasiswa Perguruan Tinggi bagi mahasiswa miskin dan mahasiswa berprestasi - Menyiapkan makan minum di SLB	- Bantuan Pendidikan dalam Penyelesaian Studi Akhir - Prodi yang direncanakan oleh Pemkab Buol di Prioritaskan untuk guru Paud dan SD (Kerjasama tahun 2025 dengan Universitas Tadulako melalui PKSDU). - Menyiapkan mobil untuk antar jemput anak sekolah dan makan minum di SLB	
	Pelatihan Vokasional Siap Kerja Bagi Milenial Gen Z	Wira Usaha Baru	1.500 WUB	35 - 200 WUB	- Peningkatan Pelatihan Kompetensi Bagi Milenial Gen Z di BBPVP (Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas)	- Pelatihan Peningkatan Kompetensi Bagi Milenial Gen Z di BLK Pogogul Buol	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
				25 LPK	- Peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) - Mendorong Penciptaan Wirausaha Baru (WUB) - Job Fair	- Pengadaan sarana prasarana Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) - Penciptaan dan Peningkatan WUB - Pelaksanaan Bursa Kerja	
BERANI SEHAT							
	Kesehatan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi	98 (2024) 99.5 (2025) 99.5 (2030) 80 % keaktifan	98,09 (2024) 100 (2025) 100 (2030) 80 % keaktifan	Membiayai peserta sebanyak 1.352 dalam pembiayaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Provinsi Dan Provinsi Membiayai iuran PBI masyarakat Kabupaten Buol 81.731 jiwa. atau senilai Rp. 2.574.811.200	- Untuk tetap mempertahankan kepesertaan 98% dan keaktifan 80%	
		- Usia Harapan Hidup	69,98 (2024) 71,64 (2025) 73 (2030)	71,30 (2024) 71,35 (2025) 71,50 (2030)	- Pembinaan dan pelatihan tenaga kesehatan - Pelatihan 25 Kompetensi Dasar yang wajib dilakukan oleh Kader Posyandu (di Kabupaten). - Pelatihan Peningkatan SDM bagi Petugas UGD penanganan Bayi dan Balita di Fasilitas	- Menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui intervensi kecukupan imunisasi lengkap serta pemeriksaan kehamilan - Mendukung Pelatihan Kader Posyandu 25 Kompetensi Dasar (tingkat Kecamatan) - Menyiapkan Data Peserta FKLTP.	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
					Kesehatan Layanan Tingkat Pertama (FKLTP).	- Sosialisasi ASI Eksklusif di 11 Kecamatan.	
					- Pengadaan alat Antropometri 95 Paket.	- Melakukan Pengukuran	
		- Stunting	26,1 (2024) 23,9 (2025) 21,9 (2030)	36,9 (2024) 30 (2025) 20,1 (2030)	- Mendorong komitmen penurunan stunting dengan melaksanakan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui aksi konvergensi tingkat kecamatan, kabupaten dan Provinsi melalui perencanaan, implementasi melalui penandaan dalam SIPD serta melakukan inovasi lintas sektor	- Mendorong komitmen penurunan stunting dengan melaksanakan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui 4 aksi konvergensi Analisis Situasi, Penguatan perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Sararan.	
		- SPM Kesehatan	89% (2024) 100% (2025) 100% (2030)	82,35% (2024) 100% (2025) 100% (2030)	1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana daerah provinsi, dan	- Pencapaian SPM Kesehatan dengan kewenangan Kabupaten dengan pembiayaan melalui dana BOK dan DAU Earmark.	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
					2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi.	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil. 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin. 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir. 4. Pelayanan kesehatan balita. 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif. 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut. 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi. 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus. 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis. 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.	
		Ketersediaan Sumberdaya Kesehatan di Rumah Sakit/puskesmas	Lengkap (Rumah Sakit Provinsi)	- 50% (Lengkap rumah sakit) Dokter spesialis anak,	Melakukan Fasilitasi Kekurangan Tenaga Kesehatan Ke kementerian Kesehatan.	Pemkab dapat merekrut dan penambahan insentif daerah untuk Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang ditempatkan di pelayanan primer	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
				Anestesi, Bedah, Obgin, Patologi Klinik, Penyakit Dalam, Radiologi masing2 1 dokter spesialis - 30,77% (Nakes lengkap puskesmas) - Melengkapi tenaga kesehatan di Puskesmas (Dokter 3, Dokter Gigi 7, Farmasi 1, Gizi 2, Kesling 1, Kesmas 1)		(puskesmas). Sesuai dengan sistem informasi sumberdaya kesehatan. Selama ini penugasn khusus ditempatkan oleh Pusat, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bisa dilakukam pemenuhan penugasan khusus oleh daerah dengan pembiayaan daerah masing-masing. Saat ini untuk pelaksanaan penugasan khusus dengan pembiayaan daerah sedang dibuatkan surat edaran Menteri. Masih proses pembahasan oleh pimpinan di Kementerian Kesehatan.	
BERANI SEJAHTERA							
	Sosial	Tingkat Kemiskinan	11,04 (2024) 11,06 – 11,56 (2025) 6,10-7,00 (2030)	13,08%(2024) 12,45% (2025) 9,46% (2030)	- Program Bantuan Sosial Pangan Daerah (Bansos bertujuan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam konsumsi pangan di Sulawesi	Diharapkan program yang sama dapat dilaksanakan seperti kegiatan prioritas Provinsi	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
					Tengah. Penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia dalam keluarga miskin menggunakan data DTSEN. Target Desil 1-2 Kemiskinan ekstrem (2026- 2030) UEP Graduasi - Intervensi melalui Bantuan usaha Ekonomi Produktif UEP Graduasi dimana merupakan bantuan intervensi melalui sasaran Masyarakat miskin, penyandang disabilitas produktif dan lanjut usia potensial dalam mengembangkan usaha menuju kemandirian ekonomi dan keluar dari kemiskinan Besar. Bantuan bantuan sarana usaha perorangan atau keluarga rentan miskin (desil 4) Target Desil 4 (2026-2030) KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Target Desil 3-4 (2026-2030)	UEP Graduasi diharapkan program yang sama dapat dilaksanakan seperti kegiatan prioritas Provinsi untuk penanganan kemiskinan - Intervensi melalui Bantuan usaha Ekonomi Produktif UEP Graduasi dimana merupakan bantuan intervensi melalui sasaran Masyarakat miskin, penyandang disabilitas produktif dan lanjut usia potensial dalam mengembangkan usaha menuju kemandirian ekonomi dan keluar dari kemiskinan Besar. Bantuan bantuan sarana usaha perorangan atau keluarga rentan miskin (desil 4)	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
					Guru dan tenaga pendidik SMA disiapkan oleh Provinsi	KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Target Desil 3-4 (2026-2030) - Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas Nasional berada di kabupaten Buol. Menyiapkan lahan minimal 8 Ha. - Tenaga pendidik SD SMP disiapkan oleh pemda Buol	
	Berani Satu Harga	Pengendalian Inflasi	1,29 (2024) 3,6-4,6 (2025) 3,00-3,10 (2030)		Menyiapkan Pelaksanaan Pasar Murah (Operasi Pasar)/Bahan Pangan Murah	Menyiapkan Pelaksanaan Pasar Murah (Operasi Pasar)/Bahan Pangan Murah	
					Memfasilitasi berkaitan dengan pembangunan gudang Bulog	Menyiapkan surat, administrasi dan penyiapan lahan 1 Ha terkait pembangunan gudang Bulog	
BERANI MAKMUR							
	Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produktivitas Gabah 5-6 Ton/ Ha			Pemenuhan target Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Se Sulteng seluas 251.858 Ha berkoordinasi intensif dengan pihak Danrem 132/Tadulako dan KOREM 132/Tadulako	Pemenuhan target Luas Tambah Tanam (LTT) Padi seluas 5.330 Ha/tahun berkoordinasi intensif dengan pihak Kodim 1305 Buol Tolitoli	
		ekstenfikasi		1.000 Ha (2025) 200 Ha (2026)	Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Percetakan lahan sawah baru	- Menetapkan dan menyiapkan Lahan Clean and Clear untuk	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
				500 Ha (2027-2030)		kebutuhan cetak sawah baru selama 5 tahun - Pembangunan jaringan irigasi tersier dilokasi cetak sawah di Desa Panilanjaya - Pembangunan jaringan irigasi tersier dilokasi cetak sawah DI-Maniala di Desa Soraya - Pembangunan jaringan irigasi tersier dilokasi cetak sawah DI-Pinamula di Desa Pinamula (208 Ha) dan Desa Taluan (89 Ha) - Pendampingan kelembagaan dan insentif	
		ekstenfikasi			Melakukan pengawasan dan pembinaan luasan kawasan pertanian nasional sebagai berikut: Komoditas Padi seluas 5.000 Ha, Komoditas Jagung seluas 25.000 Ha, dan Komoditas Kacang Tanah seluas 1.100 Ha, Komoditas Durian seluas 1.620 Ha, Komoditas Alpokat seluas 810 Ha, Komoditas Manggis seluas	Melakukan pengawasan penggunaan alsintan dan sarana prasarana.	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
					300 Ha, Komoditas Mangga seluas 150 Ha, Komoditas Bawang Merah seluas 50 Ha, Komoditas Cabai seluas 100 Ha, Komoditas Sayuran Lainnya seluas 20 Ha, dan Komoditas Buah lainnya seluas 30 Ha,		
		ekstenfikasi			Pemenuhan target Luas Tambah Tanam (LTT) Jagung se Sulteng seluas 5.000 Ha berkoordinasi intensif dengan Polda Sulteng.	Pemenuhan target Luas Tambah Tanam (LTT) Jagung seluas 150 Ha berkoordinasi intensif dengan Polres Buol.	
		Intensifikasi	64.873 Ha	1.422 Ha	Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di daerah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah memastikan ketersediaan Pupuk Urea sebanyak 568.800 Kg, Pupuk NPK sebanyak 711.000 Kg, Pupuk organik sebanyak 22.752 Liter, Benih Unggul sebanyak 3.550 Kg, pestisida 2.844 Liter dan Alsintan untuk mendukung produktivitas 5-6 Ton Gabah di Buol.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan di 11 (sebelas) Lokasi prioritas yaitu Desa Bongo 37 Ha, Desa winangun 139 Ha, Desa Moyong 125 Ha, Desa Modo 285 Ha, desa Mopu 103 Ha, Desa Air Terang 220 Ha, Desa Maniara 189 Ha, Desa Boilan 110 Ha, Desa Pinamula 208 Ha, Desa Pinamula Baru 19 Ha, Desa Taluan 89 Ha.	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
		Intensifikasi			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan Dinas Cipta karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan berfungsinya irigasi Kewenangan Provinsi di Kabupaten Buol yaitu Daerah Irigasi Air Terang pada tahun anggaran 2025.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol berkoordinasi dengan Dinas Cipta karya dan Sumberdaya Air Kabupaten Buol untuk memastikan berfungsinya irigasi Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Buol yaitu DI Bongo dan DI Jati Mulia (RC sudah siap), DI Winangun (SID 2026), DI Pinamula (SID 2026) akan di dorong ke aplikasi sipuri dan ketersediaan SID untuk kebutuhan penapisan usulan disiapkan oleh kabupaten Buol	
	PERKEBUNAN				Mendukung kawasan Perkebunan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah (bibit kakao dan kelapa)	Melakukan pembinaan, pengawasan dan pelatihan kelompok petani kakao dan kelapa	
	PETERNAKAN	Berani 159 Excellent			Pengadaan Straw Semen Beku dan indukan Sapi Eksotik Pelatihan Petugas Inseminator Buatan dan Petugas Kebuntingan	- Pembinaan data dan informasi berkaitan dengan peternakan sapi - Menyiapkan anggaran untuk pembelian Straw Semen Beku - Pengawasan kelompok penerima Straw - Pelatihan Petugas Inseminator Buatan dan Petugas Kebuntingan	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
	Tenaga Kerja	BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan bagi Petani dan Nelayan	3.491 Kepala RT	12.569 RT	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Berani Makmur pada Program BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan bagi Petani dan Nelayan	Menyiapkan data pekerja rentan bagi petani dan nelayan	
	Kelautan dan Perikanan	Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Penangkapan (2025) 277.364,96 ton (2026) 307.261,94 ton (2027) 285.748,31 ton (2028) 290.034,53 ton (2029) 294.385,04 ton (2030) 298.800,81 ton	Peningkatan Produksi Penangkapan (2025) 21.435,49 ton (2026) 23.746 ton (2027) 22083,37 ton (2028) 22.414,62 ton (2029) 22.750,84 ton (2030) 23.092,10 ton	(2026-2030) Pengadaan kapal kewenangan Provinsi diprioritaskan di daerah pelabuhan Perikanan Diapati, pelabuhan perikanan Labuton, perikanan Kuala Besar melalui koperasi usaha bersama	- Penyiapan dan pembinaan kelompok nelayan - Verifikasi dan monev - Intervensi sesuai kewenangan - Pelatihan bagi kelompok nelayan	
	Lingkungan Hidup	IKLH	79,74 (2024) 81,79 (2025) 85,97 (2030)	84,50 (2024) 93,99 (2025) 95,50 (2030)	Alokasi Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) 2026-2030	- Membuat Regulasi Tentang TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi) - Alokasi TAKE	
BERANI LANCAR							
	Pekerjaan Umum	Persentase Kemantapan Jalan	64,98% (2024) 65% (2025) 73% (2030)	23%(2024) 23% (2025) 34,45% (2030)	- Rekonstruksi/Peningkatan Ruas Jalan Kokobuka - Air Terang , pada TA 2026 - Rekonstruksi/Peningkatan Ruas Jalan Muliasari (Bts. Kab. Tolitoli) – Kokobuka, MYC 2027 sd 2029 - Rekonstruksi/Peningkatan Ruas Jalan Air Terang – Kali Kulango,	- Menyiapkan data dan titik lokasi yang akan diintervensi oleh Provinsi (jalan Desa dan jalan kantong Produksi) - Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas jalan kewenangan Kabupaten - Penyiapan lahan (clear and clean)	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
					- Pra Fs 2024 jalan Lambunu-Buol - Penyusunan Perencanaan direncanakan (DED dan Dokling TA 2026) Jalan Lambunu – Buol, Ruas Jalan dan 2027 APBD/APBN/KPBU ini Merupakan Jalan Penghubung Lintas Barat Dan Lintas Timur Pulau Sulawesi Yang Juga Berfungsi Menghubungkan Antara Teluk Tomini Dan Selat Makassar Laut Sulawesi, Serta Sebagai Jalan Penghubung Antara Kabupaten Buol Dan Kabupaten Parigi Moutong - Pembangunan Jalan Desa dan rabat beton	- Pembebasan lahan - Dalam rangka keselarasan dengan Misi 7 Kabupaten Buol, Pemerintah akan melakukan Rekonstruksi Jalan yang terhubung dengan jalan kewenangan provinsi	
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	64,94 % (2024) 65,95 % (2025) 71,00 % (2030)	51,85 (2024) 60,00 (2025) 65,00 (2030)	- Penanganan peningkatan irigasi air terang tahun anggaran 2025 (pekerjaan konstruksi bendung irigasi dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dari saluran tanah menjadi pasangan batu - Operasi/Pemeliharaan irigasi Air Terang berupa parasan saluran, galian endapan dan pemeliharaan bendung di kecamatan Gadung dan Palele	- Peningkatan kapasitas untuk penjaga pintu air - Menyiapkan dokumen RC daerah irigasi kewenangan Kabupaten untuk keperluan pemenuhan usulan ke aplikasi Sipuri untuk pelaksanaan Inpres irigasi Nomor 2 Tahun 2025 yaitu: DI Winangun (SID 2026), DI Pinamula (SID 2026) akan di	- Untuk(mendukung tematik pertanian dibutuhkan peningkatan jalan nasional yaitu umu (bts gorontalo)-palele-lokodoka-Buol yang rusak 6,7 Km - Mengusulkan perubahan status DI Modo dan DI Lakea dari kewenangan



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
						dorong ke aplikasi sipuri dan ketersediaan SID untuk kebutuhan penapisan usulan disiapkan oleh kabupaten Buol - RC yang sudah siap: 1. DI Bongo, 2. DI Jati Mulia	Kabupaten menjadi Kewenangan Provinsi - Kabupaten Buol mengusulkan kepada Provinsi apabila luas sawah sudah memenuhi syarat untuk menjadi kewenangan (1.000-3.000 Ha)
		Kapasitas Air Baku	0,55 L/detik (2024) 0,6 L/detik (2025) 1,0 L/detik (2030)	-	-	Pembangunan Bangunan Pengendali banjir dan suplai air baku ke daerah irigasi kewenangan kabupaten (tertier) sungai lakuan, desa lakuan. Kec. Lakea	penanganan irigasi tersier: (Peningkatan saluran tanah menjadi pasangan batu) - DI-Lakea - DI-Lakuan - DI-Maniala - DI-Pinamula - DI-Busak II - DI-Lonu - DI-Kuala Besar - DI-Kokobuka - DI-Mopu
	Perumahan Rakyat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	65,45% (2024) 66,32% (2025) 74,74% (2030)	80,00% (2024) 80,50% (2025) 83,00% (2030)	Tahun 2025 - Pekerjaan jalan lingkungan Desa Pokobo Kec. Bonobogu - Pekerjaan drainase Desa Biau Kec. Bukal - - Pekerjaan jalan lingkungan Desa Biau Kec. Bukal - Pekerjaan jalan lingkungan Desa Lakea Kec. Lakea	Melakukan ketersediaan data berkaitan dengan Kawasan kumuh, legalitas kawsan kumuh, titik lokus	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
					- Perencanaan penuntasan daerah kumuh di Desa Palele Kabupaten Buol Tahun 2026 - Pekerjaan jalan lingkungan Desa Konamukan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol - Pekerjaan jalan Lingkungan Desa Mangubi, Kec. Momunu, kab.Buol - Pekerjaan jalan Lingkungan Desa Mopu, Kec. Bukal, kab.Buol - Pekerjaan jalan Lingkungan Desa Busak II, Kec. Krtamat, kab.Buol - Pekerjaan jalan Lingkungan Lingkungan kantor, Kec. Biau, kab.Buol - Pembangunan daerah kumuh di Desa Palele Tahun 2027 - Akan di prioritaskan pada daerah kawsan kumuh yang diperbupkan (tanda tangan bupati) dan akan dilakukan perencanaan tahun 2027 untuk pelaksanaan 2028-2030		
BERANI MENYALA							
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Konsumsi Listrik Perkapita	582 KWh (2024) 612 KWh (2025)	-	Tahun 2025 Pengadaan/Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya, di :	Menyiapkan data dan informasi berkaitan dengan PJUTS dan melakukan pengawasan keberadaan PJUTS	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
			801 KWh (2030)		1. Desa Bungkudu Kec. Bukal; 2. Desa Biau Kec. Bukal 3. Desa Tongon Kec. Momunu; 4. Desa Bunobogu Selatan Kec. Bunobogu; 5. Desa Bokat Kec. Bokat 6. Desa Paleleh Kec. Paleleh; 7. Desa Timbulon Kec. paleleh barat; 8. Desa Pandangan Kec. Gadung Tahun 2026 Pengadaan/Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya, di : 9. Desa Kokobuka Kec. Tiloan; 10. Desa Air Terang Kec. Tiloan 11. Desa Busak 2 Kec. Karamat; 12. Desa Mendaan Kec. Karamat; 13. Desa Ngune Kec. Lakea; 14. Desa Ilambe Kec. Lakea; 15. Desa Bukaan Kec. Lakea Tahun 2027-2030 Sesuai usulan proposal	Kabupaten Melakukan Pengawasan Aset PJUTS.	
	Komunikasi dan Infomatika	Indeks SPBE	3,00 poin (2024)	3,5 (2025) 4,0 (2030)	Tahun 2026 Pelatihan untuk Operator dari Diskominfo santik bagi desa-	- Menyiapkan personil untuk pelatihan serta pendampingan	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
		Indeks PTIK	3,15 poin (2025) 3,40 poin (2030) 5,77 (2024) 5,77 (2025) 6,09 (2030)	-	desa yang belum memiliki jaringan internet yang ada di Kabupaten Buol : 1. Desa Potugu Kecamatan Momunu 2. Desa Tang Kecamatan Bokat 3. Desa Talaki Kecamatan Paleleh 4. Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan 5. Desa Yugut Kecamatan Bukal 6. Desa Bulogidon Tanjung Kecamatan Gadung 7. Desa Moinano Kecamatan Karamat Tahun 2027 10 Desa, Tahun 2028 10 desa, Tahun 2029 7 Desa - Pemerintah Provinsi mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui BPKAD	- Melakukan verifikasi dan indentifikasi berkaitan dengan lokasi <i>Blank Spot</i>	
BERANI HARMONI							
	PARIWISATA	Berani Harmoni dengan topik berani Desa Wisata	13	1 Desa	Tahun 2026 Pemerintah Provinsi Dinas Pariwisata melakukan Penyusunan Dokumen Kajian Potensi Desa Wisata Pantai Tanjung Dako sepanjang 5 km garis pantai	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab. Buol melaksanakan Sosialisasi Sapta Pesona di Desa Wisata Mendaan Tanjung Dako Kecamatan Karamat.	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
					yang dikenal pasir putih, air terjun dan gua alam.		
					Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Melaksanakan Bimbingan Teknis pengelolaan dan melakukan promosi Desa Wisata Mendaan Tanjung Dako.	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab. Buol dan Perguruan Tinggi melakukan kerja sama terkait pengembangan Desa Wisata Mendaan Tanjung Dako dan melakukan promosi.	
						Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab. Buol dan Masyarakat Desa Wisata Mendaan Tanjung Dako melaksanakan kegiatan rutin wisata bersih.	
					Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan hak intelektual ekonomi kreatif produk gula merah Deas Wisata Mendaan Tanjung Dako.	Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Melaksanakan Pelatihan ekonomi kreatif produksi pengolahan dan pengemasan gula merah bagi masyarakat di Desa Wisata Mendaan Tanjung Dako	
	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaaan Gender (IDG)	77,52 (2023) 78,00 (2025) 83,00 (2030)		Wira Usaha Baru -Melakukan pelatihan tata rias kepada perempuan (Siswa lulus SMA/SMK yang tidak melanjutkan kuliah) di kembangkan skill dan akan diberikan sertifikat sebagai modal wirausaha baru	Wira Usaha Baru -Melakukan pelatihan tata rias kepada perempuan (Siswa lulus SMA/SMK yang tidak melanjutkan kuliah) di kembangkan skill dan akan diberikan	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
					Target 50 orang (2026) 100 orang (2027) 150 orang (2028) 200 orang (2029) 200 orang (2030)	sertifikat sebagai modal wirausaha baru Target 50 orang (2026) 100 orang (2027) 150 orang (2028) 200 orang (2029) 200 orang (2030)	
	Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	60,00 (2024) 61,15 (2025) 70,39 (2030)		Wira Usaha Baru -Melakukan pelatihan dan bimtek kepada pemuda usia 16-30 tahun sesuai dengan UU nomor 9 tahun 2020 tentang Pemuda di kembangkan skill dan akan diberikan sertifikat sebagai modal wirausaha baru Target 200 pemuda (2026-2030)	Wira Usaha Baru -Melakukan pelatihan dan bimtek kepada pemuda usia 16-30 tahun sesuai dengan UU nomor 9 tahun 2020 tentang Pemuda di kembangkan skill dan akan diberikan sertifikat sebagai modal wirausaha baru Target 200 muda (2026-2030)	
-	- PERINDUSTRIAN	- Wirausaha Baru	300	Sentra IKM Garam dan Sentra IKM Nata De Coco	- Penumbuhan wira usaha baru melalui pelatihan vokasi - Melakukan pelatihan untuk Pemberdayaan Sentra Industri Kecil Menengah, - Memfasilitasi peluang kemitraan antara IKM dgn Industri besar - Melaksanakan kegiatan pemasaran produk dan promosi produk sentra IKM - Pengembangan Wirausaha Baru Industri	- Penyediaan sarana prasarana yg ada dlm sentra IKM dan - Pembentukan Kelembagaan sentra IKM menjadi UPT Sentra Industri Kecil Menengah - Bantuan Modal Usaha bagi IKM yg ada dlm sentra - Melaksanakan kegiatan yg berhubungan pemasaran produk dan	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
					Kecil Pelatihan Motif Batik Khas Daerah	promosi produk sentra IKM	
	KOPERASI dan UMKM	"berani Akses Pembiayaan"			Memberikan subsidi bunga pinjaman kepada UMKM sebanyak 6% pada program KUR sehingga mendapatkan kemudahan dalam pengembalian pinjaman akan di suport dengan tenaga pendamping KUR untuk kegiatan sosialisasi dalam rangka kelancaran	- Penyediaan data UMKM yang layak mendapatkan KUR - Pelatihan UMKM yang mendapatkan KUR - Pengawasan UMKM yang mendapatkan KUR	
		Inkubator Bisnis			Pendampingan, Pelatihan Perkoperasian, Manajerial, Keterampilan Teknis Bagi Anggota Koperasi, Pengelolaan Koperasi Syariah untuk naik kelas	- Penyediaan data UMKM yang akan naik kelas - Pelatihan UMKM yang akan naik kelas - Pengawasan UMKM yang akan naik kelas	
BERANI BERKAH							
	Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76,66-77,81 (2025) 80,00-81,25 (2030)		- Memberikan Insentif bagi Guru Mengaji, Marbot, Pendeta/Tokoh Agama dan Pemangku Adat Target 2026-2030 Berdasarkan usulan Kabupaten Buol - Penyetaraan Status Pesantren, Madrasah dan Sekolah Keagamaan - Perbaikan sarana prasarana keagamaan	- Menyiapkan data Guru Mengaji, Marbot, Pendeta/Tokoh Agama dan Pemangku Adat - Penyetaraan Status Pesantren, MI dan MTS dan Sekolah Keagamaan - Perbaikan sarana prasarana keagamaan	



NO.	URUSAN	SASARAN	TARGET		PROGRAM INTERVENSI		KET.
			PROVINSI	KABUPATEN	PROVINSI	KABUPATEN	
					- Memperkuat peran FKUB dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	- Memperkuat peran FKUB dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	
BERANI BERINTEGRITAS							
	BPKAD	Indeks Pelayanan Publik	3,48 (2025) 3,88 (2030)		Pemberian bantuan keuangan sebesar 5 Milyar per Kabupaten untuk Mengakomodir urusan pelayanan publik yang telah diusulkan dalam musrenbang namun tidak diakomodir	Menyiapkan data untuk kebutuhan usulan prioritas yang akan diintervensi yang masuk ke dalam usulan musrenbang tetapi tidak terakomodir	



3.2.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

- a. Program Pengelolaan Pendidikan, program ini diarahkan pada perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, serta peningkatan partisipasi pendidikan.
- b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, program ini diarahkan pada perluasan akses pemerataan layanan dan peningkatan kualitas pendidikan.
- c. Program Pengembangan Kurikulum, program ini diarahkan pada implementasi kurikulum nasional pendidikan dasar serta pengembangan kurikulum muatan lokal, yang berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri di masing masing wilayah.
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, program ini diarahkan pada Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk lembaga pendidikan formal Di Kawasan Khusus.

Pelaksanaan urusan pendidikan bertujuan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan serta meningkatkan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah di Kabupaten Buol. Indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 3.23
SPM Bidang Pendidikan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)
Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik
Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal



PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui

2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, program ini diarahkan pada pemetaan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan; peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia sesuai standar; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan dukungan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, serta kesehatan jiwa; penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; pemenuhan operasional pelayanan rumah sakit khusus mata, serta peningkatan mutu pelayanan di Rumah sakit.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pemenuhan obat dan bahan habis pakai.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, serta pelaksanaan



komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif preventif.

Pelaksanaan urusan kesehatan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan. Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 3.24
SPM Bidang Kesehatan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase Ibu hamil dan Balita berkunjung ke Posyandu dan yankes lainnya)

3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana sarana Sumber Daya Air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan pemeliharaan prasarana sarana SDA; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS); koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta

pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi.

- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, hibah sarana prasarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional, serta peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat.

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

- a. Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
- b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman;
- c. Meningkatnya penyediaan Infrastruktur layanan dasar;
- d. Meningkatnya konektivitas wilayah; dan
- e. Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung secara tertib dan andal.

Tujuan dari urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas. Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 3.25
SPM Bidang Pekerjaan Umum

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi



PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
		dan Banjir Rob Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum layak minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)

4. Standar Pelayanan Minimal Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pengembangan Perumahan, program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
- Program Kawasan Permukiman, program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana sarana utilitas umum perumahan.
- Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan, program ini diarahkan pada pembinaan penyiapan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, program ini diarahkan untuk menyediakan rumah layak huni dan terjangkau, dilengkapi prasarana dan sarana lingkungan yang memadai guna mencegah dan mengurangi kawasan kumuh.

- f. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, program ini diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan aspek keadilan sosial, transparansi proses, serta pemberian santunan yang layak bagi pihak yang terkena dampak.

Pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat serta untuk memenuhi akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 3.26
SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Renovasi Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin
Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10- 15 Ha yang Ditangani
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Tercapainya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang terjangkau untuk masyarakat, berkurangnya kawasan permukiman kumuh, serta tersedianya lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak Cakupan akses layanan air bersih dan sanitasi layak
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU



PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Terjaminnya hak masyarakat dan kepastian hukum dalam penyelesaian ganti kerugian serta santunan tanah	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah yang sesuai ketentuan dan dapat diterima oleh pemilik tanah

5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satgas Linmas.
- Program Penanggulangan Bencana, Program ini diarahkan pada saat tanggap darurat bencana terkait dalam menangani daerah – daerah yang mengalami bencana alam.
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sarana prasarana serta sumber daya manusia.

Pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; serta untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 3.27
SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Kepmendagri IKK



PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya
Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pemberdayaan Sosial, program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- Program Rehabilitasi Sosial, program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta penyaluran bantuan sosial dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).
- Program Penanganan Bencana, program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

Pelaksanaan urusan sosial ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:



- a. Tersedianya Data Fakir Miskin
- b. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
- c. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.
- d. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- e. Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana
- f. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 3.28
SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan
		• Presentase Pekerja Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA. • Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar
Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	• Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti. • Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti • Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti.



PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
		- Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti - Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti.
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	- Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar - Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
Penanganan Bencana	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana

3.2.6 Progam Lintas Perangkat Daerah

1. Program Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan secara parsial atau sektoral semata. Karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan harus mempertimbangkan dimensi ketidakberdayaan karena kemelaratan yang akut, dimensi ketimpangan struktural, dan kemunduran perekonomian yang mengancam kesejahteraan, semua pelaku ekonomi. Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan multidimensi dan lintas sektor, dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, masyarakat sipil, lembaga filantropi dan komunitas lokal.

Strategi pertama adalah penurunan beban pengeluaran, yang bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Upaya ini dilakukan melalui pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, rehabilitasi sosial, serta berbagai bantuan sosial dan subsidi. Di bidang pendidikan, program seperti beasiswa dan bantuan peralatan sekolah disediakan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan. Pengendalian inflasi juga menjadi



bagian penting melalui operasi pasar dan penyediaan pasar murah, guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Selain itu, pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan menjadi bagian dari upaya menjaga daya tahan ekonomi rumah tangga miskin terhadap tekanan kebutuhan hidup.

Strategi kedua adalah peningkatan pendapatan, yang difokuskan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui penyediaan bantuan sarana dan prasarana di sektor pertanian dan perikanan, termasuk kemudahan akses BBM bersubsidi bagi nelayan serta bantuan peralatan usaha. Sementara itu, peningkatan kompetensi masyarakat diarahkan pada penyediaan informasi pasar kerja, pelatihan kerja, program padat karya, serta bantuan permodalan untuk mendorong wirausaha.

Strategi ketiga adalah pengurangan kantong kemiskinan, yang difokuskan pada pembangunan dan penyediaan akses terhadap infrastruktur dasar di wilayahwilayah miskin. Ini mencakup peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta perumahan dan permukiman. Konektivitas antar wilayah juga diperbaiki untuk mendukung mobilitas dan akses ekonomi. Di sisi lain, penyediaan layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan listrik menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas hidup di daerah-daerah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi.

Seluruh strategi tersebut dijalankan secara terkoordinasi melalui dua langkah penting, yaitu pemutakhiran data dan konvergensi program. Pemutakhiran data bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, sementara konvergensi program mengintegrasikan berbagai program dari lintas sektor dan lembaga agar sinergis dan tepat sasaran. Melalui pendekatan komprehensif ini, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

Pentingnya penggunaan data yang akurat dalam program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem ditindaklanjuti melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Inpres ini menekankan pentingnya ketersediaan dan penggunaan data sosial ekonomi yang terintegrasi dan akurat dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. DTSEN bertujuan untuk



menyatukan berbagai sumber data yang selama ini tersebar dan tumpang tindih, sehingga seluruh intervensi dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat secara lebih efisien dan akuntabel.

Selanjutnya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional. Salah satu pokok utama dari Inpres ini adalah penekanan pada pelaksanaan program yang bersifat terintegrasi, tepat sasaran, dan berbasis data. Dalam hal ini, seluruh intervensi diarahkan untuk menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan. DTSEN menjadi alat untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin ekstrem secara akurat, memastikan bahwa bantuan dan program pemerintah menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Inpres ini juga mendorong optimalisasi pelaksanaan berbagai program seperti bantuan sosial, penyediaan layanan dasar gratis, sekolah rakyat, program perumahan rakyat, hingga pemberdayaan ekonomi produktif melalui koperasi dan UMKM. Selain itu, pendekatan padat karya, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja menjadi bagian penting dari strategi peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Pemerintah menekankan perlunya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan intervensi ini, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Buol dilakukan melalui aksi konvergensi program lintas Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan skema cross cutting program sebagai berikut:



2. Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi

Stunting atau sering disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 HPK, yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK di samping berisiko pada hambatan pertumbuhan fisik dan keterlambatan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan aktivitas anak di masa depan. Stunting dan masalah gizi lain diperkirakan menurunkan produk domestik bruto (PDB) sekitar 3% per tahun (World Bank, 2014; Better Growth Through Improved Sanitation and Hygiene Practices. WB: Indonesia).

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, produktif, sejahtera dan mandiri harus dilakukan semenjak masa emas (golden ages) manusia yaitu di 1000 Hari Pertama Kehidupan (270 hari dimasa kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupannya). Hal tersebut sejalan dengan upaya percepatan penanggulangan stunting yang dilakukan secara konvergensi dan terintegrasi. Konvergensi berarti aksi atau gerakan yang mengarah atau ditujukan pada tujuan yang diinginkan. Secara harafiah konvergensi berarti “mengumpulkan sesuatu yang berserakan” dan jika diterapkan pada Perangkat Daerah/Instansi berarti mengarahkan (mengumpulkan) program dan kegiatan regular yang sudah ada di Perangkat Daerah/Instansi untuk diarahkan pada tujuan yang diinginkan sehingga tercipta harmonisasi kerja, sedangkan integrasi yaitu keterpaduan gerakan, kesamaan ritme atau langkah yang seirama oleh perangkat daerah kepada tujuan dan sasaran bersama melalui aksi program dan kegiatannya yang sesuai dengan tugas fungsi masing-masing dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (Stranas P3S) 2025–2029 disusun sebagai pedoman utama pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Strategi ini bertujuan menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,4% pada 2029 dan 5% pada 2045 melalui penguatan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta perbaikan sistem tata kelola, layanan, dan perilaku masyarakat. Target dan pendekatan ini merupakan kelanjutan dari hasil



evaluasi program 2018–2024. Pelaksanaan program sebelumnya menunjukkan sejumlah tantangan seperti lemahnya koordinasi, kurangnya pemahaman lintas sektor, ego sektoral, serta keterbatasan dalam konvergensi dan cakupan layanan. Evaluasi tahun 2024 memberikan pelajaran penting bahwa pencegahan harus lebih diutamakan dibanding hanya penanganan kasus stunting yang sudah terjadi. Selain itu, integrasi sistem pemantauan dan evaluasi serta penguatan kapasitas pelaksana di daerah menjadi prioritas perbaikan ke depan.

Stranas P3S dibangun di atas enam pilar strategi: komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, konvergensi program dan kemitraan, ketahanan pangan dan gizi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta pemantauan dan evaluasi. Enam pilar ini dioperasionalkan melalui perencanaan berbasis data, advokasi politik lintas level, pelibatan multisektor, hingga mekanisme insentif untuk kinerja daerah.

Kelompok sasaran intervensi terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu nifas; anak usia 0 – 23 bulan; anak usia 24 – 59 bulan; remaja putri dan calon pengantin; keluarga dan masyarakat. Intervensi diarahkan untuk menjamin cakupan layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, air bersih, serta perubahan perilaku yang berkelanjutan. Konvergensi layanan dipastikan melalui sinkronisasi program pusat, daerah, hingga desa, serta pelibatan lembaga non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Pendekatan wilayah dan rumah tangga digunakan untuk menjangkau sasaran prioritas secara lebih tepat dan efektif.

Untuk mengatasi prevalensi stunting yang masih tinggi di Kabupaten Buol, diperlukan program prioritas yang menyentuh akar permasalahan secara sistemik, komprehensif, dan terukur. Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Penanggulangan Stunting tidak bisa diselesaikan dengan satu sektor saja tetapi harus multi sektor atau dilakukan dengan lintas perangkat daerah. Salah satu aspek krusial yang perlu diperkuat adalah sistem dan tata kelola data stunting. Saat ini, banyak kabupaten/kota masih menghadapi tantangan dalam ketersediaan dan konsistensi data keluarga berisiko stunting, termasuk ibu hamil, balita, dan calon pengantin. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong penguatan integrasi dan pemutakhiran data berbasis *by name by address* yang dilakukan secara berkala dan lintas sektor. Verifikasi lapangan, validasi bersama desa/kelurahan, serta integrasi



data dari BKKBN (Elsimil) dan Kemenkes (e-PPGBM), dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus menjadi dasar untuk memastikan setiap intervensi tepat sasaran.

Selanjutnya, program prioritas juga harus diarahkan pada penguatan kapasitas tenaga pelaksana di lapangan, yaitu tenaga kesehatan, tenaga gizi, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan kader pembangunan manusia. Banyak di antaranya belum mendapatkan pelatihan yang komprehensif tentang intervensi gizi spesifik, komunikasi perubahan perilaku, serta penggunaan aplikasi pendukung seperti e-PPGBM dan Elsimil. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis, supervisi berkala, dan pembekalan modul praktis sangat dibutuhkan. Kerja sama dengan perguruan tinggi serta mitra pembangunan sangat diperlukan dalam memperkuat sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak percepatan penurunan stunting di desa-desa lokus prioritas.

Seiring dengan penguatan data dan SDM, intervensi pencegahan stunting perlu menjadi prioritas utama dalam program RPJMD 2025–2029. Pencegahan stunting harus dimulai sejak remaja dan calon pengantin melalui skrining gizi, pemberian tablet tambah darah, edukasi kesehatan reproduksi, serta penggunaan aplikasi Elsimil secara massif. Pada masa kehamilan, intervensi harus difokuskan pada pemenuhan gizi ibu, pemeriksaan ANC lengkap, dan edukasi pola makan bergizi seimbang. Untuk balita, program pemberian makanan tambahan (PMT), imunisasi lengkap, serta pemantauan tumbuh kembang secara berkala di posyandu menjadi komponen penting dalam menurunkan prevalensi stunting secara signifikan.

Dengan menempatkan penguatan sistem data, SDM pelaksana, dan intervensi pencegahan sebagai poros utama strategi, program penurunan stunting di Kabupaten Buol tidak hanya akan bersifat reaktif, tetapi mampu membangun fondasi ketahanan gizi jangka panjang. Komitmen kepala daerah, peran aparatur desa/kelurahan, dukungan anggaran yang memadai, serta pelibatan masyarakat dalam edukasi dan pengawasan menjadi modal penting untuk menurunkan prevalensi stunting ke angka di bawah 14% pada tahun 2029, sebagaimana target nasional yang ditetapkan dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Sinergi percepatan pencegahan dan penurunan stunting secara lintas sektor disajikan pada pohon faktor berikut ini. Untuk memudahkan pelaksanaan lintas perangkat daerah



maka dibuat skema cross cutting program yang bertujuan untuk memudahkan aksi konvergensi yang harus terlaksana secara multi sektoral dengan menggambarkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buol untuk periode 2025-2029 secara komprehensif memuat berbagai program prioritas pembangunan yang disusun selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Lebih lanjut, dokumen perencanaan ini mengintegrasikan seluruh program yang telah dirumuskan oleh perangkat daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing, dilengkapi dengan tiga komponen utama: (1) indikator kinerja, (2) pagu anggaran indikatif, dan (3) target capaian kinerja yang menjadi tanggung jawab institusi terkait sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, proses perencanaan tersebut mensyaratkan penetapan Kapasitas Riil Keuangan Daerah sebagai prasyarat sebelum menentukan alokasi belanja tahunan dalam siklus RPJMD. Aspek kapasitas fiskal ini telah dituangkan dalam dokumen Gambaran Keuangan Daerah yang berperan sebagai fundamental dalam proses pengalokasian anggaran pembangunan jangka menengah selama periode lima tahun.

Rencana program Kabupaten Buol memuat program-program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas dan strategis yang telah disertai kebutuhan pendanaan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pada Tabel berikut di bawah ini akan disajikan rencana program seluruh perangkat daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan periode 2026-2030 yang dikelompokkan atas: (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 3) Urusan Pemerintahan Pilihan, (4) Unsur Pendukung, (5) Unsur



Penunjang, (6) Unsur Pengawas, (7) Unsur Kewilayahan, dan (8) Unsur Pemerintahan Umum:



Tabel 4.1
Rencana Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 Kabupaten Buol

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					290.500.876.972,00 0		305.025.920.820,00 0		320.277.216.861,00 0		336.291.077.704,00 0		353.105.631.590,00 0
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					229.302.506.564,00 0		233.689.631.892,00 0		240.724.113.487,00 0		252.160.319.161,00 0		261.628.335.120,00 0
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan nonformal	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	169.129.051,000	100	177.585.503,000	100	186.464.778,000	100	195.788.017,000	100	205.577.418,000
Terselenggaranya layanan administrasi dan manajemen pendukung yang efektif dan adaptif untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan secara optimal	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	229.133.377.513,00 0	100	233.512.046.389,00 0	100	240.537.648.709,00 0	100	251.964.531.144,00 0	100	261.422.757.702,00 0
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					60.836.370.408,000		70.761.188.928,000		79.068.998.374,000		83.625.698.293,000		90.975.283.208,000
Meningkatnya keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan kesetaraan	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (%)	50,4	50,4	50,83	60.836.370.408,000	51,26	70.761.188.928,000	51,69	79.068.998.374,000	52,12	83.625.698.293,000	52,55	90.975.283.208,000
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	91,40	91,98	92,51		92,88		93,25		93,62		93,99	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	79,57	79,57	80,18		81,4		82,01		82,62		82,33	
	Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan (%)	20,75	20,75	24,84		28,94		33,04		37,14		41,24	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					110.000.000,000		115.500.000,000		121.275.000,000		127.338.750,000		133.705.687,000
Terimplementasinya kurikulum muatan lokal yang memperkuat karakter, budaya, dan potensi peserta didik berbasis kearifan lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	63,87	63,87	110.000.000,000	82,08	115.500.000,000	100	121.275.000,000	100	127.338.750,000	100	133.705.687,000
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					232.000.000,000		243.600.000,000		255.780.000,000		268.569.000,000		281.997.450,000
Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang merata dan berkualitas pada seluruh jenjang pendidikan	Persentase Guru Yang memiliki sertifikasi Pendidik (%)	40,33	40,33	45,83	232.000.000,000	51,33	243.600.000,000	56,83	255.780.000,000	62,33	268.569.000,000	67,83	281.997.450,000
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					20.000.000,000		21.000.000,000		22.050.000,000		23.152.500,000		24.310.125,000
Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang berizin dan memenuhi standar layanan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100	100	100	20.000.000,000	100	21.000.000,000	100	22.050.000,000	100	23.152.500,000	100	24.310.125,000
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					0,000		195.000.000,000		85.000.000,000		86.000.000,000		62.000.000,000
Meningkatnya kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan bahasa dan sastra daerah dalam penguatan literasi dan pengembangan karakter peserta didik	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan bahasa dan sastra daerah dalam pembelajaran (%)	100	100	100	0,000	100	195.000.000,000	100	85.000.000,000	100	86.000.000,000	100	62.000.000,000
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					234.553.713.551,00 0		246.281.399.221,00 0		258.595.469.182,00 0		271.525.242.641,00 0		285.101.504.775,00 0



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					151.411.999.713,00 0		156.192.531.612,00 0		163.250.600.563,00 0		170.275.275.141,00 0		176.549.159.463,00 0
Terlaksananya pelayanan perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	850.000.000,000	100	1.200.000.000,000	100	1.300.000.000,000	100	1.350.000.000,000	100	1.300.000.000,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	86.531.313.288,000	100	89.140.081.283,000	100	93.588.771.209,000	100	98.171.550.143,000	100	103.018.856.236,00 0
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	56.421.040.076,000	100	57.551.111.879,000	100	59.277.645.208,000	100	61.055.974.570,000	100	61.670.142.280,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	649.819.845,000	100	708.809.845,000	100	770.119.845,000	100	807.589.044,000	100	889.479.675,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran					219.085.847,000		222.085.847,000		218.085.847,000		218.085.847,000		218.085.847,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	436.283.344,000	100	531.321.493,000	100	631.111.550,000	100	637.544.449,000	100	733.562.987,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	515.756.223,000	100	545.238.187,000	100	565.238.187,000	100	601.278.187,000	100	662.278.187,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	483.738.002,000	100	490.093.795,000	100	504.517.377,000	100	502.783.139,000	100	503.267.638,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	713.572.727,000	100	841.207.070,000	100	975.223.130,000	100	1.115.939.994,000	100	1.263.692.701,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	641.674.441,000	100	728.732.734,000	100	820.143.943,000	100	916.125.711,000	100	1.016.906.568,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	392.561.795,000	100	456.523.925,000	100	522.796.497,000	100	578.882.698,000	100	647.973.209,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	374.479.005,000	100	432.239.558,000	100	432.468.356,000	100	462.149.366,000	100	472.401.617,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	1.271.538.724,000	100	1.364.668.377,000	100	1.462.454.511,000	100	1.565.129.952,000	100	1.672.939.165,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	507.287.398,000	100	510.856.995,000	100	560.499.845,000	100	560.759.866,000	100	608.131.108,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	507.827.346,000	100	532.468.713,000	100	558.842.148,000	100	592.034.256,000	100	617.135.969,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	397.629.741,000	100	438.700.000,000	100	478.190.540,000	100	514.550.067,000	100	534.482.668,000
TERLAKSANANYA PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	498.391.911,000	100	498.391.911,000	100	584.492.370,000	100	624.897.852,000	100	719.823.608,000
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					69.712.897.668,000		75.075.919.465,000		79.717.672.225,000		84.937.186.949,000		91.800.472.786,000
Meningkatkan kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) (Jiwa)	122	122	122	1.060.249.109,000	109	1.068.927.524,000	97	1.078.927.525,000	86	1.102.927.525,000	77	1.117.927.525,000
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	95	95	95		95		95		95		95	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (Persentase)	98	98	98		98		98		98		98	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	48.737.763.307,000	100	51.669.751.218,000	100	54.283.571.542,000	100	57.047.014.656,000	100	59.999.234.159,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	2.363.981.000,000	100	4.510.946.175,000	100	6.025.525.449,000	100	7.654.504.540,000	100	10.768.689.650,000
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	1.536.473.341,000	100	1.586.797.999,000	100	1.640.268.392,000	100	1.723.318.604,000	100	1.767.973.356,000
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	185.000.000,000	100	195.000.000,000	100	205.000.000,000	100	210.000.000,000	100	225.000.000,000
Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	2.080.000.000,000	100	1.850.000.000,000	100	1.877.000.000,000	100	1.990.000.000,000	100	2.250.000.000,000
Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) (Jiwa)	122	122	122	743.052.598,000	109	802.000.000,000	97	818.000.000,000	86	886.664.971,000	77	911.664.971,000
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	95	95	95		95		95		95		95	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (Persentase)	98	98	98		98		98		98		98	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) (Jiwa)	122	122	122	1.094.746.553,000	109	1.094.746.553,000	97	1.094.746.553,000	86	1.094.746.553,000	77	1.094.746.553,000
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	95	95	95		95		95		95		95	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (Persentase)	98	98	98		98		98		98		98	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	1.147.827.225,000	100	1.230.138.182,000	100	1.230.464.227,000	100	1.280.806.575,000	100	1.281.166.041,000
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan Terwujudnya layanan pengobatan dan kesehatan ;Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) (Jiwa)	122	122	122	2.582.854.575,000	107	2.719.951.596,000	97	2.871.053.467,000	86	3.025.510.433,000	77	3.187.690.247,000
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	95	95	95		95		95		95		95	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (Persentase)	98	98	98		98		98		98		98	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan Terwujudnya layanan pengobatan dan kesehatan ;Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) (Jiwa)	122	122	122	1.464.479.640,000	109	1.464.479.640,000	97	1.464.479.640,000	86	1.562.826.300,000	77	1.576.826.300,000
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	95	95	95		95		95		95		95	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (Persentase)	98	98	98		98		98		98		98	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan Terwujudnya layanan pengobatan dan kesehatan ;Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) (Jiwa)	122	122	122	1.117.671.543,000	109	1.167.495.576,000	97	1.233.916.872,000	86	1.283.619.234,000	77	1.317.898.713,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	95	95	95		95		95		95		95	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (Persentase)	98	98	98		98		98		98		98	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan Terwujudnya layanan pengobatan dan kesehatan ;Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) (Jiwa)	122	122	122	1.943.377.854,000	109	2.058.377.854,000	97	2.171.377.854,000	86	2.306.906.854,000	77	2.446.906.854,000
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	98	98	98		98		98		98		98	
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	95	95	95		95		95		95		95	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan Terwujudnya layanan pengobatan dan kesehatan ;Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	763.752.475,000	100	763.752.475,000	100	824.172.259,000	100	858.172.259,000	100	914.785.070,000
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan Terwujudnya layanan pengobatan dan kesehatan ;Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	591.054.308,000	100	591.054.306,000	100	591.054.306,000	100	591.054.306,000	100	591.054.306,000
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan Terwujudnya layanan pengobatan dan kesehatan ;Terwujudnya	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	461.500.001,000	100	463.386.228,000	100	469.000.000,000	100	480.000.000,000	100	509.794.902,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
jaminan kesehatan bagi masyarakat													
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan Terwujudnya layanan pengobatan dan kesehatan ;Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	1.839.114.139,000	100	1.839.114.139,000	100	1.839.114.139,000	100	1.839.114.139,000	100	1.839.114.139,000
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					12.441.803.024,000		13.884.813.798,000		14.466.034.788,000		15.042.526.607,000		15.419.716.717,000
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan Terwujudnya layanan pengobatan dan kesehatan ;Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan (%)	100	100	100	10.200.000,000	100	10.200.000,000	100	10.200.000,000	100	10.200.000,000	100	10.200.000,000
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	100	100	100	41.679.383,000	100	70.263.352,000	100	99.276.519,000	100	100.090.345,000	100	62.094.863,000
Meningkatnya mutu dan distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan (%)	100	100	100	5.496.335.141,000	100	6.903.868.446,000	100	7.249.061.869,000	100	7.611.514.962,000	100	7.953.493.354,000
Meningkatnya mutu dan distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan (%)	100	100	100	6.893.588.500,000	100	6.900.482.000,000	100	7.107.496.400,000	100	7.320.721.300,000	100	7.393.928.500,000
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN					522.424.000,000		660.545.200,000		693.572.460,000		728.251.083,000		764.663.637,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
DAN MAKANAN MINUMAN													
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	100	100	100	522.424.000,000	100	660.545.200,000	100	693.572.460,000	100	728.251.083,000	100	764.663.637,000
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					464.589.146,000		467.589.146,000		467.589.146,000		542.002.861,000		567.492.172,000
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	100	100	100	440.372.500,000	100	440.372.500,000	100	440.372.500,000	100	509.786.215,000	100	535.275.526,000
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) (Persentase)	36,9	30	29	12.692.171,000	28	15.692.171,000	27	15.692.171,000	26	20.692.171,000	25	20.692.171,000
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	100	100	100	6.779.600,000	100	6.779.600,000	100	6.779.600,000	100	6.779.600,000	100	6.779.600,000
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) (Persentase)	36,9	30	29	4.744.875,000	28	4.744.875,000	27	4.744.875,000	26	4.744.875,000	25	4.744.875,000
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					81.922.431.889,000		86.018.553.483,000		90.319.481.157,000		94.835.455.215,000		99.577.227.976,000
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.460.878.245,000		9.777.401.573,000		10.656.230.175,000		10.656.230.173,000		10.656.230.173,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	10.460.878.245,000	100	9.777.401.573,000	100	10.656.230.175,000	100	10.656.230.173,000	100	10.656.230.173,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					8.911.553.644,000		4.702.087.176,000		5.432.404.248,000		9.355.620.039,000		9.373.508.479,000
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatkan akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	4,80	2,13	4,70	8.911.553.644,000	5,45	4.702.087.176,000	8,89	5.432.404.248,000	7,90	9.355.620.039,000	7,80	9.373.508.479,000
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	48,47	49,92	50,89		51,37		52,83		54,28		55,74	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.300.000.000,000		2.828.735.000,000		3.253.045.250,000		3.700.000.000,000		3.700.000.000,000
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk berakses air minum (%)	50	50	55	2.300.000.000,000	57	2.828.735.000,000	58	3.253.045.250,000	60	3.700.000.000,000	60	3.700.000.000,000
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					0,000		0,000		10.650.000.000,000		0,000		0,000
Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	0	0	0	0,000	0	0,000	25	10.650.000.000,000	25	0,000	25	0,000
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					0,000		2.499.797.359,000		2.874.766.962,000		4.700.000.000,000		4.700.000.000,000
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sistem penyediaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan	50	50	50	0,000	50	2.499.797.359,000	50	2.874.766.962,000	50	4.700.000.000,000	50	4.700.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Aman) (Persentase)												
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.000.000.000,000		3.410.000.000,000		3.921.500.000,000		3.621.500.000,000		3.621.500.000,000
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	95,28	95,28	96,35	2.000.000.000,000	97,42	3.410.000.000,000	98,49	3.921.500.000,000	99,56	3.621.500.000,000	99,56	3.621.500.000,000
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					2.000.000.000,000		2.830.000.000,000		3.254.500.000,000		4.765.000.000,000		4.765.000.000,000
Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	100	2.000.000.000,000	100	2.830.000.000,000	100	3.254.500.000,000	100	4.765.000.000,000	100	4.765.000.000,000
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					3.000.000.000,000		8.803.600.000,000		10.124.140.000,000		5.300.000.000,000		5.300.000.000,000
Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	100	100	100	3.000.000.000,000	100	8.803.600.000,000	100	10.124.140.000,000	100	5.300.000.000,000	100	5.300.000.000,000
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN					52.850.000.000,000		51.166.932.375,000		39.108.385.799,000		51.690.096.280,000		56.413.980.601,000
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	23,22	23,95	24,38	52.850.000.000,000	26,47	51.166.932.375,000	27,35	39.108.385.799,000	28,23	51.690.096.280,000	29,12	56.413.980.601,000
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					0,000		0,000		166.508.723,000		169.008.723,000		169.008.723,000
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi (Orang)	2	2	3	0,000	3	0,000	4	166.508.723,000	4	169.008.723,000	4	169.008.723,000
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG					400.000.000,000		0,000		878.000.000,000		878.000.000,000		878.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Rasio Kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (Rasio)	0	0	0	400.000.000,000	0	0,000	0	878.000.000,000	0	878.000.000,000	0	878.000.000,000
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					4.618.329.309,000		4.821.245.774,000		5.005.958.063,000		5.220.903.774,000		5.481.948.962,000
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.071.069.609,000		4.220.986.074,000		4.290.649.074,000		4.427.144.074,000		4.649.046.277,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	4.071.069.609,000	100	4.220.986.074,000	100	4.290.649.074,000	100	4.427.144.074,000	100	4.649.046.277,000
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					50.000.000,000		64.000.000,000		143.049.289,000		165.000.000,000		172.250.000,000
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0,61	0,20	0,20	50.000.000,000	0,20	64.000.000,000	0,20	143.049.289,000	0,20	165.000.000,000	0,21	172.250.000,000
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					100.000.000,000		129.000.000,000		161.000.000,000		213.000.000,000		223.650.000,000
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	2,34	2,34	2,34	100.000.000,000	2,35	129.000.000,000	2,36	161.000.000,000	2,37	213.000.000,000	2,37	223.650.000,000
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					0,000		3.000.000,000		6.000.000,000		7.500.000,000		7.875.000,000
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Perumahan dan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang di tangani (%)	192	192	193	0,000	194	3.000.000,000	195	6.000.000,000	196	7.500.000,000	197	7.875.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					397.259.700,000		404.259.700,000		405.259.700,000		408.259.700,000		429.127.685,000
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	100	100	100	397.259.700,000	100	404.259.700,000	100	405.259.700,000	100	408.259.700,000	100	429.127.685,000
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					19.614.393.058,000		20.595.112.710,000		21.624.868.346,000		22.706.111.763,000		23.841.417.351,000
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.108.339.238,000		17.659.058.890,000		18.748.814.526,000		19.650.057.943,000		20.615.363.531,000
meningkatnya layanan perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	13.054.571.140,000	100	13.780.102.388,000	100	14.541.910.198,000	100	15.341.808.399,000	100	16.181.701.510,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	4.053.768.098,000	100	3.878.956.502,000	100	4.206.904.328,000	100	4.308.249.544,000	100	4.433.662.021,000
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					856.053.820,000		856.053.820,000		856.053.820,000		856.053.820,000		856.053.820,000
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	50	50	60	856.053.820,000	60	856.053.820,000	62	856.053.820,000	65	856.053.820,000	65	856.053.820,000
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	28,57	28,57	28,47		24		22		20		20	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Indeks Penyelenggaraan Trantubumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai)	20	20	25		30		35		40		40	
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.050.000.000,000		1.480.000.000,000		1.420.000.000,000		1.600.000.000,000		1.770.000.000,000
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100	100	100	1.050.000.000,000	100	1.480.000.000,000	100	1.420.000.000,000	100	1.600.000.000,000	100	1.770.000.000,000
	Persentase Tanggap Darurat Bencana (%)	80	70	56		44		44		43		41	
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	40	40	50		50		50		50		50	
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000
Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran kabupaten/kota	Tingkat waktu tanggap (response timerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	20	20	30	600.000.000,000	23	600.000.000,000	26	600.000.000,000	30	600.000.000,000	30	600.000.000,000
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	14,61	14,61	24,61		34,61		44,61		50,61		50,61	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.967.283.328,000		6.265.647.494,000		6.578.929.869,000		6.907.876.362,000		7.253.270.180,000
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.749.642.915,000		5.068.236.083,000		5.301.059.025,000		5.579.422.444,000		5.838.047.033,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	4.749.642.915,000	100	5.068.236.083,000	100	5.301.059.025,000	100	5.579.422.444,000	100	5.838.047.033,000
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					20.000.000,000		251.600.000,000		240.550.000,000		291.105.000,000		347.215.500,000
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (%)	100	100	100	20.000.000,000	100	251.600.000,000	100	240.550.000,000	100	291.105.000,000	100	347.215.500,000
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000
meningkatkan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan Dalam dan Luar negeri yang mendapatkan Layanan Pemulangan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					788.355.798,000		295.154.796,000		324.670.275,000		357.137.303,000		422.851.032,000
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	100	100	100	788.355.798,000	100	295.154.796,000	100	324.670.275,000	100	357.137.303,000	100	422.851.032,000
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					20.000.000,000		215.872.000,000		235.872.000,000		235.872.000,000		255.872.000,000
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	100	100	100	20.000.000,000	100	215.872.000,000	100	235.872.000,000	100	235.872.000,000	100	255.872.000,000
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					384.284.615,000		429.784.615,000		471.778.569,000		439.339.615,000		384.284.615,000
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam (Persentase)	100	100	100	384.284.615,000	100	429.784.615,000	100	471.778.569,000	100	439.339.615,000	100	384.284.615,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					5.924.619.970,000		6.189.236.169,000		6.414.014.103,000		6.765.530.934,000		7.134.623.606,000
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.630.426.280,000		4.713.026.280,000		4.823.526.280,000		4.849.126.146,000		5.218.218.818,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	99	100	100	4.630.426.280,000	100	4.713.026.280,000	100	4.823.526.280,000	100	4.849.126.146,000	100	5.218.218.818,000
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					61.075.000,000		61.075.000,000		61.075.000,000		96.075.000,000		96.075.000,000
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	61.075.000,000	100	61.075.000,000	100	61.075.000,000	100	96.075.000,000	100	96.075.000,000
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					770.618.690,000		946.634.889,000		1.059.912.823,000		1.150.829.788,000		1.150.829.788,000
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	100	100	100	770.618.690,000	100	946.634.889,000	100	1.059.912.823,000	100	1.150.829.788,000	100	1.150.829.788,000
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					150.500.000,000		156.500.000,000		157.500.000,000		157.500.000,000		157.500.000,000
Menigkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	100	100	100	150.500.000,000	100	156.500.000,000	100	157.500.000,000	100	157.500.000,000	100	157.500.000,000
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					312.000.000,000		312.000.000,000		312.000.000,000		512.000.000,000		512.000.000,000
Menigkatnya Pekerja Indonesia Yang Terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak- hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	100	100	100	312.000.000,000	100	312.000.000,000	100	312.000.000,000	100	512.000.000,000	100	512.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.120.300.348,000		4.326.315.363,000		4.542.631.127,000		4.769.762.679,000		5.008.250.805,000
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.952.610.348,000		3.100.240.863,000		3.255.252.902,000		3.418.015.541,000		3.588.916.302,000
Terlaksananya Pelayanan perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	70	71	72	2.952.610.348,000	73	3.100.240.863,000	74	3.255.252.902,000	75	3.418.015.541,000	80	3.588.916.302,000
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					350.000.000,000		367.500.000,000		385.875.000,000		405.168.750,000		425.427.188,000
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pengembangan	Persentase peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan berdasarkan bidang strategis (politik, ekonomi, sosial) (%)	100	100	100	350.000.000,000	100	367.500.000,000	100	385.875.000,000	100	405.168.750,000	100	425.427.188,000
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					505.690.000,000		530.974.500,000		557.523.225,000		585.399.388,000		614.669.362,000
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani secara komprehensif (%)	100	100	100	505.690.000,000	100	530.974.500,000	100	557.523.225,000	100	585.399.388,000	100	614.669.362,000
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					100.000.000,000		105.000.000,000		110.250.000,000		115.762.500,000		121.550.626,000
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemuahan hak, serta perlindungan perempuan dan	Persentase keluarga dengan ketahanan keluarga kategori baik (%)	25	25	25	100.000.000,000	25	105.000.000,000	25	110.250.000,000	25	115.762.500,000	25	121.550.626,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
anak													
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					10.000.000,000		10.500.000,000		11.025.000,000		11.576.250,000		12.155.064,000
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data terdistribusi dan usia dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan (%)	100	100	100	10.000.000,000	100	10.500.000,000	100	11.025.000,000	100	11.576.250,000	100	12.155.064,000
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					200.000.000,000		210.000.000,000		220.500.000,000		231.525.000,000		243.101.250,000
Terjaminnya pemerataan hak semua anak secara komprehensif	Persentase anak yang menerima layanan pemerataan hak dasar secara optimal sesuai kelompok usia dan jenis kelamin (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	210.000.000,000	100	220.500.000,000	100	231.525.000,000	100	243.101.250,000
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					2.000.000,000		2.100.000,000		2.205.000,000		2.315.250,000		2.431.013,000
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak dalam situasi khusus yang mendapatkan layanan perlindungan sesuai standar (%)	100	100	100	2.000.000,000	100	2.100.000,000	100	2.205.000,000	100	2.315.250,000	100	2.431.013,000
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					8.754.992.672,000		9.192.742.306,000		9.652.379.419,000		10.134.998.390,000		10.641.748.309,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.360.199.595,000		5.628.209.575,000		5.909.620.051,000		6.205.101.055,000		6.515.356.106,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	5.360.199.595,000	100	5.628.209.575,000	100	5.909.620.051,000	100	6.205.101.055,000	100	6.515.356.106,000
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					1.250.713.239,000		1.313.248.901,000		1.378.911.346,000		1.447.856.913,000		1.520.249.759,000
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	75	75	75	1.250.713.239,000	75	1.313.248.901,000	75	1.378.911.346,000	75	1.447.856.913,000	75	1.520.249.759,000
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					893.366.599,000		938.034.929,000		984.936.676,000		1.034.183.509,000		1.085.892.685,000
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	83,90	86,60	89,30	893.366.599,000	92	938.034.929,000	94,60	984.936.676,000	97,30	1.034.183.509,000	100	1.085.892.685,000
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					893.366.599,000		938.034.929,000		984.936.676,000		1.034.183.509,000		1.085.892.685,000
Meningkatnya penganganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan kerawanan pangan (%)	1,74	1,74	1,74	893.366.599,000	1,74	938.034.929,000	1,74	984.936.676,000	1,74	1.034.183.509,000	1,74	1.085.892.685,000
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					357.346.640,000		375.213.972,000		393.974.670,000		413.673.404,000		434.357.074,000
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	6,66	16,66	20	357.346.640,000	25	375.213.972,000	33,33	393.974.670,000	50	413.673.404,000	100	434.357.074,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					100.000.000,000		133.000.000,000		196.000.000,000		241.152.192,000		253.209.802,000
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN					0,000		1.000.000,000		2.000.000,000		2.000.000,000		2.100.000,000
Menurunnya Jumlah kasus sengketa dan konflik pertanahan	Persentase Penurunan Kasus Sengketa dan Konflik Pertanahan (%)	100	100	100	0,000	100	1.000.000,000	100	2.000.000,000	100	2.000.000,000	100	2.100.000,000
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					25.000.000,000		29.000.000,000		38.000.000,000		60.000.000,000		62.250.000,000
Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah serta penyediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Bidang Tanah Yamh Ganti Kerugiannya telah diselesaikan (%)	50	25	30	25.000.000,000	35	29.000.000,000	40	38.000.000,000	45	60.000.000,000	50	62.250.000,000
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					0,000		3.000.000,000		6.000.000,000		14.152.192,000		15.609.802,000
Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Objek Redistribusi	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Persentase)	0	25	30	0,000	35	3.000.000,000	40	6.000.000,000	45	14.152.192,000	50	15.609.802,000
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					75.000.000,000		100.000.000,000		150.000.000,000		165.000.000,000		173.250.000,000
Terwujudnya Penataan Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah yang Tertib, Efisien, dan Berkeadilan	Persentase Bidang Tanah Terdaftar (%)	7,74	7,74	7,74	75.000.000,000	7,89	100.000.000,000	8,05	150.000.000,000	8,21	165.000.000,000	8,38	173.250.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					9.430.039.792,000		9.901.541.780,000		10.396.618.870,000		10.916.449.813,000		11.462.272.304,000
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.918.043.155,000		7.152.545.143,000		7.467.952.819,000		7.710.007.423,000		8.015.157.801,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	17.250.000,000	100	18.858.454,000	100	20.597.332,000	100	20.597.332,000	100	19.597.332,000
TERLAKSANANYA PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	6.900.793.155,000	100	7.133.686.689,000	100	7.447.355.487,000	100	7.689.410.091,000	100	7.995.560.469,000
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					155.467.228,000		237.467.228,000		262.467.228,000		91.398.500,000		91.398.500,000
Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	155.467.228,000	100	237.467.228,000	100	262.467.228,000	100	91.398.500,000	100	91.398.500,000
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					483.743.266,000		529.743.266,000		561.412.680,000		634.002.010,000		658.174.123,000
Tersedianya Data Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Data Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	385.580.176,000	100	416.580.176,000	100	435.580.176,000	100	454.505.997,000	100	478.678.110,000
TERSEDIANYA DATA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Data Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	98.163.090,000	100	113.163.090,000	100	125.832.504,000	100	179.496.013,000	100	179.496.013,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)					0,000		35.000.000,000		110.000.000,000		184.759.724,000		197.259.724,000
Tersedianya RTH Kab. Buol	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (%)	100	100	100	0,000	100	35.000.000,000	100	110.000.000,000	100	184.759.724,000	100	197.259.724,000
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					0,000		49.000.000,000		49.000.000,000		105.496.013,000		105.496.013,000
Terlaksananya Pengendalian Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3 (%)	100	100	100	0,000	100	49.000.000,000	100	49.000.000,000	100	105.496.013,000	100	105.496.013,000
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					184.098.643,000		209.098.643,000		212.098.643,000		242.098.643,000		221.098.643,000
Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM (%)	100	100	100	49.338.919,000	100	39.338.919,000	100	42.338.919,000	100	48.338.919,000	100	51.338.919,000
TERLAKSANANYA PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	100	100	100	134.759.724,000	100	169.759.724,000	100	169.759.724,000	100	193.759.724,000	100	169.759.724,000
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN					120.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
HIDUP													
terselesaikannya kasus pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat (%)	100	100	100	120.000.000,000	100	120.000.000,000	100	120.000.000,000	100	120.000.000,000	100	120.000.000,000
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.568.687.500,000		1.568.687.500,000		1.613.687.500,000		1.828.687.500,000		2.053.687.500,000
Tersedianya data pengelolaan persampahan	Persentase Sampah yang Tertangani (%)	100	100	100	1.568.687.500,000	100	1.568.687.500,000	100	1.613.687.500,000	100	1.828.687.500,000	100	2.053.687.500,000
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.768.148.789,000		7.106.556.228,000		7.461.884.039,000		7.834.978.241,000		8.226.727.153,000
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.738.023.789,000		6.099.931.228,000		6.439.259.039,000		6.695.853.241,000		6.900.702.153,000
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	5.738.023.789,000	100	6.099.931.228,000	100	6.439.259.039,000	100	6.695.853.241,000	100	6.900.702.153,000
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					60.000.000,000		59.500.000,000		63.000.000,000		66.500.000,000		71.700.000,000
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 Hari yang Memiliki KIA (%)	25	30	35	60.000.000,000	40	59.500.000,000	45	63.000.000,000	50	66.500.000,000	55	71.700.000,000
	Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga (KK) (%)	35	40	45		50		55		60		65	
	Persentase Penduduk yang Telah Melakukan Perekaman KTP-el (%)	25	30	35		40		45		50		55	
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					855.500.000,000		877.500.000,000		885.000.000,000		993.000.000,000		1.089.700.000,000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Angka Usia 0-17 Tahun kurang 1 Hari yang Memiliki Akta Kelahiran (%)	20	25	30	855.500.000,000	33	877.500.000,000	35	885.000.000,000	40	993.000.000,000	45	1.089.700.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Penduduk yang Meninggal memiliki Akta Kematian (%)	20	25	30		35		40		45		50	
	Rasio pasangan berakte nikah (Rasio)	30	35	40		45		50		55		60	
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					100.000.000,000		55.000.000,000		60.000.000,000		65.000.000,000		150.000.000,000
Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Ketersediaan Database kependudukan (%)	35	40	45	100.000.000,000	50	55.000.000,000	55	60.000.000,000	60	65.000.000,000	65	150.000.000,000
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					14.625.000,000		14.625.000,000		14.625.000,000		14.625.000,000		14.625.000,000
Terbitnya Buku Profil Kependudukan	Persentase Penyajian Komponen Data Profil Kependudukan (%)	25	30	35	14.625.000,000	40	14.625.000,000	45	14.625.000,000	50	14.625.000,000	55	14.625.000,000
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					5.332.043.376,000		5.598.645.544,000		5.878.577.822,000		6.172.506.713,000		6.481.132.048,000
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.218.500.000,000		4.194.000.000,000		4.551.330.916,000		4.599.150.954,000		4.961.611.994,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	4.218.500.000,000	100	4.194.000.000,000	100	4.551.330.916,000	100	4.599.150.954,000	100	4.961.611.994,000
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					5.000.000,000		6.190.855,000		7.246.906,000		8.355.759,000		9.520.054,000
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat Desa serta Kemandirian Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	108	108	108	5.000.000,000	108	6.190.855,000	108	7.246.906,000	108	8.355.759,000	108	9.520.054,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					35.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		40.000.000,000		60.000.000,000
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat Desa serta Kemandirian Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	35.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	40.000.000,000	100	60.000.000,000
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					185.000.000,000		457.454.689,000		330.000.000,000		565.000.000,000		450.000.000,000
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat Desa serta Kemandirian Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	185.000.000,000	100	457.454.689,000	100	330.000.000,000	100	565.000.000,000	100	450.000.000,000
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					888.543.376,000		911.000.000,000		960.000.000,000		960.000.000,000		1.000.000.000,000
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat Desa serta Kemandirian Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	888.543.376,000	100	911.000.000,000	100	960.000.000,000	100	960.000.000,000	100	1.000.000.000,000
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.962.740.400,000		4.160.877.422,000		4.368.921.297,000		4.587.367.366,000		4.816.735.743,000
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					449.597.544,000		472.077.422,000		495.681.294,000		520.465.360,000		546.488.629,000
Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk	Persentase keluarga yang menjadi sasaran pengendalian penduduk dan memiliki akses terhadap informasi kependudukan dan pembangunan	100	100	100	449.597.544,000	100	472.077.422,000	100	495.681.294,000	100	520.465.360,000	100	546.488.629,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	keluarga (%)												
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					3.049.142.856,000		3.201.600.000,000		3.361.680.003,000		3.529.764.006,000		3.706.252.212,000
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pasangan usia subur (PUS) aktif ber-KB terhadap total PUS sasaran (%)	69	69	70	3.049.142.856,000	75	3.201.600.000,000	80	3.361.680.003,000	90	3.529.764.006,000	100	3.706.252.212,000
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					464.000.000,000		487.200.000,000		511.560.000,000		537.138.000,000		563.994.902,000
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga sasaran yang mengikuti program pemberdayaan keluarga dan menunjukkan peningkatan indeks ketahanan keluarga (%)	100	100	100	464.000.000,000	100	487.200.000,000	100	511.560.000,000	100	537.138.000,000	100	563.994.902,000
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					5.153.201.131,000		5.410.861.187,000		5.681.404.246,000		5.965.474.459,000		6.263.748.182,000
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.667.201.131,000		4.871.420.940,000		4.965.719.049,000		5.314.474.459,000		5.462.748.182,000
Terlaksananya pelayanan perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	4.667.201.131,000	100	4.871.420.940,000	100	4.965.719.049,000	100	5.314.474.459,000	100	5.462.748.182,000
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					395.000.000,000		448.440.247,000		442.685.197,000		512.000.000,000		647.000.000,000
Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi darat	Persentase layanan angkutan darat (%)	30	30	35	395.000.000,000	35	448.440.247,000	35	442.685.197,000	35	512.000.000,000	35	647.000.000,000
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN					91.000.000,000		91.000.000,000		273.000.000,000		139.000.000,000		154.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PELAYARAN													
Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi Laut	Persentase Layanan Angkutan Laut (%)	30	30	30	91.000.000,000	35	91.000.000,000	35	273.000.000,000	40	139.000.000,000	40	154.000.000,000
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5.343.047.496,000		5.557.749.870,000		5.827.987.364,000		6.155.211.732,000		6.409.465.089,000
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.283.531.515,000		4.438.256.641,000		4.724.554.464,000		5.125.791.590,000		5.225.214.339,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	4.283.531.515,000	100	4.438.256.641,000	100	4.724.554.464,000	100	5.125.791.590,000	100	5.225.214.339,000
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					63.000.000,000		121.439.829,000		97.370.000,000		57.246.742,000		126.951.250,000
Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (%)	100	100	100	63.000.000,000	100	121.439.829,000	100	97.370.000,000	100	57.246.742,000	100	126.951.250,000
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					996.515.981,000		998.053.400,000		1.006.062.900,000		972.173.400,000		1.057.299.500,000
Meningkatnya penerapan e-government melalui pemanfaatan aplikasi informatika yang terintegrasi dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan mengedepankan prinsip good governance and clean government	Persentase aplikasi layanan pemerintahan daerah yang terintegrasi dalam sistem informasi berbasis SPBE dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (%)	74,36	74,36	74,36	996.515.981,000	74,36	998.053.400,000	74,36	1.006.062.900,000	74,36	972.173.400,000	74,36	1.057.299.500,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5.241.201.656,000		5.416.781.622,000		5.671.980.704,000		5.955.579.738,000		6.253.358.726,000
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.151.201.656,000		5.235.281.622,000		5.481.405.704,000		5.755.475.988,000		6.043.249.788,000
terlaksananya pelayanan perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	123.924.490,000	100	130.120.714,000	100	136.626.750,000	100	143.458.087,000	100	150.630.992,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	5.027.277.166,000	100	5.105.160.908,000	100	5.344.778.954,000	100	5.612.017.901,000	100	5.892.618.796,000
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					0,000		20.000.000,000		21.000.000,000		22.050.000,000		23.152.500,000
Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	45,45	68,18	0	0,000	90,91	20.000.000,000	90,92	21.000.000,000	90,92	22.050.000,000	90,92	23.152.500,000
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					15.000.000,000		15.750.000,000		16.537.500,000		17.364.375,000		18.232.594,000
Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	33,19	37,61	37,61	15.000.000,000	37,63	15.750.000,000	37,63	16.537.500,000	37,65	17.364.375,000	37,65	18.232.594,000
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					15.000.000,000		15.750.000,000		16.537.500,000		17.364.375,000		18.232.594,000
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	100	100	100	15.000.000,000	100	15.750.000,000	100	16.537.500,000	100	17.364.375,000	100	18.232.594,000
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN					0,000		20.000.000,000		21.000.000,000		22.050.000,000		23.152.500,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PERKOPERASIAN													
Terlaksannya Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	22,12	26,55	0	0,000	30,97	20.000.000,000	30,97	21.000.000,000	30,97	22.050.000,000	30,97	23.152.500,000
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					20.000.000,000		20.000.000,000		21.000.000,000		22.050.000,000		23.152.500,000
Terlaksannya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	22,57	28,76	30,97	20.000.000,000	30,97	20.000.000,000	30,97	21.000.000,000	30,97	22.050.000,000	30,97	23.152.500,000
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					40.000.000,000		40.000.000,000		42.000.000,000		44.100.000,000		46.305.000,000
Terlaksannya pertumbuhan UKM	Jumlah pertumbuhan UMKM pangan lokal binaan (%)	10	10	10	40.000.000,000	15	40.000.000,000	15	42.000.000,000	16	44.100.000,000	16	46.305.000,000
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					0,000		50.000.000,000		52.500.000,000		55.125.000,000		57.881.250,000
Terlaksannya Pengembangan UMKM	Update dan pengumpulan Data UMKM (Persentase)	5	6	0	0,000	7,2	50.000.000,000	7,5	52.500.000,000	7,8	55.125.000,000	7,8	57.881.250,000
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.722.453.761,000		4.958.576.449,000		5.206.505.271,000		5.466.830.535,000		5.740.172.061,000
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.572.453.761,000		4.668.645.496,000		4.873.862.646,000		5.134.187.910,000		5.407.529.436,000
Terlaksannya pelayanan perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	4.572.453.761,000	100	4.668.645.496,000	100	4.873.862.646,000	100	5.134.187.910,000	100	5.407.529.436,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					40.000.000,000		212.387.054,000		69.292.570,000		69.292.570,000		69.292.570,000
Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pemberian Kemudahan Berusaha	Persentase Kebijakan Pemberian Kemudahan Berusaha (%)	100	100	100	40.000.000,000	100	212.387.054,000	100	69.292.570,000	100	69.292.570,000	100	69.292.570,000
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					70.000.000,000		36.029.939,000		90.836.095,000		90.836.095,000		90.836.095,000
Pemenuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Persentase (%)	100	100	100	70.000.000,000	100	36.029.939,000	100	90.836.095,000	100	90.836.095,000	100	90.836.095,000
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					40.000.000,000		39.478.310,000		152.478.310,000		152.478.310,000		152.478.310,000
Persentase Capaian Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Persentase Capaian Realisasi Investasi PMDN dan PMA (%)	100	100	100	40.000.000,000	100	39.478.310,000	100	152.478.310,000	100	152.478.310,000	100	152.478.310,000
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					0,000		2.035.650,000		20.035.650,000		20.035.650,000		20.035.650,000
Tersusunnya Dokumen Laporan Data Penanaman Modal dan Perizinan dan Non Perizinan Yang dikelola	Persentase Data Penanaman Modal dan Perizinan dan Non Perizinan yang dikelolah (%)	0	100	100	0,000	100	2.035.650,000	100	20.035.650,000	100	20.035.650,000	100	20.035.650,000
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					6.734.106.924,000		7.057.312.270,000		7.395.327.883,000		7.748.759.277,000		8.118.228.741,000
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.771.365.855,000		5.046.797.094,000		5.183.761.190,000		5.316.035.914,000		5.442.233.042,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya pelayanan perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	4.771.365.855,000	100	5.046.797.094,000	100	5.183.761.190,000	100	5.316.035.914,000	100	5.442.233.042,000
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					250.000.000,000		275.000.000,000		302.500.000,000		332.750.000,000		366.025.000,000
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	18	18	20	250.000.000,000	29	275.000.000,000	30	302.500.000,000	30	332.750.000,000	30	366.025.000,000
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.562.741.069,000		1.719.015.176,000		1.890.916.693,000		2.080.008.363,000		2.288.009.199,000
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	3	3	5	1.562.741.069,000	7	1.719.015.176,000	8	1.890.916.693,000	8	2.080.008.363,000	9	2.288.009.199,000
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					150.000.000,000		16.500.000,000		18.150.000,000		19.965.000,000		21.961.500,000
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	1	0,17	0,17	150.000.000,000	0,17	16.500.000,000	0,17	18.150.000,000	0,17	19.965.000,000	0,17	21.961.500,000
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					4.000.000,000		50.000.000,000		57.000.000,000		20.000.000,000		60.000.000,000
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					4.000.000,000		50.000.000,000		57.000.000,000		20.000.000,000		60.000.000,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral (%)	100	100	100	4.000.000,000	100	50.000.000,000	100	57.000.000,000	100	20.000.000,000	100	60.000.000,000
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					17.000.000,000		24.500.000,000		28.875.000,000		34.343.750,000		50.568.167,000
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					17.000.000,000		24.500.000,000		28.875.000,000		34.343.750,000		50.568.167,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penyelenggaraan Keamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Keamanan Informasi (%)	100	100	100	17.000.000,000	100	24.500.000,000	100	28.875.000,000	100	34.343.750,000	100	50.568.167,000
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.296.670.435,000		2.411.503.956,000		2.532.079.154,000		2.658.683.112,000		2.791.617.267,000
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.361.670.435,000		1.429.753.956,000		1.501.241.654,000		1.576.303.737,000		1.655.118.924,000
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	100	100	100	1.361.670.435,000	100	1.429.753.956,000	100	1.501.241.654,000	100	1.576.303.737,000	100	1.655.118.924,000
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					360.000.000,000		378.000.000,000		396.900.000,000		416.745.000,000		437.582.250,000
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional daerah	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	82,76	82,76	82,76	360.000.000,000	82,76	378.000.000,000	82,76	396.900.000,000	82,76	416.745.000,000	82,76	437.582.250,000
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					155.000.000,000		162.750.000,000		170.887.500,000		179.431.875,000		188.403.468,000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan pelestarian sejarah lokal	Persentase Kegiatan Pembinaan Sejarah yang Melibatkan Masyarakat (%)	100	100	100	155.000.000,000	100	162.750.000,000	100	170.887.500,000	100	179.431.875,000	100	188.403.468,000
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					420.000.000,000		441.000.000,000		463.050.000,000		486.202.500,000		510.512.625,000
Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)	41,18	41,18	41,18	420.000.000,000	41,18	441.000.000,000	41,18	463.050.000,000	41,18	486.202.500,000	41,18	510.512.625,000
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.646.889.530,000		3.854.234.006,000		4.022.945.706,000		4.211.592.992,000		4.430.672.641,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.330.846.599,000		3.506.586.781,000		3.640.533.758,000		3.779.181.044,000		3.998.260.693,000
Terlaksananya pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	6	6	6	3.330.846.599,000	6	3.506.586.781,000	6	3.640.533.758,000	6	3.779.181.044,000	6	3.998.260.693,000
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					216.042.931,000		220.647.225,000		242.411.948,000		262.411.948,000		262.411.948,000
Terlaksananya pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Rasio)	9.532	10.000	15.000	216.042.931,000	17.000	220.647.225,000	18.000	242.411.948,000	19.000	262.411.948,000	20.000	262.411.948,000
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					100.000.000,000		127.000.000,000		140.000.000,000		170.000.000,000		170.000.000,000
Terlaksananya Kegiatan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki(Persentase)	1	1	1	100.000.000,000	1	127.000.000,000	1	140.000.000,000	1	170.000.000,000	1	170.000.000,000
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					100.000.000,000		120.000.000,000		150.000.000,000		170.000.000,000		170.000.000,000
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					50.000.000,000		60.000.000,000		70.000.000,000		85.000.000,000		100.000.000,000
Terlaksananya kegiatan pengelolaan Arsip	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Kegiatan)	1	1	1	50.000.000,000	1	60.000.000,000	1	70.000.000,000	1	85.000.000,000	1	100.000.000,000
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					25.000.000,000		30.000.000,000		40.000.000,000		42.500.000,000		42.500.000,000
Terlaksananya Program Perlindungan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0,5	0,5	0,5	25.000.000,000	0,5	30.000.000,000	0,5	40.000.000,000	0,5	42.500.000,000	0,5	42.500.000,000
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP					25.000.000,000		30.000.000,000		40.000.000,000		42.500.000,000		27.500.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya perizinan penggunaan Arsip	Tingkattersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaba n nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	1	1	1	25.000.000,000	1	30.000.000,000	1	40.000.000,000	1	42.500.000,000	1	27.500.000,000
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					5.846.882.888,000		6.139.227.032,000		6.446.188.384,000		6.768.497.803,000		7.106.922.693,000
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.200.829.111,000		5.710.140.032,000		5.959.050.528,000		6.236.157.063,000		6.523.661.630,000
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Capaian SAKIP (Nilai)	60	65	70	5.200.829.111,000	75	5.710.140.032,000	80	5.959.050.528,000	85	6.236.157.063,000	90	6.523.661.630,000
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					634.636.877,000		118.087.000,000		160.587.856,000		167.867.000,000		181.766.876,000
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	21.118,70	21.435,4 8	21.746	634.636.877,000	22.083,3 7	118.087.000,000	22.414,6 2	160.587.856,000	22.750,8 4	167.867.000,000	23.092,1 0	181.766.876,000
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					0,000		200.000.000,000		210.000.000,000		220.500.000,000		231.540.000,000
Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	721,53	757,607	795,48	0,000	851,17	200.000.000,000	910,75	210.000.000,000	974,50	220.500.000,000	1.042,72	231.540.000,000
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					11.416.900,000		65.000.000,000		68.250.000,000		73.612.500,000		77.293.125,000
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	0	30	40	11.416.900,000	45	65.000.000,000	50	68.250.000,000	55	73.612.500,000	60	77.293.125,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					0,000		46.000.000,000		48.300.000,000		70.361.240,000		92.661.062,000
Meningkatnya Konsumsi ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	60	65	70	0,000	76	46.000.000,000	82	48.300.000,000	88	70.361.240,000	95	92.661.062,000
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					270.000.000,000		297.000.000,000		326.700.000,000		359.370.000,000		395.307.000,000
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					180.000.000,000		198.000.000,000		217.800.000,000		239.580.000,000		263.538.000,000
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,08	1,08	1,16	180.000.000,000	1,24	198.000.000,000	1,32	217.800.000,000	1,32	239.580.000,000	1,32	263.538.000,000
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					20.000.000,000		22.000.000,000		24.200.000,000		26.620.000,000		29.282.000,000
Meningkatnya Pendapatan Daerah yang bersumber dari sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	0,24	0,24	0,49	20.000.000,000	0,73	22.000.000,000	0,98	24.200.000,000	0,98	26.620.000,000	0,98	29.282.000,000
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					70.000.000,000		77.000.000,000		84.700.000,000		93.170.000,000		102.487.000,000
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	1,08	1,10	1,13	70.000.000,000	1,15	77.000.000,000	1,15	84.700.000,000	1,20	93.170.000,000	1,20	102.487.000,000
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					9.112.339.310,000		9.567.956.275,000		10.046.354.091,000		10.548.671.795,000		11.076.105.385,000
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA					1.786.733.198,000		1.876.069.858,000		1.969.873.351,000		2.068.367.019,000		2.171.785.369,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PERTANIAN													
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	59.660	67.210	75.026	1.786.733.198,000	76.656	1.876.069.858,000	77.790	1.969.873.351,000	78.931	2.068.367.019,000	80.096	2.171.785.369,000
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Kg)	400.000	475.000	550.000		625.000		700.000		775.000		850.000	
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.573.466.396,000		3.752.139.716,000		3.939.746.702,000		4.136.734.037,000		4.343.570.739,000
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian/perkebunan yang ditetapkan menjadi LP2B (%)	1,36	10	22	3.573.466.396,000	24	3.752.139.716,000	26	3.939.746.702,000	28	4.136.734.037,000	30	4.343.570.739,000
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					893.366.599,000		938.034.929,000		984.936.676,000		1.034.183.509,000		1.085.892.685,000
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	10	15	70	893.366.599,000	70	938.034.929,000	70	984.936.676,000	70	1.034.183.509,000	70	1.085.892.685,000
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					893.366.599,000		938.034.929,000		984.936.676,000		1.034.183.509,000		1.085.892.685,000
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian/perkebunan (%)	94,58	93,15	92,64	893.366.599,000	92,06	938.034.929,000	91,37	984.936.676,000	90,56	1.034.183.509,000	89,57	1.085.892.685,000
	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian/perkebunan (%)	10	10	10		10		10		10		10	
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					536.019.959,000		562.820.957,000		590.962.005,000		620.510.106,000		651.535.611,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha/Rekomtek Pertanian/Perkebunan yang diterbitkan (%)	10	10	15	536.019.959,000	17	562.820.957,000	20	590.962.005,000	21	620.510.106,000	23	651.535.611,000
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.429.386.559,000		1.500.855.886,000		1.575.898.681,000		1.654.693.615,000		1.737.428.296,000
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	5	10	10	1.429.386.559,000	20	1.500.855.886,000	20	1.575.898.681,000	20	1.654.693.615,000	20	1.737.428.296,000
	Persentase kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi (%)	0	0	1		2		2		2		5	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					139.000.000,000		197.200.000,000		213.449.999,000		224.122.500,000		235.328.624,000
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					20.000.000,000		20.000.000,000		21.000.000,000		22.050.000,000		23.152.500,000
Terlaksannnya Kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	0	0	2,5	20.000.000,000	2,5	20.000.000,000	3,0	21.000.000,000	3,0	22.050.000,000	3,0	23.152.500,000
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					0,000		20.000.000,000		20.999.999,000		22.050.000,000		23.152.499,000
Terlaksannnya Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	6,4	9,7	0	0,000	9,10	20.000.000,000	10	20.999.999,000	11	22.050.000,000	11	23.152.499,000
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					89.000.000,000		87.200.000,000		87.950.000,000		92.347.500,000		96.964.875,000
Terlaksannnya Operasi Pasar pada Pasar Rakyat	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang	12,9	16,1	19,3	89.000.000,000	19,5	87.200.000,000	19,8	87.950.000,000	19,10	92.347.500,000	19,10	96.964.875,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penting (Persentase)												
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					20.000.000,000		20.000.000,000		21.000.000,000		22.050.000,000		23.152.500,000
Terlaksananya Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan (Rp)	0	0	3,0	20.000.000,000	3,0	20.000.000,000	3,2	21.000.000,000	3,5	22.050.000,000	3,5	23.152.500,000
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					10.000.000,000		50.000.000,000		52.500.000,000		55.125.000,000		57.881.250,000
Terlaksananya Standarisasi dan perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	1,9	2,2	2,5	10.000.000,000	2,5	50.000.000,000	3,0	52.500.000,000	3,5	55.125.000,000	3,5	57.881.250,000
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					0,000		0,000		10.000.000,000		10.500.000,000		11.025.000,000
Terlaksananya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	2	2	0	0,000	0	0,000	7	10.000.000,000	8	10.500.000,000	8	11.025.000,000
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					90.000.000,000		129.730.116,000		145.466.622,000		152.739.953,000		160.376.951,000
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					45.000.000,000		84.730.116,000		88.966.622,000		93.414.953,000		98.085.701,000
Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Kecil yang Memperoleh Fasilitasi dan Sertifikasi Usaha (%)	45,25	45,45	45,60	45.000.000,000	45,62	84.730.116,000	45,65	88.966.622,000	45,65	93.414.953,000	45,65	98.085.701,000
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					20.000.000,000		20.000.000,000		31.500.000,000		33.075.000,000		34.728.750,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Izin yang di terbitkan lengkap dan sesuai dengan standar yang berlaku	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	10	15	18	20.000.000,000	18	20.000.000,000	20	31.500.000,000	20	33.075.000,000	20	34.728.750,000
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		26.250.000,000		27.562.500,000
Terlaksananya Hasil Fasilitasi, Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri	Pertumbuhan Industri (%)	25	32,50	40	25.000.000,000	45	25.000.000,000	45	25.000.000,000	45	26.250.000,000	45	27.562.500,000
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					476.250.000,000		531.677.299,000		642.945.038,000		644.276.165,000		645.673.847,000
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					140.000.000,000		140.000.000,000		140.000.000,000		140.000.000,000		140.000.000,000
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	140.000.000,000	100	140.000.000,000	100	140.000.000,000	100	140.000.000,000	100	140.000.000,000
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					195.000.000,000		255.000.000,000		315.000.000,000		315.000.000,000		315.000.000,000
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	100	100	100	195.000.000,000	100	255.000.000,000	100	315.000.000,000	100	315.000.000,000	100	315.000.000,000
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					141.250.000,000		136.677.299,000		187.945.038,000		189.276.165,000		190.673.847,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Menigkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran Dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	141.250.000,000	100	136.677.299,000	100	187.945.038,000	100	189.276.165,000	100	190.673.847,000
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					27.660.133.642,000		29.323.140.321,000		30.789.297.335,000		32.328.762.203,000		33.945.200.313,000
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.299.067.952,000		25.655.679.754,000		26.950.052.669,000		28.302.498.243,000		29.742.101.960,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administarsi Perkantoran (%)	100	100	100	79.154.549,000	100	95.913.741,000	100	100.709.431,000	100	105.744.906,000	100	111.032.155,000
Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administarsi Perkantoran (%)	100	100	100	178.685.068,000	100	194.004.655,000	100	213.406.910,000	100	234.748.052,000	100	258.265.322,000
terlaksananya pelayanan pemerintahan	Persentase Pelayanan Administarsi Perkantoran (%)	4	100	100	64.244.056,000	100	65.048.462,000	100	70.187.787,000	100	67.969.314,000	100	84.066.712,000
Terlaksananya pelayanan perkantoran	Persentase Pelayanan Administarsi Perkantoran (%)	100	100	100	22.888.144.803,000	100	24.032.552.043,000	100	25.234.179.645,000	100	26.495.888.627,000	100	27.820.683.058,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administarsi Perkantoran (%)	100	100	100	45.409.474,000	100	53.274.282,000	100	55.937.996,000	100	58.734.898,000	100	61.671.644,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administarsi Perkantoran (%)	100	100	100	229.519.800,000	100	240.995.790,000	100	253.045.580,000	100	265.697.860,000	100	278.982.753,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administarsi Perkantoran (%)	100	100	100	225.440.956,000	100	276.713.003,000	100	290.548.653,000	100	305.076.086,000	100	320.329.891,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administarsi Perkantoran (%)	100	100	100	377.283.246,000	100	435.432.478,000	100	457.204.102,000	100	480.064.307,000	100	504.067.523,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksana Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	211.186.000,000	100	261.745.300,000	100	274.832.565,000	100	288.574.193,000	100	303.002.902,000
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					3.146.748.623,000		3.380.899.516,000		3.548.057.588,000		3.731.188.328,000		3.905.048.810,000
Cakupan layanan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	100	100	430.070.826,000	100	485.980.033,000	100	510.279.034,000	100	535.792.984,000	100	562.582.632,000
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100	2.468.362.853,000	100	2.591.780.995,000	100	2.721.370.044,000	100	2.857.438.546,000	100	3.000.310.473,000
TERLAKSANANYA PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	4	100	100	248.314.944,000	100	303.138.488,000	100	316.408.510,000	100	337.956.798,000	100	342.155.705,000
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4	100	100		100		100		100		100	
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					214.317.067,000		286.561.051,000		291.187.078,000		295.075.632,000		298.049.543,000
CAKUPAN LAYANAN ADM DAN FASILITASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Kematangan UKPBJ (Persentase)	100	100	100	6.866.000,000	100	7.924.230,000	100	8.320.441,000	100	8.736.463,000	100	9.173.286,000
CAKUPAN LAYANAN DAN FASILITASI ,PENGENDALIAN ,EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100	39.275.901,000	100	74.854.362,000	100	68.895.058,000	100	61.669.014,000	100	52.972.598,000
Terlaksananya kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	168.175.166,000	100	203.782.459,000	100	213.971.579,000	100	224.670.155,000	100	235.903.659,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					28.189.382.867,000		29.598.852.010,000		30.959.721.610,000		32.410.634.691,000		33.948.093.426,000
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.831.172.313,000		26.072.730.928,000		27.376.367.474,000		28.814.810.848,000		30.321.107.457,000
Terlaksananya pelayanan perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	24.831.172.313,000	100	26.072.730.928,000	100	27.376.367.474,000	100	28.814.810.848,000	100	30.321.107.457,000
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					3.358.210.554,000		3.526.121.082,000		3.583.354.136,000		3.595.823.843,000		3.626.985.969,000
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	3.358.210.554,000	100	3.526.121.082,000	100	3.583.354.136,000	100	3.595.823.843,000	100	3.626.985.969,000
5.01 - PERENCANAAN					8.142.032.357,000		8.548.776.778,000		8.976.332.507,000		9.305.266.021,000		9.776.646.210,000
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.292.032.357,000		6.604.955.152,000		6.935.752.349,000		7.118.089.285,000		7.442.793.127,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	6.292.032.357,000	100	6.604.955.152,000	100	6.935.752.349,000	100	7.118.089.285,000	100	7.442.793.127,000
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					750.000.000,000		788.035.795,000		827.262.194,000		878.450.028,000		921.697.196,000
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	750.000.000,000	100	788.035.795,000	100	827.262.194,000	100	878.450.028,000	100	921.697.196,000
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN					1.100.000.000,000		1.155.785.831,000		1.213.317.964,000		1.308.726.708,000		1.412.155.887,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
DAERAH													
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	1.100.000.000,000	100	1.155.785.831,000	100	1.213.317.964,000	100	1.308.726.708,000	100	1.412.155.887,000
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
5.02 - KEUANGAN					170.236.741.709,00 0		178.748.578.793,00 0		187.686.007.733,00 0		197.070.308.120,00 0		206.923.823.526,00 0
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.057.593.378,000		17.910.473.039,000		18.805.996.678,000		19.746.296.495,000		20.733.611.298,000
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	90	90	90	12.061.846.229,000	90	12.664.938.531,000	90	13.298.185.443,000	90	13.963.094.696,000	90	14.661.249.405,000
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	99	100	100	4.995.747.149,000	100	5.245.534.508,000	100	5.507.811.235,000	100	5.783.201.799,000	100	6.072.361.893,000
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					151.856.035.602,00 0		159.448.837.389,00 0		167.421.279.270,00 0		175.792.343.248,00 0		184.581.960.429,00 0
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan serta Tata Kelola	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	90	90	90	151.856.035.602,00 0	90	159.448.837.389,00 0	90	167.421.279.270,00 0	90	175.792.343.248,00 0	90	184.581.960.429,00 0



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	90	90	90		90		90		90		90	
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	90	90	90		90		90		90		90	
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					890.263.904,000		934.777.101,000		981.515.959,000		1.030.591.762,000		1.082.121.357,000
Meningkatnya tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	90	90	90	890.263.904,000	90	934.777.101,000	90	981.515.959,000	90	1.030.591.762,000	90	1.082.121.357,000
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					432.848.825,000		454.491.264,000		477.215.826,000		501.076.615,000		526.130.442,000
Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah (%)	100	100	100	432.848.825,000	100	454.491.264,000	100	477.215.826,000	100	501.076.615,000	100	526.130.442,000
5.03 - KEPEGAWAIAN					4.174.975.576,000		4.386.724.956,000		4.604.989.204,000		4.832.780.681,000		5.088.502.040,000
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.470.607.443,000		3.647.465.416,000		3.830.510.680,000		4.021.333.787,000		4.221.336.780,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	3.470.607.443,000	100	3.647.465.416,000	100	3.830.510.680,000	100	4.021.333.787,000	100	4.221.336.780,000
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					704.368.133,000		739.259.540,000		774.478.524,000		811.446.894,000		867.165.260,000
Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	100	100	100	704.368.133,000	100	739.259.540,000	100	774.478.524,000	100	811.446.894,000	100	867.165.260,000
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					483.003.720,000		504.153.304,000		530.432.969,000		559.412.601,000		573.300.906,000
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					483.003.720,000		504.153.304,000		530.432.969,000		559.412.601,000		573.300.906,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Layanan Pengembangan SDM (%)	100	100	100	483.003.720,000	100	504.153.304,000	100	530.432.969,000	100	559.412.601,000	100	573.300.906,000
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					500.000.000,000		525.357.196,000		551.508.166,000		698.966.686,000		727.798.132,000
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					500.000.000,000		525.357.196,000		551.508.166,000		698.966.686,000		727.798.132,000
Meningkatnya Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	100	100	100	500.000.000,000	100	525.357.196,000	100	551.508.166,000	100	698.966.686,000	100	727.798.132,000
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					9.880.401.966,000		10.374.422.064,000		10.893.143.167,000		11.437.800.325,000		12.009.690.342,000
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.613.763.280,000		10.041.143.378,000		10.310.350.481,000		10.626.043.639,000		10.728.287.656,000
Terlaksananya pelayanan perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	9.613.763.280,000	100	10.041.143.378,000	100	10.310.350.481,000	100	10.626.043.639,000	100	10.728.287.656,000
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					240.585.686,000		306.865.686,000		544.384.686,000		764.348.686,000		1.176.464.686,000
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Pada Perangkat Daerah (%)	75	75	77	240.585.686,000	79	306.865.686,000	81	544.384.686,000	83	764.348.686,000	85	1.176.464.686,000
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran N-1 Pada Perangkat Daerah (%)	56	56,89	60		65		70		75		80	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Pemenuhan Dokumen Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada 2 Elemen (%)	95	95	95		95		95		95		95	
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					26.053.000,000		26.413.000,000		38.408.000,000		47.408.000,000		104.938.000,000
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi (%)	100	100	100	26.053.000,000	100	26.413.000,000	100	38.408.000,000	100	47.408.000,000	100	104.938.000,000
7.01 - KECAMATAN					37.610.291.173,000		39.881.377.731,000		41.765.446.615,000		43.723.718.947,000		45.768.904.897,000
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.653.095.826,000		37.514.289.934,000		39.064.388.587,000		40.697.715.089,000		42.692.179.025,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	3.154.484.283,000	100	3.254.699.240,000	100	3.400.129.471,000	100	3.544.212.886,000	100	3.706.002.660,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	2.299.718.762,000	100	2.429.456.435,000	100	2.467.971.756,000	100	2.589.800.156,000	100	2.701.822.486,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	2.413.029.002,000	100	2.554.190.452,000	100	2.665.424.724,000	100	2.790.720.710,000	100	2.922.281.496,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	11.027.650.782,000	100	11.670.783.321,000	100	12.106.072.487,000	100	12.543.163.611,000	100	13.297.571.792,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	2.305.038.554,000	100	2.429.417.914,000	100	2.539.807.631,000	100	2.636.368.704,000	100	2.734.586.993,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	2.224.668.497,000	100	2.345.130.421,000	100	2.445.172.817,000	100	2.558.717.333,000	100	2.677.939.075,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	2.515.293.745,000	100	2.642.894.617,000	100	2.774.438.473,000	100	2.912.559.524,000	100	3.056.314.316,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	3.028.103.704,000	100	3.180.208.326,000	100	3.328.137.563,000	100	3.471.115.133,000	100	3.605.820.743,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	2.433.459.482,000	100	2.558.421.065,000	100	2.682.935.803,000	100	2.812.076.277,000	100	2.960.468.093,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	1.684.162.276,000	100	1.770.839.595,000	100	1.877.041.887,000	100	1.946.577.531,000	100	2.033.939.958,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	2.567.486.739,000	100	2.678.248.548,000	100	2.777.255.975,000	100	2.892.403.224,000	100	2.995.431.413,000
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					180.351.905,000		306.945.713,000		329.801.697,000		543.890.243,000		557.833.125,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	70.034.440,000	100	91.560.000,000	100	97.800.000,000	100	100.000.000,000	100	105.000.000,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	0	100	100	35.800.000,000	100	35.800.000,000	100	35.800.000,000	100	35.800.000,000	100	35.800.000,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	0,000	100	0,000	100	35.000.000,000	100	200.000.000,000	100	155.000.000,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	4.050.001,000	100	10.875.068,000	100	11.000.000,000	100	16.550.000,000	100	38.977.647,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	10.000.000,000	100	13.605.000,000	100	13.605.000,000	100	13.605.000,000	100	13.605.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	0,000	100	50.000.000,000	100	57.750.000,000	100	70.754.309,000	100	74.292.025,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	9.500.000,000	100	9.975.000,000	100	10.473.750,000	100	10.997.437,000	100	11.547.309,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	4.050.001,000	100	10.875.068,000	100	11.000.000,000	100	11.550.000,000	100	38.977.647,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	20.000.000,000	100	43.261.947,000	100	43.261.947,000	100	43.261.947,000	100	43.261.947,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	0	100	100	25.917.463,000	100	35.993.630,000	100	6.611.000,000	100	6.611.000,000	100	6.611.000,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	1.000.000,000	100	5.000.000,000	100	7.500.000,000	100	34.760.550,000	100	34.760.550,000
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.498.068.066,000		1.540.905.775,000		1.692.212.900,000		1.778.825.399,000		1.776.779.021,000
Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	37.829.066,000	100	47.690.000,000	100	66.920.000,000	100	69.000.000,000	100	73.885.175,000
Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	0	100	3.850.000,000	100	3.850.000,000	100	3.850.000,000	100	3.850.000,000	100	3.850.000,000
Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	1.400.000.000,000	100	1.400.000.000,000	100	1.510.000.000,000	100	1.584.000.000,000	100	1.555.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	0,000	100	5.000.000,000	100	5.500.000,000	100	10.775.000,000	100	11.313.750,000
Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	3.740.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000
Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	15.000.000,000	100	10.097.875,000	100	15.807.500,000	100	20.404.125,000	100	25.845.200,000
Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	0,000	100	5.000.000,000	100	5.500.000,000	100	10.775.000,000	100	11.313.750,000
Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	22.689.000,000	100	24.957.900,000	100	24.957.900,000	100	24.957.900,000	100	24.957.900,000
Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	0	100	100	6.960.000,000	100	6.960.000,000	100	6.960.000,000	100	6.960.000,000	100	6.960.000,000
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	7.000.000,000	100	7.350.000,000	100	7.717.500,000	100	8.103.374,000	100	8.653.246,000
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	1.000.000,000	100	20.000.000,000	100	35.000.000,000	100	30.000.000,000	100	45.000.000,000
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					105.710.000,000		176.414.994,000		212.853.051,000		240.197.817,000		258.663.201,000
Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	1	100	100	0,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	1.826.188,000	100	5.000.000,000
Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0	0	100	3.605.000,000	100	10.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	35.000.000,000	100	50.000.000,000	100	60.000.000,000	100	70.000.000,000	100	90.000.000,000
Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	0,000	100	5.000.000,000	100	5.500.000,000	100	14.204.309,000	100	14.914.524,000
Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	3.605.000,000	100	10.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000
Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	0,000	100	15.000.000,000	100	15.750.000,000	100	16.537.500,000	100	17.364.375,000
Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	0,000	100	5.000.000,000	100	5.500.000,000	100	14.204.309,000	100	14.914.524,000
Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	42.500.000,000	100	52.689.994,000	100	53.141.801,000	100	53.216.199,000	100	42.500.000,000
Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0	100	100	15.000.000,000	100	17.500.000,000	100	20.000.000,000	100	22.000.000,000	100	22.500.000,000
Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	1.500.000,000	100	1.500.000,000	100	3.000.000,000	100	3.000.000,000	100	6.000.000,000
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	4.500.000,000	100	4.725.000,000	100	4.961.250,000	100	5.209.312,000	100	5.469.778,000
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					49.489.575,000		171.663.815,000		253.697.880,000		251.546.149,000		268.651.937,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	0,000	100	15.000.000,000	100	15.750.000,000	100	16.537.500,000	100	17.364.375,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	1	100	100	12.159.575,000	100	6.000.000,000	100	26.000.000,000	100	26.000.000,000	100	30.000.000,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	0	0	0,000	100	6.000.000,000	100	6.000.000,000	100	6.000.000,000	100	6.000.000,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	0,000	100	0,000	100	55.750.000,000	100	46.000.000,000	100	55.750.000,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	0,000	100	15.000.000,000	100	16.500.000,000	100	17.325.000,000	100	18.191.250,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	0,000	100	6.000.000,000	100	6.000.000,000	100	6.000.000,000	100	6.000.000,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	10.000.000,000	100	38.663.815,000	100	31.197.880,000	100	21.358.649,000	100	12.155.062,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	0,000	100	15.000.000,000	100	16.500.000,000	100	17.325.000,000	100	18.191.250,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	5.000.000,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	21.330.000,000	100	50.000.000,000	100	55.000.000,000	100	70.000.000,000	100	70.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	1.000.000,000	100	10.000.000,000	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	100	30.000.000,000
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					123.575.801,000		171.157.500,000		212.492.500,000		211.544.250,000		214.798.588,000
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	1.274.875,000	100	24.500.000,000	100	22.575.000,000	100	23.703.750,000	100	23.888.938,000
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	20	1	1	8.550.000,000	1	0,000	1	35.000.000,000	1	35.000.000,000	1	35.000.000,000
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	14.845.000,000	100	14.845.000,000	100	14.845.000,000	100	14.845.000,000	100	14.845.000,000
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	100	16.000.000,000	100	16.800.000,000	100	17.640.000,000
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	11.175.000,000	100	16.112.500,000	100	16.112.500,000	100	16.112.500,000	100	16.112.500,000
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	24.000.000,000	100	25.200.000,000	100	26.460.000,000	100	27.783.000,000	100	29.172.150,000
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	100	16.000.000,000	100	16.800.000,000	100	17.640.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	0	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	0	100	100	5.100.000,000	100	5.100.000,000	100	5.100.000,000	100	5.100.000,000	100	5.100.000,000
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	100	100	18.630.926,000	100	45.400.000,000	100	50.400.000,000	100	45.400.000,000	100	45.400.000,000
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					5.015.228.429,000		5.285.989.881,000		5.540.289.378,000		5.805.303.843,000		6.080.569.032,000
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.250.890.830,000		3.169.278.989,000		3.161.272.296,000		3.306.005.262,000		3.297.577.877,000
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	3.250.890.830,000	100	3.169.278.989,000	100	3.161.272.296,000	100	3.306.005.262,000	100	3.297.577.877,000
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					862.898.250,000		900.000.000,000		1.069.500.000,000		1.119.500.000,000		1.398.192.574,000
Mengkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	862.898.250,000	100	900.000.000,000	100	1.069.500.000,000	100	1.119.500.000,000	100	1.398.192.574,000
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA					826.439.349,000		520.750.000,000		542.250.000,000		542.250.000,000		547.250.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BUDAYA POLITIK													
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	826.439.349,000	100	520.750.000,000	100	542.250.000,000	100	542.250.000,000	100	547.250.000,000
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					15.000.000,000		50.000.000,000		70.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Ormas Yang Terdaftar (%)	100	100	100	15.000.000,000	100	50.000.000,000	100	70.000.000,000	100	75.000.000,000	100	75.000.000,000
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					30.000.000,000		235.860.892,000		257.860.892,000		257.860.892,000		257.860.892,000
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	30.000.000,000	100	235.860.892,000	100	257.860.892,000	100	257.860.892,000	100	257.860.892,000
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					30.000.000,000		410.100.000,000		439.406.190,000		504.687.689,000		504.687.689,000
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	30.000.000,000	100	410.100.000,000	100	439.406.190,000	100	504.687.689,000	100	504.687.689,000
TOTAL KESELURUHAN					1.022.655.148.024,000		1.074.518.477.430,000		1.128.005.328.301,000		1.184.166.521.716,000		1.243.135.774.802,000



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Buol diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Buol. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Ukuran keberhasilan RPJMD dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2025-2029 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan diharapkan dapat menekan angka kemiskinan. Pembangunan SDM unggul berkarakter dan harmonisasi sosial yang kondusif diupayakan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis terus diupayakan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dalam proses pembangunan di Buol periode 2025-2029.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan IKU dan target capaian periode 2025-2030 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030 Kabupaten Buol

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1.	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	55.50-64.10	61.63-68.08	67.75-72.05	73.88-76.03	80.00-80.00	86.13-83.98
2.	Indeks Gini	Indeks	0.233-0.264	0.231-0.255	0.230-0.245	0.228-0.236	0.226-0.226	0.224-0.217
3.	Tingkat Kemiskinan	(%)	12,55	11,91	11,28	10,64	10,00	9,36
4.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90
5.	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	44,24	45,46	46,67	47,89	49,10	50,32
6.	Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	TON CO2 EQ	399.371	458.259	517.148	576.036	634.924	693.812
7.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	14.50-22.50	16.66-22.66	18.82-22.82	20.97-22.97	23.13-23.13	25.29-23.29
8.	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	2,04	2,23	2,41	2,60	2,78	2,97
9.	Indeks Pembangunan Manusia	%	71.07-71.19	72.25-72.34	73.44-73.50	74.62-74.65	75.80-75.80	76.99-76.96
10.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.50-7.73	3.85-7.03	4.21-6.32	4.56-5.62	4.92-4.92	5.27-4.21
11.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	35,00	38,44	41,88	45,31	48,75	52,19
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.50-2.90	2.52-2.82	2.54-2.74	2.56-2.66	2.58-2.58	2.60-2.50



4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek Geografi dan Demografi adalah indikator kinerja daerah yang mengukur karakteristik dasar wilayah dan penduduk yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan target capaian periode 2025-2030 sebagaimana tabel berikut



Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030 Kabupaten Buol

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	-	7,72	7,34	6,96	6,58	6,20	5,82
2	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	-	399.371,04	458.259,34	517.147,64	576.035,94	634.924,24	693.812,54
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,49	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1
4	Indeks Risiko Bencana	Indeks	271,2	210,44	202,32	194,19	186,07	177,94	169,82
5	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	-	0,60	0,68	0,77	0,85	0,93	1,01
6	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	57,00	57,00	67,50	78,00	88,50	99,00	99,00
7	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	-	5-7.5	5.84-9.38	6.68-11.25	7.52-13.13	8.36-15.00	9.2-16.88
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	-	11	14,50	18,00	21,50	25,00	28,50
9	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	30,29	30.29-30.29	32.19-33.72	34.09-37.15	35.98-40.57	37.88-44.00	39.78-47.43



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	82,81	86,26	86,47	86,67	86,88	87,08	87,29
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,13	2.50-2.90	2.52-2.82	2.54-2.74	2.56-2.66	2.58-2.58	2.60-2.50
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,349	0,330	0,322	0,315	0,307	0,299	0,291
3	Indeks Pembangunan Manusia	%	70,89	71.07-71.19	72.25-72.34	73.44-73.50	74.62-74.65	75.80-75.80	76.98-76.95
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,22	90,22	91,80	92,60	93,40	94,20	95,00
5	Indeks Gini	Indeks	0,266	0.233-0.264	0.231-0.255	0.230-0.245	0.228-0.236	0.226-0.226	0.224-0.217
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,31	3.50-7.73	3.86-7.03	4.21-6.33	4.57-5.62	4.92-4.92	5.28-4.22
7	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	51,14	55.50-64.10	61.63-68.08	67.75-72.05	73.88-76.03	80.00-80.00	86.13-83.98
8	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,20	9,29	9,38	9,47	9,56	9,65	9,65
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,18	13,78	13,84	13,90	13,96	14,01	14,07
10	Indeks Pembangunan Keluarga	%	61,92	63,08	64,24	65,40	66,56	67,72	68,88
11	Usia Harapan Hidup (UHH)	%	71,30	71,66	72,01	72,20	72,22	72,23	72,23
12	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	36,9	30	29	28	27	26	25



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
13	Tingkat Kemiskinan	(%)	13,08	12,55	11,91	11,28	10,64	10,00	9,36
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	43,02	44,24	45,46	46,67	47,89	49,10	50,32
2	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	44,62	49,10	55,83	62,55	69,28	76,00	82,7
3	Indeks Inovasi Daerah	Angka	34,55	35,00	38,44	41,88	45,31	48,75	52,19
4	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	-	62,86	63,82	64,79	65,75	66,71	67,67
5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel) (Ribu/Orang)	Orang	150	150-250	306-381	463-513	619-644	775-775	931-906
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,17	62,50	65,72	69,37	73,02	76,67	80,32
7	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum	%	-	0.50-0.58	0.72-0.78	0.95-0.99	1.17-1.19	1.39-1.39	1.61-1.59
8	Nilai SAKIP	Nilai	60,01	60,33	63,96	64,64	68,26	68,94	72,57
9	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	-	14.50-22.50	16.66-22.66	18.82-22.82	20.97-22.97	23.13-23.13	25.28-23.28
10	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	-	0,84	1,10	1,36	1,62	1,88	2,14
11	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Nilai	-	11,10	10,93	10,75	10,58	10,40	10,2
12	Persentase Desa Mandiri	%	9,26	11,11	12,96	14,81	16,67	18,52	20,37



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
13	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	2,06	2,04	2,23	2,41	2,60	2,78	2,97
14	Rasio Ketergantungan	%	49,90	49,90	49,65	49,40	49,15	48,90	48,90
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Persentase	49,43	53,26	54,28	55,29	56,31	57,32	58,34
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,50	70,50	70,85	71,21	71,56	71,92	71,92
IV ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	-	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90
2	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,02	3,11	3,15	3,20	3,24	3,28	3,32
3	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
4	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	-	2,1	2,28	2,45	2,63	2,80	3,0
5	Indeks Integritas Nasional	Persentase	-	75	75,95	76,90	77,85	78,80	79,8
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,19	3,20	3,24	3,34	3,43	3,52	3,61
7	Persentase Penegakan Perda	%	-	50	60	60	62	65	65
V INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Iklim Kebinekaan (SMP)	%	68,57	69,57	70,57	71,57	72,57	73,57	74,57



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,60	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48	0,48
3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	76,76	77,12	77,48	77,84	78,20	78,56	78,56
4	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,21	99,05	99,16	99,27	99,38	99,49	99,49
5	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	94,19	85,82	96,36	96,90	97,44	97,98	97,98
6	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	57,97	60,47	62,97	65,47	67,97	70,47	72,97
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15	Angka	96,80.	97,14	97,48	97,82	98,16	98,50	98,84
8	Proporsi Guru PAUD Dengan Kualifikasi S1/D4	%	45,75	37,48	38,48	39,48	40,48	41,48	42,48
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	91,40	92,14	92,51	92,88	93,25	93,62	93,62
10	Angka Partisipasi Kasar SD / MI	%	97,77	98,64	98,89	99,14	99,39	99,64	99,64
11	Skor Kemampuan Numerasi (SD)	Skor	45,94	48,84	51,74	54,64	57,54	60,44	63,34
12	Iklim Keamanan (SMP)	%	66,65	68,15	69,65.	71,15	72,65	74,15	75,65
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	94,19	95,87	96,46	97,05	97,64	98,23	98,23
14	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,53	0,52	0,50	0,48	0,46	0,44	0,44
15	Angka Partisipasi Kasar SMP / MTs	%	86,60	87,92	88,58	89,24	89,90	90,56	90,56



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
16	Skor Kemampuan Literasi (SMP)	Skor	56,75	57,85	58,95	60,05	61,15	62,25	63,35
17	Skor Kemampuan Literasi (SD)	Skor	51,38	53,88	56,38	58,88	61,38	63,88	66,38
18	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	53,19	55,59	57,99	60,39	62,79	65,19	67,59
19	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	920,39	955,01	972,32	989,63	1.006,94	1.024,25	1.024,25
20	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	78,35	79,57	80,18	80,79	81,40	82,01	82,01
21	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	57,63	64,12	78,69	98,12	100,00	100,00	100,00
22	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Angka	78,18	80,92	83,66	86,40	89,14	91,88	94,43
23	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	Angka	16,65	20,75	24,84	28,94	33,04	37,14	41,24
24	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	34,93	35,54	36,65	37,76	38,87	39,98	39,98
25	Skor Kemampuan Numerasi (SMP)	Skor	53,38	54,88	56,38	57,88	59,38	60,88	62,38
26	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	48,42	49,12	49,47	49,82	50,17	50,52	50,87
27	Iklim Keamanan SD	Nilai	74,32	75,22	76,12	77,02	77,92	78,82	79,72



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
28	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	29,38	31,81	34,23	36,66	39,08	40,29	40,29
29	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	96,48	96,75	97,02	97,29	97,56	97,83	97,83
30	Iklim Kebinekaan (SD)	%	72,18	73,18	74,18	75,18	76,18	77,18	77,18
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Cakupan kunjungan bayi	%	90	91	92	93	94	95	95
2	Pelayan IVA	Angka	50.450	50.450	55.495	61.044	67.148	73.863	73.863
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	95	95	95	95	95	95	95
4	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Penderita GHPR (gigitan hewan penular rabies) yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Penemuan kasus AFP	Kasus	4	4	4	4	4	4	4
7	PENEMUAN KASUS PNEMONIA DAN PNEMONIA BERAT	%	85	85	90	95	95	95	95
8	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	%	75	75	75	75	75	75	75



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	91	91	92	93	94	95	95
10	Riwayat Pengobatan Hepatitis C dan tidak sembuh	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Fasilitas Umum	%	85	85	85	85	85	85	85
12	Cakupan Pelayanan Nifas	%	35	35	45	55	70	85	85
13	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,417	0,108	0,101	0,94	0,87	0,68	0,68
14	Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100
16	Pelayanan GIF usia (7-15 TAHUN)	Angka	31.294	31.294	34.423	37.866	37.866	41.652	45.618
17	Pravelensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	%	11	11	11	11	11	11	11
18	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Vaksin	%	80	80	85	85	85	90	90



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
19	Jumlah alat kesehatan yang memenuhi syarat (Kalibrasi) di Puskesmas	Angka	250	250	250	300	300	350	350
20	Jumlah Hasil Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga Yang Memenuhi Syarat	%	30	30	35	35	35	40	40
21	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Rasio	11	11	11	11	11	11	11
22	Cakupan pembantu puskesmas	%	48	48	48	48	48	48	48
23	Jumlah Unit Puskesmas yang mendapatkan distribusi obat	%	14	14	14	14	14	14	14
24	Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja	%	25	25	35	45	65	75	75
25	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Rasio	7	8	8	9	9	10	10
26	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	Persentase	75	80	85	90	90	95	100
27	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	9,2	9,2	8,4	8	7,6	7,2	7,2



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
28	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	1	1	1	1	1	1	1
29	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
30	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	63	63	66	69	72	75	75
31	Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja	%	10	10	20	30	40	50	50
32	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	95	95	95	95	95	95	95
33	Cakupan puskesmas	%	127	127	127	127	127	127	127
34	Persentase Pelayanan kefarmasian di Puskesmas	%	75	75	75	75	80	80	80
35	Pemetaan risiko penyakit infeksi emerging dan silantor dan SKDR	%	100	100	100	100	100	100	100
36	PENANGANAN PNEMONIA DAN PNEMONIA BERAT	%	85	85	90	90	90	90	90
37	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	16,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
38	Jumlah SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	Angka	15	15	15	15	20	20	20
39	Presentasi puskesmas terakreditasi paripurna	%	100	100	100	100	100	100	100
40	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
41	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	23,00	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
42	Jumlah Sarana Air Minum Komunal yang Memenuhi Syarat	%	70	70	75	75	75	80	80
43	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	%	70	70	70	70	70	70	70
44	Status HIV Positif	%	100	100	100	100	100	100	100
45	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Jiwa	122	122	109	97	86	77	77
46	Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas	%	70	70	75	75	75	80	80
47	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Rasio	0,305	0,325	0,350	0,375	0,400	0,425	0,425



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
48	Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	%	70	70	70	70	70	70	70
49	Presentas anak umur 1-12 tahun mendapatkan obat cacing maksimal 2 kali setahun	%	75	75	80	84	84	85	85
50	Persentase Sarana dan Produk IRTP yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan	%	50	50	50	60	60	70	70
51	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	65	66	67	68	69	70	70
52	Kabupaten/kota dengan fasyankes memenuhi syarat kesehatan lingkungan	%	45	45	55	60	65	75	75
53	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	80	80	85	85	85	90	90
54	Presentase kabupaten/kota yang melakukanPergerakan Germas dengan tema prioritas	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
55	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	100	100	100	100	100	100	100
56	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100
57	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	%	100	100	100	100	100	100	100
58	Jumlah Sarana dan Produk IRTP yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan	Angka	20	20	20	25	25	30	30
59	Penderita diare yang ditangani	%	95	95	95	95	95	95	95
60	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
61	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	19	19	18	17	16	15	15
62	Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 60% Ketersediaan SPA sesuai standar (ASPAK)	Angka	13	13	13	14	14	14	14



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
63	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian yang sesuai Standar (Apotek, Toko Obat dan Klinik)	%	75	75	75	75	80	80	80
64	Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian yang sesuai Standar (Apotek, Toko Obat dan Klinik)	Angka	36	36	36	38	38	40	40
65	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100
66	CAKUPAN PENGOBATAN ISPA	%	95	95	95	95	95	95	95
67	Pelayanan GIF usia (>15 TAHUN)	Angka	112.089	112.089	123.298	135.628	149.190	164.109	164.109
68	Imunisasi Dasar Lengkap	%	85	85	85	85	85	85	85
69	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	50	50	50	100	100	100	100
70	Persentase jumlah desa SBS dan STBM	%	100	100	100	100	100	100	100
71	Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan	%	98,06	98,17	98,47	98,77	98,97	99	99,06



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
72	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	12,62	12,62	11,63	10,97	10,96	9,96	9,96
73	Insidensi Tuberkulosis	Kasus	459	367	377	372	365	357	340
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	66,68	66,68	68,76	70,84	72,92	75,00	75,00
2	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	0	10	10	10	10	10	10
3	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	8,6	8,6	9,03	9,5	9,89	10,3	10,3
4	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektar	0	700	700	700	700	700	700
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	76,21	76,21	77,04	77,87	78,70	79,53	79,53
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	95,28	95,28	96,35	97,42	98,49	99,56	99,56
7	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	0	1	1	1	1	1	1



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
8	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi	0	3	3	3	3	3	3
9	Penyelesaian materi teknis RDTR	Materi Teknis	0	2	2	2	2	2	2
10	Ketaatan terhadap RTRW	%	70	70	75	75	76	77	77
11	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	23	23	25,29	27,58	29,87	32,16	32,16
12	Persentase penduduk berakses air minum	%	94,54	94,54	96,79	97,04	97,29	97,54	97,54
13	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	0	2	2	2	2	2	2
14	Penetapan RTRW	Perda/Perkada	1	1	1	1	1	1	1
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	0,42	0,42	0,48	0,50	0,56	0,65	0,65
2	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU	%	43,00	43,00	43,05	43,10	43,15	43,20	43,20
3	Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	%	0	0	75,61	75,61	75,61	75,61	75,61



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	68,01	68,01	68,31	68,40	68,45	68,49	68,49
5	Rasio Permukiman Layak Huni	%	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
6	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	%	31,99	31,99	31,69	31,67	31,65	31,63	31,63
7	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
8	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	%	2,34	2,34	2,34	2,35	2,36	2,37	2,37
9	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,192	0,192	0,194	0,195	0,196	0,197	0,197
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	14,61	14,61	24,61	34,61	44,61	50,61	50,61
2	Tingkat waktu tanggap (response timerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	20	20	30	23	28	30	30
3	Persentase Penegakan PERDA	%	50	50	60	60	62	65	65
4	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	20	25	40	55	70	85	90



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
5	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat	%	20	20	25	30	35	40	40
6	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	50	50	60	70	80	85	90
7	Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	45	50	55	60	65	70	75
8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	28,57	28,57	26,47	24	22	20	20
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentas e	100	100	100	100	100	100	100
2	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	Lembaga	2	2	2	2	2	2	2



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	15,38	15,38	19,23	23,08	26,92	30,77	30,77
4	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	280	285	290	295	300	305	310
6	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	15,38	15,38	19,23	23,08	26,92	30,77	30,77
7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	27,78	27,78	33,33	38,89	44,44	55,56	55,6
8	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	0	0	0	0	0	0	0
9	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10	Persentase PMKS yang tertangani	%	15,38	15,38	19,23	23,08	26,92	30,77	30,77
11	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosialekonomi sejenis lainnya	%	11,11	16,67	27,78	33,33	38,89	44,44	44,4
12	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	90	90	92	94	96	98	98,00
13	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	85	95	100	100	100	100	100
14	SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	Orang	43	44	45	46	47	48	49
15	Persentase (%) lanjut usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
16	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana	%	90	90	92	94	96	98	98,00
17	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosia	%	3,07	7,69	9,23	12,30	15,38	23,07	23,07
18	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	5,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Angka	2	2	2	2	2	2	2
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	29,43	29,43	29,58	29,87	30,17	30,62	30,62
4	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	35	35	36	38	39	41	43



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
5	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	50	50	50	50	50	50	50
6	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	3.426	3.529	3.688	3.798	3.912	4.069	4.371
7	Persentase Pekerja Informal	%	60,32	61,27	60,77	60,09	59,23	58,17	56,91
8	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	-	62,17	63,74	65,30	66,87	68,43	70,00
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	%	3,28	3,31	3,35	3,38	3,41	3,45	3,48
11	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	20	20	21,87	23,75	25,62	27,50	29,37
12	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	51,15	51,15	51,41	51,92	52,44	53,23	53,23



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
13	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	100	100	100
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
4	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	54,00	55,05	56,20	57,25	58,37	58,37	59,40
6	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	130	300	450	500	560	580	601
7	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	94,5	94,5	94,6	94,6	94,7	94,7	94,7
8	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	70,00	75,00	75,50	79,00	98,00	98,50	100,00
9	Rasio KDRT	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
10	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	9	9	8	8	8	8	8
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
12	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	32	32	34	34	34	34	34
13	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	109	109	110	110	110	111	111
14	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	50	100	200	350	400	550	600
15	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
16	Persentase ARG Daerah	%	4,0	4,2	4,5	5	5,5	6	6,5
17	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	95,00	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	100,00
19	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	Nilai Skor Pola Pangan Harapan Skor PPH Ketersediaan	%	37,57	43,21	49,69	57,14	65,71	75,57	86,90
2	Ketersediaan Pangan Utama	%	54,02	88,59	145,29	238,28	390,78	640,88	1.051,04
3	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	%	4,75	5,77	7,00	8,50	10,32	12,54	15,22
4	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	13,04	14,78	17,39	21,73	24,34	30,43	34,78
5	Skor PPH Konsumsi	%	83,90	86,60	89,30	92	94,60	97,30	100
6	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	6,10	6,20	6,31	6,42	6,53	6,64	6,75
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	0	0	30	30	30	30	30
2	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	0	0	30	30	30	30	30
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	3	3	3	3	3	3	3
2	Luas Ruang Terbuka Hijau	Angka	12	12	12	12	12	12	12



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
3	Persentase Layanan pengujian UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	%	37,73	37,73	41,50	45,65	50,22	60,76	60,76
4	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkatdaerah kabupaten	Nilai	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Nilai	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Nilai	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usahadan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	Angka	1	1	1	1	1	1	1
8	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina J	Angka	1	1	1	1	1	1	1
9	Indeks Kualitas Udara	Indeks	81,80	81,80	82	82,30	82,40	82,60	82,60



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu Kabupaten/Kota	Angka	1	1	1	1	1	1	1
11	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	86,16	86,46	86,76	87,06	87,36	87,66	87,88
12	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	61,2	62,42	63,67	64,95	66,24	67,57	68,92
13	Indeks Kualitas Air	Indeks	86,10	86,10	86,30	86,50	86,70	86,90	86,90
14	Nilai TPA (program Adipura) >= 71	Nilai	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
15	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Nilai	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
16	Timbulan Sampah yang Ditangani	Ton	3.578.000	3.578.000	3.742.200	3.594.800	3.609.000	3.755.600	3.755.600
17	Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	Angka	1	1	1	1	1	1	1
18	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	1,63	1,63	3,104	6,46	6,56	6,44	6,44



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
19	Sampah yang berkurang melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	Angka	15.600	15.600	16.200	16.800	17.400	18.000	18.000
20	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH d yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	63,16	63,16	73,68	84,21	87,47	100	100
21	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Nilai	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
2	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	65	66	67	68	69	70	71
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Rate Net Recent Migrasi	Angka	4.652	4.653	4.654	4.655	4.656	4.657	4.658
6	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
7	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,58	99,59	99,60	99,61	99,62	99,63	99,64
8	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	%	100	100	100	100	100	100	100
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase Desa Mandiri (%)	Persentase	9,26	11,11	12,96	14,81	16,67	18,52	20,37
2	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Desa	108	108	108	108	108	108	108
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	9,57	9,98	10,38	10,77	11,16	11,54	12,45



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
2	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	89,2	84,23	85,46	86,6	87,64	88,61	89,12
3	Ratio Akseptor KB	%	68	69	69	72	74,5	75	75
4	Total Fertility Rate (TFR).	Orang	2,28	2,41	2,36	2,31	2,26	2,21	2,16
5	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	64,04	64,73	65,41	66,07	66,71	67,33	67,98
6	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	43,20	41,45	39,88	38,23	36,58	34,92	33,27
7	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	85,10	85,72	86,38	87,03	87,68	88,32	88,96
8	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	63,00	64,20	66,30	66,50	67,60	68,80	70,00
9	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,49	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1
10	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	9,20	8,69	8,18	7,67	7,16	6,65	6,14
11	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Angka	2,73	2,46	2,4	2,35	2,35	2,3	2,3
AO	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	4	4	4	4	4	4	4



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	31.400	32.500	33.454	34.620	35.710	36.830	36.830
3	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	28.765	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	50.000
4	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun (Orang)	Orang	37.172	38.180	39.210	40.450	41.372	42.830	42.830
5	Persentase layanan angkutan darat	%	6,16	6,16	6,17	6,18	6,19	6,20	6,20
6	Pemasangan Rambu-rambu	%	2,7	2,7	3	4	5	6	6
7	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	0.6:0.6	0.63:0.63	0.67:0.67	0.70:0.70	0.75:0.75	0.79:0.79	0.84:0.84
8	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	-	55	60	65	70	75	80
2	Jumlah area blank spot di daerah	Titik	12	12	10	7	5	2	0



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	3,19	3,20	3,24	3,34	3,43	3,52	3,61
4	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	71,30	91,30	93,04	94,78	96,52	100	100
5	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Indeks	43,04	41,88	44,50	47,13	49,75	52,38	55,00
6	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Level	2	2	2	3	3	4	5
AQ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Proporsi Jumlah UKM	Persentase	10,727	69,34	73,34	77,96	83,19	89,04	95,19
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	93,00	93,75	94,00	94,75	95,00	95,75	95,75
3	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Persentase	0	0	0,5	0,8	1	1,3	1,5
4	Update dan pengumpulan Data UMKM	Persentase	1.210	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82
5	Persentase BPR/LKM aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	25,71	28,57	31,49	37,21	37,79	38,37	39,24



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
7	Rasio Kewirausahaan	Persentase	10,727	6,94	7,34	7,80	8,33	8,91	9,53
8	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,70	99,71	99,72	99,73	99,74	99,75	99,75
9	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Persentase	0,001	0,2	1	1,3	1,5	1,8	2
10	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Persentase	0,07	0,11	0,50	1	2	3,50	5
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	343.975	159.127	198.184	226.290	240.343	250.343	250.343
2	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	20	12,57	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
3	Rasio daya serap tenaga kerja (Rasio)	Orang	3.155	3.586	3.786	3.886	3.986	4.086	4.186
4	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (org atau kelompok)	Perusahaan	5	23	25	27	29	31	31
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Persentase	12	12	12	12	12	12	12



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
2	Cakupan pembinaan atlet muda	%	78	78	80	0,40	0,45	0,48	0,48
3	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	Persentase	28	30	34	38	40	46	50
4	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	0	5	10	10	10	10	10
5	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	60	63	18,35	18,35	18,35	18,35	18,35
6	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	Persentase	18	24	30	36	42	48	55
7	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Persentase	3,85	4,02	4,35	4,75	4,90	5,15	5,25
8	Persentase wirausaha muda	%	85	85	35,64	35,64	35,64	35,64	35,64
9	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	Kegiatan	0,4	0,5	0,7	0,10	0,15	0,18	0,20
10	Jumlah prestasi	Orang	5	5	5	5	6	6	6



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	olahraga								
11	Jumlah atlet berprestasi	Orang	15	15	15	17	28	28	28
12	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	Persentase	0	0	3,70	4,81	4,81	5,5	5,5
13	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	60	65	0,73	0,73	0,76	0,79	0,79
14	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Persentase	2	2	2	3	4	4	4
15	Cakupan pembinaan olahraga	%	50	55	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,09	2,2	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
2	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Nilai	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	-	43,57	47,93	52,29	56,64	61,00	65,36
AV	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	23	23	27	29	32	35	35
2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	0	47,06	58,82	70,58	82,35	94,12	100
3	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	8	7	10	12	15	18	18
5	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	43	50	65	75	90	100	100
6	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	%	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
7	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	1	1	1	1	1	1
8	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	9,01	13,51	18,02	22,52	27,03	31,53	36,04
9	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekstrakurikuler kesenian	%	0	41,25	57,70	64,30	65,54	100	100
10	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	0,90	1,08	1,26	1,44	1,62	1,80	1,98
11	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	%	9,01	10,81	12,61	14,41	16,22	18,02	19,82
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Rasio	43	50	65	75	90	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
2	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	23	23	27	29	32	35	35
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Rasio	1	1	1	1	1	1	1
4	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	60	63	65	70	70	71	73
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	4.917	4.917	4.936	4.936	4.936	4.936	4.936
6	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	70	72	73	75	75	75	75
7	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	3	3	3	3	3	3	3
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	20	30	35	40	45	50	60
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3
3	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	68,25	68,25	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54
AY	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Produksi perikanan	%	98,11	96,04	97,53	98,11	99,75	99,80	99,80
2	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/T H	60	65	70	76	82	88	95



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
3	Kawasan konservasi daerah yang operasional	Ha	3.320,30	3.320,30	3.325	3.326,30	3.327,30	3.330,50	3.332
4	Produksi Garam	Ton	36,61	38,44	40,36	42,38	44,50	46,72	49,06
5	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	21.118,7	21.435,4	217.460	22.083,3	22.414,6	22.750,8	23.092,1
6	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	70	74,50	75	75,50	76	76,50	77
7	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	721,53	757,60	795,48	851,17	910,75	974,50	1.042,72
8	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
9	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	98,38	96,43	97,59	98,38	98,73	99,58	99,58
AZ	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
1	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalana n	70.620	70.750	70.870	70.925	71.025	71.130	71.250
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	7	7	7	7	7	7	7
3	Rasio PDB Pariwisata	%	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0
4	Kunjungan Wisata	%	50	50	50	50	50	50	50
5	Jumlah devisa sektor pariwisata	Rp	1.053.005.110	0	143.782.718.912	0	0	0	0
6	PAD sektor pariwisata	%	2,23	2,23	2,50	2,60	2,60	2,60	2,60



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
BA 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan Ubi Jalar	Ton	245,1	246,10	247,11	248,13	249,14	250,17	251,19
2	Produksi Padi	Ton	15.666	16.052,95	16.449,46	16.855,76	17.272,10	17.698,72	18.135,88
3	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kacang Tanah	Ton	66,84	67,13	67,42	67,71	68,00	68,29	68,58
4	Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura Durian	Ton	52,2	52,30	52,40	52,50	52,60	52,70	52,80
5	Jumlah Populasi Ternak Ayam Petelur	Ekor	17.343	53.780	166.773	517.165	1.603.730	4.973.167	15.421.791
6	Luas Areal Tanaman Padi	Ha	3.905,80	4.323,33	4.785,49	5.297,06	5.863,32	6.490,11	7.183,90
7	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton	252.284,07	254.832,14	257.405,94	260.005,74	262.631,80	265.284,38	267.936,76
8	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan Ubi Kayu	Ton	353,05	354,22	355,28	356,56	357,73	358,91	360,10
9	Luas Areal Tanaman Pangan Jagung	Ha	8.541,79	9.756,43	11.143,80	12.728,45	14.538,43	16.605,79	18.967,14
10	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit Mandiri	Ton	42.129.553	42.192.747,3 3	42.256.036,45	42.319.420,5 1	42.382.899,6 4	42.446.473,9 9	42.510.143,7 0



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan Sagu	Ton	353.563	359.220,01	364.967,53	370.807,01	476.739,92	382.767,76	388.892,04
12	Jumlah Populasi Ternak Sapi	Ekor	17.429	18.643	19.943	21.333	22.820	24.410	26.112
13	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	0,472	0,474	0,477	0,479	0,482	0,484	0,487
14	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	5.691,15	5.804,97	5.921,07	6.039,49	6.160,28	6.283,49	6.409,16
15	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kacang Hijau	Ton	1	1,001	1,002	1,003	1,004	1,005	1,006
16	Jumlah Populasi Ternak Kambing	Ekor	3.149	3.541	3.982	4.478	5.036	5.664	6.370
17	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh	Ton	99.789	100.786,89	101.794,76	102.812,71	103.840,83	104.879,24	105.928,03
18	Jumlah Produksi Komoditas Holtikultura Cabe Rawit	Ton	1.003	1.026,37	1.050,28	1.074,76	1.099,80	1.125,42	1.151,65
19	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala	Ton	10.392	10.443,96	10.496,18	10.548,66	10.601,40	10.654,41	10.707,68
20	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan Kelapa Dalam	Ton	5.669.288	5.725.980,88	5.783.240,69	5.841.073,10	5.899.483,83	5.958.478,66	6.018.063,45



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
21	Jumlah Komoditas Holtikultura Cabe Besar	Ton	16,80	17,27	17,75	18,24	18,75	19,27	19,80
22	Cakupan bina kelompok tani	%	91,90	93,74	95,61	97,53	99,48	99,77	100
23	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit Inti	Ton	77.039.850	78.580.647	80.152.259,94	81.755.305,14	83.390.411,24	85.058.219,47	86.759.383,86
24	Jumlah Populasi Ternak Ayam Pedaging	Ekor	179.297	328.203	600.775	1.099.720	2.013.037	3.684.865	6.745.147
25	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit Plasma	Ton	16.850.370	18.198.399,60	19.654.271,57	21.226.613,29	22.924.742,36	24.758.721,75	26.739.419,49
26	Produksi Jagung	Ton	51.967,54	54.170,96	56.467,81	58.862,05	61.357,80	63.959,37	66.671,25
BB 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	48,30	49,23	50,25	51,26	52,28	52,33	52,33
2	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp	28.986.810.985	28.986.810.985	28.986.810.985	35.233.649.919	36.995.332.415	38.845.099.036	38.845.099.036
3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	20	20	20	20	20	20	20
BC 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	4,45	4,54	4,63	4,72	4,82	4,91	4,91
2	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	0,01183	0,01203	0,01223	0,01244	0,01264	0,01284	0,01304



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Unit	22	24	27	30	33	35	35
4	Pertumbuhan Industri	%	31	35	37	41	44	46	46
BD	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
1	Persentase Transmigran yang di bangun	%	20	20	20	20	20	20	100
2	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persentase	20	20	40	40	60	80	100
BE	4.02 - SEKRETARIAT DPRD								
1	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
2	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
BF	5.01 - PERENCANAAN								
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Nilai	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Nilai	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Nilai	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Nilai	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100
BG	5.02 - KEUANGAN								
1	Persentase Belanja Kesehatan	%	47,64	47,64	10	10	10	10	10
2	Persentase belanja pendidikan	%	20,11	20,11	20	20	20	20	20
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	3	3	3	3	3	3	3
4	Penetapan APBD	%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
BH	5.03 - KEPEGAWAIAN								
1	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Angka	735	1.617	1.617	2.113	2.237	2.361	2.361



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
2	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Angka	25	34	34	34	34	34	34
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.487	3.908	4.209	4.509	4.810	5.111	5.111
BI	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	8	0,36	11,48	11,48	11,33	11,22	11,22
2	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	62	62	62	62	62	62	62
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	25	48,66	49,88	51,09	52,31	53,53	53,53
BJ	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
4	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
BK	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH								
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	75	77	79	81	83	85	85
2	Jumlah Temuan BPK	Angka	24	23	22	21	20	19	19
BL	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	0	0	68	68	69	69	70
2	Indeks Stabilitas Politik Daerah	Indeks	0	100	100	100	100	100	100



BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buol merupakan penegasan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi Mewujudkan Buol Agamis sebagai Daerah Agropolitan Yang Maju dan Berkelanjutan melalui implementasi 7 misi yaitu 1). Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2). Meningkatkan Perekonomian Yang Kokoh Dan Inklusif Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Digital; 3). Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance And Clean Government; 4). Meningkatkan dan Memantapkan Sistem Ketentraman, Ketertiban dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; 5). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya; 6). Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Perdesaan Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan; 7). Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dan Sarana - Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan.

Dokumen RPJMD ini, dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Dunia Usaha, DPRD, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kabupaten Buol kurun waktu 2025 sampai dengan 2029. Selain itu, diperlukan kerangka regulasi yang jelas dan kaidah pelaksanaan yang terstruktur untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan menjadi bagian dari rencana yang komprehensif dan terintegrasi.

5.1. PEDOMAN TRANSISI

Penyusunan dokumen RPJMD periode 2025-2029 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang secara reguler dimulai pada Desember 2024, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029. Walaupun penyusunan semua dokumen perencanaan tersebut bersama-sama sejak Januari 2025,



kepentingan strategis berupa implementasi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025-2029 dimulai dari Triwulan III 2025. Kepentingan strategis tersebut dilakukan setelah melakukan perubahan RKPD 2025, Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA) Tahun 2025, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025. Dokumen ini disusun dengan menyelaraskan dengan arah kebijakan pemerintah Provinsi dan Nasional.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai pedoman dalam beberapa hal, antara lain:

1. Menyusun visi, misi, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta sebagai acuan bagi calon kepala daerah.
2. Menyusun Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Buol.
3. Menciptakan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mencapai visi dan misi daerah.
4. Menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antara fungsi pemerintahan daerah.
5. Menjadi pedoman bagi penentu kebijakan pembangunan dan memastikan keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam rangka memastikan pelaksanaan yang efektif dan komprehensif, ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan, seperti:
 - a. Menjaga konsistensi perencanaan dan pendanaan untuk memastikan keselarasan dan kesinambungan dalam pembangunan daerah.
 - b. Memperhatikan RPJPD sebagai pedoman dalam menyusun visi dan misi daerah serta program pembangunan dalam RPJMD.
 - c. Lembaga eksekutif dan legislatif, didukung oleh instansi vertikal dan masyarakat, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan



pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

- d. Bupati Buol memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD dengan memobilisasi seluruh potensi dan kekuatan daerah.
 - e. Sekretaris Daerah bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan RPJMD.
 - f. Penerapan Kerangka Logis Kinerja (Cascading) diperlukan untuk menghubungkan tujuan jangka menengah dengan strategi tahunan dan program-program tahunan lainnya.
 - g. Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan RPJMD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program serta pendanaannya.
 - h. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) bertugas mengkoordinasikan penyusunan RPJMD dan memandu proses perencanaan pembangunan.
 - i. Bappedalitbang juga bertugas membangun komunikasi organisasi dan kepada masyarakat mengenai RPJMD dan melaksanakan evaluasi pelaksanaannya.
 - j. Pengendalian dan evaluasi antardokumen harus dilakukan secara terkoordinasi untuk memastikan implementasi yang efektif.
 - k. Insentif, baik dalam bentuk dukungan regulasi maupun dukungan lainnya, diperlukan untuk mendorong pelaksanaan program pembangunan.
 - l. Mekanisme perubahan harus diatur dengan jelas sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menanggapi perubahan kondisi atau kebijakan.
 - m. Komunikasi publik perlu ditingkatkan melalui keterlibatan pemangku kepentingan lainnya, khususnya masyarakat, untuk memastikan partisipasi yang luas dalam pembangunan daerah.
6. Sistem insentif bertujuan nantinya agar dapat diterapkan untuk mendorong pelaksanaan program, baik dalam bentuk regulasi, dukungan finansial, atau kebijakan khusus. Dukungan sistem insentif yang akan diberikan sebagai berikut: a) Insentif fiskal berupa subsidi atau



pengurangan pajak untuk proyek strategis daerah.; b) Insentif regulasi, seperti penyederhanaan perizinan bagi sektor prioritas.; c) Insentif non-fiskal, seperti pengakuan dan penghargaan bagi pihak yang berkontribusi besar dalam pembangunan.

7. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan;
 - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan; dan
 - terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
8. Dokumen RPJMD perlu diseleraskan dan dikoordinasikan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya. Proses koordinasi antara RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD penting dilakukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian alokasi anggaran. Diperlukan instrumen regulasi atau forum lintas sektoral guna menjami konsistensi antara perencanaan dan pendanaan.
9. Diperlukan kerangka pengendalian yang di dalamnya terdapat tata cara evaluasi dan pemantauan yang terintegrasi, termasuk hal-hal sebagai berikut: a) Jadwal evaluasi berkala (misalnya dua tahunan); b) Indikator kinerja untuk mengevaluasi pencapaian visi, misi, dan sasaran pokok; c) Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk pengendalian dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi.
10. Komunikasi publik perlu dibangun dalam penyusunan, evaluasi, maupun pelaksanaan RPJMD. Adapun strategi komunikasi publik yang perlu dilakukan seperti: a) Penggunaan media sosial, forum diskusi, atau musyawarah masyarakat untuk menyosialisasikan program RPJMD; b) Langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi publik, termasuk kelompok rentan; c) Mekanisme umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan yang dirumuskan.
11. Manajemen risiko terintegrasi dan berkesinambungan dalam setiap



tahapan pembangunan.

12. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah bagian penting dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buol Tahun 2025-2029. PUG dimasukkan dalam tujuh misi pembangunan yaitu 1). Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2). Meningkatkan Perekonomian Yang Kokoh Dan Inklusif Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Digital; 3). Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance And Clean Government; 4). Meningkatkan dan Memantapkan Sistem Ketentraman, Ketertiban dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; 5). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya; 6). Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Perdesaan Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan; 7). Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dan Sarana - Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan. Dengan menerapkan PUG semua warga Kabupaten Buol diharapkan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara merata, tanpa ada yang tertinggal (no one left behind). Komitmen ini hanya bisa terwujud melalui kerja sama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten, pihak swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat.